



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terdapat perubahan Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 2016-2021, perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
39. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
40. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

41. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 324);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 6 Seri D);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 – 2021.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 2018

WAKIL BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 11 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 297-14/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Malang periode Bupati dan Wakil Bupati Malang Masa Jabatan 2016 – 2021 ini adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, dengan terpilihnya Dr. H. Rendra Kresna sebagai Bupati Malang dan Drs. H. M. Sanusi, MM sebagai Wakil Bupati Malang yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35–595 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35–596 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2016.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Malang telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021.

Namun dalam perkembangannya terdapat dinamika yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang, yaitu diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah, yang mengakibatkan restrukturisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan demikian mengharuskan Pemerintah Kabupaten Malang untuk merevisi RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang Perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Ketentuan tersebut di atas menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021, dengan maksud untuk menyelaraskan konsistensi antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas pelaporannya karena telah terjadi perubahan dalam kewenangan dan struktur Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 – 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 maka Ibukota Kabupaten Malang dipindahkan dari Wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun tujuan umum pembentukan Kabupaten Malang selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan warisan leluhur pendahulu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng (abadi) dan dikenal dengan sesanti *Satata Gama Karta Raharja*.

Pemerintah Kabupaten Malang periode Bupati dan Wakil Bupati Malang Masa Jabatan 2016-2021 ini adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, dengan terpilihnya Dr. H. Rendra Kresna sebagai Bupati Malang dan Drs. H. M. Sanusi, MM sebagai Wakil Bupati Malang yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35–595 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35–596 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Malang Provinsi Jawa Timur yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2016.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Malang telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah rencana strategis kepala daerah terpilih yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, anggaran dan indikator kinerja. Berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra PD, Renja PD, serta RKPD.

Proses Penyusunan Perubahan RPJMD sesuai dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa implikasi terhadap adanya perubahan kewenangan Pemerintah Daerah. Bidang kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan, pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selama merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, maka dengan undang-undang tersebut berpindah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga hal ini akan mendasari adanya perbedaan yang mendasar pada program pembangunan yang bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Memasuki tahun pertama dan awal tahun kedua dalam implementasi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang berdampak pada perlunya penyesuaian atau perubahan dalam hal kelembagaan/organisasi, perencanaan dan penganggaran seluruh daerah di Indonesia. Salah satu perubahan kebijakan nasional dimaksud, adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Malang untuk merevisi RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kedudukan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Malang untuk periode 5 (lima) tahun pada tahap ke-3 dari RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan ini dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan RPJMD Kabupaten ini didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Pasal 282 ayat (1) huruf (c) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Selanjutnya diperjelas pada ayat (2) bahwa perubahan yang mendasar sebagaimana disebut pada ayat (1) Huruf (c) mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Ketentuan tersebut diatas menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan maksud untuk menyelaraskan konsistensi antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas pelaporannya karena telah terjadi perubahan dalam kewenangan dan struktur perangkat daerah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD Kabupaten ini dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Malang untuk merevisi RPJMD sesuai Perda Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

Berdasarkan perkembangan kondisi diatas, sangat berpengaruh terhadap substansi dan muatan materi dalam dokumen perencanaan yang sudah disusun. Salah satu diantara perubahan tersebut adalah nomenklatur perangkat daerah telah mengalami perubahan, sementara dokumen RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 masih memakai nomenklatur perangkat daerah lama, sehingga perbedaan struktur perangkat daerah ini berdampak pada penganggaran yang harus menggunakan struktur perangkat daerah baru.

Keterkaitan antar dokumen RPJMD dengan RKPD Renstra dan Renja PD menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Perubahan dokumen RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2018 dimana masih tersisa tiga periode RKPD di dalamnya, salah satu fokus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKPD 2019-2021 sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Malang pada akhir periode pembangunan jangka menengah. RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif. Setiap Perangkat Daerah selanjutnya menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Tahun 2016-2021 juga menjadi acuan untuk menyusun RKPD Kabupaten Malang. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan dan berkaitan dengan seluruh *stakeholders* di Kabupaten Malang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
39. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
40. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
41. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 324);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 6 Seri D);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

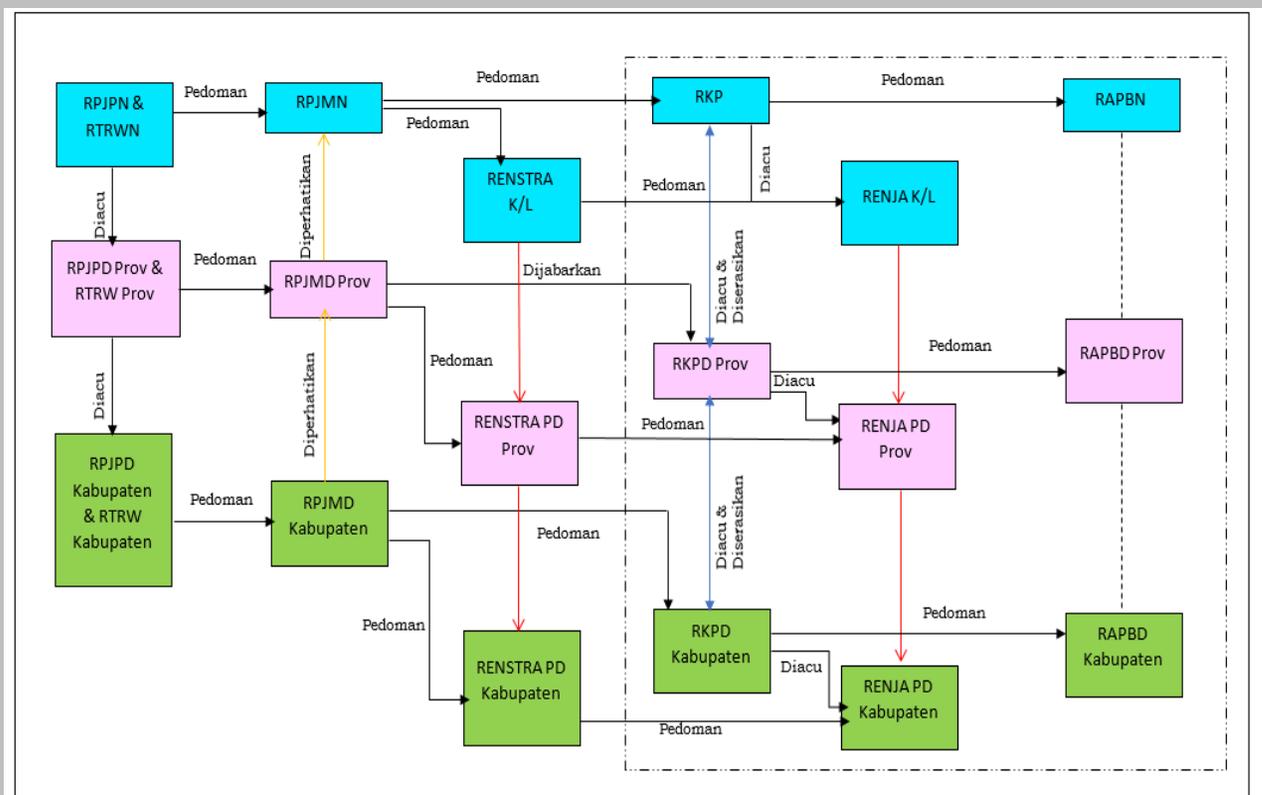
Berkaitan dengan hubungan antar dokumen, Perubahan RPJMD mempunyai kedudukan yang sama dengan dokumen RPJMD terhadap dokumen yang lainnya. Untuk mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang, penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai perencanaan lainnya, baik pada lingkup Kabupaten Malang, Provinsi maupun Nasional. Penyusunan Perubahan RPJMD merupakan penjabaran atas kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 untuk tahap perencanaan tahun 2016-2020. Pada tahap tersebut, RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 diprioritaskan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Dengan menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat. Dengan fokus kebijakan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Malang yang berkualitas, mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 memiliki nilai strategis yang memuat visi misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, penyusunannya harus berpedoman RPJPD Kabupaten Malang yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi tujuam dan sasaran dalam RPJM, maka seluruh Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Renstra PD yang berdurasi 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstra PD sangat ditentukan oleh pelaksanaan Renja PD sebagai dokumen perencanaan tahunan masing-masing PD.

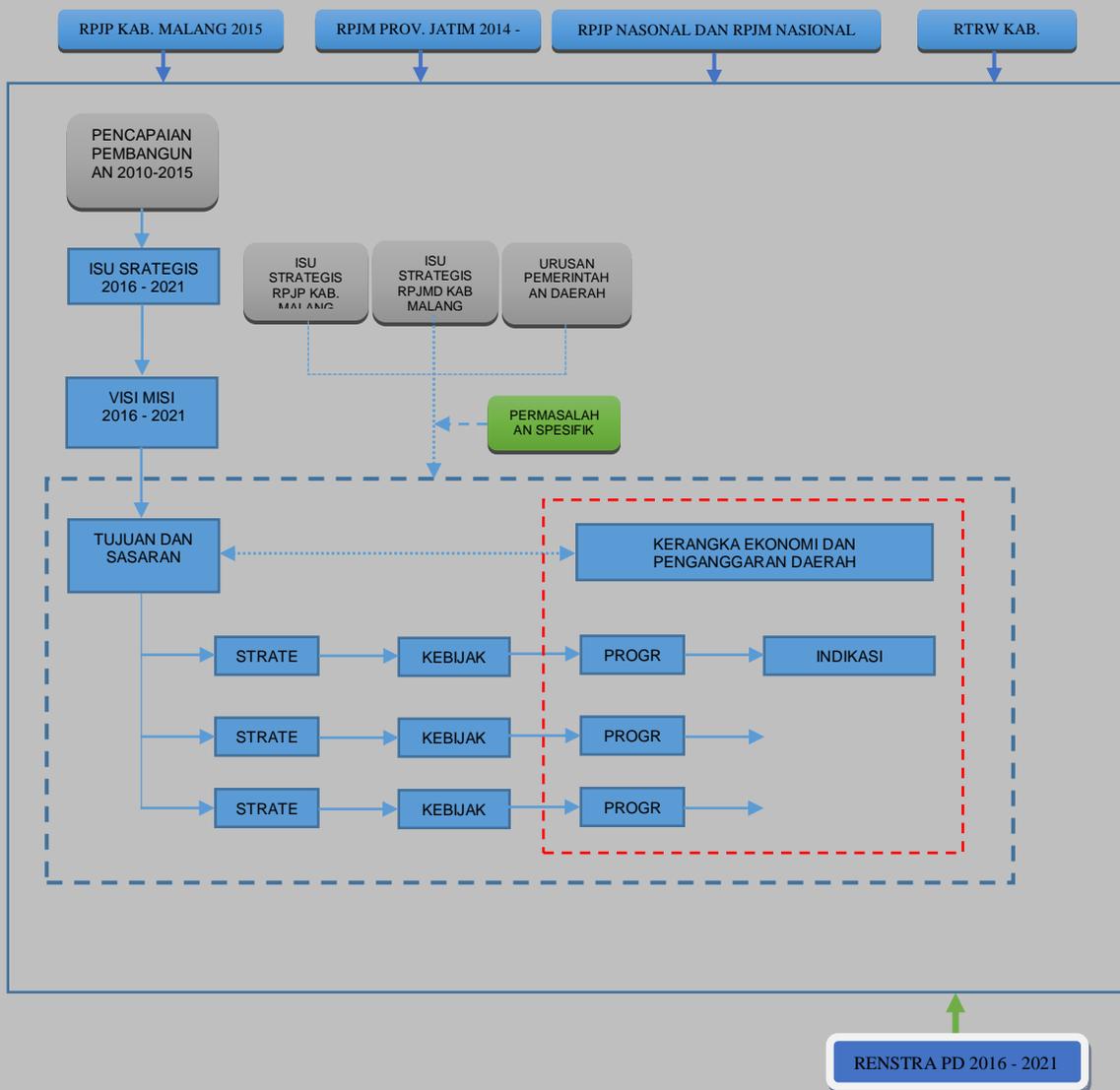
Perubahan RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini sebagai penjabaran teknis Perubahan RPJMD pada masing-masing perangkat daerah, berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masing-masing Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk sisa periode dari waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perencanaan yang ada dalam Perubahan RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pada Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam RKPD ini secara teknis dan operasional akan memuat prioritas sasaran pembangunan berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Malang. Diagram keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1.2
 Kerangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang



Sejalan dengan hal tersebut maka penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berpedoman pada: (1) RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025, khususnya tahap ketiga (2016-2021); (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030. Selanjutnya penyusunan RPJMD Kabupaten Malang juga memperhatikan hubungan dengan dokumen lain meliputi:

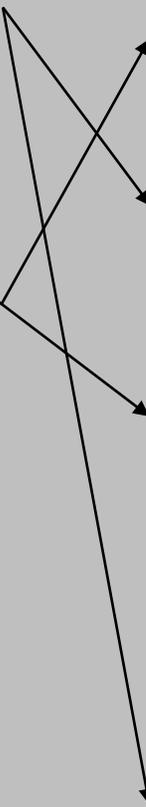
1. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional)

RPJM Nasional Tahun 2015-2020 menyebutkan bahwa Visi Indonesia Tahun 2015-2020 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan Misi sebagai berikut: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

RPJMN wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan. Berikut ini disajikan keterkaitan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2020:

Tabel 1.1
Hubungan dan Keterkaitan RPJMD Kabupaten Malang dengan RPJMN

Misi RPJMD Kabupaten Malang	Hubungan dan Keterkaitan	Misi RPJMN
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;		1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;		2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;		3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;		4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;		5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat;		6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.		7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Agenda prioritas pembangunan yang ditetapkan yaitu: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, 8) Melakukan revolusi karakter bangsa, 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sembilan agenda prioritas pembangunan pemerintahan tersebut, lebih dikenal dengan 'Nawa Cita'. Agar RPJMN mampu dioperasionalkan secara optimal dan tercipta harmonisasi irama pembangunan, RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 wajib mengacu pokok-pokok 'Nawa Cita' tersebut. Pada konteks inilah pendekatan atas-bawah (*top down*) diimplementasikan dalam penyusunan RPJMD.

2. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah: "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak". Visi tersebut diuraikan dalam beberapa Misi, yaitu: 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; 2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi; 3) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang; 4) Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 5) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Sama halnya dengan RPJMN, Substansi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 juga wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
 Hubungan dan Keterkaitan RPJMD Kabupaten Malang dengan
 RPJMD Provinsi Jawa Timur

Misi RPJMD Kabupaten Malang	Hubungan dan Keterkaitan	Misi RPJMD Prov. Jatim
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;		1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;		2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;		3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;		4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;		5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;		
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.		

3. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur

Arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Malang adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan penetapan struktur pemanfaatan ruang tersebut mampu mendorong pemerataan pelayanan, khususnya pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Malang sendiri maupun daerah lain di lingkup wilayah Jawa Timur. Dalam rencana sistem perkotaan, Kabupaten Malang bersama Kota Malang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, kegiatan nasional, atau kegiatan beberapa provinsi. Perwilayahan Jawa Timur juga direncanakan dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan yang dibagi dalam 8 SWP yaitu : 1) SWP Gerbangkertosusila Plus, 2) SWP Malang Raya, 3) SWP Madiun dan sekitarnya, 4) SWP Kediri dan sekitarnya, 5) SWP Probolinggo, Lumajang, 6) SWP Blitar, 7) SWP Jember, dan 8) SWP Banyuwangi.

4. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Yang Berbatasan

RPJMD Kabupaten/Kota sekitar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang juga menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan, khususnya guna mendukung strategi umum dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang menegaskan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, meningkatkan potensi pariwisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya di wilayah Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota sekitar.

5. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang

Untuk mengetahui hubungan dan keterkaitan misi antara RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Hubungan dan Keterkaitan RPJMD Kabupaten Malang dengan
RPJPD Kabupaten Malang

Misi RPJMD Kabupaten Malang	Hubungan dan Keterkaitan	Misi RPJPD Kabupaten Malang
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;		1. Meningkatkan pemahaman dan menjadikan nilai-nilai universal agama sebagai pemersatu dan penggerak pembangunan masyarakat madani;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;		2. Meningkatkan supremasi hukum dan HAM serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;		3. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan serta mendorong maju dan berprestasinya olah raga, seni dan budaya;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;		4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya berdasarkan potensi dan prospek pengembangannya;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;		5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya berdasarkan keadilan sosial dan menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;		6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan publik.
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.		

RPJPD Kabupaten Malang saat ini memasuki Kebijakan Pembangunan tahap ke-3 (2016-2021) yang secara spesifik diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program pembangunan tahap ke-2 (2010-2015) yang belum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut: 1) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan public; 3) Meningkatkan mutu pendidikan; olah raga dan seni budaya; 4) Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; 5) Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup; 6) Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan dan; 7) Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan tersebut di atas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Posisi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 selanjutnya menjadi dokumen yang menjabarkan perencanaan jangka panjang secara lebih terfokus.

6. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang

Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas: 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; 3) kebijakan dan strategi sistem perkotaan; 4) kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; 5) kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang, yang terdiri atas: 1) WP I lingkaran kota Malang; 2) WP II Kepanjen; 3) WP III Ngantang; 4) WP IV Tumpang; 5) WP V Turen dan Dampit; 6) WP VI Sumbermanjing Wetan.

7. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi PD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati terpilih dan RPJMD. Penyajian Renstra PD dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas PD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.

8. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara).

9. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Renja PD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten. Selanjutnya PD dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja PD.

10. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. RPJMD Kabupaten Malang dengan Beberapa Dokumen Lainnya

Guna mensinergiskan pembangunan kewilayahan dan sektoral, maka dalam Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 juga memperhatikan keberadaan dokumen-dokumen lain diluar komponen perencanaan. Pada bagian lain, dokumen berupa perencanaan sektoral dan bersifat mikro juga perlu mengacu pada RPJMD. Adapun contoh dari dokumen-dokumen lain yang dimaksud meliputi: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI); (2) Roadmap Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Malang 'Ponco Wismo Jatu'; (3) Rencana Aksi Pengurangan Dampak Perubahan Iklim; (4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB ini berisikan gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri atas latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB ini memaparkan gambaran umum kondisi Kabupaten Malang beberapa tahun terakhir yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

BAB ini menjelaskan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

BAB ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan Kabupaten Malang yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan sendiri maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Malang di masa yang akan datang.

BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB ini menjelaskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah.

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

BAB ini menguraikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

BAB ini menjelaskan tentang uraian hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Disajikan juga penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

BAB ini menjelaskan tentang hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah setiap tahun selama masa jabatan sampai dengan akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari komitmen target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

1.5. Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang secara berkesinambungan. Adapun tujuan dari penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah:

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malang, khususnya periode tahun 2016-2021;
2. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2021 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang. Selanjutnya, RKPD tersebut menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
5. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di wilayah Kabupaten Malang;
6. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

Secara lebih khusus, maksud dari penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan perubahan Perangkat Daerah, dan penyesuaian permasalahan/isu strategis pembangunan Kabupaten Malang. Tujuan penyusunan perubahan yaitu melakukan perbaikan substansi RPJMD Kabupaten Malang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

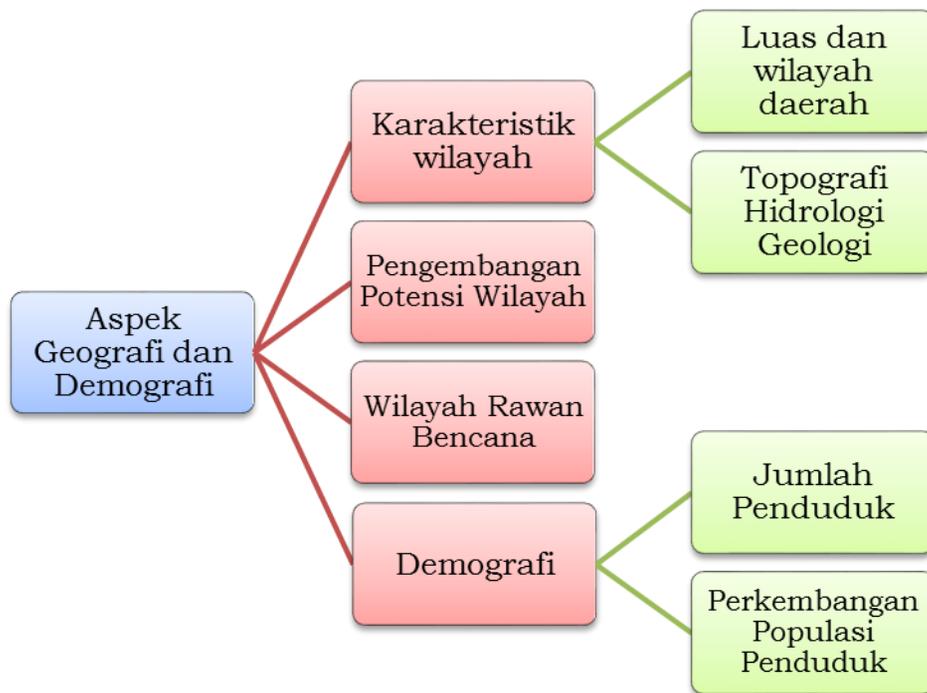
Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Informasi mengenai kondisi umum Kabupaten Malang akan memberikan gambaran kondisi saat ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk analisis berikutnya. Namun disisi lain tidak semua informasi disajikan dalam gambaran umum kondisi daerah, hanya informasi yang penting dan relevan saja yang ditampilkan. Informasi yang dianggap penting dan relevan jika menjelaskan tentang gambaran umum yang selaras dengan permasalahan pembangunan, visi misi kepala daerah dan isu-isu strategis Kabupaten Malang.

Dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, perlu adanya gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Malang yang akan memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat Kabupaten Malang. Gambaran umum kondisi daerah ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah melalui pemetaan secara objektif dan analisis data yang valid.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pada aspek geografi Kabupaten Malang perlu dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Sedangkan pada aspek gambaran demografi, antara lain meliputi jumlah penduduk, perkembangan populasi penduduk serta proyeksi kependudukan Kabupaten Malang. Berikut ini merupakan gambaran tentang aspek geografi dan demografi.

Gambar 2.1
Kerangka Aspek Geografi dan Demografi



2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas 3.534,86 km² atau 353.486 ha dan terletak pada koordinat 112°17'10,90" – 122°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11" – 8°26'35,45" Lintang Selatan. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Dari luas Kabupaten Malang tersebut terbagi atas kawasan daratan dan lautan, masing-masing seluas 2.977,05 km² dan 557,81 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo
Sebelah Timur	: Kabupaten Lumajang
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Bagian Tengah (Lingkar Dalam)	: Kota Malang dan Kota Batu

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan 14.696 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Berikut rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Malang:

Tabel 2.1
Jumlah Desa Dan Kelurahan Menurut Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan		RW	RT
		Desa	Kelurahan		
1.	Donomulyo	10	-	115	487
2.	Kalipare	9	-	58	442
3.	Pagak	8	-	77	330
4.	Bantur	10	-	96	492
5.	Gedangan	8	-	80	354
6.	Sumbermanjing Wetan	15	-	112	525
7.	Dampit	11	1	114	713
8.	Tritoyudo	13	-	61	298
9.	Ampelgading	13	-	97	312
10.	Poncokusumuo	17	-	170	820
11.	Wajak	13	-	152	487
12.	Turen	15	2	169	705
13.	Bululawang	14	-	89	351
14.	Gondanglegi	14	-	58	382
15.	Pagelaran	10	-	67	289
16.	Kepanjen	14	4	77	468
17.	Sumberpucung	7	-	53	261
18.	Kromengan	7	-	51	232
19.	Ngajum	9	-	90	329
20.	Wonosari	8	-	86	306
21.	Wagir	12	-	89	378
22.	Pakisaji	12	-	87	380
23.	Tajinan	12	-	75	359
24.	Tumpang	15	-	104	651
25.	Pakis	15	-	147	800
26.	Jabung	15	-	82	476
27.	Lawang	10	2	146	607
28.	Singosari	14	3	152	836
29.	Karangploso	9	-	105	473
30.	Dau	10	-	77	310
31.	Pujon	10	-	85	310
32.	Ngantang	13	-	72	346
33.	Kasembon	6	-	63	187
Jumlah/Total		378	12	3.155	14.696

Sumber Data : BPS Kabupaten Malang, 2017

B. Letak dan Kondisi Geografis

1. Topografi

Topografi Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung api yang aktif maupun tidak aktif, dan sungai. Kawasan pesisir pantai terletak di Wilayah Selatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, membentang mulai dari Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, sampai Ampelgading. Wilayah dengan kontur datar terletak sebagian besar di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji, sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Wilayah dengan kontur bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Kawasan dengan kontur perbukitan yang terjal sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl.

Tabel 2.2
Nama dan Ketinggian Pegunungan di Kabupaten Malang

No.	Nama Gunung/Pegunungan	Tinggi (m)
1.	Kelud	1.731
2.	Kawi	2.651
3.	Panderman	2.040
4.	Anjasmoro	2.277
5.	Welirang	2.156
6.	Arjuno	3.339
7.	Bromo	2.329
8.	Batok	2.868
9.	Semeru	3.676
10.	Pegunungan Kendeng	650

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Wilayah Kabupaten Malang diidentifikasi terdapat 9 (sembilan) gunung dan 1 (satu) pegunungan yang terdiri dari: Keberadaan gunung dan pegunungan tersebut, menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensikehutan yang luas dan sumber-sumber mata air yang dimanfaatkan untuk kepentingan konsumsi, irigasi pertanian dan industri. Limpan air dari sumber mata air mengalir melalui sungai-sungai besar maupun kecil. Tercatat, di Kabupaten Malang mengalir 5 (lima) sungai besar dan 68 (enam puluh delapan) sungai kecil. Sungai besar antara lain Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Amprong, Sungai Konto, dan Sungai Metro. Diantara sungai-sungai besar tersebut, Sungai Brantas adalah sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.

Bentang alam yang sebagian besar terdiri atas pegunungan dan perbukitan, menjadikan Kabupaten Malang berhawa sejuk sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadikannya tempat peristirahatan maupun tempat tinggal secara permanen. Hawa yang sejuk tersebut juga menjadikan Kabupaten Malang sebagai wilayah pengembangan pertanian dan perkebunan yang prospektif. Suhu udara rata-rata berkisar antara $19,1^{\circ}\text{C}$ hingga $26,6^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71°C hingga 89°C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan Desember.

Berdasarkan struktur fisik dan geografis Kabupaten Malang dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Bagian utara, barat dan tengah merupakan daerah yang relatif subur; (2) Bagian Selatan merupakan pegunungan kapur yang memiliki potensi tambang cukup besar; (3) Bagian timur merupakan pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan, tambang dan pariwisata.

Kondisi topografi Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 aspek antara lain:

a. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Kabupaten Malang dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian yaitu:

- Ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut : 0% dari seluruh wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- Ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan laut : 75,76% dari seluruh wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
- Ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan laut : 18,18% dari seluruh wilayah dengan kondisi berbukit.
- Ketinggian lebih 1000 meter di atas permukaan laut : 3,03% dari seluruh wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Tabel 2.3
Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan Diatas Permukaan Laut
Tahun 2012-2017

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)
010. Donomulyo	449	449	449	449	449	423
020. Kalipare	310	310	310	310	310	303
030. Pagak	560	560	560	560	560	521
040. Bantur	273	273	273	273	273	317
050. Gedangan	546	546	546	546	546	494
060. Sumbermanjing	563	563	563	563	563	598
070. Dampit	585	585	585	585	585	427
080. Tirtoyudo	603	603	603	603	603	594
090. Ampelgading	542	542	542	542	542	516
100. Poncokusumo	842	842	842	842	842	685
110. Wajak	553	553	553	553	553	513
120. Turen	445	445	445	445	445	391
130. Bululawang	425	425	425	425	425	406
140. Gondanglegi	443	443	443	443	443	360
150. Pagelaran	437	437	437	437	437	339
160. Kepanjen	335	335	335	335	335	336
170. Sumberpucung	291	291	291	291	291	304
180. Kromengan	321	321	321	321	321	329
190. Ngajum	383	383	383	383	383	372
200. Wonosari	811	811	811	811	811	773
210. Wagir	474	474	474	474	474	544
220. Pakisaji	386	386	386	386	386	395
230. Tajinan	486	486	486	486	486	497
240. Tumpang	577	577	577	577	577	607
250. Pakis	474	474	474	474	474	490
260. Jabung	624	624	624	624	624	519
270. Lawang	527	527	527	527	527	501
280. Singosari	493	493	493	493	493	494
290. Karangploso	561	561	561	561	561	630
300. Dau	562	562	562	562	562	583
310. Pujon	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.157
320. Ngantang	870	870	870	870	870	651
330. Kasembon	240	240	240	240	240	239
Jumlah / Total	524	524	524	524	524	373

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2017

Ket *) : 2017 dari Podes 2018 Kecamatan dan Kabupaten

b. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang mempunyai kemiringan lereng 48,69% hampir di seluruh dataran rendah Kabupaten Malang, sedangkan untuk kemiringan lereng 28,85% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >22,46% berada pada daerah pegunungan.

Gambar 2.2
Kemiringan Lereng Kabupaten Malang

Luas Wilayah Kecamatan menurut Kemiringan Tanah (Hektar) <i>Area of District by Declivity Land (Ha)</i>					Lanjutan Tabel 1.13 <i>Continued Table</i>		
Kecamatan <i>District</i>	0 - 2°	2° - 8°	8° - 15°	15° - 25°	Kecamatan <i>District</i>	25° - 40°	> 40°
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(6)	(7)
010. Donomulyo	936.39	5,254.75	2,946.03	5,817.91	010. Donomulyo	715.92	-
020. Kalipare	2,544.12	6,412.16	1,939.88	2,973.84	020. Kalipare	-	-
030. Pagak	636.70	3,768.90	3,217.95	1,386.45	030. Pagak	-	-
040. Bantur	1,615.88	3,634.48	5,983.37	4,853.68	040. Bantur	18.59	-
050. Gedangan	1,152.80	2,370.14	4,421.51	7,904.81	050. Gedangan	215.74	-
060. Sumbermanjing	1,549.42	2,548.11	6,367.96	9,489.88	060. Sumbermanjing	3,874.70	119.93
070. Dampit	1,225.66	6,308.23	1,984.90	3,207.46	070. Dampit	536.75	-
080. Tirtoyudo	206.20	2,236.96	1,173.88	5,378.38	080. Tirtoyudo	4,788.24	412.34
090. Ampelgading	846.55	515.85	2,024.32	8,536.64	090. Ampelgading	10,294.58	1,732.06
100. Poncokusumo	1,148.15	3,607.63	1,077.40	758.21	100. Poncokusumo	7,815.93	5,280.68
110. Wajak	1,819.66	3,688.35	732.96	-	110. Wajak	3,060.56	154.47
120. Turen	5,056.19	1,222.83	71.16	-	120. Turen	12.82	-
130. Bululawang	3,822.60	579.40	-	-	130. Bululawang	-	-
140. Gondanglegi	9,170.87	2,335.13	-	-	140. Gondanglegi	-	-
150. Pagelaran	23,640.54	6,019.46	-	-	150. Pagelaran	-	-
160. Kepanjen	2,787.29	1,689.71	-	-	160. Kepanjen	-	-
170. Sumberpucung	2,476.23	1,147.57	147.20	-	170. Sumberpucung	-	-
180. Kromengan	2,555.03	1,184.09	151.88	-	180. Kromengan	-	-
190. Ngajum	4,135.59	1,916.57	245.84	-	190. Ngajum	-	-
200. Wonosari	144.14	2,553.06	1,315.66	650.87	200. Wonosari	1,144.94	651.33
210. Wagir	172.44	3,054.18	1,573.91	778.63	210. Wagir	1,369.66	779.18
220. Pakisaji	2,246.51	1,246.61	335.59	65.78	220. Pakisaji	45.51	-
230. Tajinan	1,630.06	2,160.29	191.46	-	230. Tajinan	88.19	-
240. Tumpang	1,553.30	2,971.14	484.71	-	240. Tumpang	1,914.27	105.58
250. Pakis	3,575.90	1,750.10	-	-	250. Pakis	-	-
260. Jabung	1,601.12	2,788.09	1,615.02	59.63	260. Jabung	6,584.82	960.32
270. Lawang	597.23	3,464.94	620.04	1,436.01	270. Lawang	653.06	8.72
280. Singosari	2,576.83	5,029.81	765.23	801.42	280. Singosari	1,138.54	263.17
290. Karangploso	683.97	2,363.85	1,343.30	125.33	290. Karangploso	560.83	8.72
300. Dau	73.47	693.27	118.46	404.42	300. Dau	1,289.61	2,505.77
310. Pujon	-	1,646.22	1,155.91	643.24	310. Pujon	7,915.33	1,693.30
320. Ngantang	622.77	1,878.75	1,725.91	872.03	320. Ngantang	7,260.92	1,228.62
330. Kasembon	365.04	905.22	1,165.22	945.92	330. Kasembon	1,832.59	348.01
Jumlah Total	83,168.65	88,945.85	44,896.66	57,090.54	Jumlah Total	63,132.10	16,252.20

Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Malang

Source: Land Affairs Service of Malang Regency

Catatan: Hasil perhitungan Peta Kemampunan Tanah dg Planimeter tahun 1988

Kelerengan 0° - 8°= 48.69 %

Kelerengan 8° - 25°= 28.85 %

Kelerengan 25° - 40°= 22.46 %

2. Geologi

Ditinjau dari keadaan geologinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Malang terbentuk dari hasil gunung api kwarter muda yang meliputi areal seluas 44,25 % atau 148.152,52 Ha dari seluruh

luas Kabupaten Malang, sedangkan sebagian kecil merupakan *miosen facies* baru gamping dengan luas 90.884,00 Ha atau 27,15 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya.

Jenis tanah di Kabupaten Malang terdiri dari jenis tanah alluvial, regosol, brown forest, andosol, latosol, mediteran dan litosol. Jenis tanah ini tidak seluruhnya tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Tabel 2.4
Luas Daerah Berdasarkan Struktur Geologi di Kabupaten Malang

No.	Struktur Geologi	Luas	
		Ha	%
1.	Hasil gunung api kwarter muda	145.152,52	44,25
2.	Hasil gunung api kwater tua	41.741,61	12,47
3.	Miosen facies gamping	90.884,00	27,15
4.	Miosen facies sedimen	12.834,00	3,83
5.	Alivium	40.135,87	11,99
6.	Waduk	1.039,00	0,31
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Luas daerah yang termasuk jenis tanah latosol memiliki luas sebesar 86.260,36 Ha atau 25,77 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Malang. Mediteran mempunyai luas sebesar 55.811,30 Ha atau 16,67 %, litosol seluas 69.133,25 Ha atau 20,65 % dan alluvial 28.003,25 Ha atau 8,36 % dari seluruh luas Kabupaten Malang. Brown forest memiliki luas 6.142,25 Ha atau 1,83 % dari seluruh luas Kabupaten Malang.

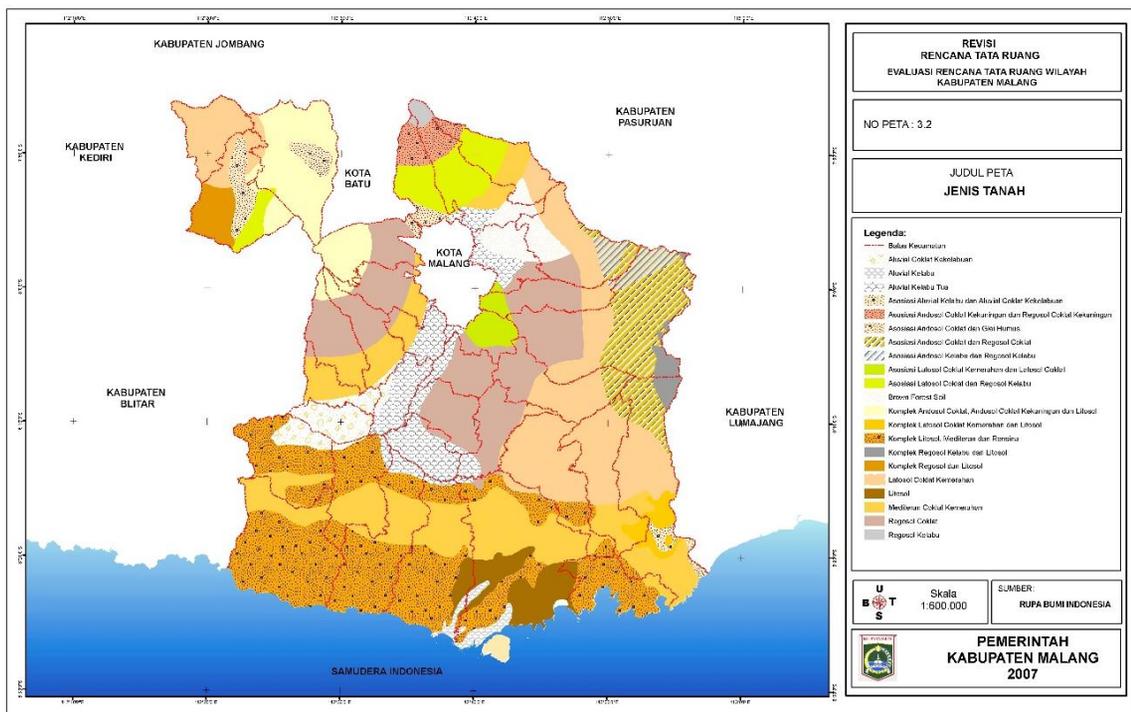
Tabel 2.5
Luas Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Tanah dan Sifat-sifatnya

No	Jenis Tanah	Luas		Sifat Tanah
		Ha	%	
1.	Andosol	43.783,42	13,08	Subur, mudah erosi
2.	Latosol	86.260,36	25,77	Tanah subur, tanah erosi potensi untuk tanaman perkebunan
3.	Mediteran	55.881,30	16,67	Mudah kena erosi, umumnya daerah hutan
4.	Litosol	69.133,25	20,65	Mudah kena erosi umumnya daerah hutan
5.	Alluvial	28.003,25	8,36	Potensi untuk pertanian umumnya daerah hutan
6.	Regosol	45.654,17	13,64	Daerah subur dan potensi untuk pertanian tinggal
7.	Brown Forest	6.142,25	1,83	Potensi pertanian rendah kurang dapat menyerap air
Jumlah		334.787,00	100,00	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Sedangkan jenis tanah regosol memiliki luas 45.654,17 Ha atau 13,64 % dari seluruh luas Kabupaten Malang dan andosol adalah 43.782,42 Ha atau 13,08 % dari luas seluruh wilayah Kabupaten Malang. Lebih jelasnya tentang jenis tanah dan persebarannya, dapat dilihat pada Tabel 2.6 diatas dan Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.3
Jenis Tanah Dan Persebaran Di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Kemampuan tanah di Kabupaten Malang merupakan unsur-unsur yang sangat berpengaruh pada jenis-jenis penggunaan lahan yang ada di atasnya. Unsur-unsur fisik yang ada di atasnya meliputi:

a. Erosi

Di Kabupaten Malang, wilayah yang tidak ada erosi yang meliputi areal seluas 276.861,10 Ha atau 82,70 % dari luas Kabupaten Malang, sedangkan yang rentan/ada erosi seluas 57.925,90 Ha atau 17,30 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya, daerah-daerah rentan erosi di Kabupaten Malang yang ada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Ampelgading dan Bantur.

Tabel 2.6
Luas Daerah Berdasarkan Erosi di Kabupaten Malang

No.	Klasifikasi	Luas	
		Ha	%
1.	Ada erosi	75.925,90	17,30
2.	Tidak ada erosi	276.861,10	82,70
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

b. Kedalaman Efektif Tanah

Wilayah Kabupaten Malang memiliki kedalaman efektif tanah > 90 cm mencakup areal seluas 278.925,56 Ha atau 83,31 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah dengan kedalaman ini baik untuk pertumbuhan perakaran tanaman. Sedangkan yang memiliki kedalaman 60 - 90 cm di Kabupaten Malang meliputi areal seluas 35.528,89 Ha atau 10,61 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah ini baik untuk tanaman semusim dan cukup baik untuk tanaman keras atau tahunan. Wilayah yang berada pada kedalaman 30 - 60 cm di Kabupaten Malang adalah seluas 17.804,55 Ha atau 5,32 % dari seluruh luas Kabupaten Malang yang mana kondisi demikian ini cukup baik untuk tanaman keras/tahunan. Luas wilayah di Kabupaten Malang yang berada pada kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm adalah seluas 2.528,00 Ha atau 0,76% dari seluruh luas Kabupaten Malang. Pada wilayah ini masih memungkinkan diusahakan tanaman semusim, tetapi pada kedalaman 0 - 10 cm tidak baik untuk pertumbuhan tanaman.

Tabel 2.7
Luas Daerah Berdasarkan Kedalaman Efektif Tanah
di Kabupaten Malang

No	Klasifikasi Kedalaman Efektif Tanah	Luas	
		Ha	%
1.	> 90 cm	278.925,56	83,31
2.	60 - 90 cm	35.528,89	10,61
3.	30 - 60 cm	17.804,55	5,32
4.	< 30 cm	2.528,00	0,76
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

c. Tekstur Tanah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Malang bertekstur sedang 248.142,51 Ha atau 74,12 % dari luas wilayah. Selain itu, wilayah dengan luas 82.944,49 Ha atau 24,79 % adalah tanah

dengan tekstur halus. Sedangkan Tanah dengan tekstur kasar mempunyai luas sebesar 3.650,00 Ha atau 1,09 % dari luas wilayah Kabupaten Malang seluruhnya.

Tabel 2.8
Luas Daerah Berdasarkan Klasifikasi Tekstur Tanah
di Kabupaten Malang

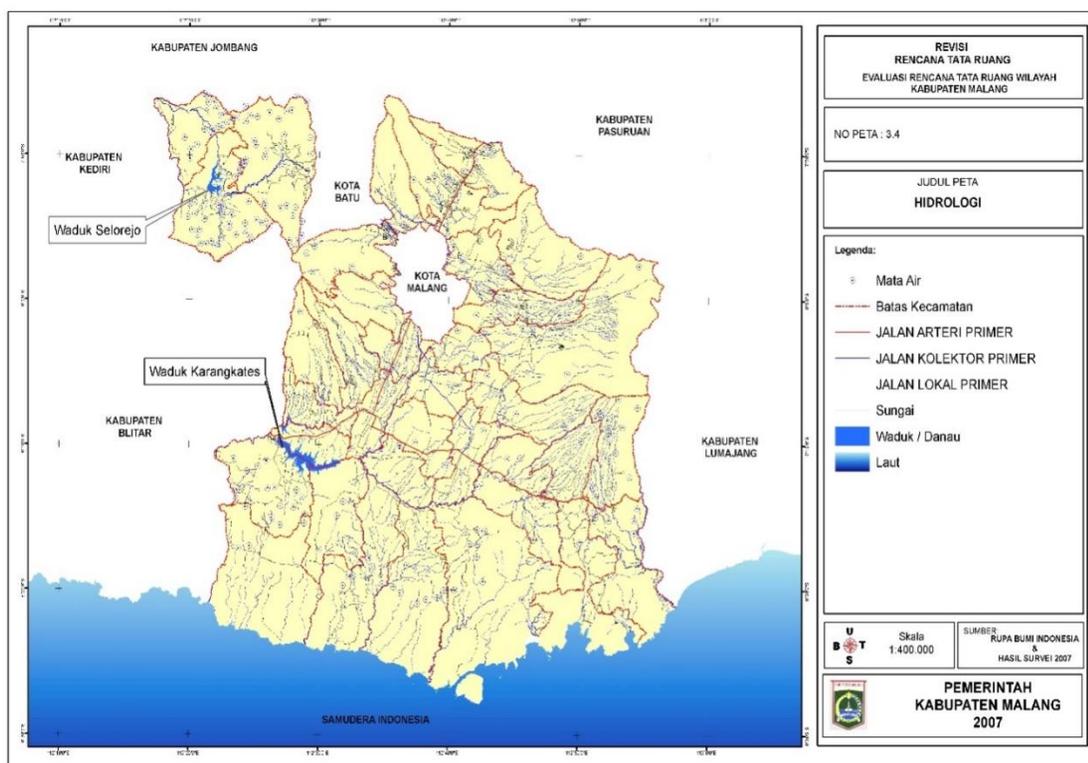
No.	Klasifikasi Tekstur Tanah	Luas	
		Ha	%
1.	Halus	82.994,49	24,79
2.	Sedang	248.142,51	74,12
3.	Kasar	3.650,00	1,09
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

3. Hidrologi

Kabupaten Malang yang merupakan daerah dataran tinggi memiliki drainase yang baik yakni tidak pernah tergenang air, kecuali pada dataran-dataran yang kemampuan saluran drainasenya bermasalah. Drainase tanah menunjukkan lama dan seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air dan menunjukkan kecepatan resapan air dari permukaan tanah. Di wilayah ini terdapat genangan air berupa waduk Karangates dan Selorejo yang menjadi muara drainase dari berbagai wilayah.

Gambar 2.4
Kondisi Hidrologi di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Di Kabupaten Malang dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak sungai, anak-anak sungai yang ada sebagian dari Kali Konto dan Kali Brantas, sungai-sungai tersebut ada beberapa yang masuk di waduk-waduk Karangates dan Selorejo, ada juga yang masuk Samudra Indonesia dan Laut Jawa.

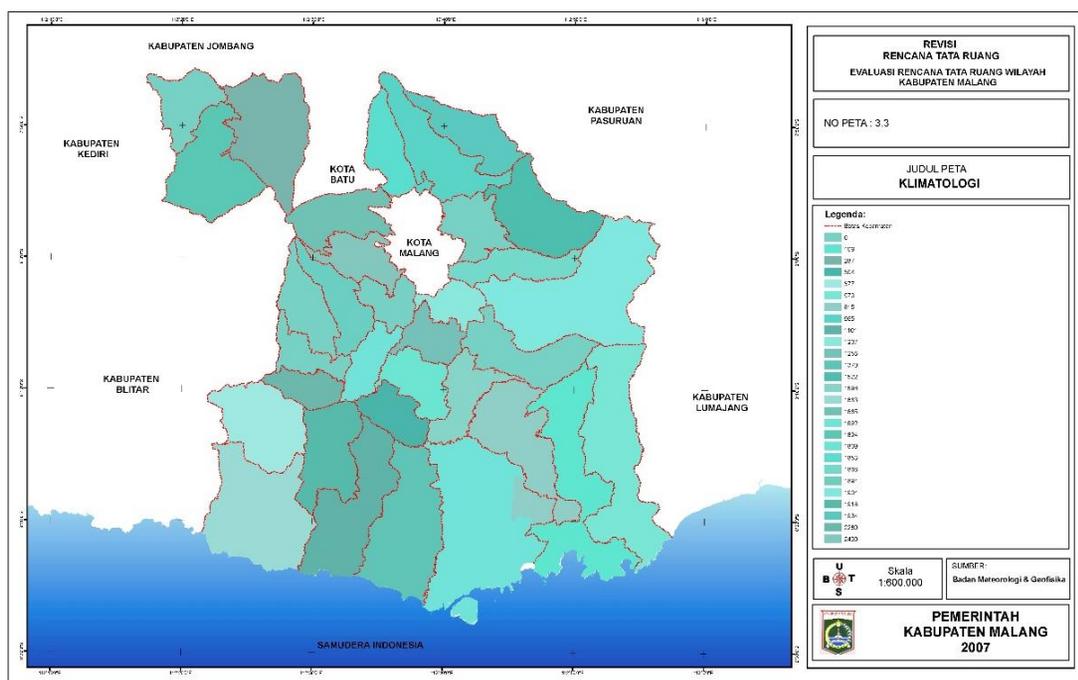
Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Malang terdapat 588 mata air dengan debit 1 sampai di atas 200 liter/detik, debit tertinggi terdapat di Wendit Kecamatan Pakis (1.100 liter/detik). Sedangkan kecamatan yang memiliki debit air lebih dari 200 liter/detik adalah mata air yang berada di Tumpang, Pakis, Singosari, Gondanglegi, Sumberpucung, Ngajum, Wagir, Ampelgading dan Dampit. Lebih jelasnya tentang kondisi hidrologi di Kabupaten Malang, lihat Gambar 2.2.

4. Klimatologi

Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara 18,25 °C sampai dengan 31,45 °C (suhu rata-rata dari empat stasiun pengamat cuaca antara 23 °C sampai 25 °C). Tekanan udara yang paling tinggi dari empat stasiun pengamat cuaca terjadi di Singosari 1.012,70 dan yang lain masih dibawah angka tersebut.

Gambar 2.5

Kondisi Klimatologi di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Kelembaban udara yang diteliti lewat keempat stasiun, Stasiun Lawang 2.423 adalah menunjukkan angka tertinggi 84 % dan rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8

sampai dengan 4,7 Km/jam. Untuk curah hujan di Kabupaten Malang rata-rata pertahunnya 1.596 mm dengan hari hujan 84,85 per tahun, curahhujan turun antara bulan April-Oktober. Diantara kedua musim tersebut ada musim peralihan antara bulan April - Mei dan Oktober-November. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi klimatologi di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

5. Penggunaan Lahan

Struktur penggunaan lahan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Data Rincian Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
	Kawasan Lindung	
1	Hutan Lindung	41.542,22
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Kawasan Resapan Air)	
3	Kawasan Perlindungan Setempat	
4	Kawaan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya	23.724,41
	a. Cagar Alam Pulau Sempu	999,49
	b. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	19.013,25
	c. Taman Hutan Raya R. Soerjo	3.711,67
	Total	65.266,63
	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi	50.907,24
2	Hutan Rakyat	-
3	Pertanian	168.315,84
	Pertanian Lahan Basah	48.905,26
	Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura	119.410,58
4	Perkebunan	14.597,08
	Perkebunan Negara	
	Perkebunan Rakyat	
5	Perikanan	75,44
	Perikanan Tangkap	
	Perikanan Budidaya (Tambak)	75,44
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	40,5
7	Industri	1.010,76
	Kawasan Industri	
	Kawasan Peruntukan Industri	1.010,76
8	Pariwisata	
9	Permukiman	41.493,30
	Permukiman Perkotaan	
	Permukiman perdesaan	
10	Kawasan Peruntukan Lainnya	310,28
	Bandara	310,28
	Hankam/Kawasan Militer	
11	Wilayah Perairan Darat	2.556,08
12	Lain-lain	
	Total	279.306,52
	Luas total penggunaan lahan	344.573,15

Sumber: Neraca Penggunaan Lahan Kabupaten Malang Tahun 2015 (Badan Pertanahan Nasional)

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Klasifikasi pengembangan wilayah Kabupaten Malang meliputi hutan bakau, perikanan, perkebunan, permukiman dan hutan. Seiring dinamika sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan di Kabupaten Malang senantiasa menimbulkan masalah berupa kerusakan alam dan lingkungan, seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, dan terbatasnya ketersediaan lahan. Oleh karena itu, tata kelola pengembangan wilayah perlu dilakukan secara terfokus agar aspek keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud secara bersama. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Malang diarahkan ke pengembangan kawasan (a) Agroekowisata yang berpusat di Kecamatan Poncokusumo dan daerah sekitarnya seperti Wajak, Pakis, Bromo, Jabung, dan Tumpang yang disebut sebagai Kawasan “Poncowismojatu”. Pengembangan di wilayah tersebut diarahkan pada pengembangan potensi pertanian yang diintegrasikan dengan potensi pariwisata. Wisata Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi wisata alam andalan Kabupaten Malang, berupaya dikembangkan melalui optimalisasi potensi pada kawasan sekitar seperti pertanian hortikultura yang melimpah, bentang alam dan aktifitas religi dan budaya masyarakat Tengger; (b) Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan suguhan wisata ritualnya antara lain pesarean, mitos dan kepercayaan yang berkembang dan ekspresi-ekspresi budaya masyarakat seperti Gebyar Suroan dan Kirab Budaya Agung; (c) Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang menawarkan keindahan bendungan yang dikelilingi gunung, penginapan yang artistik dan aneka produk olahan perikanan; (d) Potensi alam pesisir Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

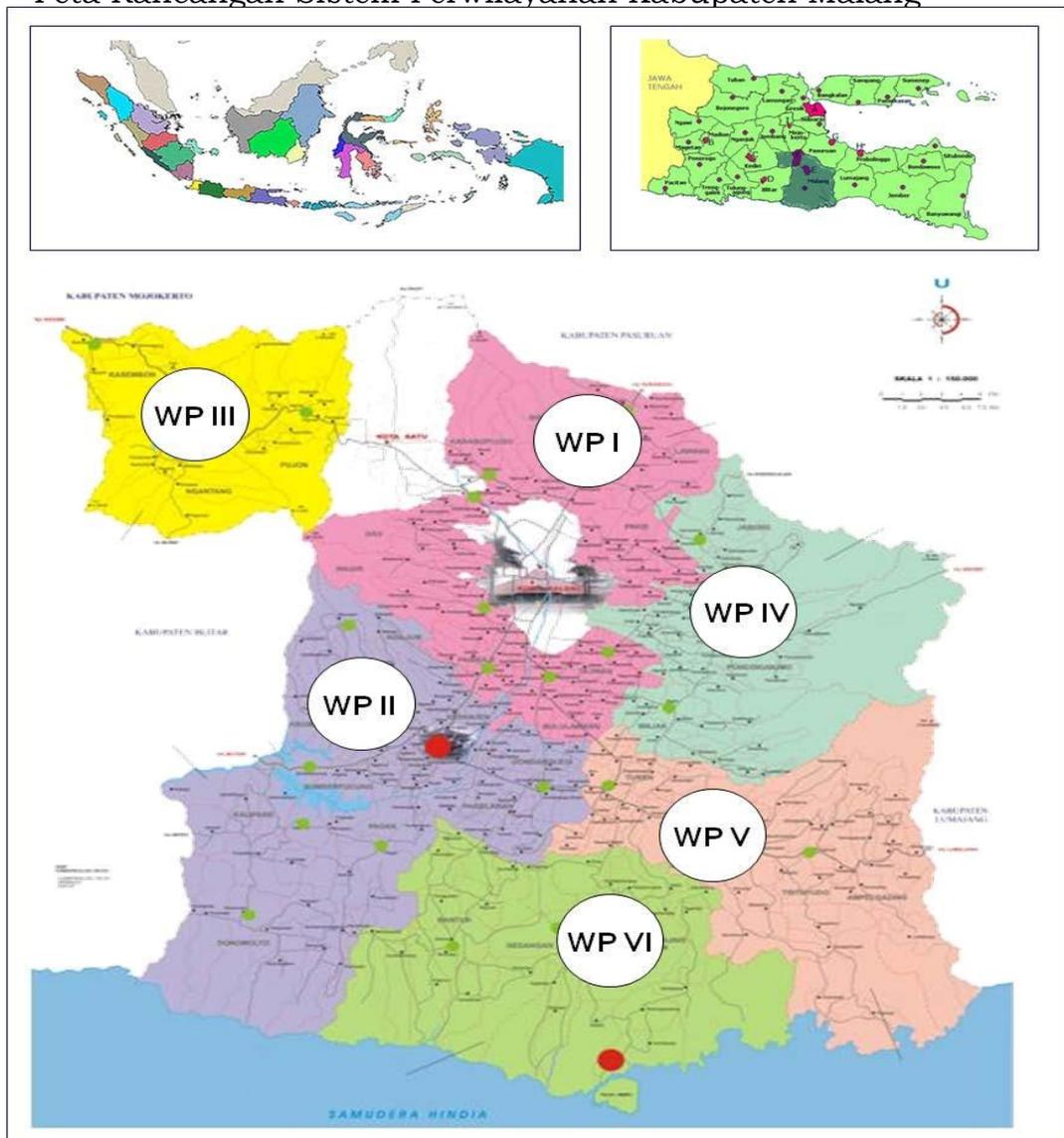
Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW):

1. WP I lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir,

- Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang; 2) Pengembangan jalan Malang–Batu; 3) Peningkatan konservasi lingkungan; 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang–Bandara Abdul Rahman Saleh dan pengembangan permukiman.
2. WP II Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen; 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep; 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan; 4) Peningkatan kapasitas jalan akses/sirip JLS; 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan dan pengembangan permukiman.
3. WP III Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan; 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang; 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan; 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi; 5) Pengembangan dan peningkatan jalan kabupaten sebagai alternatif provinsi.

4. WP IV Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–Poncokusumo–Ngadas–Bromo; 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan; 3) Jalan tembus utama antar kecamatan; 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
5. WP V Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).
6. WP VI Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

Gambar 2.6
Peta Rancangan Sistem Perwilayahan Kabupaten Malang



2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis, dan geologis wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana alam berupa tsunami. Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang, yaitu:

1. Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi:
 - a. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
 - b. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
 - c. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
 - d. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;

- e. Desa Sitarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - f. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
 - g. Desa Kemiri Kecamatan Jabung
 - h. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
 - i. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
2. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
 - a. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
 - b. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari GunungSemeru;
 - c. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/S04, S02) dari Gunung Kelud; dan
 - d. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas solfatara-fumarola hingga belerang (S04) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.
 3. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
 4. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.
 5. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

Di Kabupaten Malang terdapat rawan bencana yang meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, kebakaran lahan, kekeringan dan tsunami. untuk lebih jelasnya mengenai lokasi dan jenis rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.10

Data Rawan Bencana Kabupaten Malang

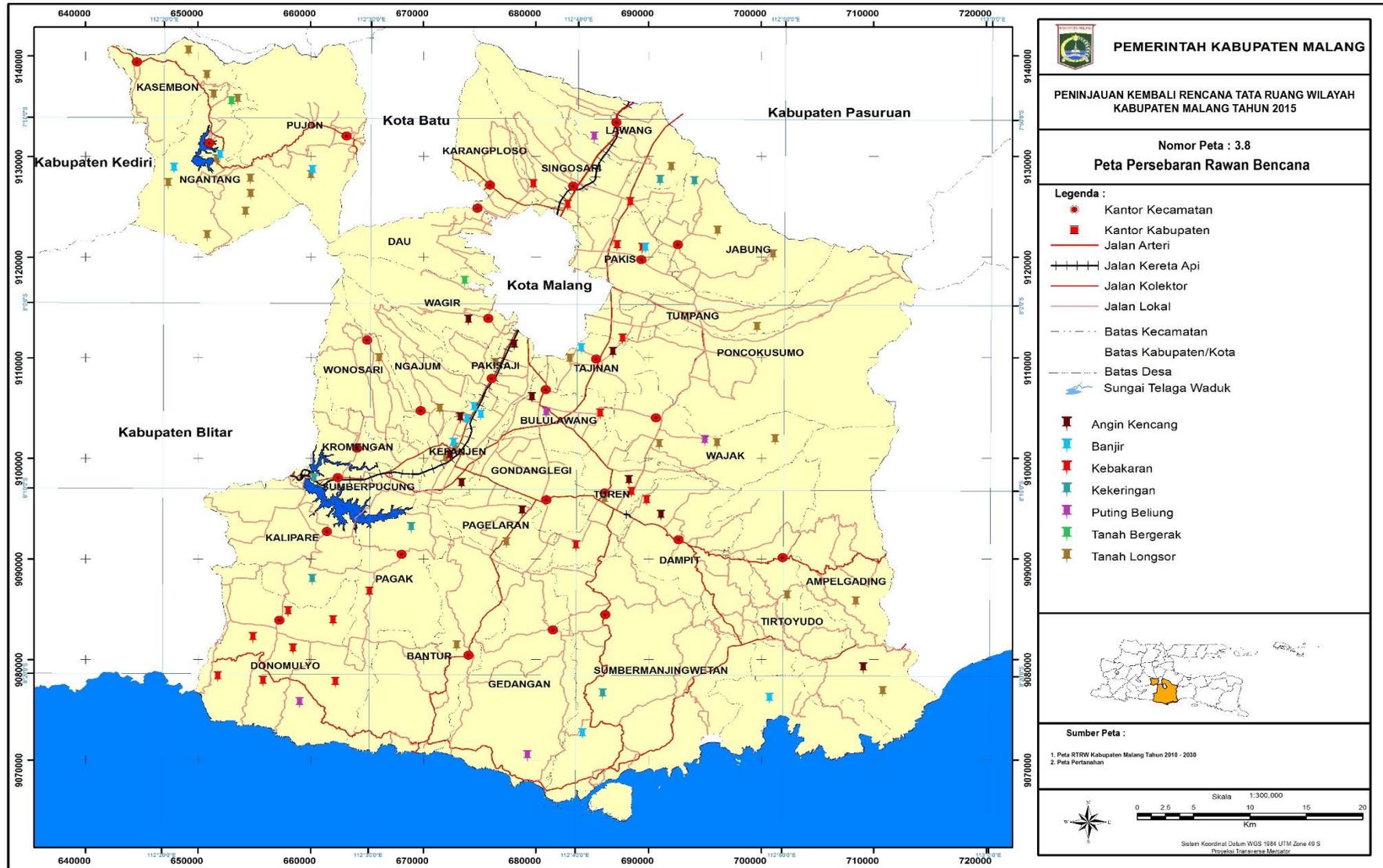
NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA								
			BANJIR BANDANG	BANJIR GENANGAN	TANAH LONGSOR	GEMPA BUMI	GUNUNG MELETUS	PUTTING BELIUNG	KEBAKARAN LAHAN	KEKERINGAN	TSUNAMI
1	Ampelgading	Sidorenggo	-	-	-	Semua wilayah	V	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Taman Sari	-	-	-		V			-	-
		Wirotaman	-	-	V		-			-	-
		Lebakharjo	V	-	V		-			-	V
2	Tirtoyudo	TamanSatriyan	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Pujiharjo	V	-	V		-			-	V
		Purwodadi	V	-	V		-			-	V
		Tirtoyudo	-	-	-		-			-	-
		Sumbertangkil	-	-	-		-			-	-
3	Dampit	Srimulyo	V	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Sukodono	-	-	V		-			-	-
		Pamotan	V	-	-		-			-	-
4	Sbr.Manjingwetan	Tambaksari	V	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Sumberagung	-	-	V		-			-	V
		Sitiarjo	V	-	V		-			-	-
		Tambakrejo	V	-	V		V			-	V
		Sidoasri	V	V	V		V			-	V
		Druju	-	-	-		-			-	-
		Smbr.Wetan	-	-	-		-			-	-
		Klepu	-	-	-		-			-	-
		Ringinkembar	-	-	-		-			-	-
		KedungBanteng	-	-	-		-			-	-
5	Turen	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
6	Bululawang	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
7	Gondanglegi	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
8	Pagelaran	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
9	Wajak	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA								
			BANJIR BANDANG	BANJIR GENANGAN	TANAH LONGSOR	GEMPA BUMI	GUNUNG MELETUS	PUTTING BELIUNG	KEBAKARAN LAHAN	KEKERINGAN	TSUNAMI
10	Tajinan	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
11	Pagak	Pagak Gampingan Sumberejo	- - -	- - -	- - -	Semua wilayah	- - -	Semua wilayah	Semua wilayah	V V V	- - -
12	Bantur	Srigonco Wonorejo	- V	- -	V -	Semua wilayah	- -	Semua wilayah	Semua wilayah	- -	V -
13	Gedangan	Gajahrejo Sindurejo Tumpakrejo Sidodadi Gedangan	V - V V -	- - - - -	V - V V -	Semua wilayah	- - - - -	Semua wilayah	Semua wilayah	- - - - -	- - V - -
14	Donomulyo	Tlogosari Kedungsalam Tulungrejo Sumberoto Purworejo Donomulyo Purwodadi Tempursari Mentaraman Banjarejo	- V V V - - - - - -	- - - - - - - - - -	V V - V - - - - - -	Semua wilayah	- - - - - - - - - -	Semua wilayah	Semua wilayah	V V - V V V V V V V	- V - V V - - - - -
15	Kalipare	Tumpakrejo Putukrejo	- -	V -	- -	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	- V	- -
16	Kepanjen	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
17	Pakisaji	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
18	Wagir	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
19	Ngajum	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
20	Wonosari	Kebobang	-	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
21	Kromengan	Semua wilayah	-	-	-	Semua	-	Semua	Semua wilayah	-	-

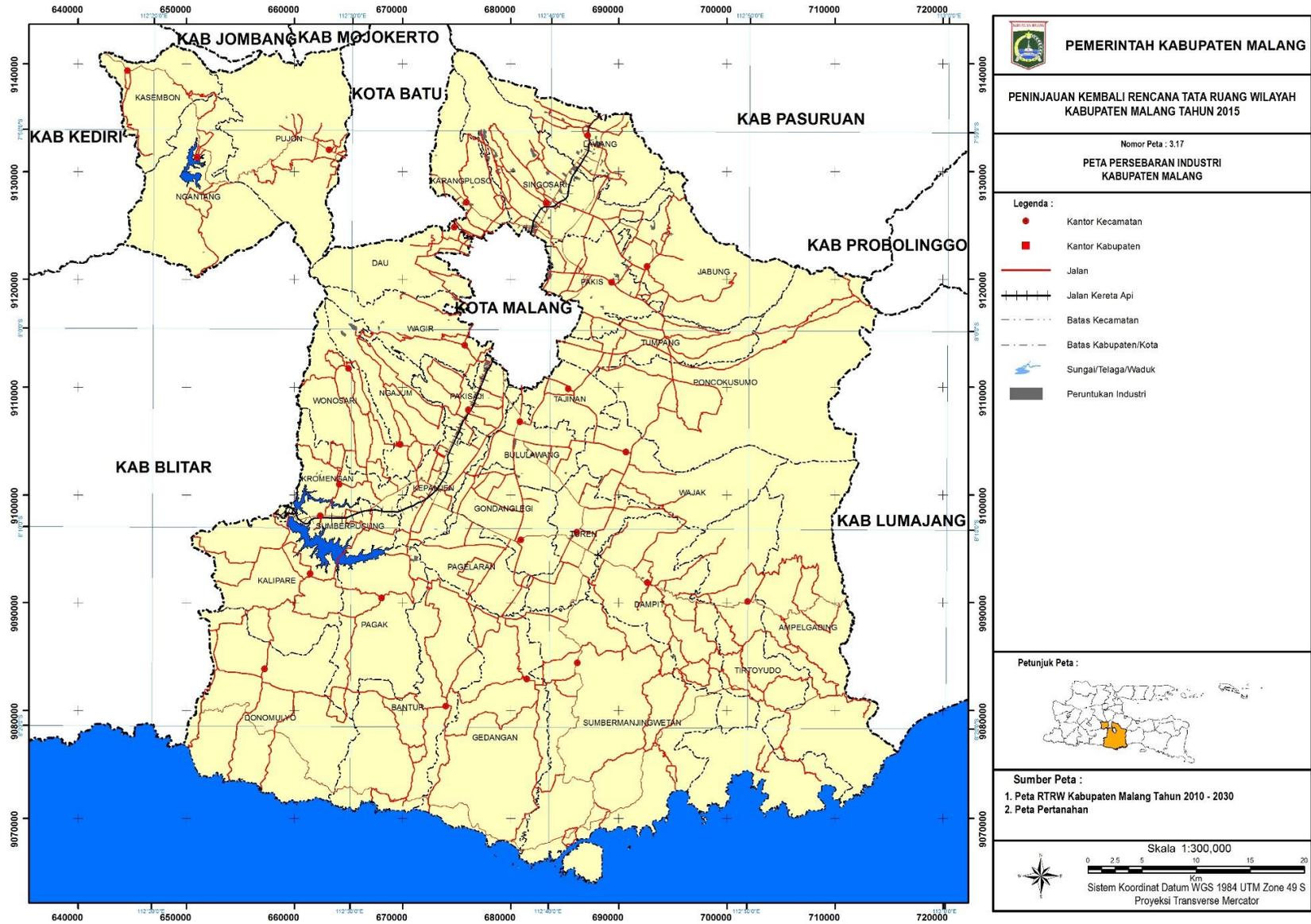
NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA								
			BANJIR BANDANG	BANJIR GENANGAN	TANAH LONGSOR	GEMPA BUMI	GUNUNG MELETUS	PUTTING BELIUNG	KEBAKARAN LAHAN	KEKERINGAN	TSUNAMI
						wilayah		wilayah			
22	Sumberpucung	Karangkates	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	V	
23	Tumpang	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
24	Pakis	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
25	Poncokusumo	Pandansari	-	-	V	Semua wilayah	V	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Gubukklakah	-	-	V		V			-	-
		Ngadas	-	-	V		V			-	-
26	Jabung	Slamparrejo	V	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Kemiri	V	-	V		-			V	-
		Jabung	-	-	-		-			V	-
27	Singosari	Ardimulyo	V	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Wonorejo	-	-	-		-			V	-
28	Lawang	Turirejo	-	-	V	Semua wilayah	V	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Sidoluhur	-	-	-		-			V	-
29	Karangploso	Bocek	-	-	V	Semua wilayah	V	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
30	Dau	Karangwidoro	V	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
31	Pujon	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
32	Ngantang	Sumberagung	-	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Banjarrejo	-	-	V		-			-	
		Sidodadi	-	-	V		-			-	
		Pagersari	-	-	V		-			-	
		Banturejo	-	-	-		V			-	-
33	Kasembon	Pait	V	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Wonoagung	-	-	V		-			-	
		Kasembon	-	-	-		V			-	
	TOTAL		21 Desa	2 Desa	31 Desa	33 Kec	11 Desa	33 Kec	33 Kec	19 Desa	10 Desa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016

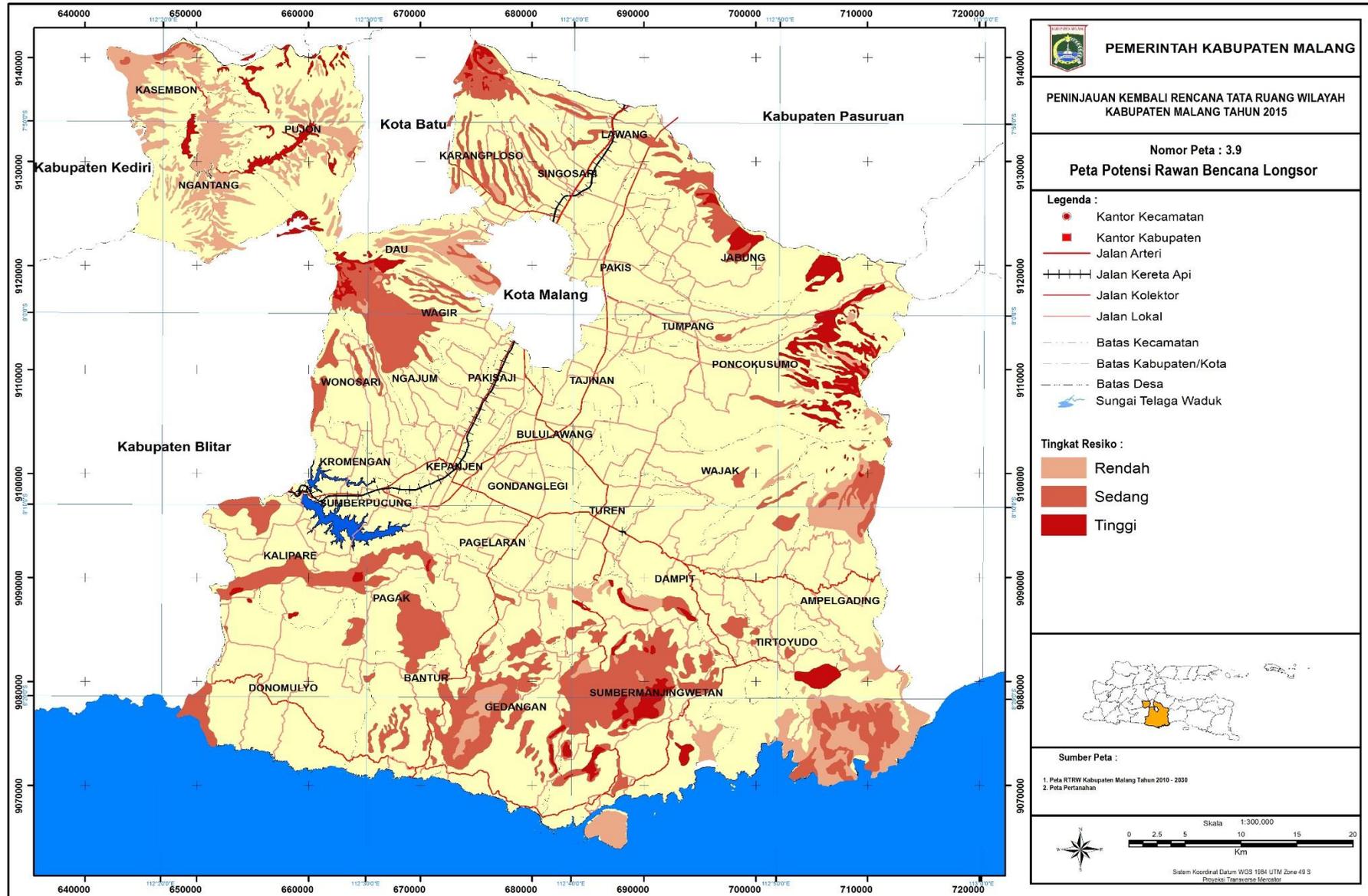
Gambar 2.7



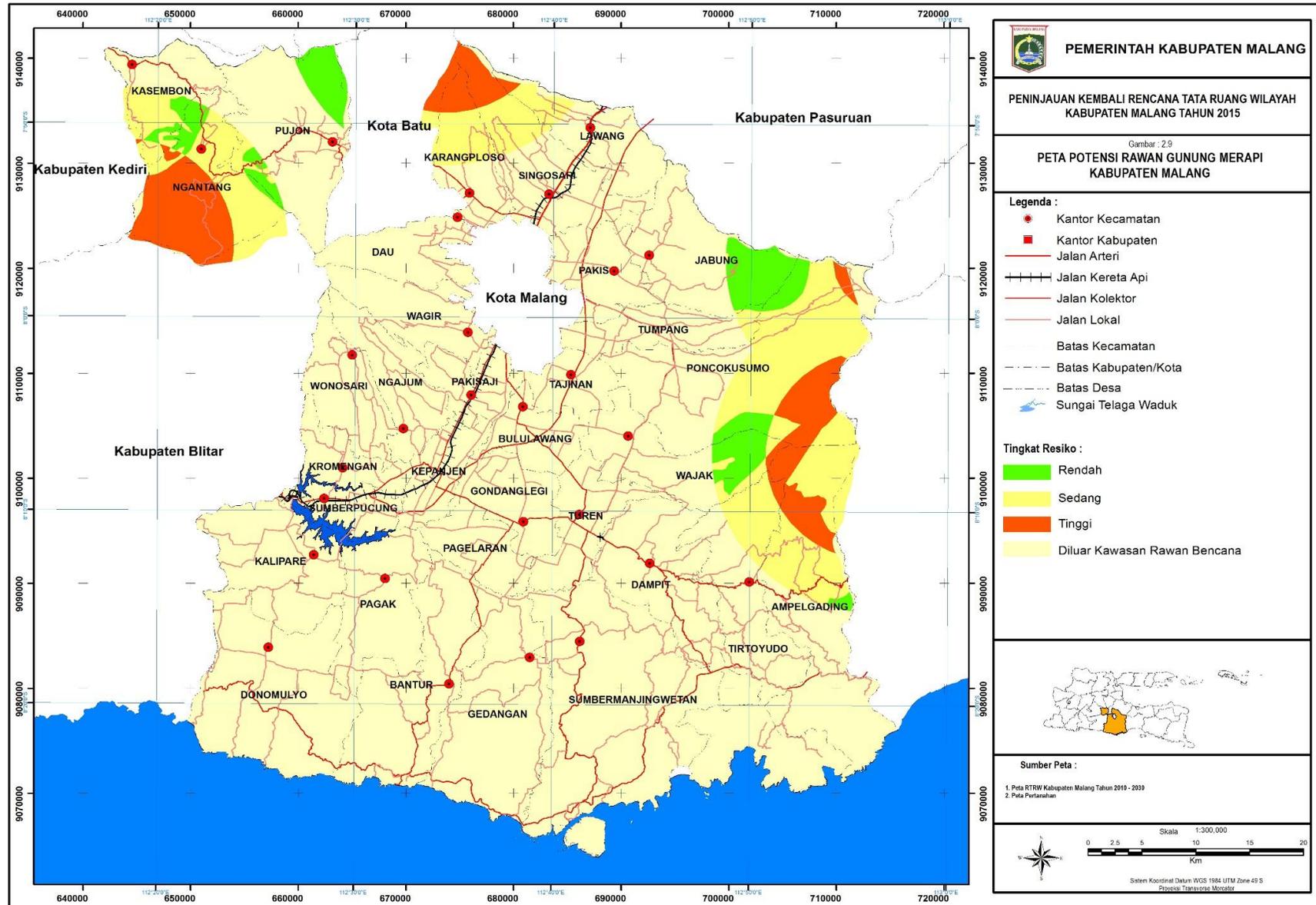
Gambar 2.8



Gambar 2.9



Gambar 2.10



2.1.4 Demografi

A. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2017 adalah 2.576.596 jiwa.

Tabel 2.11
Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang
Tahun 2012-2017

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.490.878	2.508.698	2.527.087	2.544.315	2.560.675	2.576.596
Jumlah Laki-Laki	Jiwa	1.250.780	1.260.414	1.269.613	1.278.511	1.286.867	1.295.017
Jumlah Perempuan	Jiwa	1.240.098	1.248.284	1.257.474	1.265.804	1.273.808	1.281.579
Pertumbuhan penduduk	%	0,76	0,71	0,73	0,68	0,64	0,62
Kepadatan penduduk	jiwa/km ²	705	710	715	720	724	728

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.295.017 jiwa (50,26 persen) dan perempuan 1.281.579 jiwa (49,74 persen). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,62 persen, dan tingkat kepadatan sebesar 728 jiwa/Km².

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hasil penghitungan akhir tahun 2017 adalah sebesar 2.782.740 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.403.364 jiwa (50,43%) dan perempuan 1.379.376 jiwa (49,57%). Sedangkan tahun 2015 adalah sebesar 2.581.671 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.305.267 jiwa (50,56%) dan perempuan 1.276.404 jiwa (49,44%). Jumlah ini mengalami penurunan 510.503 jiwa dibandingkan Tahun 2014 sebesar 3.092.174 atau turun 16,5% hal ini karena: a) Sesuai dengan perintah Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka pada pertengahan bulan Mei 2015, telah dilaksanakan pemutakhiran data meliputi: Data Kembar, Data Kependudukan Pasif yang selama lima tahun tidak mengalami perubahan, dan Anomali data atau data yang tidak layak dipertahankan karena kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan proses tertentu di server; b) Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan database secara nasional; c) Berkenaan dengan hal tersebut kami telah melakukan hal-hal

sebagai berikut: (1) Melakukan proses pengaktifan kembali data penduduk yang telah dinonaktifkan dalam proses penyandingan apabila bila dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar berdomisili sesuai dengan Kartu Keluarga yang dimiliki dan telah melalui seleksi ketunggalan data secara nasional; (2) Memperketat persyaratan pengajuan percetakan dokumen kependudukan bagi penduduk yang termasuk wajib KTP tetapi belum melaksanakan perekaman KTP elektronik. Caranya mengharuskan mereka datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan cek data biometri dan perekaman KTP elektronik secara langsung, atau datang ke Kecamatan untuk melaksanakan perekaman KTP elektronik

Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang
Tahun 2012-2017

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk							
	- Laki-laki	Jiwa	1.524.633	1.541.907	1.549.678	1.305.267	1.365.806	1.403.364
	- Perempuan	Jiwa	1.518.980	1.536.053	1.543.036	1.276.404	1.339.589	1.379.376
	Jumlah	Orang	3.043.613	3.077.960	3.092.714	2.581.671	2.705.395	2.782.740
2	Jumlah Penduduk Usia Sekolah							
a.	Usia 4-6 Tahun/Usia TK							
	- Laki-laki	Orang	63.581	64.060	63.402	56.179	57.596	56.620
	- Perempuan	Orang	60.517	60.818	60.018	52.951	54.107	53.593
	Jumlah	Orang	124.098	124.878	123.420	109.130	111.703	110.213
b.	Usia 7-12 Tahun/Usia SD							
	- Laki-laki	Orang	143.100	140.122	138.392	118.005	121.387	122.650
	- Perempuan	Orang	136.265	133.611	131.881	113.053	115.922	116.770
	Jumlah	Orang	279.365	273.733	270.273	231.058	237.309	239.420
c.	Usia 13-15 Tahun/Usia SMP							
	- Laki-laki	Orang	69.299	71.636	73.194	63.206	63.944	64.414
	- Perempuan	Orang	67.675	67.675	69.649	60.410	61.166	61.603
	Jumlah	Orang	136.974	139.311	142.843	123.616	125.110	126.017
d.	Usia 16-18 Tahun/Usia SMU							
	- Laki-laki	Orang	71.746	72.313	69.752	60.564	63.689	65.052
	- Perempuan	Orang	68.420	68.444	65.693	56.794	60.351	61.922
	Jumlah	Orang	140.166	140.757	135.445	117.358	124.040	126.974
e.	Usia 19-24 Tahun/Usia PT							
	- Laki-laki	Orang	139.319	138.130	138.836	121.941	127.837	128.770
	- Perempuan	Orang	137.259	134.391	1.333.842	107.374	115.839	118.354
	Jumlah	Orang	276.578	272.521	1.472.678	229.315	243.676	247.124

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Malang, 2017

Perbedaan hasil perhitungan antara BPS dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disebabkan karena perbedaan penggunaan pendekatan atau metode perhitungan. BPS menganggap penduduk adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau selama 6 (enam) bulan telah berdomisili pada suatu tempat. Adapun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perhitungan jumlah

penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen kependudukan yang diterbitkan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan informasi dari tabel 2.11, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 6 (enam) tahun rata-rata sebesar 0,70 persen. Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Malang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, mengingat Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata, sehingga turut mempercepat pertambahan penduduk di Kabupaten Malang. Diasumsikan, untuk 4 (empat) tahun mendatang pertambahan jumlah penduduk dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.13
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang
Tahun 2018-2021

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk					
- BPS	Jiwa	2,591,795	2,607,634	2,623,201	2,639,108
- Dispenduk	Jiwa	2.640.980	2.661.051	2.681.274	2.701.497
Kepadatan					
- BPS	jiwa/km ²	733	738	742	747
- Dispenduk	jiwa/km ²	747	752	753	764

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Malang, 2017 diolah

Walaupun jumlah penduduk di Kabupaten Malang memiliki *trend* yang naik, tetapi presentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012-2017 presentase pertumbuhan penduduk menurun sampai pada angka 0.64%. Salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap pelambatan laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah keberhasilan implementasi program Keluarga Berencana di Kabupaten Malang.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

A. Pertumbuhan PDRB

Untuk mengkaji tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, maka digunakan indikator perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Perhitungan PDRB terbagi dalam dua kategori utama, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga konstan (ADHK) 2010. Sejak tahun 2014, perhitungan PDRB (regional) dan PDB (nasional) telah menggunakan tahun dasar 2010 dan tidak lagi menggunakan tahun dasar 2000. Penggunaan tahun dasar 2010 dimaksudkan agar nilai pertumbuhan PDRB sebagai parameter penilaian kinerja perekonomian suatu daerah dapat lebih akurat dan objektif. Selain itu, perubahan penggunaan acuan tahun dasar tersebut merupakan adopsi dari *The 2008's System of National Accounts* (SNA 2008) dalam kerangka *Supply and Use Tables* (SUT) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Variabel PDRB merupakan variabel terpenting dalam melakukan analisis perekonomian dalam suatu wilayah. Oleh karena itu variabel PDRB menjadi variabel utama dalam indikator makro ekonomi berdasarkan skala ordinal. Hal tersebut dikarenakan hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Berbagai kebijakan yang disusun dan hasil evaluasi kinerja perekonomian menggunakan angka PDRB sebagai landasan.

Menurut BPS (2014), Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Melalui perhitungan PDRB dapat diketahui struktur perekonomian suatu daerah, laju pertumbuhan

ekonomi maupun tingkat inflasi di level produsen. Perbandingan PDRB antar wilayah dapat menunjukkan dimana posisi kekuatan ekonomi daerah tersebut.

Kegunaan PDRB antara lain:

1. Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi menghasilkan oleh suatu daerah atau provinsi, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
2. Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk suatu region atau provinsi,
3. Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ketahun,
4. PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya stuktur perekonomian dan peranan sektor perekonomian dalam suatu wilayah, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah,
5. PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar,
6. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan menurut barang dan jasa yang dihasilkan sektor ekonomi,
7. PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar pulau atau provinsi,
8. PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRB perkapita atau persatu orang,
9. PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

PDRB dapat dihitung dengan menggunakan dua metode yaitu secara langsung dan tidak langsung (alokasi).

1. Metode Langsung

Dalam menggunakan Metode Langsung terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan PDRB yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun dalam 3

pendekatan ini berbeda namun hasil perhitungan nantinya tidak akan mengalami perbedaan. Penjelasan dari 3 pendekatan itu adalah sebagai berikut:

a) PDRB Menurut Pendekatan Produksi (*Produk Approach*)

Jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun) adalah PDRB. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga perhitungan melalui pendekatan nilai tambah.

Perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut disebut dengan pendekatan produksi. Dan nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara. Biaya antara adalah adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi. Bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau yang mempunyai umur kurang dari 1 tahun merupakan biaya antara, sementara upah, gaji, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan bukan termasuk biaya antara. Pendekatan produksi banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor yang produksinya berbentuk fisik/barang.

b) PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun) disebut dengan PDRB. Perhitungan PDRB dengan menggunakan pendekatan pendapatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdapat upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan pajak tidak langsung

c) PDRB menurut pendekatan Pengeluaran (*Expend Approach*)

Jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentuk modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah adalah PDRB menurut pendekatan ini. Perhitungan menurut *Expend Approach* bertitik

tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik.

2. Metode Tidak Langsung (Alokasi)

PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas merupakan metode ini. Untuk melakukannya digunakan beberapa alokator yang terdiri dari: 1) Nilai Produksi Bruto pada wilayah yang dialokasikan, 2) Jumlah produksi fisik, 3) Tenaga Kerja, 3) Penduduk, 4) Penduduk, 5) dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan presentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap sektor maupun subsektor.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang ini menggunakan jenis metode PDRB langsung dengan pendekatan produksi (lapangan usaha), karena mampu mengukur besaran nilai tambah dari input menjadi output pada setiap sektor ekonomi. Pendekatan ini juga dapat menjadi dasar evaluasi dalam identifikasi kondisi eksisting berikut strategi pengembangan setiap sektor ekonomi.

Secara umum, Pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Malang mampu meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Malang pada tahun 2012 sebesar Rp52.797,10 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2017 mencapai Rp89.180,19 Milyar. Sedangkan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang pada tahun 2012 sebesar Rp47.076,21 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2017 mencapai Rp61.408,93 Milyar. Adapun PDRB per kapita pada tahun 2012 sebesar Rp21,19 Juta dan terus meningkat hingga tahun 2017 mencapai Rp34,61 Juta. Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB, PDRB ADHK dan PDRB perkapita dapat pada Tabel 2.14 berikut:

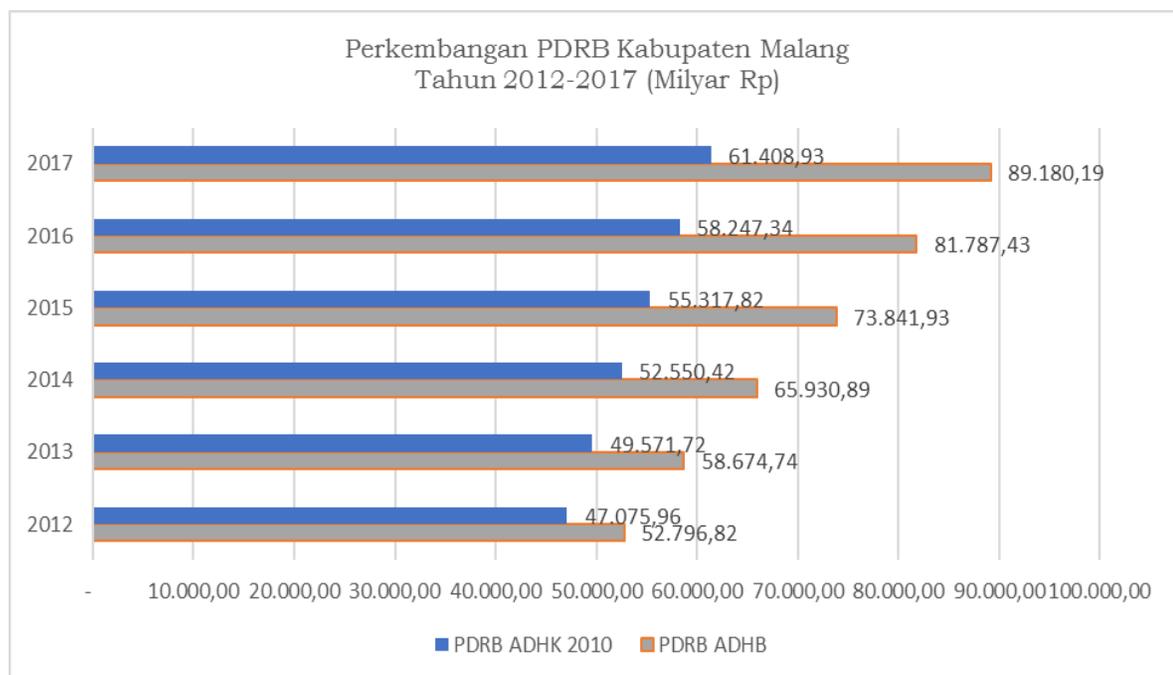
Tabel 2.14
Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010
(dalam Milyar Rupiah) Kabupaten Malang Tahun 2012-2017

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)
PDRB ADHB	Milyar Rp	52.797,10	58.674,74	65.930,89	73.841,93	81.787,43	89.180,19
PDRB ADHK 2010	Milyar Rp	47.076,21	49.571,72	52.550,42	55.317,82	58.247,34	61.408,93

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Ket *) : Angka Sementara

Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Malang terdapat pada grafik berikut:



Gejala positif pertumbuhan PDRB dalam 6 (enam) tahun silam, menciptakan optimisme bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Malang pada masa-masa mendatang akan lebih baik. Diproyeksikan PDRB ADHB Kabupaten Malang pada akhir tahun 2021 tumbuh pada kisaran Rp90.000 milyar. PDRB ADHK pada tahun 2021 juga diperkirakan meningkat sebesar Rp44.000 Milyar.

Tabel 2.15
Perkembangan PDRB Perkapita (dalam Juta Rupiah)
Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)
PDRB PERKAPITA ADHB	Juta Rp	21,19	23,39	26,10	29,02	31,94	34,61

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Ket *) : Angka Sementara

B. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhannya ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010.

Realitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang senantiasa mengalami perubahan setiap tahunnya. Terdapat perlambatan pertumbuhan pada tahun 2012 dan 2013 dengan capaian sebesar 6,77 persen menjadi 5,30 persen. Selanjutnya, ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2014 tumbuh kembali pada posisi 6,01 persen dan pada tahun 2015 melambat menjadi 5,27 persen, sedangkan pada tahun 2016 tumbuh kembali menjadi 5,30 persen hingga pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,43 persen.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang lebih didominasi oleh hambatan makro ekonomi. Pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan terdepresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS hingga menyentuh level Rp14.000 per dollar AS, menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Kenaikan harga-harga barang dan jasa tersebut pada gilirannya melemahkan daya beli masyarakat. Dampaknya, perekonomian cenderung mengalami kelesuan sampai saat ini meskipun harga BBM telah turun kembali dan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS kembali menguat.

Karakter perekonomian Kabupaten Malang yang terbuka, menjadikan dinamika ekonomi global turut berpengaruh terhadap perekonomian setempat. Dampak perekonomian global yang dimaksud, tercermin dalam konteks perdagangan luar negeri yang nilai transaksinya mengalami penurunan beberapa tahun terakhir akibat rendahnya permintaan. Kondisi melemahnya ekspor komoditas, pada gilirannya menurunkan tingkat produksi barang dan jasa sehingga berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Malang. Apalagi, persoalan domestik, seperti keterbatasan kapasitas industri dalam memenuhi permintaan luar negeri juga menjadi salah satu hambatan pengembangan ekonomi di Kabupaten Malang.

Menghadapi situasi yang demikian, pemerintah Kabupaten Malang sudah berusaha menetapkan dan menjalankan serangkaian kebijakan untuk mendorong stabilitas perekonomian daerah terutama dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi lokal yang progresif. Akan tetapi, kompleksitas permasalahan yang dihadapi menyebabkan upaya-upaya stimulasi ekonomi yang ditempuh kurang berjalan optimal.

C. Inflasi

Disamping pertumbuhan ekonomi, indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya. Perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Malang merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Perubahan harga yang dimaksud adalah perubahan harga di tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi telah dihilangkan. Inflasi Kabupaten Malang pada tahun 2017 mencapai 3,43 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2016) sebesar 5,30 persen.

Pada periode 4 (empat) tahun mendatang, perekonomian Kabupaten Malang diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan laju yang tidak signifikan. Sebaliknya, tingkat inflasi di Kabupaten Malang berpotensi mengalami tekanan yang cukup kuat. Lesunya perekonomian nasional maupun global masih menjadi faktor yang determinan dalam mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Malang.

Tabel 2.16
Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi
Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,77	5,30	6,01	5,27	5,30	5,43
Inflasi	Persen	5,27	5,54	6,00	6,40	5,19	3,43

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Ket *) : Angka Sementara

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang diproyeksikan meningkat sebesar 5,87 persen dan laju inflasi sebesar 6,0 persen pada tahun 2021. Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang secara rinci, dapat digunakan hasil perhitungan PDRB ADHK 2010 berdasarkan lapangan usaha yang dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok lapangan usaha, yaitu *tradables* dan *non-tradables*. Dari kelompok *tradable*, pelemahan yang tajam terjadi di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sementara itu, industri Pengolahan merupakan satu-satunya lapangan usaha dari kelompok *tradable* yang mencatatkan pertumbuhan positif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha *non-tradables*, antara lain pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori *non-tradable* yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa perusahaan.

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen)

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)
Tradable						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,68	3,23	2,84	3,44	2,98	1,70
Pertambangan dan Penggalian	1,06	1,90	1,75	2,92	1,31	5,12
Industri Pengolahan	6,28	3,10	9,74	6,44	6,08	5,66
Non-Tradable						
Pengadaan Listrik dan Gas	10,32	5,60	4,06	-0,74	4,29	5,92
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,36	6,56	1,85	5,72	4,94	6,89
Konstruksi	9,53	9,40	5,92	3,84	5,13	7,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,74	6,23	4,23	5,29	5,64	7,00
Transportasi dan Pergudangan	9,10	9,93	5,89	7,68	7,09	8,00

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,66	5,17	6,03	6,70	7,30	8,24
Informasi dan Komunikasi	11,12	11,78	6,67	6,78	7,00	7,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,94	11,90	6,85	5,83	6,10	2,90
Real Estate	6,02	6,07	5,71	5,95	6,12	5,38
Jasa Perusahaan	5,03	6,76	9,54	8,53	5,77	5,48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	2,63	1,95	0,62	4,99	3,91	1,89
Jasa Pendidikan	8,35	7,69	7,02	7,21	6,05	4,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,92	8,66	10,73	4,18	4,89	5,82
Jasa lainnya	3,64	4,81	4,40	4,54	6,01	4,93

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Ket *) : Angka Sementara

Berdasarkan tabel 2.17, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang tahun 2012-2017 berdasarkan lapangan usaha rata-rata mengalami pertumbuhan negatif, hanya lapangan usaha Kontruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya yang mengalami pertumbuhan positif.

Gambaran atas pertumbuhan ekonomi berdasarkan uraian PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha membuktikan bahwa pelemahan perekonomian global dan nasional cukup berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara sektoral di Kabupaten Malang. Walaupun demikian, pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang masih tergolong moderat, karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang relatif kuat. Ketahanan konsumsi rumah tangga juga didukung keuntungan demografi. Struktur penduduk Kabupaten Malang berada pada kondisi yang menguntungkan yaitu tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia non produktif. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif akan sangat mendukung pembangunan ekonomi. Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung berkonsumsi lebih besar dari usia non produktif.

Fenomena demografis inilah yang oleh para pakar kependudukan disebut “bonus demografi” (*demographic dividend*) yang akan terjadi hanya satu kali dalam sejarah kependudukan sebuah bangsa. Bonus demografi tentu saja merupakan suatu berkah karena melimpahnya jumlah penduduk usia kerja dan akan menguntungkan dari sisi pembangunan, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun

demikian, jika bonus jumlah penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan pendidikan ketrampilan yang memadai, tidak akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi.

D. Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Tabel 2.18
Indeks Gini Kabupaten Malang Tahun 2012- 2017

Indeks Gini	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Malang	0,32	0,38	0,33	0,38	0,32	0,35

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan :
 $G < 0,3$ = Ketimpangan rendah
 $0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan sedang, dan
 $G > 0,5$ = Ketimpangan tinggi

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa angka gini rasio di Kabupaten Malang selama beberapa tahun terakhir masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3-0,5). Selama tahun 2012-2017 nilai gini rasio di Kabupaten Malang menunjukkan tren ke arah peningkatan, pada tahun 2011 sebesar 0,36 dan tahun 2017 meningkat menjadi 0,35.

E. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistik meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Sebagai amanat *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDG'S ini melanjutkan konsep dari MDG'S yang sudah berakhir di tahun 2015. Pada dasarnya MDG'S dan SDG's punya persamaan dan kesamaan tujuan. SDG'S melanjutkan cita-cita mulia dari MDG'S yang ingin menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi *sustainable* tersebut. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut tersusunlah 17 Tujuan Global antara lain;(1)Tanpa Kemiskinan (2) Tanpa Kelaparan (3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (4) Pendidikan Berkualitas (5) Kesetaraan Gender (6) Air Bersih dan Sanitasi (7) Energi Bersih dan Terjangkau (8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (10) Mengurangi Kesenjangan (11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (13) Aksi Terhadap Iklim (14) Kehidupan Bawah Laut (15) Kehidupan di Darat (16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Begitu juga arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional tentang masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang sudah dimulai RPJMD Kabupaten Malang periode 2006-2010. Pada saat itu sudah

memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan, dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Kemiskinan
Kabupaten Malang Tahun 2012-2017

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Kemiskinan	Persen	11,01	11,44	11,07	11,53	11,49	11,04

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang berada pada level 11,04 persen di Tahun 2017. Kemudian, angka pengangguran terbuka mencapai 4,60 persen di Tahun 2017. Angka kemiskinan di Kabupaten Malang menunjukkan *trend* yang menurun. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan telah berjalan dengan baik meski belum optimal.

F. Angka Kriminalitas

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi.

Tindak kejahatan terbanyak sebagaimana data Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Malang adalah kasus narkoba dan perjudian sebanyak 114 kasus yang dilaporkan. Serta kasus penipuan sebanyak 84 kasus. Sementara itu, berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi. Namun demikian, secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik secara kualitas maupun kuantitas cenderung mengalami penurunan. Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2.20
Angka Kriminalitas Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus narkoba	60	54	74	114	108
2	Jumlah kasus pembunuhan	10	0	4	6	2
3	Jumlah kejahatan seksual	8	10	11	1	4
4	Jumlah kasus penganiayaan	68	70	56	79	58
5	Jumlah kasus pencurian	59	42	32	35	61
6	Jumlah kasus penipuan	118	102	71	84	200
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	4	0	2	3	1
8	Kasus perjudian	161	100	120	114	82
9	Kasus pemerasan dan penadahan	12	26	15	9	6
10	Bunuh diri	10	10	15	20	21
	Jumlah	510	414	400	465	543
	Jumlah penduduk	2.490.878	2.508.698	2.527.087	2.544.315	2.560.675
11	Angka kriminalitas	0,0002	0,00016	0,00015	0.00018	0.00021

Sumber : Badan Kesbang dan Politik, 2017

G. Transformasi Struktur Ekonomi

Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau yang berperan dalam ekonomi dapat diartikan sebagai struktur ekonomi. Pada jangka pendek struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah, bila sektor primer yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah tersebut dikatakan menganut tipe industri. Untuk jangka panjang struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi.

Untuk melihat gambaran secara utuh struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat berdasarkan perhitungan PDRB ADHB tahun 2012-2016 dengan menganalisa kedalam 3 (tiga) kategori yaitu primer, sekunder dan tersier. Kategori primer mencakup kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori pertambangan dan penggalian. Kategori sekunder meliputi kategori industri pengolahan, kategori listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah serta kategori bangunan. Kategori tersier mencakup kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya.

Dari sisi penawaran, transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya pangsa sektor primer. Pada saat yang bersamaan sektor sekunder meningkat dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan sektor tersier. Dalam proses ini, pergeseran pangsa tetap harus diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda. Lebih lanjut, laju percepatan dari suatu proses transformasi akan berbeda untuk masing-masing daerah, tergantung dari karakteristik daerah yang bersangkutan. Untuk daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Malang, proses transformasinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan-daerah kawasan industri seperti Surabaya, Gresik dan yang sejenis. Perbedaan ini karena untuk daerah-daerah yang kaya sumber daya alam cenderung masih membutuhkan pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada sektor lainnya. Perkembangan struktur ekonomi PDRD ADHB Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21
Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang
Tahun 2011-2017 (dalam persen)

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)
Primer	20,33	20,16	20,25	20,00	19,46	18,73
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,16	18,15	18,15	17,96	17,50	16,82
B Pertambangan dan Penggalian	2,17	2,07	2,10	2,04	1,96	1,91
Sekunder	42,13	42,16	42,48	43,01	43,33	43,68
C Industri Pengolahan	29,91	29,32	29,99	30,20	30,33	30,48
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F Konstruksi	12,03	12,47	12,65	12,63	12,83	13,02
Tersier	37,52	37,69	36,95	36,99	37,21	37,59
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,99	19,05	18,51	18,48	18,66	19,04
H Transportasi dan Pergudangan	1,02	1,10	1,14	1,17	1,18	1,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,12	3,07	3,10	3,17	3,26	3,34
J Informasi dan Komunikasi	4,19	4,22	4,01	3,97	3,96	3,96
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,71	1,72	1,72	1,73	1,70
L Real Estat	1,38	1,38	1,31	1,35	1,33	1,33
M,N Jasa Perusahaan	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,08	2,07	1,90	1,90	1,89	1,84
P Jasa Pendidikan	2,33	2,42	2,43	2,41	2,40	2,34
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,53	0,55	0,57	0,56	0,55	0,55
R,S, T,U Jasa lainnya	1,95	1,91	1,90	1,90	1,89	1,90
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Ket *) : Angka Sementara

Berdasarkan tabel 2.21, perubahan pangsa struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dijelaskan bahwa pangsa kategori sekunder yang dimotori oleh kategori industri pengolahan dan kategori konstruksi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, pangsa kategori sekunder masih berkisar pada angka 42,13 persen, selanjutnya naik secara konsisten mencapai 43,68 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, pangsa kategori tersier mengalami peningkatan, dari 37,52 persen pada tahun 2012 menjadi 37,59 persen pada tahun 2017. Kategori primer juga mengalami penurunan peranannya pada struktur ekonomi Kabupaten Malang. Pada tahun 2017, kontribusi lapangan usaha kategori primer sebesar 18,73 persen atau menurun sebesar 1,60 poin dibandingkan tahun 2012. Berkurangnya luas lahan dan pengaruh perubahan iklim yang ekstrim berperan terhadap penurunan produksi pertanian, peternakan dan perikanan. Pertambangan dan bahan galian mengalami kejenuhan eksploitasi dan berkurangnya eksplorasi. Pada kategori primer, penurunan lapangan usaha pertanian serta pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,34 poin dan 0,26 poin.

Berdasarkan gambaran tentang pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2012-2017 tersebut, dapat ditarik kesimpulan: Pertama, Memasuki tahun 2017, tren penurunan kategori primer dalam beberapa tahun terakhir mulai melambat. Kedua, kategori tersier yang diharapkan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malang, ternyata perannya tidak signifikan, Ketiga, pergeseran perekonomian Kabupaten Malang dari kategori primer ke kategori sekunder dan tersier tengah berlangsung. Pergeseran adalah sesuatu yang wajar terjadi pada suatu pembangunan ekonomi. Akan tetapi, pergeseran yang terjadi di Kabupaten Malang tampaknya mulai merubah aset penting, yaitu pertanian. Kondisi demikian, dapat ditinjau dari beralihfungsinya hamparan lahan pertanian menjadi lahan bangunan baik pemukiman, pertokoan, perkantoran, perumahan maupun lainnya. Apabila keadaan ini terus dibiarkan berlangsung tanpa pengendalian secara ketat dan konsisten, maka dikhawatirkan Kabupaten Malang tidak lagi menjadi pemasok pangan utama dibagi daerah sekitar.

Untuk 4 (empat) tahun mendatang, struktur perekonomian Kabupaten Malang diprediksi akan mengalami pola pergeseran yang sama dengan

periode 6 (enam) tahun lalu. Sektor primer diperkirakan tidak lagi mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Malang, penurunan diperkirakan mencapai 17,89 persen pada tahun 2021. Adapun sektor sekunder dan tersier akan meningkat, masing-masing mencapai angka 44,28 persen dan 38,28 persen pada hitungan tahun yang sama. Dengan Demikian, fokus kebijakan pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan perlu tetap mengedepankan sektor pertanian untuk menopang pengembangan sektor industri dan jasa.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir kondisi kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut ini:

Tabel 2.22
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun 2012-2017

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Manusia	-	64,71	65,20	65,59	66,63	67,51	68,47

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Malang. Berdasarkan tabel di bawah, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPM Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi IPM Kabupaten Malang pada tahun 2012 berada pada level 64,71, Tahun 2013 sebesar 65,20, Tahun 2014 sebesar 65,59, Tahun 2015 menjadi 66,63, tahun 2016 sebesar 67,51 dan pada Tahun 2017 menjadi 68,47. Peningkatan IPM ini disebabkan mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

B. Aspek Pendidikan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama empat tahun terakhir dari 2012 sampai dengan 2017.

1. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mempengaruhi nilai IPM. Hingga tahun 2016, HLS mencapai 12.28 tahun, namun pada tahun 2017 sudah mencapai 12.56 tahun, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Malang Tahun 2012-2017

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,87	11,02	11,25	11,98	12,28	12,56

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

2. Rata-rata Lama Sekolah

Selain harapan lama sekolah (HLS), indikator rata-rata lama sekolah (RLS) juga mempengaruhi nilai IPM. Hingga tahun 2017, RLS mencapai 7.17 tahun.

Tabel 2.24
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Malang Tahun 2012-2017

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,51	6,59	6,66	6,73	6,98	7,17

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM). APM ini mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Indikator APM secara lengkap dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Untuk Tingkat SD, SMP
Dan SMA di Kabupaten Malang Tahun 2012-2017

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI							
	* APM	Persen	99,26	96,26	99,32	99,34	99,35	99,40
2.	SMP Sederajat							
	* APM	Persen	79,78	79,80	79,83	80,78	80,61	83,64
3.	SMA Sederajat							
	* APM	Persen	44,46	44,48	47,38	76,61	76,83	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Malang, 2017

Berdasarkan data di atas dapat dilihat baik APM Tahun 2012 sampai dengan 2017 cenderung meningkat. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2012 sebesar 99,26 persen meningkat sebesar 99,49 persen di tahun 2017, dan untuk tingkat SMP Sederajat pada tahun 2012 sebesar 79,78 persen meningkat menjadi sebesar 83,64 persen di tahun 2017, sedangkan untuk tingkat SMA Sederajat sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

4. Angka Partisipasi Kasar

Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator APM ini mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Sedangkan indikator APK mencerminkan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang tertentu dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang tertentu. Indikator APM dan APK secara lengkap dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Untuk Tingkat SD, SMP dan
SMA di Kabupaten Malang Tahun 2012-2017

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI							
	* APK	Persen	113,14	113,19	113,17	113,19	113,19	113,19
2.	SMP Sederajat							
	* APK	Persen	96,36	96,41	96,39	96,39	96,55	96,61
3.	SMA Sederajat							
	* APK	Persen	55,56	55,62	59,34	81,23	81,43	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Malang, 2017

Berdasarkan data di atas dapat dilihat baik APM maupun APK Tahun 2012 sampai dengan 2017 cenderung meningkat. Adapun Angka

Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2012 sebesar 113,14 persen naik sebesar 113,19 persen di tahun 2017, dan untuk tingkat SMP Sederajat pada tahun 2012 sebesar 96,36 persen meningkat sebesar 96,61 persen di tahun 2017, sedangkan untuk tingkat SMA Sederajat sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

5. Capaian Angka Kelulusan

Untuk lebih memperjelas kondisi objektif perkembangan capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang, maka perlu diinformasikan pula tentang hasil kelulusan pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.27
Capaian Angka Kelulusan Per Satuan Tingkat Pendidikan
Tahun 2012-2017

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kelulusan Tingkat SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan Tingkat SMP/MTs	Persen	99,86	99,99	100	100	100	100
Angka Kelulusan Tingkat SMA/MA	Persen	99,90	99,90	99,94	100	100	100
Angka Kelulusan Tingkat SMK	Persen	100	100	100	100	100	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 2017

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan tingkat SD/MI mampu dipertahankan sebesar 100 % dalam 6 (enam) tahun terakhir. Adapun untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 99,86% meningkat sebesar 100% di tahun 2017, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

C. Aspek Kesehatan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir.

1. Angka Harapan Hidup

Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, dicerminkan melalui besaran Angka Harapan Hidup (AHH). Konsep AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun

tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (www.bps.go.id).

AHH digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. AHH diupayakan untuk terus menerus meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat secara sinergis.

Tabel 2.28
Perkembangan Angka Harapan Hidup
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,72	71,76	71,78	71,98	72,05	72,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2017

Berdasarkan data diatas tampak bahwa AHH Kabupaten Malang secara rerata lebih tinggi dari Kabupaten lain yang ada di Jawa Timur bagian Selatan dan lebih tinggi dari rerata Jawa Timur yaitu sebesar 70,80 pada tahun 2017.

2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malang per 1000 kelahiran hidup Tahun 2012 sebesar 4,88 turun menjadi 4,42 pada tahun 2013. Namun, angka tersebut naik pada Tahun 2014 menjadi 6,09 dan pada tahun 2015 turun menjadi 5,95 hingga tahun 2016 dan 2017 turun masing-masing menjadi 4,52 dan 1,60. Sedangkan Angka Kematian Anak Balita per 1000 kelahiran hidup Tahun 2012 sebesar 0,10 dan Tahun 2013 naik menjadi 0,21 hingga Tahun 2014 menjadi 0,43 bertahan hingga tahun 2016 dan turun menjadi 0 pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih rendah khususnya tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil di dusun-dusun

terpencil, penyakit degeneratif dan penyakit menular serta adanya daerah-daerah yang masih sulit dijangkau pelayanan. Disamping itu, peningkatan angka kematian bayi juga disebabkan oleh kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga perlu upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Tabel 2.29
Perkembangan Angka Kematian Bayi Dan Angka Kematian Anak Balita Di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	4,88	4,42	6,09	5,95	4,52	1,60
Angka Kematian Anak Balita (AKAB)	Per 1000 KH	0,10	0,21	0,43	0,43	0,43	0

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Malang, 2017

3. Angka Kematian Ibu

Untuk angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2012 sebesar 61,29 dan meningkat cukup signifikan di Tahun 2013 menjadi sebesar 89,31 dan Tahun 2014 turun menjadi 62,28 serta pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 72,22 dan pada Tahun 2016 turun menjadi 52,75 hingga tahun 2017 menjadi 45,32. Dalam hal pengurangan angka kematian ibu Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan melalui pengembangan Pondok Kesehatan Desa sebagai pusat penyuluhan dan konsultasi kesehatan termasuk penyuluhan gizi yang program terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	61,29	89,31	62,28	72,22	52,75	46,48

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Malang, 2017

D. Ketenagakerjaan

Potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Walaupun demikian, pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi senantiasa diikuti dengan upaya-upaya perluasan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan dampaknya. Perluasan lapangan kerja juga belum memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk berperan pada sektor produktif. Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari pekerjaan) sedangkan TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan TPAK dan TPT di kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

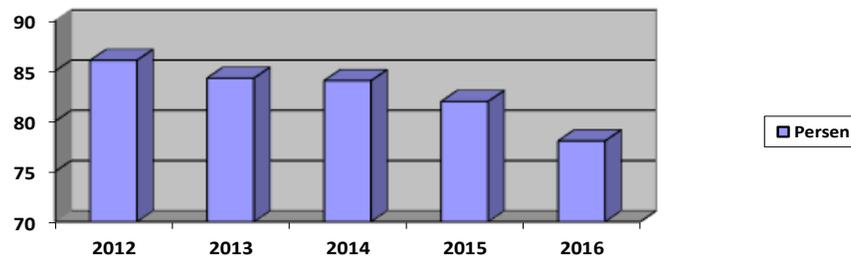
Tabel 2.31
Tabel Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	84.3	84.04	81.98	78.05	78.05

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Malang, 2017 (diolah)

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang berkerja dengan angkatan kerja, selama tahun 2011-2016 rasio penduduk yang bekerja menunjukkan tren menurun disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam penetapan cukai rokok yang menyebabkan terjadi pemutusan hubungan kerja serta diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 260 tahun 2015 tentang dihentikannya sementara penempatan tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang berdampak pada penempatan tenaga kerja yang mana tujuan ke Timur Tengah merupakan primadona arah tujuan pencari kerja masyarakat Kabupaten Malang.

Gambar 2.11
Grafik Rasio Penduduk Bekerja
Kabupaten Malang Tahun 2012-2016



2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Budaya dalam suatu bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa sesuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa yang tidak terbatas pada ragam keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa.

Pengembangan budaya di Kabupaten Malang diarahkan pada pengembangan dan pembinaan budaya daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur pancasila.

Kebijakan pengarusutamaan kebudayaan dan olahraga menjadi strategi dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi di bidang kebudayaan dan olahraga.

Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya menyediakan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya bidang seni budaya dan olahraga antara lain fasilitas seni budaya dan olahraga bagi masyarakat.

A. Kebudayaan

Pengembangan seni dan budaya bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, peningkatan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil pembinaan kebudayaan dapat dilihat berkembangnya seni budaya di masyarakat dari upaya pemerintah untuk membangun ruang berekspresi bagi masyarakat pecinta budaya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Malang terdapat 18 tempat ruang berekspresi seni budaya seperti pada table berikut:

Tabel 2.32
Ruang Berekspresi Seni dan Budaya di Kabupaten Malang

No	Nama Tempat
1	Panggung Terbuka di Taman Wisata Air Wendit
2	Pendopo Museum Singhasari
3	Padepokan Asmoro Bangun
4	Padepokan Mangun Darmo
5	Padepokan Mudra Ganesha
6	Padepokan Cokro Buwono
7	Sanggar Kartika (Open Stage Diknas)
8	Stadion Kanjuruhan (Open Stage)
9	Pelataran Candi Singosari
10	Pelataran Candi Sumberawan
11	Pelataran Candi Jago
12	Pelataran Candi Kidal
13	Perkebunan The Wonosari (Open Stage)
14	Karangkates (Open Stage)
15	Selorejo (Open Stage)
16	Rest Area Karangploso (Open Stage)
17	Rest Area GubugKlakah (Open Stage)
18	Taman Rekreasi Sengkaling (Open Stage)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

B. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Malang. Perkembangan jumlah sarana gedung olahraga dapat dilihat dalam Tabel 2.32 di bawah ini:

Tabel 2.33
Data Sarana Fasilitas Olah Raga di Kabupaten Malang
Tahun 2016

NO	KECAMATAN	FASILITAS OLAH RAGA										
		STADION	SB	BV	BB	TENIS	BL. TANGKIS	FUTSAL	GOR	AULA	KLM RENAN G	JML
1	PUJON	0	14	10	2	0	5	2	0	15	2	50
2	NGANTANG	0	4	13	3	1	2	1	0	3	1	28
3	KASEMBON	0	4	2	1	1	2	1	0	3	0	14
4	SINGOSARI	0	23	37	22	6	18	6	0	29	7	148
5	LAWANG	1	6	3	2	1	2	2	0	4	0	21
6	KARANG PLOSO	0	8	9	1	1	5	3	1	4	10	42

NO	KECAMATAN	FASILITAS OLAH RAGA										
		STADION	SB	BV	BB	TENIS	BL. TANGKIS	FUTSAL	GOR	AULA	KLM RENAN G	JML
7	DAU	1	6	7	1	2	4	4	0	2	2	29
8	TUMPANG	1	5	4	1	1	1	3	0	4	0	20
9	PAKIS	0	10	5	4	0	1	2	0	3	1	26
10	JABUNG	0	7	4	1	0	1	1	0	2	0	16
11	PONCOKUSUMO	0	12	5	0	0	0	1	0	0	0	18
12	BULULAWANG	1	11	15	2	1	10	1	2	16	1	60
13	WAJAK	1	6	2	1	0	1	1	0	4	0	16
14	TAJINAN	0	11	0	0	0	6	1	0	12	0	30
15	GONDANGLEGI	1	14	2	3	0	4	2	0	0	1	27
16	PAGELARAN	0	9	8	2	0	7	1	0	2	0	29
17	TUREN	2	16	25	7	1	12	3	1	12	5	84
18	DAMPIT	1	25	42	4	0	2	1	3	11	4	93
19	TIRTOYUDO	1	7	2	0	0	4	1	0	0	0	15
20	AMPELGADING	0	5	17	0	0	1	1	0	0	0	24
21	SBRMANJING WETAN	0	6	2	0	0	1	1	0	1	0	11
22	KEPANJEN	1	8	5	4	2	5	4	0	1	3	33
23	PAKISAJI	2	9	3	0	1	9	0	0	16	2	42
24	WAGIR	0	14	11	0	0	9	2	1	12	2	51
25	NGAJUM	0	7	9	1	0	1	0	0	9	0	27
26	WONOSARI	0	12	15	0	0	8	3	0	6	1	45
27	SUMBER PUCUNG	1	10	3	2	0	1	1	0	2	0	20
28	KROMENGAN	0	7	8	2	0	5	1	0	8	1	32
29	PAGAK	0	5	3	2	0	1	1	0	2	0	14
30	KALIPARE	0	12	33	0	0	5	0	0	2	1	53
31	DONOMULYO	1	16	20	9	0	12	0	0	2	2	62
32	GEDANGAN	0	11	12	0	0	2	0	0	1	0	26
33	BANTUR	0	10	12	2	2	6	0	0	17	1	50
	JUMLAH	15	330	348	79	20	153	51	8	205	47	1256

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2017

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama dalam mempersiapkan terbentuknya generasi bangsa yang demokratis, terampil, cerdas, kreatif, berakhlak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menghadapi tantangan global. Pemerintahan daerah sebagai *supporting system*, tentunya memiliki andil besar dalam penerapan maupun pelaksanaan cita-cita dan hak rakyat. Pendidikan sebagai saluran perubahan masyarakat harusnya dijadikan prioritas. Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan pendidikan sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu dilaksanakan pemerintah dengan baik guna mendukung pelaksanaan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-undang Dasar. Berikut tabel perkembangan jumlah murid, jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah kelas untuk tingkat SD, SMP dan SMA.

Tabel 2.34
Perkembangan Jumlah Murid, Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan
Jumlah Kelas untuk Tingkat SD, SMP dan SMA
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
JUMLAH MURID							
1	TK/RA/BA/TA	Orang	62.899	66.940	54.081	65.942	90.691
	SD	Orang	203.337	194.036	196.544	172.991	182.638
	SDLB	Orang	309	240	507	496	-
	SMP	Orang	72.272	76.968	73.619	80.068	79.877
	SMP Unggulan (RSBI)	Orang	1.680	-	-	-	-
	SMP Terbuka	Orang	555	617	590	601	-
	SMPLB	Orang	108	92	90	88	-
	SMA	Orang	14.976	18.561	19.426	20.701	20.669
	SMA Unggulan (RSBI)	Orang	2.964	-	-	-	-
	SMA Terbuka	Orang	101	55	200	221	-
	SMLB	Orang	63	21	30	32	-
	SMK	Orang	31.450	35.653	42.721	38.215	39.321
	SMK Unggulan (RSBI)	Orang	3.539	-	-	-	-
JUMLAH SEKOLAH							
2	TK/RA/BA/TA	Unit	1.329	1.324	1.303	1.409	1.856
	SD	Unit	1.171	1.178	1.174	1.171	1.174
	SDLB	Unit	9	9	9	9	-
	SMP	Unit	317	323	311	319	323
	SMP Unggulan (RSBI)	Unit	2	-	-	-	-
	SMP Terbuka	Unit	6	6	6	6	-
	SMPLB	Unit	7	8	8	8	-
	SMA	Unit	62	64	64	64	60
	SMA Unggulan (RSBI)	Unit	3	-	-	-	-
	SMA Terbuka	Unit	1	1	1	1	-
	SMLB	Unit	3	2	2	2	-
	SMK	Unit	99	114	114	114	129
	SMK Unggulan (RSBI)	Unit	2	-	-	-	-
JUMLAH GURU							
3	TK/RA/BA/TA	Orang	4.203	3.342	2.872	3.873	-
	SD	Orang	11.571	11.732	11.522	12.186	11.446
	SDLB	Orang	26	30	32	32	75
	SMP	Orang	5.790	6.154	5.984	6.334	4.340
	SMP Unggulan (RSBI)	Orang	224	-	-	-	-
	SMP Terbuka	Orang	102	102	103	103	-
	SMPLB	Orang	42	13	-	-	-
	SMA	Orang	1.534	1.916	1.752	1.752	1.430
	SMA Unggulan (RSBI)	Orang	224	-	-	-	-
	SMA Terbuka	Orang	25	30	30	30	-
	SMLB	Orang	15	9	9	9	8
	SMK	Orang	2.352	2.304	3.177	3.177	2.378
	SMK Unggulan (RSBI)	Orang	260	-	-	-	-
JUMLAH RUANG KELAS							
4	TK/RA/BA/TA	Kelas	2.552	2.554	2.580	3.164	3.018
	SD	Kelas	7.839	7.843	7.856	7.886	7.819
	SDLB	Kelas	69	69	69	69	39
	SMP	Kelas	2.591	2.620	2.665	2.675	2.743
	SMP Unggulan (RSBI)	Kelas	51	-	-	-	-
	- SMP Terbuka	Kelas	18	30	30	30	-
	- SMPLB	Kelas	32	30	30	30	-
	- SMA	Kelas	518	742	964	974	768
	SMA Unggulan (RSBI)	Kelas	92	-	-	-	-
	SMA Terbuka	Kelas	3	3	3	3	-
	SMLB	Kelas	16	10	11	12	-
	SMK	Kelas	1.070	1.300	1.392	1.395	1.451
	SMK Unggulan (RSBI)	Kelas	101	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Selain Perkembangan jumlah murid, jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah kelas untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan atau putus sekolah, dapat dilihat

dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang sudah tidak mengenyam pendidikan formal lagi dan lebih dikenal dengan Angka Putus Sekolah (APs). APs Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.35
Perkembangan Angka Putus Sekolah dibandingkan dengan
Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016

URAIN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
APs SD / MI	Persen	0,13	0,12	0,12	0,09	0,01
APs SMP / MTs	Persen	0,56	0,54	0,85	0,44	0,07
APs SMA/MA/SMK	Persen	0,94	0,85	0,85	0,11	0,14

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Sedangkan ditinjau dari ketersediaan infrastruktur sekolah terutama dari banyaknya gedung sekolah terlihat bahwa rasionya masih rendah. hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah dari waktu ke waktu, sedangkan pertumbuhan gedung sekolah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk usia sekolah.

Tabel 2.36
Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2012-2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI						
1	Jumlah gedung sekolah	1.180	1.201	1.197	1.482	1.235
2	Jumlah penddk usia 7 - 12 th	279.365	273.733	270.273	229.793	254.218
3	Rasio (1:...	42	44	44	64	48
SMP / MTs						
1	Jumlah gedung sekolah	332	337	311	480	1.052
2	Juml penddk usia 13 - 15 th	136.974	139.311	142.843	113.183	122.751
3	Rasio (1:..	24	24	22	43	83
SMA/MA/SMK						
1	Jumlah gedung sekolah	169	183	178	237	632
2	Jumlah penddk usia 16 -18 th	140.166	140.757	135.445	144.075	123.840
3	Rasio (1:..	12	13	13	16	51

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Sedangkan untuk perbandingan dan perkembangan jumlah murid dan guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Per Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012-2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016
I SD/MI						
1	Jumlah Guru	11.597	11.762	11.641	14.943	9.428
2	Jumlah Murid	203.646	194.276	197.051	234.751	183.068
3	Rasio	0,057	0,060	0,059	0,063	0,051
II SMP / MTs						
1	Jumlah Guru	6.158	6.269	5.984	7.904	4.340
2	Jumlah Murid	74.615	77.677	73.619	110.769	81.540
3	Rasio	0,082	0,08	0,081	0,071	0,053
III SMA/MA/MK						
1	Jumlah Guru	4.410	4.259	4.929	5.680	3.808
2	Jumlah Murid	53.093	56.015	62.147	65.646	67.123
3	Rasio	0.083	0.076	0.079	0,086	0,056

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

B. Kesehatan

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Tujuannya agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bidang Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan dan menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Malang.

Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan mutu akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Malang sangat tergantung dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Sebagai komitmen Kabupaten Malang terhadap sektor kesehatan masyarakat maka di wilayah Kabupaten Malang terdapat beberapa fasilitas sarana kesehatan seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Perkembangan Sarana Kesehatan Di Kabupaten Malang
Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	Ket
1	RSU Daerah Pemerintah	Buah	2	2	2	2	2	RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang
2	Rumah Sakit TNI	Buah	2	2	2	2	2	RSAU Pakis dan RS Ban Brawijaya
3	Rumah Sakit Departemen Lain	Buah	1	1	1	1	1	RSJ Lawang
4	Rumah Sakit Khusus Swasta							
	RS Bersalin	Buah	3	1	1	1	1	Permata Hati Dampit
	RS Bedah	Buah	1	1	1	1	1	Hasta Husada Kepanjen
5	Rumah Sakit Umum Swasta	Buah	12	16	16	16	16	
6	Klinik Rawat Inap	Buah	32	32	44	44	44	
7	Klinik Rawat Jalan	Buah	11	11	12	12	12	
8	PUSKESMAS	Buah	39	39	39	39	39	
9	PUSKESMAS Pembantu	Buah	93	93	93	93	93	
10	PUSKESMAS Keliling	Buah	55	72	72	72	72	
11	Puskesmas Ideal	Buah	16	18	18	18	18	
12	POSYANDU	Buah	2.783	2.799	2.816	2.828	2.828	
13	PONKESDES	Buah	390	390	390	390	390	
14	Desa Siaga Aktif	Desa	384	390	390	390	390	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Malang, 2017

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiapkan 93 Puskesmas Pembantu, 72 Puskesmas Keliling, 17 ambulans, serta melakukan penguatan terhadap 2.828 Posyandu dan peningkatan status Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga.

Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan berupa pengembangan Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas

Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki spesifikasi pelayanan dan Program Sutera Emas (Surveillance Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat), program unggulan Home care, Perawan Siter (Penanganan dan Pemberdayaan Masyarakat Rawan Gizi Terpadu), EMAS (Expanding maternal and Neonatal Survival), Program Keluarga Sehat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pula dengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen dan Lawang. Fasilitas yang disediakan berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan tindakan medik.

Disamping itu akan dikembangkan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Daerah, pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), pengembangan UPTD pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, juga akan dilakukan standarisasi sarana kesehatan (akreditasi dan ISO), Pengembangan tata kelola Puskesmas BLUD.

Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar di Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan. Pemerintah Kabupaten Malang juga terus meningkatkan jumlah tenaga medis dan paramedis yang ada.

Tabel 2.39
Perkembangan Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Malang
Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Dokter Spesialis	Orang	239	225	225	298	285
2	Jumlah Dokter Umum	Orang	227	82	161	234	246
3	Jumlah Dokter Gigi	Orang	71	20	28	86	84
4	Jumlah Bidan/Perawat	Orang	2.480	2.611	3.038	2.906	3.151
5	Jumlah Sanitarian	Orang	57	14	18	42	33
6	Jumlah Paramedis Lain		409	-	1.921	445	381
	Apoteker/Ass. Apoteker	Orang	173	81	114	175	220
	Gizi (D-IV/D-III/SPAG)	Orang	88	36	57	91	66
	Analisis Kesehatan (D-III/SMAK)	Orang	87	36	73	129	115

	Kesehatan Masyarakat (S1/DIII)	Orang	21	5	30	17	24
	Perawat Gigi	Orang	40	40	40	33	37
7	Jumlah Tenaga Non Medis/Paramedis	Orang	1.615	1.627	1.650	1.127	1.030

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Menurunnya angka kesakitan/incident rate (IR) dan angka kematian (CFR) tahun 2012 - 2016 dari target, antara lain:

a. Kasus DBD

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian	IR	CFR (%)
2012	173	7	4,06	6,95
2013	1.165	14	46,49	1,20
2014	834	4	33,03	0,48
2015	1.331	11	52,31	0,75
2016	1.268	13	51,50	1,03

Jumlah penderita Demam Berdarah di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun cenderung fuktuatif yaitu tahun 2012 kasus DBD turun sebesar 173 kasus (6,96 per 100.000 penduduk), penderita meninggal sebanyak 7 orang (CFR : 0,28%) yang tersebar di 6 puskesmas (6 kecamatan), tahun 2013 kasus DBD meningkat cukup tinggi sebesar 1.165 kasus (46,49 per 100.000 penduduk), penderita meninggal sebanyak 14 orang (CFR : 1,2%) yang tersebar di 11 puskesmas (10 kecamatan), tahun 2014 kasus DBD terjadi penurunan sebesar 834 kasus (33,03 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari 379 penderita laki-laki dan 455 penderita perempuan, penderita meninggal sebanyak 4 orang (CFR : 0,48%) yang tersebar di 4 puskesmas (4 kecamatan) dan tahun 2015 kasus DBD terjadi peningkatan sebesar 1.331 kasus (52,31 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari 673 penderita laki-laki dan 658 penderita perempuan, penderita meninggal sebanyak 10 orang (CFR : 0,75%) yang tersebar di 7 puskesmas (7 kecamatan). Sedangkan tahun 2016 kasus DBD terjadi penurunan sebesar 1.268 kasus (49,52 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari 648 penderita laki-laki dan 621 penderita perempuan, penderita meninggal sebanyak 13 orang (CFR : 1,03%) yang tersebar di 10 puskesmas (10 kecamatan). Angka ini lebih rendah dari target nasional yaitu 2 per 100.000 penduduk.

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian	IR	CFR (%)
2012	1.530	59	61,51	2,40
2013	1.634	0	65,20	0
2014	1.801	42	71,33	1,7
2015	1.915	44	75,27	1,73
2016	2.029	50	79,24	1,95

b. Kasus TB

Kasus Tb penemuan TB dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan pada jumlah kematian.

Tabel 2.40

Keterkaitan angka kesembuhan (Cure Rate) dan angka keberhasilan pengobatan (Succes Rate) (Kasus TB)

No	Uraian	Target	Pencapaian (%)				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka kesembuhan (th 2013)	> 5%	85,1	83,39	75,52	75,37	78,82
2	Angka keberhasilan pengobatan (px th. 2013)	> 5%	90,84	91,65	88,74	87,21	84,59

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa angka kesembuhan dan angka keberhasilan kasus TB berada diatas target.

Indikator kesehatan di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

a. Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

b. AKI (Angka Kematian Ibu)

Kematian ibu menurut SKRT tahun 1992-1994 cenderung menurun dari 425 menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan berdasar data SDKI 2002 – 2003, Angka Kematian Ibu atau Maternal

Mortality Ratio (IMR) di Indonesia adalah sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut laporan puskesmas di Kabupaten Malang tahun 2001–2010 jumlah kematian ibu berkisar 19–32 ibu, tahun 2011 turun menjadi 26 ibu (63,39 per 100.000 kelahiran hidup), tahun 2012 turun menjadi 25 ibu (61,29 per 100.000 kelahiran hidup), tahun 2013 turun menjadi 39 ibu (89,31 per 100.000 kelahiran hidup), tahun 2014 turun menjadi 27 ibu (62,28 per 100.000 kelahiran hidup) dan tahun 2015 meningkat menjadi 30 ibu (72,22 per 100.000 kelahiran hidup). Sedangkan tahun 2016 jumlah kematian ibu turun menjadi 21 ibu (52,78 per 100.000 kelahiran hidup) yang terdiri dari ibu hamil sebesar 3 ibu (23,33%), ibu bersalin sebesar 5 ibu (20%) dan ibu nifas sebesar 13 ibu (56,67%). Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan di Jawa Timur sebesar 97,40 per 100.000 kelahiran hidup) dan hasil SKRT

c. AKB (Angka Kematian Bayi)

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Malang berdasarkan laporan data kematian dari puskesmas tahun 2011 – 2013 terjadi penurunan yaitu dari 219 bayi (5,34 per 1.000 kelahiran hidup) tahun 2011, tahun 2012 turun sebesar 199 bayi (4,88 per 1.000 kelahiran hidup), tahun 2013 turun sebesar 193 bayi (4,42 per 1.000 kelahiran hidup). Sedangkan tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah kematian sebesar 264 bayi (6,09 per 1.000 kelahiran hidup), tahun 2015 turun sebesar 246 bayi (5,95 per 1.000 kelahiran hidup) dan tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kematian bayi sebesar 180 bayi (4,52 per 1.000 kelahiran hidup).

d. Balita Gizi Buruk

Dari hasil penimbangan balita tahun 2012 jumlah balita BGM/ balita gizi buruk sebanyak 1.221 (0,81%), tahun 2013 jumlah balita BGM/ balita gizi buruk turun sebanyak 1.071(0,73%), tahun 2014 jumlah balita BGM/ balita gizi buruk turun sebanyak 1.017(0,68%) dan tahun 2015 jumlah balita BGM sebanyak 884 balita (0,59%), dan balita gizi buruk sebanyak 129 (0,086%). Sedangkan tahun 2016 jumlah balita BGM turun sebanyak 858 balita (0,68%).

e. Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Malang tahun 2012 sebanyak 304 balita (100%) mendapat perawatan, tahun 2013 sebanyak 243 balita (100%) mendapat perawatan, tahun 2014 sebanyak 145 balita gizi buruk ditemukan dan sebesar 145 balita (100%) mendapat perawatan, yang terdiri dari 73 balita laki-laki (50,34%) dan 72 balita perempuan (49,66%) dan tahun 2015 sebanyak 129 balita gizi buruk ditemukan dan sebesar 129 balita (100%) mendapat perawatan, yang terdiri dari 63 balita laki-laki (48,84%) dan 66 balita perempuan (51,16%). Sedangkan tahun 2016 sebanyak 125 balita gizi buruk ditemukan dan sebesar 125 balita (100%) mendapat perawatan, yang terdiri dari 66 balita laki-laki (52,80%) dan 59 balita perempuan (47,20%).

f. Persalinan Tenaga Kesehatan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2012 sebesar 93,08% (40.604 dari 43.625 sasaran ibu bersalin), tahun 2013 meningkat sebesar 99,99% (43.321 dari 43.324 sasaran ibu bersalin), tahun 2014 turun sebesar 99,85% (42.999 dari 43.064 sasaran ibu bersalin), tahun 2015 meningkat sebesar 100,53% (41.545 dari 41.324 sasaran ibu bersalin) dan tahun 2016 menurun sebesar 97,17% (39,829 dari 40.987 sasaran ibu bersalin). Cakupan tertinggi di 8 puskesmas yaitu Puskesmas Jabung, Ardimulyo, Kasembon, Sumbermanjing Kulon, Bantur, Gondanglegi, Wajak dan Puskesmas Sitiarjo sebesar 100%, sedangkan cakupan terendah di Puskesmas Sumberpucung sebesar 83,18%. Cakupan Kabupaten Malang ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan target Nasional yaitu 90%.

g. Cakupan Rumah Tangga Sehat

Tahun 2012 dari 183.673 rumah yang diperiksa, meningkat sebanyak 129.575 rumah (70,55%) yang memenuhi syarat (rumah sehat), tahun 2013 dari 209.542 rumah yang diperiksa, meningkat sebanyak 146.693 rumah (70,01%) yang memenuhi syarat (rumah sehat), tahun 2014 dari 110.326 rumah yang dibina, sebesar 58.843 rumah (53,34%) memenuhi syarat dan

jumlah rumah sehat sebanyak 211.029 rumah (30,57%) dari 690.281 rumah yang ada dan tahun 2015 dari 130.869 rumah yang dibina, sebesar 73.026 rumah (55,80%) memenuhi syarat dan jumlah rumah sehat sebanyak 288.356 rumah (45,71%) dari 690.281 rumah yang ada. Sedangkan tahun 2016 dari 258.757 rumah yang belum memenuhi syarat sebesar 109.554 rumah (42,34%) yang dibina, sebesar 65.764 rumah (60%) memenuhi syarat dan jumlah rumah sehat sebanyak 476.442 rumah (71,17%) dari 690.281 rumah yang ada. Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan target nasional yaitu 80% rumah memenuhi syarat kesehatan. Cakupan rumah sehat tertinggi di Puskesmas Donomulyo sebesar 95,62%, dan cakupan terendah di Puskesmas Lawang (0,37%) dan sebanyak 7 Puskesmas tidak melapor.

h. Cakupan Air Bersih

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Sumber Air Bersih yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dapat dijabarkan sebagai berikut : tahun 2012 pemeriksaan Sumber Air Bersih dari 702.677 KK yang ada, yang diperiksa sebesar 183.673 (26,14%), tahun 2013 pemeriksaan Sumber Air Bersih dari 702.677 KK yang ada, yang diperiksa sebesar 175.802 (25,02%), tahun 2014 jumlah penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebesar 771.556 penduduk (30,56%) dari 2.524.863 penduduk dan tahun 2015 jumlah penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebesar 1.300.583 penduduk (56,05%) dari 2.544.315 penduduk. Sedangkan tahun 2016 jumlah penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebesar 1.969.750 penduduk (75,77%) dari 2.599.773 penduduk yang ada di Kabupaten Malang

i. Cakupan Pengguna Jamban Keluarga

Penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak (jamban sehat) di Kabupaten Malang tahun 2012 adalah 91,15%, tahun 2013 turun menjadi 86,53%, tahun 2014 turun menjadi 21,90%, dan tahun 2015 turun menjadi 36,57% dan tahun 2016 sebesar 1.969.750 penduduk (75,77%) dari 2.560.675 penduduk yang ada.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Malang adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- (1) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Malang;
- (2) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 2.41
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang jalan kondisi baik	Km	1.385,70	1.465,67	1.465,67	1.586,49	1.056,66
Panjang jalan seluruhnya	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	83,03	87,82	87,82	95,08	63,32

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2017

Tabel 2.42
Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)
Di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang trotoar dan drainase yang dibangun	m	49.500	48.000	46.500	34.000	34.000
Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	1.668.76	1.668.76	1.668.76	1.668.76	1.668.76
Persentase panjang trotoar dan drainase yang dibangun	%	2,97	2,88	2,79	2,04	2,04

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2017

Di wilayah Kabupaten Malang, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan walaupun skalanya masih kecil. Hal ini disebabkan karena pola penanganan sampah di Kabupaten Malang bertumpu pada kawasan perkotaan khususnya Ibu Kota Kecamatan, sedangkan sebagian besar lainnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat baik melalui pengelolaan TPS 3R maupun Bank sampah. Pada kawasan-kawasan perdesaan, penanganan sampah dilakukan secara konvensional yaitu melalui sistem gali urug terkendali. Hal ini disebabkan karena masih tersedianya lahan untuk pembuangan sampah dengan model galian/juglangan.

Tabel 2.43
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
Di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah daya tampung TPS	M ³	6.364	6.540	6.716	6.986	6.986
Jumlah penduduk	M ³	3.043.613	3.077.960	3.092.714	2.581.671	2.581.671
Rasio TPS	%	2.09	0.21	2.17	2.71	2.71

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang (diolah)

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Malang. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan potensi RTH wilayah perkotaan Kabupaten Malang dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per Satuan Wilayah
di Kabupaten Malang Tahun 2011-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Luas ruang terbuka hijau	Ha	4.133.23	4.222.79	4.286.52	4.296.04	4.296.04
Luas wilayah	Ha	94.422.78	94.422.78	64.422.78	94.422.78	94.422.78
Rasio ruang terbuka hijau	%	4.34	4.47	4.54	4.55	4.55

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang (diolah)

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Tabel 2.45
Luas Irigasi Kabupaten Malang Dalam Kondisi Baik

No	Jaringan irigasi	Luas irigasi				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kondisi baik (ha)	27.135,35	31.775,71	37.928,93	38.294,85	32.232,31
2	Luas total (ha)	43.640,00	45.885,50	46.050,50	46.033,00	46.033,00
3	Persentase	62,18	69,25	75,85	83,19	70,02

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2017

Sesuai kewenangannya, Dinas Pengairan tidak mempunyai data luas lahan budidaya pertanian, yang ada adalah data luas baku sawah yaitu luas sawah yang dilayani oleh jaringan irigasi, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.46
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Malang

No	Jaringan irigasi	Panjang Jaringan				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jaringan primer (m)	183.766,00	350.218,80	350.218,80	350.218,80	350.218,80
2	Jaringan sekunder (m)	322.640,00	537.532,50	537.532,50	537.532,50	537.532,50
3	Jaringan tersier (m)	607.099,00	801.351,00	801.351,00	801.351,00	801.351,00
4	Luas baku sawah (ha)	43.640,00	45.885,50	46.050,50	46.033,00	46.033,00
5	Rasio (1+2+3) / (4)	25,52	36,81	36,68	36,69	36,69

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2017

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Malang relatif stagnan, yang menandakan bahwa kebutuhan rumah tangga akan penggunaan air bersih di Kabupaten Malang mengalami peningkatan dan sudah mencapai 12.26% di tahun 2016.

Penduduk Kabupaten Malang yang memiliki akses air bersih melalui jaringan perpipaan pada Tahun 2016 adalah 12,26 %, mengalami peningkatan sekitar 1,74 % dibandingkan tahun 2012 (sebesar 10,42 %), dapat dilihat pada tabel 2.42. Data tersebut belum mencakup data rumah tangga pengguna air bersih melalui bangunan bukan jaringan perpipaan terlindungi seperti sumur gali, sumur pompa tangan, maupun pengambilan langsung dari sumber (Data ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang). Adapun yang memerlukan penanganan prioritas karena merupakan daerah rawan air adalah Desa Sidoluhur dan Srigading di Kecamatan Lawang, Desa Harjokuncaran, Ringinsari, Sumbermanjingwetan, Druju, Klepu, Kedungbanteng dan Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan, Desa Pagak dan Desa Sumberejo di Kecamatan Pagak, Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo, Desa Gedangan, Tumpakrejo, Sidodadi, Gajahrejo di Kecamatan Gedangan, Desa Wonokerto Bantur, Desa Jabung Kecamatan Jabung (Dusun Kunci).

Tabel 2.47
Perkembangan Penyediaan Air Bersih
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pelanggan (Rumah tangga)	SR	72.324	79.663	83.312	88.376	88.376
Jumlah Rumah Tangga terlayani	RT	781.703	877.685	902.800	720.922	720.922
Rumah Tangga pengguna air bersih	%	9.25	9.08	9.23	12.26	12.26

Sumber : PDAM Kabupaten Malang, 2017

Di daerah tersebut air sulit didapat karena potensi air baku sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakatnya dan potensi air bawah tanahnya hanya berkisar 0,5-2,5 ltr perdetik dengan kedalaman 100 - 130 m (kecuali Desa Sidoluhur Kec. Lawang) sehingga diperlukan investasi yang sangat besar untuk membangun sistem penyediaan air minum serta mencari alternatif upaya seperti membuat penampungan air hujan, depo air minum yang diisi secara berkala ataupun pengolahan air sungai menjadi air bersih dengan membangun bangunan pasir lambat.

Dalam hal perkembangan cakupan rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Malang mengalami peningkatan tiap tahunnya, yang menandakan bahwa kebutuhan energi listrik rumah tangga Kabupaten Malang semakin meningkat. Hal ini dapat di lihat pada tabel 2.48 berikut:

Tabel 2.48
Perkembangan Pengguna Listrik
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pengguna listrik (Rumah tangga)	SR	669,565	736,789	794,739	843,968	843,968
Jumlah Rumah Tangga terlayani	RT	781.703	877.685	902.800	720.922	720.922
Rumah Tangga pengguna listrik	%	85.65	83.95	88.03	117.07	117.07

Sumber : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Malang

Program pengembangan perumahan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan, sarana prasarana serta pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin, antara lain meliputi:

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin;
- (2) Pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan rumah sederhana sehat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk miskin diperkotaan;
- (3) Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan permukiman yang layak, aman, sehat, dan renovasi rumah tidak layak huni;
- (4) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dikawasan kumuh, desa tradisional, dan desa nelayan;
- (5) Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;

- (6) Fasilitas dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana akibat bencana alam.

Tabel 2.49
Rumah Layak Huni
di Kabupaten Malang Tahun 2012 - 2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah rumah layak huni	Buah	589.584	600.897	612.482	678.003	678.003
Jumlah penduduk	Orang	3.043.613	3.077.960	3.092.714	2.581.671	2.581.671
Rasio rumah layak huni	%	0,238	0,240	0,242	0.26	0.26

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang (diolah)

Pada tabel 2.49 di atas, terkait dengan capaian SPM urusan perumahan, bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Malang di tahun 2016 sudah mencapai 678.003 unit dengan ketersediaan rasio rumah layak huni untuk masyarakat sudah 0,26%.

Tabel 2.50
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah rumah tangga bersanitasi	SR	414.051	411.151	454.641	488.251	488.251
Jumlah Rumah Tangga	RT	781.703	877.685	902.800	720.922	720.922
Presentase rumah tangga bersanitasi	%	78.5	78.34	82.4	85.36	85.36

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang (diolah)

Penduduk Kabupaten Malang yang memiliki akses sanitasi pada Tahun 2016 adalah 85,36%, mengalami peningkatan sekitar 9,36% dibandingkan tahun 2012 (sebesar 76%). Adapun yang memerlukan penanganan prioritas mendesak kawasan perkotaan adalah sebagai dari Kecamatan Pakis , sebagian dari Kecamatan Lawang, sebagian dari Kecamatan Turen, sebagian dari Kecamatan Tumpang, sebagian kecil dari Kecamatan Singosari. Kawasan perdesaan adalah Kecamatan Ngantang, sebagian dari Kecamatan Wonosari, Sebagian dari Kecamatan Ngajum, sebagian dari Kecamatan Gondanglegi, sebagian dari Kecamatan Tajinan dan Jabung. (peta terlampir) narasumber Deta Rencana Induk Sistem pengolahan Air Limbah Kabupaten Malang disamping itu masih perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus kampanye PHBS supaya masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengola sanitasi di lingkungan tempat tinggalnya sehingga mendukung naiknya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang. (Peta tahapan Pengentasan BABS terlampir).

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, khususnya dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilakukan melalui 1 kegiatan pembinaan setiap tahunnya. Kerja sama antara pemeluk agama dalam pembangunan daerah yang saat ini telah berjalan, perlu untuk lebih ditingkatkan terutama melalui forum rutin diskusi lintas agama.

Tabel 2.51

Data Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS Dan OKP

NO	URAIAN	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sosialisasi peningkatan rasa solidaritas di kalangan masyarakat	Kali	2	2	1	1	1
2	Sosialisasi peningkatan kerukunan antar umat beragama	Kali	2	2	3	3	1

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang, 2017

Terjadi penurunan jumlah kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 dikarenakan dalam tahun 2013 bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan pada tahun 2014 diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada Serentak pada tahun 2015 sehingga prioritas program dan kegiatan difokuskan pada Bidang Politik Dalam Negeri dengan kegiatan yang berkaitan dan mendukung penyelenggaraan Pemilu.

Tabel 2.52

Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

NO	URAIAN	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Penyuluhan politik kepada masyarakat	Kali	2	3	4	16	5
2	Pembinaan administrasi bantuan parpol	Kali	3	3	2	4	3

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang, 2017

Berdasarkan data pada Tabel Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan mengenai perkembangan jumlah personil satuan polisi pamong praja dan limnas, jumlah kegiatan penegakan PERDA (tipiring dan pembongkaran), jumlah kegiatan penerbitan pelanggaran PERDA, jumlah personil Satlinmas se-Kabupaten Malang dan jumlah kegiatan pemantauan dan penyelenggaraan informasi potensi bencana alam.

Untuk jumlah personil satuan polisi pamong praja dan linmas paling banyak ada pada tahun 2016 sebanyak 153 personil, baik yang PNS, CPNS, PTT dan Banpol.

Tabel 2.53
Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SAT	2012	2013	2014	2015	2016
1	Perkembangan Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas :						
	- PNS	Orang	53	53	49	46	46
	- CPNS	Orang	-	-	-	-	-
	- PTT	Orang	3	3	3	3	3
	- Banpol	Orang	37	73	73	74	104
2	Penegakan PERDA (Tipiring dan Pembongkaran)	Kegiatan	141	352	259	584	189
3	Penertiban Pelanggaran PERDA	Kegiatan	6.550	2.332	5.164	7.120	4.680
4	Jumlah Personil Satlinmas se-Kabupaten Malang	Orang	-	12.878	12.878	12.878	12.878
5	Pemantauan dan Penyelarasan Informasi Potensi Bencana Alam	Kegiatan	-	-	-	-	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga fungsi pemantauan dan penyelarasan informasi bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

F. Sosial

Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan. Pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial berarti mengentaskan mereka dari situasi tersebut sehingga diharapkan semakin lama jumlah mereka akan berkurang.

Tabel 2.54
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Orang	4.420	147.212	146.010	146.050	147.212
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	169.606	169.000	169.000	169.170	170.010
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	261	87.11	86.30	86.33	56.59

Sumber : Dinas Sosial, 2017

Tabel 2.55
PMKS Yang Tertangani
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	4.420	147.212	146.010	146.050	147.212
Jumlah PMKS yang ada	Orang	721.112	721.112	731.418	731.418	731.418
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	0.61	20.41	19.96	19.97	20,12

Sumber : Dinas Sosial, 2017

Tahun 2012 realisasinya sangat kecil karena jumlah populasi PMKS cukup besar sedangkan anggaran yang tersedia terbatas.

Mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 realisasinya melebihi target karena adanya program dari Kemensos Antara lain: Program Bantuan Simpanan Kesos (PSKS). Pemberdayaan Fakmis melalui KUBE dan Program-programnya lainnya.

Panti sosial di Kabupaten Malang dibedakan menjadi panti asuhan, panti werda, panti rehabilitasi sosial, berikut adalah tabel mengenai perkembangan panti sosial di Kabupaten Malang :

Tabel 2.56
Perkembangan Panti Sosial
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Panti Asuhan	Unit	43	45	45	47	49
2	Jumlah Penghuni	Orang	2.560	2.676	2.702	2.892	2.827
3	Jumlah Panti Werda	Unit	2	4	4	4	4
4	Jumlah Penghuni	Orang	100	157	157	157	157
5	Jumlah Panti Rehabilitasi Sosial	Unit	3	4	4	3	3
6	Jumlah Penghuni	Orang	267	292	292	267	267

Sumber : Dinas Sosial, 2017

Jumlah unit panti sosial tahun 2016 terbanyak adalah panti asuhan dengan 49 unit dengan jumlah penghuni sebanyak 2.892 orang.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan dari jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Malang pada Tahun 2012 sejumlah 1.976.188 orang, pada Tahun 2016 menjadi 1.965.371 orang, demikian juga dengan jumlah angkatan kerja sejumlah 1.489.340 pada Tahun 2012 menjadi 1.573.802 orang. Sementara itu jumlah angkatan kerja tertampung disektor formal pada Tahun 2011 sebanyak 3.474 orang, pada Tahun 2015 tertampung 2,023. Jumlah pencari kerja yang terdaftar Tahun

2011 sebanyak 57.981 orang sedangkan pada Tahun 2015 sebesar 52.115 orang.

Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut ini:

Tabel 2.57
Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang
Tahun 2012-2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk Usia Kerja	orang	1.976.188	1.859.646	1.578.886	1.965.371	1.697.536
Angkatan Kerja	orang	1.489.340	1.478.820	1.487.523	1.573.802	1.643.830
Angkatan Kerja Tertampung	orang	6.610	2.457	3.344	4.514	4.514
Pencari Kerja	orang	81.024	156.187	51.394	52.115	52.115
Jumlah Pengiriman TKI	orang	3.953	4.178	3.029	1.969	1.969
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,10	3,00	3,45	3,31	4,02

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2017

Tabel 2.58
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2016

NO	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	94.60	79.50	94.21	80.07	96,83
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.10	3.00	3.45	3.31	4,02

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2017

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten Malang tertinggi pada tahun 2012 sebesar 94,60 persen dan terendah pada tahun 2013 sebesar 79,50 persen. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat pada tahun 2012 sebesar 4,10 persen.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam perkembangan kota yang semakin kompleks saat ini, diketahui bahwa sarana bermain anak agar dapat menjadi media tumbuh kembang secara layak masih dirasakan sangat minim. Ini karena lahan yang terbatas dan belum adanya perhatian serius. Di sisi lain, eksploitasi anak yang ditunjukkan dengan masih banyaknya anak jalanan juga perlu ditangani segera.

Terkait dengan capaian indikator SPM di bidang layanan terpadu perempuan dan anak diketahui bahwa kinerja selama periode 2012-2016 sudah cukup optimal. Ini diindikasikan dengan adanya usaha nyata berupa tindak lanjut penanganan dari pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang disertai dengan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Tabel 2.59
Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
di Kabupaten Malang Tahun 2012 - 2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Pekerja perempuan dilembaga pemerintah	Orang	-	568.724	8.129	9.010	10.170
Jumlah pekerja perempuan	Orang	568.953	8.129	568.411	455.686	445.084
Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	%	-	1,43	1,43	1,98	2,58

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabuptan Malang masih belum begitu tinggi.

Tabel 2.60
Rasio KDRT
di Kabupaten Malang Tahun 2012 - 2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah KDRT	Orang	140	156	73	71	20
Jumlah Rumah Tangga	Orang	568.953	684.524	687.700	741.201	669.980
Rasio KDRT	%	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Pada tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan 0,01 salah satu faktornya adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan yang mulai tumbuh, dan kemudian ditahun berikutnya mengalami penurunan 0,01, salah satunya karena faktor pemahaman masyarakat dalam membina rumah tangga mulai tinggi.

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kabupaten Malang merupakan Kabupaten penyangga pangan nasional, sehingga perkembangan padi, jagung dan kedelai yang merupakan komoditas utama yang sangat berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Tabel 2.61
Regulasi Ketahanan Pangan

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2017

Regulasi ketahanan pangan ditindaklanjuti pada tahun 2012 dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Keputusan Bupati Nomor : 180/502/KEP/421.013/2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malang meliputi susunan Keanggotaan, Kelompok Kerja Teknis, dan Kekompok Kerja Ahli. Peraturan ini terus digunakan sampai dengan saat ini.

Tabel 2.62
Ketersediaan Pangan Utama (beras)

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Ketersediaan Pangan Utama (beras) dalam ton/tahun	252.948	288.626	291.453	301.684	319.247

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2017

Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Malang dapat dikatakan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dari data yang didapat disajikan di tahun 2012 mengalami penurunan karena ada pengaruh musim (fuso) tetapi setelah itu meningkat kembali. Ketersediaan beras ditentukan dari produksi beras, sedangkan produksi beras dipengaruhi oleh berbagai jenis factor, diantaranya kepemilikan lahan dan penggunaan; jenis dan menegemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan menejemen tanam pertanian; dan pemanenan. Disamping itu juga dipengaruhi oleh perubahan temperature dan curah hujan.

Tabel 2.63
Jumlah Kelompok Tani

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pemula	1044	949	288.626	301.684	1116
Lanjut	500	590	715	752	530
Madya	42	47	57	76	83
Utama	0	0	2	9	9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2017

Jumlah kelompok tani diharapkan tiap tahunnya ada peningkatan yaitu dari pemula untuk menjadi lanjut meningkat 10%, lanjut menjadi madya meningkat 10%, dan madya menjadi utama meningkat 5%. Data terakhir pada tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/403/KEP/421.013/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Gapoktan.

D. Pertanahan

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk ditangani. Penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Malang selama periode 2012-2016 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan izin lokasi diselesaikan secara keseluruhan. Perkembangan Penyelesaian Kasus Tanah Negara, Penyelesaian Ijin Lokasi dan Presentase Pengadaan Tanah di Kabupaten Malang selama periode 2012-2016 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.64
Penyelesaian Kasus Tanah Negara, Penyelesaian Ijin Lokasi Dan Presentase Pengadaan Tanah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	90	90	90	90	90
2	Penyelesaian Ijin Lokasi	-	-	70	100	100
3	Persentase Pengadaan Tanah	33	82	90	100	100

Sumber : Dinas Pertanahan, 2017

Tabel 2.65
Perkembangan Jumlah Tanah Yang Bersertifikat
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanah						
	Bangunan/Gedung						
	- Jumlah Hak Milik	Bidang	252.569	263,033	275.500	275.500	275.500
	- Jumlah Hak Guna	Bidang	25.736	27.553	29.247	29.247	29.247
	Bangunan						
	- Jumlah Hak Pakai	Bidang	1.131	1.287	1.493	1.493	1.493
2	Tanah						
	Pertanian/Perkebunan/Ladang						
	- Jumlah Hak Milik	Bidang	0	0	0	0	0
	- Jumlah Hak Pakai	Bidang	0	0	0	0	0
	- HGU	Bidang	125	129	130	129	130
	Pengelolaan						

Sumber : Dinas Pertanahan, 2017

E. Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dimaksud untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	2.25%	3.81%	10.05%	6.06%	6.06%
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	100%	100%	100%	100%	100%
Penegakan hukum lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pemantauan dan pengawasan kawasan pemukiman dan industri	4.48%	4.64%	4.70%	4.81%	4.81%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2017

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembahasan kondisi kependudukan akan berhubungan langsung dengan masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam pembangunan wilayah mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai

dengan tempat tinggalnya. Karakteristik sosial yang dimaksud disini adalah karakter dari masing-masing penduduk.

Tabel 2.67
Administrasi Kependudukan
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Keping	1,614,185	1,700,817	1,713,817	1,746,451	1,836,048
2	Jumlah Kartu Keluarga (KK)	Lembar	781,703	877,685	902,800	720,922	771,672
3	Akta Kelahiran	Lembar	26,326	60,986	59,183	39,283	44,937
4	Akta Kematian	Lembar	28	41	52	94	2,917
5	Akta Perkawinan	Lembar	448	960	510	472	469
6	Akta Perceraian	Lembar	92	171	91	98	98
7	Surat Keterangan	Lembar	1,600	13,003	15,391	818	813
8	Kutipan II	Lembar	187	508	549	533	616

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Gambar 2.12
Struktur Kependudukan
Di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

SINKRONISASI DATA RPJMD KABUPATEN MALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
BIDANG URUSAN/INDIKATOR		RUMUS	2011	2012	2013	2014	2015
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil:	1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 / telah menikah}}$	0,90	0,80	0,85	0,87	0,89
	2. Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk ber-KK}}{\text{Jumlah penduduk yang telah menikah}}$	1,9	1,6	1,5	1,4	1,4
	3. Rasio pasangan berakte nikah (non muslim)	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$	0,81	0,75	0,75	0,75	0,79
	4. Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah penduduk ber-KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	90%	80%	85%	87%	89%
	5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	572	603	621	639	713
	6. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada/tidak	Ada 2.920.500	Ada 3.043613	Ada 3.077.960	Ada 3.092.714	Ada 2.581.671
	7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada/tidak	Sudah/Ada	Sudah/Ada	Sudah/Ada	Sudah/Ada	Sudah/Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan KTP elektronik mulai dilaksanakan pada tahun 2012, tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 merupakan data hasil perekaman KTP el, yang terjadi kenaikan dengan dilakukannya penyisiran perekaman pada daerah-daerah yang belum dilakukan perekaman seperti di universitas-universitas, lembaga masyarakat, sekolah. Selain itu juga dilakukan pelayanan jemput bola ke desa-desa. Pada akhir bulan Desember 2014 merupakan batas akhir tidak berlakunya KTP manual/SIAK sehingga masyarakat banyak yang mengajukan permohonan KTP-elektronik. Meskipun begitu masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP el, sehingga tetap dilakukan pelayanan jemput bola.

Dengan adanya beberapa perubahan baik undang-undang, Permendagri maupun surat edaran, hal tersebut mempengaruhi capaian kinerja penerbitan akta kelahiran antara lain adanya surat edaran menteri dalam negeri no. 427.11/611/SJ tanggal 28 Desember 2010 bahwa pelaporan kelahiran lebih dari 1(satu) tahun harus penetapan pengadilan, sehingga masyarakat banyak yang tidak mencatatkan kelahirannya, kemudian terbit lagi surat edaran menteri dalam negeri nomor 427.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang tidak lagi melalui pengadilan apabila kelahiran lebih dari 1(satu) tahun, Undang-undang nomor 24 tahun 2013 terdapat perubahan beberapa pasal yang dulu untuk pencatatan kelahiran berasas peristiwa, sekarang berdasarkan asas domisili. Dari adanya perubahan perubahan landasan hukum tersebut mempengaruhi hasil capaian kinerja dari kepemilikan akta kelahiran, tetapi secara rasio terjadi peningkatan dari tahun ketahun. Dinas Kependudukan Kabupaten Malang juga telah melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, serta melakukan pelayanan jemput bola secara berkala ke desa-desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Database kependudukan di Kabupaten Malang telah dilaksanakan mulai tahun 2012 dengan dimulainya pelaksanaan penerapan KTP elektronik berbasis NIK Nasional. Dari data perkembangan jumlah penduduk terjadi peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, tetapi terjadi penurunan di tahun 2015 karena didasarkan pada pemutakhiran data melalui biometrik sehingga terjadi perbedaan jumlah penduduk, hal tersebut disebabkan untuk pencetakan KTP el berdasarkan data tunggal artinya bila terjadi seseorang melakukan perekaman dua kali pada tempat yang berbeda, maka cetak KTP yang dilakukan pada saat perekaman yang pertama, untuk perekaman kedua pada tempat yang berbeda tidak dapat dilakukan perekaman sehingga terjadi duplicate record. Untuk hal tersebut harus dilakukan pembersihan data ganda. Pembersihan data dilakukan juga karena adanya data kembar, data kependudukan pasif yang selama lima tahun tidak mengalami perubahan, dan anomali data atau data yang tidak layak dipertahankan karena kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan proses tertentu di server, hal ini bertujuan juga untuk meningkatkan tingkat keakuratan database secara nasional.

Untuk Rasio pasangan nikah berakte nikah non muslim terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun ketahun, karena masyarakat mulai memahami pentingnya dokumen administrasi kependudukan terutama akta perkawinan, karena akte perkawinan merupakan salah satu syarat dalam pengurusan akta kelahiran. Selain itu juga dilakukan pendekatan kepada pendeta-pendeta (perkawinan non muslim) untuk segera melaporkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil apabila telah melakukan pemberkatan perkawinan untuk segera dapatnya dilakukan penerbitan akta perkawinan. Pelayanan jemput bola juga dilakukan bersamaan dengan pelayanan dokumen kependudukan lainnya. Selain itu untuk penerbitan akta perkawinan non muslim ada permasalahan bahwa seseorang yang melakukan pemberkatan di wilayah kabupaten Malang belum tentu mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep besar yang memuat peran utama pemerintah dalam memberikan hasil guna bagi masyarakat. Pemberdayaan tidak diartikan dengan memberikan langsung apa yang secara instan dikehendaki oleh masyarakat. Lebih daripada itu, pemberdayaan adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang mampu “mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan” (sesuai Misi Kabupaten Malang) dan ”Mengembangkan kapasitas yang berorientasi pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta mengembangkan secara sinergi dengan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin” (sesuai Arah Kebijakan Daerah).

(1) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM

Pembinaan LPM dilaksanakan melalui pelatihan LPMD. Jumlah LPMD/K di Kabupaten Malang sebanyak 390 LPMD/K.

2012	2013	2014	2015	2016
8 desa	18 desa	18 desa	26 desa	26 desa

(2) Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK

Kelompok Binaan PKK saat ini masing-masing kelompok PKK memiliki satu kelompok binaan. namun tidak menuntut kemungkinan nantinya satu kelompok PKK memiliki lebih dari satu kelompok binaan, sehingga apa bila pembagi pada rumus adalah jumlah PKK maka nilainya akan lebih dari 100%.

2012	2013	2014	2015	2016
424 klp				

(3) Jumlah LSM

Untuk LSM, BPM Kab. Malang tidak pernah melakukan pendataan/ pembinaan terhadap LSM. yang dilakukan adalah kerja sama dengan LSM dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat.

(4) PKK Aktif

PKK aktif saat ini sudah 100% (sumber data TP PKK Kab. Malang).

2012	2013	2014	2015	2016
424	424	424	424	424

(5) Posyandu Aktif

Posyandu aktif saat ini sudah 100% dari 2.816 posyandu di Kabupaten Malang.

2012	2013	2014	2015	2016
2.766	2.809	2.816	2.816	2.816

(6) Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk swadaya, indikator yang digunakan adalah prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat yaitu dengan membandingkan swadaya tahun ini dikurangi swadaya tahun lalu dibagi swadaya tahun lalu dikalikan seratus persen.

2012	2013	2014	2015	2016
36.971.859.579	50.645.890.700	77.771.223.600	87.624.132.647	93.612.342.000

Untuk pasca program tidak dilakukan karena program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan hasilnya diserahkan ke desa lokasi pelaksanaan program.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah adalah menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program Keluarga Berencana (KB).

Rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2012–2016 terus mengalami penurunan, pada tahun 2012 sebesar 0,61, tahun 2013 sebesar 0,60, kemudian tahun 2014 naik sebesar 0,78 dan turun pada tahun 2015 menjadi 0,76, namun pada tahun 2016 rata-rata jumlah anak mengalami peningkatan sebesar 0,85. Hal ini disebabkan mulai tahun 2012 terdapat kecenderungan penurunan kesertaan KB Aktif hingga tahun 2016, masih tingginya usia perkawinan usia muda (usia di bawah 20 tahun), dan masih rendahnya kesertaan ber KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

Guna menyikapi permasalahan tersebut, maka Badan Keluarga Berencana terus berupaya berinovasi dalam mengembangkan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yaitu melalui Program CONTRA WAR (Contraceptive for women at Risk) merupakan program KB yang ditujukan pada PUS beresiko tinggi, Program SKS (Surveilans Keluarga Sejahtera) merupakan kegiatan pendataan tahapan keluarga sejahtera. Selain itu tetap terus mengembangkan kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KB di masyarakat, mendorong kesadaran ber KB MKJP, dan meningkatkan pendewasaan usia perkawinan.

Tabel 2.68
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015 ¹⁾	2016
Jumlah anak	Orang	449.118	447.097	590.817	549.318	616.258
Jumlah keluarga	Keluarga	740.607	744.686	759.035	718.948	723.338
Rata-rata jumlah anak per keluarga		0,61	0,60	0,78	0,76	0,85

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Malang, 2017

Rasio akseptor KB dan Cakupan peserta KB Aktif terdapat kecenderungan mengalami penurunan hingga tahun 2016, pada tahun 2012 sebesar 78,55%, tahun 2013 sebesar 76,72%, tahun 2014 sebesar 76,20%, tahun 2015 sebesar 75,66% dan tahun 2016 sebesar 65,04%. Hal ini disebabkan masih tingginya peserta KB Drop Out, masih

rendahnya kesertaan ber KB MKJP, masih rendahnya kesertaan ber KB Pria, dan masih tingginya perkawinan usia muda (Usia < 20 tahun).

Tabel 2.69
Rasio akseptor KB
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015*)	2016
Jumlah akseptor KB	Orang	408.896	401.087	397.748	380.011	276.027
Jumlah pasangan usia subur	Keluarga	520.578	522.800	521.995	502.245	424.411
Rasio akseptor KB	%	78,55	76,72	76,20	75,66	65,04

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Malang, 2017

Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus berkembang, hal ini akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan inovasi Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, melalui Program CONTRA WAR (Contraceptive for women at Risk) merupakan program KB yang ditujukan pada PUS beresiko tinggi, Program SKS (Surveilans Keluarga Sejahtera) merupakan kegiatan pendataan tahapan keluarga sejahtera, juga peningkatan kualitas KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) prgram KB di masyarakat, mengurangi besarnya tingkat DO dengan mendorong kesadaran ber KB MKJP, dan meningkatkan kesadaran bagi remaja tentang pendewasaan usia perkawinan.

Pada indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, berdasarkan data menunjukkan bahwa persentase indikator tersebut telah mengalami penurunan. Pada tahun 2012 sebesar 39,81%, tahun 2013 sebesar 39,03%, tahun 2014 sebesar 38,98%, tahun 2015 sebesar 17,08% dan tahun 2016 bertahan pada 17,08% . Perkembangan seperti ini merupakan kemajuan yang positif. Kemajuan tersebut disebabkan oleh pengaruh kebijakan ekonomi Kabupaten Malang melalui berbagai sektor pembangunan.

Walaupun demikian, Badan KB terus berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan pengembangan kegiatan wirausaha melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan mengutamakan anggota dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

Tabel 2.70
 Keluarga Para Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
 di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah keluarga pra dan I	ORG	294,851	290,614	295,864	123,533	123.533
Jumlah keluarga	KLG	740,607	744,686	759,035	723,338	723.338
Rasio keluarga pra dan I	%	39.81	39.03	38.98	17.08	17,08

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Malang, 2017

I. Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga Negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan transportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya.

Arah pengembangan perhubungan dalam lingkup nasional meliputi penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (feeder). Sedangkan dalam lingkup regional pengembangan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan memperkuat ketahanan nasional.

Upaya mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dibidang perhubungan dilakukan melalui program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta peningkatan dan pembangunan lalu lintas.

Tabel 2.71
 Perkembangan Kendaraan Wajib Uji
 di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Mobil Penumpang Umum	Buah	804	805	843	843	843
2	Bus Umum	Buah	3.015	3.134	3.239	3.326	3.428
3	Bus Bukan Umum	Buah	388	432	480	590	674
4	Mobil Barang Umum	Buah	8.072	9.165	10.124	10.453	10.453
5	Mobil Barang Bukan Umum	Buah	17.070	18.798	20.509	23.394	26.454
6	Kereta Gandengan Umum	Buah	104	103	106	104	104

7	Kereta Gandengan Bukan Umum	Buah	90	90	90	92	92
8	Kereta Tempel Umum	Buah	41	47	48	47	48
9	Kereta Tempel Bukan Umum	Buah	16	16	16	17	16
10	Kendaraan Khusus Bukan Umum	Buah	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

Tabel 2.72
Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Umum
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	Ket
1	Jumlah Mobil Bus (AKDP Bus Sedang & Besar)	Unit	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	PO (Prsh. Otobus)
2	Jumlah Mobil AKDP (Bus Kecil)	Unit	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688	Bukan PO
3	Jumlah Angkutan Pedesaan	Unit	839	838	829	829	827	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

Tabel 2.73
Perkembangan Jumlah Perlengkapan Jalan
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rambu-Rambu	Buah	4.773	6.041	6.164	6.475	6.822
2	Warning Ligh	Buah	76	91	95	98	104
3	Traffic Ligh	Buah	7	8	9	10	10
4	Pagar Pengaman Jalan/Guard Driil	M	4.200	4.200	4.200	0	0
5	Marka Jalan	M ²	27.481	34.026	37.756	39.983	41.537
6	Papan Nama	Buah	332	332	332	332	332
7	Patok Pengaman Jalan	Buah	750	2.202	2.202	2.411	2.542
8	Paku Jalan (Road Stud)	Buah	0	955	955	955	955
9	Cermin Tikungan	Buah	3	5	5	6	8

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

Tabel 2.74
Perkembangan Arus Penumpang Dan Barang Dari Bandara
Abdurachman Saleh di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Penumpang						
	- Datang	Orang	258.125	265.748	286.990	381.87	425.93
	- Berangkat	Orang	257.268	260.288	311.598	387.46	432.60
2	Barang						
	- Datang	Kg	2.986.161	3.208.27	2.065.76	2.462.0	2.638.1
	- Berangkat	Kg	2.042.765	2.328.43	2.346.14	2.856.0	3.113.0
3	Rata-rata Load Faktor						
	- Datang	Prosen	0,86	0,86	0,80	65,48	73,034
	- Berangkat	Prosen	0,85	0,85	0,78	66,44	74,178

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

J. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Malang pada awalnya menggunakan alamat URL <http://www.kabmalang.go.id>. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/Kominfo/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah, pada awal tahun 2007 alamat situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang berubah menjadi <http://www.malangkab.go.id>.

Penggunaan nama domain go.id juga sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/197/KEP/421.013/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Malang Nomor 180/263/KEP/421.013/2009 Tentang Nama Domain Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Malang Dan Nama Sub Domain Situs Web Organisasi Perangkat Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.75
Web site milik pemerintah daerah

No	Komponen	Ada/Tidak	2012	2013	2014	2015	2016
1	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada	91	92	92	104	104

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Capaian kinerja program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dapat dilihat dari perkembangan pemanfaatan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti sampai dengan akhir tahun 2015 semua SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan sudah mempunyai website. Jumlah Pengunjung Website www.malangkab.go.id rata-rata 25.000 pengunjung per bulan.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.76
 Persentase Koperasi Aktif
 di Kabupaten Malang Tahun 2012 - 2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah koperasi aktif	BH	947	995	1.009	1.037	1.160
Jumlah seluruh koperasi	BH	1.072	1.095	1.104	1.130	1.253
Presentase koperasi aktif	%	88,34	90,87	91,39	91,77	92,58

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

Tabel 2.77
 Persentase Usaha Mikro Dan Kecil
 di Kabupaten Malang Tahun 2012 - 2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	272.011	405.020	413.285	415.435	417.599
Jumlah seluruh UKM	Unit	273.101	406.180	414.516	416.669	418.860
Presentase UKM	%	99,60	99,71	99,70	99,70	99,70

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

Kondisi perkoperasian di Kabupaten Malang dari tahun 2012 sampai 2016 secara umum menunjukkan peningkatan, baik di sisi kuantitas maupun kinerjanya. Di sisi kuantitas, menunjukkan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Malang yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pula bahwa prosentase koperasi aktif terhadap total koperasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan pada usaha mikro dan kecil mengalami naik turun yang tidak begitu signifikan.

L. Penanaman modal

Secara umum jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Malang setiap tahunnya terus meningkat, dari tahun 2012 hingga 2016 jumlah investor PMA maupun PMDN di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78
 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
 di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah PMA	Investor	18	18	19	20	20
Jumlah PMDN	Investor	19	19	19	20	20

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Malang. Perkembangan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per satuan penduduk di Kabupaten Malang dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini:

(1) Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah Organisasi Pemuda Se-Kabupaten Malang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	2012	2013	2014	2015	2016
1	48	48	48	48	47

(2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah Organisasi Olahraga Se-Kabupaten Malang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO	2012	2013	2014	2015	2016
1	37	37	37	37	43

(3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO	2012	2013	2014	2015	2016
1	24	25	23	22	24

(4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO	2012	2013	2014	2015	2016
1	3	3	3	3	3

(5) Gelanggang atau Balai Remaja

Jumlah gelanggang atau balai remaja di Kabupaten tahun 2014-2016 Malang adalah sebagai berikut:

NO	SARANA DAN PRASARANA	2014	2015	2016
1	Gelanggang Olah Raga	63	104	264

(6) Lapangan Olahraga

Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Malang tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut

NO	SSARANA DAN PRASARANA	2014	2015	2016
1	Lapangan Olah Raga	739	406	992

N. Statistik

Buku Kabupaten Malang Dalam Angka selama periode 2012-2016 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, serta industri. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Malang dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Malang selama periode 2012-2016 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang.

O. Persandian

Urusan Persandian di Kabupaten Malang adalah untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

P. Kebudayaan

Karakteristik budaya di Kabupaten Malang yang berkembang dipengaruhi oleh sistem kegiatan ekonomi dan budaya induk yang mempengaruhinya. Budaya induk yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan di wilayah Kabupaten Malang tersebut adalah sebagaimana perkembangan budaya-budaya suku bangsa yang dominan berkembang di wilayah Jawa Timur.

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.79
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	8	10	19	23	18

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan kuantitas penyelenggaraan maupun keikutsertaan pada event-event seni dan budaya dikarenakan adanya dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan maupun menghadiri kegiatan seni budaya di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Tabel 2.80
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	16	16	17	18	18

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Malang terdiri dari open stage (panggung terbuka), pendopo, pelataran candi dan padepokan seni yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 terdapat peningkatan dikarenakan adanya pembangunan panggung terbuka di Taman Wisata Air Wendit dan pembangunan museum dimana sarana tersebut dapat difungsikan sebagai tempat pengembangan seni dan budaya masyarakat Kabupaten Malang.

Tabel 2.81
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	17	17	17	19	19

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Malang tercatat sejumlah 17 buah dari Tahun 2011 s.d tahun 2014 dan pada Tahun 2015 sampai Tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah dikarenakan adanya penambahan benda cagar budaya berupa hibah keris kuno dan sisa-sisa struktur jembatan kuno.

Q. Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun di Kabupaten Malang dibandingkan dengan jumlah orang yang harus dilayani masih relatif minim. Pada tahun 2011 hanya terdapat 22% pengunjung perpustakaan dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan cukup signifikan mencapai 149,28%.

Hingga saat ini, peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca diperpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai dan letak perpustakaan yang masih relatif jauh dengan tempat tinggal masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung perpustakaan. Di sisi lain, makin mudahnya akses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.82
Sarana Perpustakaan Daerah Tahun 2012 – 2016

INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	29.324 orang	29.585 orang	31.281 orang	50.319 orang	58.293 orang
Jumlah Koleksi Judul Buku	9.136 judul	9.142 judul	9.413 judul	55.432 judul	101.000 judul
Jumlah SKPD yg menerapkan arsip secara baku	84 SKPD	63 SKPD	78 SKPD	86 SKPD	86 SKPD

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2017

Peningkatan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.83
Kunjungan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2016

TAHUN				
2012	2013	2014	2015	2016
22%	22 %	92,81%	149,28%	90,00%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2017

Peningkatan pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang mengalami kenaikan yang sangat drastis dari tahun 2014 dari 31.281 orang pengunjung, tahun 2015 meningkat menjadi menjadi 50.319 orang pada tahun 2016 atau meningkat 58.293 pengunjung. Peningkatan tersebut disebabkan karena Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang melakukan pembinaan perpustakaan, promosi serta penataan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada serta terus menerus melakukan upaya penyadaran minat baca masyarakat.

Tabel 2.84
Koleksi Buku Perpustakaan Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2016

TAHUN				
2012	2013	2014	2015	2016
45%	44%	44,62 %	51,04%	87,83%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2017

Pada tahun 2016 jumlah koleksi buku pada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang sebanyak 101.000 eksemplar. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang yang merupakan koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan umum daerah, perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan sekolah.

R. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip

secara baku di Kabupaten Malang pada tahun 2016 sudah mencapai 100%.

Tabel 2.85
Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku
di Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2015

TAHUN				
2012	2013	2014	2015	2016
88 %	73 %	90,70 %	100%	100%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2017

2.3.3 Fokus Urusan Pilihan

A. Kelautan dan perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Malang terdiri dari produksi tangkap dan budidaya. Perikanan tangkap meliputi perikanan tangkap di laut dan perairan umum seperti bendungan/waduk, rawa dan sungai. Produksi perikanan budidaya meliputi produksi perairan tawar (kolam, minapadi, minamendong, jaring sekat/kolam jaring apung (KJA) dan payau (tambak).

1. Produksi Perikanan

Upaya peningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain dilakukan dengan program stimulan untuk meningkatkan produksi yaitu pemasangan rumpon, bantuan kapal penangkapan ikan, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penanganan ikan di atas kapal. Begitu pula dengan upaya peningkatan produksi perikanan budidaya dilakukan dengan program stimulan peningkatan produksi antara lain bantuan sarana prasarana budidaya, kolam percontohan, bantuan induk dan benih, bantuan mesin pakan. Selain hal tersebut dilakukan pula bimbingan teknis di bidang perikanan tangkap dan budidaya kepada para nelayan dan pembudidaya.

Data produksi perikanan tahun 2012-2016 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.86
Tabel Produksi Perikanan Tahun 2012-2016

NO.	U R A I A N	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
A. Perikanan Tangkap							
1	Laut	Ton	9.905,76	10.486,56	10.683,82	11.318,93	7.009,52
2	Perairan Umum	Ton	371,58	382,73	393,62	408,69	395,33
B. Perikanan Budidaya							
1	Perikanan Tawar	Ton	14.505,75	17.557,52	19.555,84	20.476,92	18.205,26
2	Perikanan Payau	Ton	875,00	982,00	2.657,00	2.189,00	2.357,28
	Jumlah Perikanan Tangkap & Budidaya	Ton	25.658,09	29.408,81	30.633,50	34.393,54	27.967,39

Sumber : Dinas Perikanan, 2017

2. Konsumsi Ikan

Meningkatnya konsumsi ikan merupakan salah satu sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang. Hasil perhitungan konsumsi ikan per kapita merupakan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Malang per orang per tahun. Nilai konsumsi ikan mulai tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.87
Tabel Konsumsi Ikan Tahun 2012-2016

NO.	U R A I A N	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Konsumsi Ikan	20,92	21,47	22,85	24,02	25,23

Sumber : Dinas Perikanan, 2017

Upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan terus dilakukan, antara lain melalui Program Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sosialisasi tentang manfaat dan pentingnya mengkonsumsi ikan serta promosi mengkonsumsi ikan sebagai alternatif pangan yang sehat dan ekonomis melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dengan peserta murid sekolah TK, SD dan SMP di Kabupaten Malang. Selain itu dengan dibentuk pula organisasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Malang pada tahun 2011. Diharapkan, melalui organisasi ini, gerakan peningkatan

konsumsi ikan ini mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, baik dari Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Nelayan di wilayah Kabupaten Malang tersebar di 6 (enam) kecamatan pesisir yaitu kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, dan Donomulyo. Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk mengetahui jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan setiap tahunnya. Mulai tahun 2012 sampai 2016, jumlah kelompok yang menerima bantuan mengalami peningkatan sebesar 40%, dari 10 kelompok pada tahun 2012 menjadi 14 kelompok pada tahun 2016. Peningkatan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah nelayan dan didukung pula oleh kegiatan pembinaan kelembagaan kepada para nelayan sehingga muncullah kelompok baru. Para nelayan yang pada awalnya belum berkelompok sekarang sudah membentuk kelompok nelayan. Selain itu juga dipengaruhi ketersediaan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana bagi kelompok nelayan tersebut. Adapun perkembangan kelompok nelayan yang menerima bantuan secara lebih jelas disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.88
Jumlah Kelompok Nelayan Yang Menerima Bantuan
Tahun 2012-2016

No	Uraian	Jumlah (Kelompok)					Ket.
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kelompok Nelayan	10	11	13	14	16	

4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan produksi perikanan yang dihasilkan kelompok nelayan saja atau dari usaha perikanan tangkap. Perikanan tangkap di laut dilakukan oleh nelayan laut dan di perairan umum dilakukan oleh nelayan perairan umum. Data produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2012-2016 secara rinci disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.89
Tabel Produksi Perikanan Tahun 2012-2016

NO.	U R A I A N	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Perikanan Tangkap						
1	Laut	Ton	9.905,76	10.486,56	10.683,82	11.318,93	7.009,53
2	Perairan Umum	Ton	371,58	382,73	393,62	408,69	423,26

Sumber : Dinas Perikanan, 2017

Dari tabel dan gambar di atas diketahui bahwa produksi perikanan tangkap mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Meskipun produksi tangkap sangat tergantung musim dan cuaca yang terjadi sepanjang tahun, ternyata secara keseluruhan dalam satu tahun masih mengalami peningkatan. Salah satu dukungan pemerintah adalah adanya stimulan bagi kelompok nelayan berupa pemasangan rumpon, bantuan kapal penangkapan ikan, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penanganan ikan di atas kapal.

B. Pariwisata

Sektor wisata merupakan salah satu industri yang ramah lingkungan dan berperan besar bagi pendapatan wilayah jika dapat dikelola secara baik. Kabupaten Malang memiliki obyek wisata yang beranekaragam dan tersebar di seluruh kecamatan, obyek wisata di Kabupaten Malang secara umum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu jenis wisata alam seperti pantai, pegunungan, air terjun, wisata buatan seperti kawasan bermain dan perkebunan agropolitan buatan, selain itu ada pula jenis wisata sejarah seperti kawasan wisata candi Kidal dan Candi Jago. Terdapat obyek wisata khusus berupa wisata religius yaitu pesarean Gunung Kawi. Obyek wisata di Kabupaten Malang saat ini masih banyak yang belum tersentuh dan dikembangkan. Obyek wisata unggulan yang ada meliputi Sengkaling, Candi Badut, Puncak Dieng, Candi Singosari, Stupa Sumber Awan, kebun teh, Coban Glotak, Sumber air di Gunung Ronggo dan Wendit.

Kabupaten Malang merupakan salah satu dari daerah tujuan wisata di Jawa Timur, khususnya wisatawan nusantara. Dalam setiap tahunnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Malang semakin bertambah, seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.90
Perkembangan Wisatawan
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Wisatawan						
	- Nusantara	Orang	2.362.853	2.517.248	3.170.575	3.554.609	5.719.881
	- Mancanegara	Orang	22.619	33.226	80.792	99.873	129.663
	JUMLAH	Orang	2.385.472	2.550.474	3.170.575	3.654.482	5.849.544
2	Lama Tinggal						
	- Nusantara	Hari	2	2	2	2	1
	- Mancanegara	Hari	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

Kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang mengalami peningkatan dari Tahun 2011 s.d 2016 dikarenakan adanya pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada selain dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan berupa penyelenggaraan event-event yang dapat mendatangkan kunjungan maupun secara aktif mempromosikan Daerah Tujuan Wisata (DTW) melalui media cetak, media elektronik, website, pamflet, leaflet dan brosur serta keikutsertaan pada pameran-pameran pariwisata di tingkat propinsi, nasional dan internasional.

C. Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi, kakao dan kelapa. Untuk komoditi sayuran terdiri dari kentang, kubis, cabe, tomat dan bawang merah. Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, jeruk, pisang, salak, ketela gunung kawi.

Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Malang sebagai daerah agro yang merupakan andalan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

Tabel 2.91
Produksi Komoditas Andalan Pertanian
Tahun 2012 – 2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi	Ton	461.267	461.293	461.306	478.930	505.138
2	Jagung	Ton	295.079	297.667	271.113	247.150	295.340

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
3	Sayuran	ton	393.404	393.797	310.071	373.767	459.265
4	Tebu	Ton	3.815.732	3.757.839	3.757.839	3.928.363	4.001.879
5	Kopi	Ton	13.162.00	963.00	20.797,20	14.080,00	10.222,00
6	Daging	Ton	20.787,75	21.866,55	22.325,74	38.885,69	39.949,12
7	Susu	Ton	115.619,73	116.033,57	117.235,67	132.052,01	137.324.,46
8	Telur	Ton	24.332,55	25.080,21	27.510,13	42.198,64	43.452,20
9	Ikan	Ton	22.183,84	25.658,09	28.019,45	30.633,50	32.204,55

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Kebijakan pemerintah terkait program nasional ketahanan pangan fokus terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan melalui beberapa aspek yaitu penyediaan sumber-sumber air, perbaikan pola tanam, serta peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi. Program kegiatan ini didukung oleh beberapa sumber dana anggaran APBN, APBD I dan APBD II. Selain itu pada awal tahun 2015 pemerintah bekerjasama dengan TNI berupaya meningkatkan produksi padi melalui UPSUS (Upaya Khusus) untuk komoditas PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai) dengan meningkatkan luas areal tambah tanam.

Tabel 2.92
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Produktivitas padi	%	66.90	69.55	70.81	70.81	70.81

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang

Tabel 2.93
Peningkatan Persentase Produksi Padi
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Presentase produktivitas	%	-10,07	15,26	0,003	3,82	5,47

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Malang menurun dikarenakan sektor pertanian masih berbasis onfarm (peningkatan produksi) belum berorientasi terhadap peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi hasil pertanian dan perkebunan. Peningkatan nilai tambah ini mempengaruhi revenue ratio (RC ratio) petani yang artinya biaya produksi yang petani keluarkan lebih kecil dibanding

keuntungan yang didapat. Nilai revenue ratio (RC ratio) inilah yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP). Beberapa kendala yang dihadapi petani antara lain panjangnya mata rantai perdagangan sampai konsumen, sehingga pembagian margin keuntungan tidak berpihak pada petani. Pemerintah saat ini pula mulai mengembangkan program kegiatan yang bertujuan peningkatan multiplier effect di sektor pertanian yaitu agroekowisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor pertanian dan pariwisata.

Tabel 2.94
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB ADHB
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	18,16	18,15	18,15	17,96	17,52

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Tabel 2.95
Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	%	3.91	3.89	3.86	3.85	3.85

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang

Tabel 2.96
Kontribusi sektor pertanian
(Tanaman Perkebunan) Terhadap PDRB
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Kontribusi sektor pertanian (tanaman perkebunan) terhadap PDRB	%	7.01	6.69	6.66	6.55	

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang

D. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dijabarkan sebagai perbandingan PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB. Sektor perdagangan cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor perdagangan merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi

mengingat sektor perdagangan sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor perdagangan, tingkat inflasi, adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diterapkan mulai tahun 2015.

Pada tahun 2012, nilai kontribusi sektor perdagangan sebesar 10.025,6 milyar dari total PDRB sebesar Rp 52.796,8 atau sebesar 18,99%. Pada tahun 2013, Nilai kontribusi sektor perdagangan sebesar 11.178,8 milyar dari total PDRB sebesar 58.674,7 milyar atau sebesar 19,05%. Pada tahun 2014, Nilai kontribusi sektor perdagangan sebesar 12.203,5 milyar dari total PDRB sebesar 65.930,8 milyar atau sebesar 18,51%. Pada tahun 2015, nilai kontribusi sektor perdagangan sebesar 13.647,0 milyar dari total PDRB sebesar 73.841,9 milyar atau sebesar 18,48% dan hingga tahun 2016 meningkat menjadi 15,265,0 milyar dari total PDRB sebesar 81.789,1 milyar atau sebesar 18,66%.

Tabel 2.97
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB
Tahun 2012 - 2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Milyar	10.025,6	11.178,8	12.203,5	13.647,0	15,265,0
PDRB	Milyar	52.796,8	58.674,7	65.930,8	73.841,9	81.789,1
Persentase Kontribusi	%	18,99	19,05	18,51	18,48	18,66

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Untuk Peningkatan peranan sektor perdagangan dalam perekonomian melalui penguatan perdagangan dalam dan luar negeri melalui peningkatkan persentase nilai ekspor bersih perdagangan sebagai salah satu indikasi peningkatan kegiatan sektor perdagangan.

Peningkatan nilai ekspor dan impor perdagangan dikarenakan adanya program dan kegiatan yang saling mendukung untuk mengembangkan dan peningkatan sektor perdagangan sehingga mampu mendorong meningkatnya nilai ekspor dan impor. Selain itu juga dikarenakan adanya berbagai aturan kepabeanan tentang ekspor impor yang seringkali disosialisasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang sering diikuti oleh para eksportir dan importir di wilayah Kabupaten Malang sehingga memberikan pemahaman dan memudahkan proses ekspor impor yang dilakukan. Selain itu, adanya berbagai kegiatan pameran produk-produk yang berpotensi ekspor sangat mendukung menggeliatnya sektor perdagangan.

Tabel 2.98
Ekspor Bersih Perdagangan
Tahun 2012 - 2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai Ekspor	US\$	303.731.298,57	338.273.135,89	345.541.449,41	358.333.867,32	377.153.816,14
Nilai Impor	US\$	64.758.855,43	71.671.674,94	76.000.142,85	87.048.205,43	93.323.638,27

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2017

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dijabarkan sebagai persentase perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan tahun N dengan jumlah kelompok pedagang / usaha informal.

Pada tahun 2014, Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebesar 0,40%, dimana bantuan sarana dan prasarana perdagangan dari Kementerian Perdagangan RI untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) di Stadion Kanjuruhan, berupa 130 unit tenda dan 130 unit gerobak untuk 130 orang pedagang kaki lima (PKL).

Sedangkan pada tahun 2015, bantuan sarana dan prasarana perdagangan dari Kementerian Perdagangan RI untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) di Stadion Kanjuruhan, berupa 86 unit tenda; Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kerajinan Kendedes, berupa 5 unit tenda serta Pedagang Kaki Lima (PKL) di Halaman Kantor Catatan Sipil, berupa 9 unit gerobak.

Tabel 2.99
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Tahun 2012 - 2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pedagang yang mendapat bantuan pemerintah daerah	Orang	-	-	130	100	100
Jumlah Pedagang	Orang	-	-	323	340	340
Cakupan bina pedagang	%	-	-	40,25	29,41	29,41

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2017

E. Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dijabarkan sebagai perbandingan PDRB sektor Industri terhadap PDRB. Sektor industri yang dimaksudkan adalah sektor industri pengolahan, yang terdiri dari industri batubara dan pengilangan migas; industri makanan dan minuman; industri pengolahan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri kayu, barang dari kayu dan

gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; industri kertas dan barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri karet, barang dari karet dan plastik; industri barang galian bukan logam; industri logam dasar; industri barang dari logam, komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik; industri mesin dan perlengkapan YTDL, industri alat angkutan; industri furniture; industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Sektor industri cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor industri merupakan salah satu sektor penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. Dimana dengan meningkatnya sektor industri secara tidak langsung akan meningkatkan sektor perdagangan serta daya beli masyarakat. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi mengingat sektor industri sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor industri, tingkat inflasi, serta standar kualitas produk industri sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diterapkan mulai tahun 2015.

Pada tahun 2012, nilai kontribusi sektor industri sebesar 15.792,45 milyar dari total PDRB sebesar 52.796,8 milyar atau sebesar 29,91%. Dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016, nilai kontribusi sektor industri sebesar 24.784,73 milyar dari total PDRB sebesar 81.789,1 milyar atau sebesar 30,30%.

Tabel 2.100
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB
Tahun 2012 – 2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Industri Pengolahan	Milyar	15.792,45	17.202,31	19.775,36	22.298,08	24.784,73
PDRB	Milyar	52.796,8	58.674,7	65.930,8	73.841,9	81.789,1
Persentase Kontribusi	%	29,91	29,32	29,99	30,20	30,30

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Pertumbuhan industri dijabarkan sebagai persentase pertumbuhan industri dari tahun ke tahun. Industri yang dimaksud adalah industri kecil menengah formal dan non formal yang ada di Kabupaten Malang. Sedangkan untuk industri besar formal, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian NOMOR 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perizinan Pemberi Perizinan Industri, dan Tanda Daftar Industri

bahwa mulai Tanggal 25 Juni 2008 bahwa untuk Ijin Usaha Industri Besar ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Dan untuk industri menengah formal, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagai Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, bahwa mulai Tanggal 19 Agustus 2014, untuk Ijin Usaha Industri Menengah ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Malang. Sehingga untuk pencatatan register perijinan diperlukan adanya koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Malang.

Pada tahun 2012, persentase pertumbuhan industri sebesar 0,82%, jumlah industri bertambah menjadi 21.324 unit usaha pada tahun 2012. Pada tahun 2013, persentase pertumbuhan industri sebesar 2,54%, jumlah industri bertambah menjadi 21.865 unit usaha pada tahun 2013. Pada tahun 2014, persentase pertumbuhan industri sebesar 1,55%, jumlah industri bertambah menjadi 22.261 unit usaha pada tahun 2015. dan persentase pertumbuhan industri sebesar 0,26%, jumlah industri bertambah menjadi 22.261 unit usaha pada tahun 2016.

Tabel 2.101
Pertumbuhan Industri Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Formal/Berijin						
	Industri Menengah	Unit	358	378	389	402	413
	Industri Kecil	Unit	1.329	1.359	1.385	1.407	1.447
	Jumlah Industri formal	Unit	1.687	1.737	1.774	1.809	1.860
2	Industri Informal / Rumah Tangga	Unit	19.637	20.128	20.330	20.452	21.050
	Jumlah Industri	Unit	21.324	21.865	22.104	22.291	22.910
3	Pertumbuhan Industri	%	0,82	2,54	1,09	0,85	2,78

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin dijabarkan sebagai Jumlah Kelompok Industri Yang Mendapat Bantuan Binaan Pemerintah Daerah. Kelompok industri yang mendapat bantuan binaan pemerintah daerah adalah kelompok industri kecil non formal yang mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi melalui Program Pembinaan Industri Rokok yang dialokasikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pada pada tahun 2012, kelompok industri kecil non formal yang mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi sebanyak 67 kelompok industri, atau mengalami peningkatan sebesar 71,8% dari tahun lalu. Pada tahun 2013, jumlah kelompok industri kecil non formal yang mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi sebanyak 73 kelompok industri, atau mengalami peningkatan sebesar 8,9% dari tahun lalu. Pada tahun 2014, jumlah kelompok industri kecil non formal yang mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi sebanyak 77 kelompok industri, atau mengalami peningkatan sebesar 5,5% dari tahun lalu. Pada tahun 2015 dan 2016 jumlah kelompok industri kecil non formal yang mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi sebanyak 111 kelompok industri, atau mengalami peningkatan sebesar 44,2% dari tahun lalu.

Peningkatan jumlah kelompok industri kecil non formal yang mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi yang ada merupakan bentuk konsistensi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang dalam menumbuh kembangkan industri, baik industri non formal maupun industri formal.

Tabel 2.102
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Tahun 2012 – 2015

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kelompok industri yang mendapat bantuan binaan pemerintah daerah	Kelompok	67	73	77	111	0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang

F. Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Jumlah penempatan transmigrasi menjadi indikator hasil kinerja urusan.

Tingkat kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi, selain lokasi sudah ditentukan oleh Pusat, namun tergantung juga pada kemampuan negosiasi pada saat penjajagan lokasi transmigrasi dilakukan, apabila terjadi kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Malang dan pemerintah daerah lokasi transmigrasi maka dilakukan penandatanganan MoU kesepakatan bersama. Penempatan transmigrasi

setiap tahun terjadi peningkatan. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan dan memperbanyak koordinasi dengan daerah penempatan transmigrasi.

2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah meliputi fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan; serta Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Perencanaan

Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan salah satu kinerja yang harus dilaksanakan. Selama tahun 2011-2016 pelaksanaan fungsi Perencanaan menghasilkan kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.103
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan

NO	Uraian	CAPAIAN KINERJA					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dgn Perbub tepat waktu	1	1	1	1	1	2
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)	100 %	97 %	91 %	90%	90%	92%

Sumber : Bappeda Kab Malang

B. Keuangan

Belum optimalnya upaya peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah, Masih terdapat sarana prasarana yang belum sesuai standar, Belum optimalnya pengelolaan aset, Belum optimalnyatingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi Pemerintah, Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) masih belum optimal.

Tabel 2.104
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan

NO	Uraian	CAPAIAN KINERJA				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah)	10,37	13,44	13,31	14,62	19,86

Sumber : BPKAD Kab Malang

C. Pengawasan

Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan cukup memuaskan. Dalam 6 (enam) tahun Kabupaten Malang mendapatkan 3 (tiga) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.105
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan

NO	Uraian	CAPAIAN KINERJA					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kab Malang

D. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat, Belum optimalnya penerapan SOP pelayanan, Belum meratanya persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah dari segi jumlah maupun kualitas, Belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional, Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan.

Tabel 2.106
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

NO	Uraian	CAPAIAN KINERJA					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Diklat Kepemimpinan	116	123	62	81	42	89
2	Diklat Manajemen Pemerintahan	-	-	2	477	616	148
3	Diklat Teknis	80	80	423	413	200	83
4	Diklat Fungsional	40	80	157	339	280	40

Sumber : BKD Kab. Malang

E. Penelitian dan Pengembangan

Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah. Selama tahun 2010-2015 pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan menghasilkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.107
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

NO	Uraian	CAPAIAN KINERJA					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh Balitbang	8	5	4	11	8	8

Sumber : Balitbang Kab Malang

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah

Selain digunakan untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah dan parameter arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi, struktur ekonomi juga dipakai sebagai alat untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Gambaran atas pilar-pilar kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat diidentifikasi secara objektif melalui peran sektoral atau lapangan usaha dalam struktur perekonomian. Perbandingan produktifitas masing-masing lapangan usaha (yang dinyatakan dengan satuan persentase) dapat menggambarkan besaran kontribusi setiap lapangan usaha dalam membentuk kemampuan ekonomi daerah. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan dalam memperkuat kapasitas ekonomi daerah Kabupaten Malang secara berurutan ialah: (1) industri pengolahan; (2) Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (3) Pertanian, kehutanan dan Perikanan; (4) Kontruksi; (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; (7) Jasa pendidikan; (8) Pertambangan dan Penggalian; (9) Jasa lainnya; (10) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (11) Jasa keuangan dan asuransi; (12) *Real estate*, (13) Transportasi dan pergudangan; (14) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (15) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (16) Jasa Perusahaan; dan (17) Pengadaan Listrik dan Gas.

Dilihat dari ketersediaan potensi di kawasan Malang Raya dan beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki sektor andalan yang bersamaan dengan Kabupaten Malang sesungguhnya diperlukan kerja sama kawasan yang dapat mempercepat kemajuan daerah sekaligus menjadi kekuatan daya saing bersama. Berikut gambaran potensi beberapa Kabupaten/Kota yang potensinya serupa dengan Kabupaten Malang:

Tabel 2.108
Daerah Yang Potensi Andalannya Sama Dengan Kabupaten Malang

No	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN	PERTAMBANGAN
1	Kab. Malang	Kab. Jember	Kab. Malang	Kab. Gresik	Kab. Tuban
2	Kab. Probolinggo	Kab. Blitar	Kab. Blitar	Kab. Lamongan	Kab. Gresik
3	Kab. Jember	Kab. Malang	Kab. Bangkalan	Kab. Sidoarjo	
4	Kab. Banyuwangi			Kab. Bondowoso	
5	Kab. Bojonegoro				
6	Kab. Blitar				
7	Kab. Lamongan				

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa posisi Kabupaten Malang cukup bersaing atau kompetitif untuk sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan. Namun demikian sektor yang potensinya besar yaitu perikanan dan pertambangan belum mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur.

Perekonomian Kabupaten Malang juga ditopang oleh sektor industri yang berorientasi ekspor. Berikut data realisasi ekspor Tahun 2016 per komoditas:

Tabel 2.109
Realisasi Ekspor Non Migas Menurut Komoditas
Tahun 2016

No	Komoditas	Volume (kg)	Nilai (USD)
1	Kopi	67.707.287.31	120.827.813.28
2	Tekstil	59.387.831.02	55.171.663.1
3	Audio dan TV Cabinet	31.271.281.07	47.753.083.63
4	Kayu Moulding	8.030.514.35	32,893,352.18
5	Rokok	3,381,117.96	19,509,224.28
6	Kulit	7,293,148.63	14,031,234.53
7	Botol Kemasan	783,068.52	11,583,920.04
8	Jelly Alga	3,639,202.00	10,738,607.12
9	Mebeler	9,273,139.60	8,946,123.87
10	Kakao	3,371,566.38	7,302,275.21
	Sub Total	194,138,156.84	328,757,297.24

11	Komoditas Lain	17,117,475.51	29,905,414.58
Total		211,255,632.35	358,662,711.82

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Berdasarkan tabel di atas, komoditas ekspor non migas terbesar dari Kabupaten Malang adalah Kopi. Produsen Kopi terbesar dan berkualitas di Kabupaten Malang berasal dari wilayah Kecamatan Dampit dan daerah sekitar seperti Tirtoyudo, Amplegading dan Sumbermanjing Wetan atau terkenal dengan sebutan kawasan AMSTIRDAM. Kopi asal Dampit telah memperoleh lisensi dari 4 C (The Common Code for The Coffee Community) Association yang berkedudukan di Jerman melalui PT Asal Jaya dengan nomor No L-2004 8-37-2-0317. Dengan demikian, Kopi Dampit telah memenuhi standart kualifikasi internasional dan layak untuk diekspor.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah dan nilai ekspor komoditas, perkembangan investasi juga cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Investasi yang mengalami pertumbuhan terdiri atas investasi negeri maupun investasi asing. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor pada situasi wilayah dan potensi Kabupaten Malang yang tergolong tinggi.

Tabel 2.110
Perkembangan Jumlah Dan Nilai Investasi PMDN/PMA
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Investasi	Buah	37	37	38	40	40
	- PMDN	Buah	19	19	19	20	20
	- PMA	Buah	18	18	19	20	20
2	Nilai Investasi	Milyar	6.126,14	6.326,28	6.346,28	6.484,69	6.989,66
	- PMDN	Milyar	5.185,88	5.185,84	5.185,88	5.204,25	5.556,48
	- PMA	Milyar	940,30	1.140,44	1.160,44	1.280,44	1.433,17

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan dan pertumbuhan kota pada dasarnya merupakan perwujudan tuntutan kebutuhan ruang yang diakibatkan oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta kegiatan fungsionalnya, serta interaksi antarkegiatan tersebut. Pertumbuhan

dan perkembangan kota dapat berjalan dengan sendirinya tetapi pada suatu saat dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk diatasi yang bersifat keruangan, struktural, dan fungsional. Melihat kenyataan tersebut, sebaiknya sejak dini bila ada gejala pertumbuhan dan perkembangan kota, maka perlu sekali diarahkan melalui perencanaan untuk mencapai keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan potensi yang ada seefisien dan seefektif mungkin, agar tercipta hubungan yang serasi dan harmonis antara manusia dan lingkungannya.

A. Perhubungan

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Malang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- (a) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Malang;
- (b) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Seiring dengan semakin meningkatnya dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 8.802,41 km terbagi atas jalan negara 115,63 km (1 persen), jalan provinsi 110,12 km (1 persen), jalan kabupaten 1.668,76 km (19 persen) dan jalan desa 6.907,90 km (79 persen) sehingga total 8.802,41 km. Berikut tabel rincian perkembangan prasarana jalan di Kabupaten Malang.

Tabel 2.111
Perkembangan Prasarana Jalan Tahun 2012 - 2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jalan Negara	Km	115,63	115,63	115,63	115,63	115,63
Jalan Provinsi	Km	110,12	110,12	110,12	110,12	110,12

Jalan Kabupaten	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Jalan Desa	Km	6.907,90	6.907,90	6.907,90	6.907,90	6.907,90

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga, 2017

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah, meliputi a) pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian Selatan Tengah Jawa Timur; b) pembangunan jalan tol Pandaan-Malang melanjutkan tol Surabaya-Pandaan, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Jogjakarta (ke Barat) dan Malang-Denpasar melalui Banyuwangi (ke Timur), dengan demikian potensi yang selama ini belum tergalai karena hambatan transportasi di Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan.

Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.112
Perkembangan Sarana Transportasi di Kabupaten Malang
Tahun 2012 – 2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Mobil Penumpang Umum	Buah	804	805	843	843	843
2	Bus Umum	Buah	3.015	3.134	3.239	3.326	3.428
3	Bus Bukan Umum	Buah	388	432	480	590	674
4	Mobil Barang Umum	Buah	8.072	9.165	10.12	10.453	10.453
5	Mobil Barang Bukan Umum	Buah	17.070	18.798	20.50	23.394	26.454
6	Kereta Gandengan Umum	Buah	104	103	106	104	104
7	Kereta Gandengan Bukan	Buah	90	90	90	92	92
8	Kereta Tempel Umum	Buah	41	47	48	47	48
9	Kereta Tempel Bukan Umum	Buah	16	16	16	17	16

10	Kendaraan Khusus Bukan Umum	Buah	0	0	0	0	0
----	-----------------------------	------	---	---	---	---	---

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa *trend* perkembangan sarana transportasi Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2011 hanya sebanyak 27.233. Tahun 2015 meningkat tajam menjadi 38.866 atau terjadi kenaikan rata-rata 8 persen per tahun.

Tabel 2.113
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang jalan	Km	1894,51	1894,51	1894,51	1894,51	
Jumlah Kendaraan	Unit	n/a	n/a	753,277	719,144	
Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	%	n/a	n/a	0.25	0.25	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

B. Penataan Ruang

Kabupaten Malang memiliki Luas Wilayah 353.486 Ha atau 3.534,86 Km² dengan Luas Daratan 2.977,05 Ha yang selebihnya adalah Lautan, sedangkan struktur penggunaan tanah terdiri dari:

1. Permukiman / Kawasan Terbangun	:	80.555,86	Ha	(22.89 %)
2. Industri	:	753,47	Ha	(0.21 %)
3. Sawah				
- Irigasi	:	36.058,49	Ha	(10.25 %)
- Non Irigasi	:	10.020,79	Ha	(2.85 %)
4. Pertanian Tanah Kering	:	83.402,92	Ha	(23.70 %)
5. Perkebunan				
- Perkebunan Rakyat	:	875,99	Ha	(0.24 %)
- Perkebunan Besar	:	21.014,96	Ha	(5.97 %)
6. Hutan				
- Sejenis	:	17.406,93	Ha	(4.95 %)
- Belukar	:	10.198,62	Ha	(2.90 %)
- Lebat	:	73.458,06	Ha	(20.90 %)
7. Rawa / Danau Waduk	:	718,69	Ha	(0.20 %)
8. Tambak / Kolam	:	121,43	Ha	(0.03 %)
9. Padang Rumput / Tanah Kosong	:	1.042,59	Ha	(0.30 %)
10. Tanah Tandus / Tanah Rusak	:	5.431,77	Ha	(1.55 %)
11. Tambang Galian C	:	905,20	Ha	(0.26 %)
12. Lain - lain	:	9.906,8613	Ha	(2.82 %)

Sumber : BPN Kabupaten Malang

Berdasarkan Pola Ruang Wilayah, Kabupaten Malang terdiri dari:

1. Kawasan Lindung

- (a) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, melalui penetapan kawasan hutan dan pengamanannya wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
- (b) kawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan mangrove dan kawasan pesisir di Malang Selatan;
- (c) kawasan suaka alam dan pelestarian alam, melalui perlindungan kawasan cagar budaya dan reboisasi kawasan yang rusak;
- (d) kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk penanggulangan bencana alam; dan
- (e) kawasan lindung lainnya, melalui pengembalian rona alam yang mengalami kerusakan pada kawasan-kawasan konservasi.

2. Kawasan Budidaya

- (a) Kawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi di Kabupaten Malang yang mencapai 30,5 %.
- (b) Kawasan pertanian, melalui :
 - (1) Penetapan pertanian pangan berkelanjutan (sawah beririgasi teknis);
 - (2) pengembangan lumbung desa modern;
 - (3) pengembangan hortikultura unggulan;
 - (4) pengembangan sentra peternakan; dan
 - (5) pengembangan perikanan tangkap, dan minapolitan;
- (c) Kawasan industri, melalui pengembangan industri menengah dan *home industry*.
- (d) Kawasan pariwisata, melalui:
 - (1) Pengembangan zona wisata; dan
 - (2) pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Malang, yaitu : Wisata Air Wadit di Malang Timur, Wisata Ritual Gunung Kawi, Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep di Malang Selatan, serta Waduk Selorejo dan Wanawisata Cobanrondo.
- (e) Kawasan permukiman, melalui penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten Malang (pengembangan Kasiba-Lisiba).

C. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut:

Tabel 2.114

Perkembangan Kelistrikan Tahun 2012 – 2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Distribusi JTM	Kms	2.645	2.705	2.767	2.828	2.828
Distribusi JTR	Kms	5.565	5.592	5.651	5.782	5.782
Distribusi GRD	unit	3.962	3.752	4.055	4.574	4.574
Gardu Induk	unit	10	10	10	10	10
SR	buah	842.236	892.088	943.873	971.388	971.388
Konsumsi Listrik	kwh/th	1.817.801.313	1.944.825.761	2.071.681.783	2.151.398.610	2.151.398.610

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Jumlah investasi di Kabupaten Malang semakin bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2012 nilai investasi PMA sebesar 940,30 milyar sedangkan untuk PMDN sebesar 5.185,83 milyar, selanjutnya meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2016 nilai investasi PMA sebesar 1.433,17 milyar sedangkan untuk PMDN sebesar 5.556,48 milyar.

Tabel 2.115

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Nilai Investasi PMA	Milyar	940,30	1.140,43	1.160,43	1.280,43	1.433,17
Jumlah Nilai Investasi PMDN	Milyar	5.185,83	5.185,83	5.185,83	5.185,83	5.556,48

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Tabel 2.116

Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah) di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai realisasi investasi PMA	%	-	5,04	1,75	10,34	12,00
Nilai realisasi investasi PMDN	%	-	-	-	0,35	7,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

2.4.4 Sumber Daya Manusia

A. Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2012-2016 cukup berfluktuasi. Tahun 2015 rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Malang mengalami penurunan ada korelasi dengan penurunan jumlah penduduk. Kemudian untuk rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2016 terdapat 278.27, artinya dari 10.000 penduduk di Kabupaten Malang terdapat 278 penduduk yang lulus S1/S2/S3.

Tabel 2.117
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Malang Periode 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Diploma IV/Starata 1	75.107	76.989	78.324	63.526	69.485
2	Strata 2	6.398	6.440	6.472	5.061	5.510
3	Strata 3	460	481	509	470	587
Jumlah lulusan S1/S2/S3		81.965	83.910	85.305	69.057	75.582
Jumlah Penduduk		3.043.613	3.077.9603	3.092.714	2.581.671	2.782.740
Rasio lulusan S1/S2/S3		269.30	222.01	275.83	267.49	278,27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Malang tahun 2013 relatif menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012. Jika tahun 2012 rasio ketergantungan hanya sebesar 57,11%, maka tahun 2013 menurun menjadi 54,52%. Karena perpindahan keluar dan masuk penduduk Kabupaten Malang yang dinamis Sampai dengan tahun 2016, rasio ketergantungan ini cenderung mengalami sedikit penurunan, menjadi 46,68%. Dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di

Kabupaten Malang mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.118
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Malang Periode 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	519.801	537.522	536.536	612.419	616.258
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	60.903	69.490	73.179	198.557	199,965
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	580.704	607.012	609.715	810.976	816.223
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	1.016.744	1.113.278	1.108.096	1.733.399	1.748.452
5	Rasio ketergantungan (3)/(4) (%)	57.11	54.52	55.02	46,78	46.68

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah merupakan komposisi penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga analisis untuk mengetahui keadaan keuangan daerah perlu dilakukan. Analisis keuangan daerah ini dilakukan analisis melalui kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi keuangan di masa depan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa merencanakan program dan kebijakan yang akan dilakukan di suatu daerah.

Dengan dilakukannya perubahan RPJMD, dimana kebijakan pembangunan telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun fiskal dan satu tahun fiskal sedang berjalan, maka analisis gambaran umum kinerja keuangan dilakukan terhadap realisasi APBD tahun 2016, realisasi APBD tahun 2017, penetapan APBD 2018, serta proyeksi APBD 2018-2021. Realisasi beberapa tahun sebelumnya dimungkinkan untuk dicantumkan dalam rangka memperkaya analisis. Data dan informasi dimaksud digunakan sebagai bahan analisis dan perspektif untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, khususnya pada tahun 2019-2021. Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi, pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah yang dijadikan pondasi untuk perencanaan pembangunan daerah harus tercantum di RPJMD daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aspek yang penting dalam penyusunan RPJMD. Hal ini dikarenakan gambaran pengelolaan keuangan yang tersusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di RPJMD akan bisa mendeskripsikan keuangan yang digunakan dalam suatu pelaksanaan program dan kebijakan di daerah. Dengan demikian APBD yang tercantum di RPJMD akan menggambarkan program prioritas pembangunan daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan dapat dianalisis melalui keuangan yang digunakan.

Demi mencapai upaya prioritas pembangunan seluruh kegiatan pada rencana pembangunan lima tahunan melalui RPJMD, perlu ditetapkan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Kedua hal tersebut perlu ditetapkan agar pengelolaan daerah dapat digunakan secara

efektif dan efisien untuk masyarakat umum. Arah gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka APBD. APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. APBD disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk tahun tertentu.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam; (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan; (7) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah.

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk penyelerasan sumber dana yang tersedia sesuai kebijakan dan program pemerintah untuk mengatasi kondisi pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien. Pada prinsipnya

pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan publik sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Kinerja keuangan APBD dianalisis dari sisi kinerja pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, analisis proporsi pemenuhan belanja aparatur, pengelolaan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi belanja dan pembiayaan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan yang Sah lainnya. Adapun aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selanjutnya untuk aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Arah pengelolaan pendapatan daerah akan difokuskan pada upaya pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD harus terealisasi secara efektif dan efisien.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Malang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya. Sedangkan Dana Perimbangan berasal dari bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, dana bagi hasil, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi. Gambaran realisasi pendapatan daerah ini diharapkan dapat membantu dalam mendorong berbagai kebijakan, program dan belanja daerah.

Pada dasarnya pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan daerah yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun daerah. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana perimbangan, di samping juga yang berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diharapkan tetap meningkat sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi di daerah tetap kondusif terutama pada saat perekonomian sedang lesu. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang masih tergantung dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana perimbangan lainnya. Hal inilah yang menjadi persoalan yang penting bagi penerimaan daerah.

Berikut merupakan realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2017:

Tabel 3.1
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2017

Nomor	Uraian	2013 (Rupiah)	2014 (Rupiah)	2015 (Rupiah)	2016 (Rupiah)	2017 (Rupiah)	Rata-rata Pertumbuhan per tahun (%)
I	PENDAPATAN DAERAH	2.529.685.862.151,87	3.058.671.277.833,13	3.471.281.006.610,73	3.439.632.063.348,96	3.741.811.706.499,19	10,57
1.1	Pendapatan Asli Daerah	262.267.260.454,87	411.185.107.107,13	461.887.704.824,73	502.754.981.974,96	743.313.499.675,19	31,45
1.1.1	Pendapatan Pajak daerah	95.918.841.193,00	153.924.838.045,99	170.108.822.450,00	191.399.578.172,88	255.851.109.883,64	29,29
1.1.2	Hasil Retribusi daerah	45.314.153.759,39	51.905.681.732,00	40.403.196.760,00	40.830.674.619,00	38.398.298.560,00	-3,13
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	12.007.868.773,33	12.670.468.247,73	18.340.914.239,20	14.294.282.184,44	15.817.903.641,80	9,72
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	109.026.396.729,15	192.684.119.081,41	233.034.771.357,53	256.230.446.998,64	433.246.187.589,75	44,18
1.2	Dana Perimbangan	1.700.485.365.220,00	1.831.998.927.025,00	1.893.231.262.923,00	2.308.269.278.031,00	2.299.979.677.583,00	8,16
1.2.1	Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	148.938.981.220,00	129.756.776.025,00	126.719.045.923,00	145.219.916.051,00	128.179.963.798,00	-3,09
1.2.2	Dana alokasi umum	1.439.234.034.000,00	1.572.191.571.000,00	1.613.161.777.000,00	1.694.884.660.000,00	1.665.110.987.000,00	3,79
1.2.3	Dana alokasi khusus	112.312.350.000,00	130.050.580.000,00	153.350.440.000,00	468.164.701.980,00	506.688.726.785,00	61,81
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	566.933.236.477,00	815.487.243.701,00	1.116.162.038.863,00	628.607.803.343,00	698.518.529.241,00	12,04
1.3.1	Hibah	0,00	949.656.000,00	19.994.558.900,00	25.316.252.600,00	24.743.464.000,00	676,60
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda lainnya	127.284.469.477,00	206.032.406.701,00	213.897.330.963,00	219.986.213.243,00	267.272.241.741,00	22,51
1.3.4	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	370.878.002.000,00	452.738.931.000,00	581.206.056.000,00	285.647.131.000,00	320.479.737.000,00	2,95
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda lainnya	68.770.765.000,00	155.766.250.000,00	301.064.093.000,00	97.658.206.500,00	86.023.086.500,00	35,08

Sumber : BPKAD Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa perentase pertumbuhan dari sisi pendapatan daerah Kabupaten Malang tahun 2013-2014 adalah sebesar 20,91 %, kemudian pada tahun 2014-2015 menjadi sebesar 13,49% dan kemudian pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar 9,11% . Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2017 mencapai 8,79%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Malang tahun 2013-2017 yakni 13,1%. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan pada tahun anggaran 2013-2017 tersebut apabila dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan belanja pada waktu anggaran yang sama masih cukup tinggi.

Tabel 3.2
Struktur dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Malang tahun 2013-2017

Jenis Pendapatan Daerah	Struktur (%)					Pertumbuhan (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2013-2017
Pendapatan Asli Daerah	10,37	13,44	13,31	14,62	19,86	29,67	-1,02	9,85	35,91	49,34
Dana Perimbangan	67,22	59,90	54,54	67,11	61,47	-10,90	-8,94	23,04	-8,41	-117,73
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	22,41	26,66	32,15	18,28	18,67	18,96	20,60	-43,16	2,15	1,59

B. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mempercepat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Terdapat tiga elemen penting yang saling bersentuhan untuk diperhatikan dalam menentukan belanja daerah yaitu: masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan, pemerintah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pembangunan serta DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dibidang penyusunan peraturan daerah, penyusunan anggaran dan pengawasan. Hakekat anggaran belanja daerah adalah sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikian anggaran belanja daerah hingga saat ini masih dirasakan sangat terbatas, sehingga diperlukan skala prioritas dalam penggunaannya. Secara garis besar kendala utama dalam menyusun belanja daerah adalah tajamnya perbedaan antara kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan yang harus ditangani dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan strategi dalam penyusunan Anggaran Belanja Daerah yaitu:

1. Penajaman skala prioritas pada kebutuhan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap capaian tingkat kesejahteraan;
2. Prioritas pada urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan arahan perencanaan baik RPJMD maupun RKPD; dan
3. Memperhatikan aspek politik dan sosial kemasyarakatan baik berskala daerah, regional maupun nasional.

Untuk memperjelas penggunaannya, anggaran belanja dikelompokkan menjadi dua bagian utama yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 3.3
 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Malang
 Tahun Anggaran 2013-2017

Nomor	Uraian	2013 (Rupiah)	2014 (Rupiah)	2015 (Rupiah)	2016 (Rupiah)	2017 (Rupiah)	Rata-rata Pertumbuhan per tahun (%)
1	BELANJA DAERAH	2.440.509.395.392,07	2.864.314.173.736,17	3.538.236.408.628,75	3.543.281.420.693,89	3.617.054.713.494,68	10,78
1.1	Belanja Tidak Langsung	1.511.241.974.353,00	1.629.572.341.704,00	1.955.359.089.237,00	2.011.552.863.042,50	1.908.647.554.313,51	6,40
1.1.1	Belanja pegawai	1.239.250.421.797,00	1.381.411.861.626,00	1.403.342.366.775,00	1.444.198.233.600,00	1.281.201.252.736,92	1,17
1.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Belanja hibah	85.708.808.180,00	115.434.068.600,00	207.260.510.179,00	90.587.169.480,00	84.290.140.939,59	12,75
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	66.234.873.200,00	15.115.149.000,00	20.105.658.000,00	12.476.650.000,00	26.284.800.000,00	7,14
1.1.6	Belanja Bagi Hasil	14.631.182.317,00	15.303.673.890,00	30.630.076.536,00	28.682.058.300,50	15.946.060.761,00	13,50
1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	705.400.227,00	769.032.588,00	288.968.291.977,00	429.346.209.612,00	500.924.299.876,00	9.387,46
1.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.695.673.632,00	2.499.375.000,00	5.052.185.770,00	6.262.542.050,00	0,00	57,83
1.1.9	Belanja Transfer Keuangan kepada Pemerintah Desa	103.015.615.000,00	99.039.181.000,00	0,00	0,00	0,00	-3,86
1.2	Belanja Langsung	929.267.421.039,07	1.234.741.832.032,17	1.582.877.319.391,75	1.531.728.557.651,39	1.708.407.159.181,17	17,34
1.2.1	Belanja Pegawai	87.198.262.349,00	118.220.239.768,43	163.203.501.885,26	178.901.639.206,85	225.086.262.729,62	27,27
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	405.567.656.162,07	615.017.918.829,74	705.480.922.283,30	668.901.797.142,74	742.976.554.018,74	18,06
1.2.3	Belanja Modal	436.501.502.528,00	501.503.673.434,00	714.192.895.223,19	683.925.121.301,80	740.344.342.432,81	15,33

Sumber : BPKAD Kabupaten Malang

Tabel 3.4
Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2017

No.	Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
1	2013	2.600.945.632.815,16	2.440.509.395.392,07	160.436.237.423,09	93,83
2	2014	3.158.047.979.577,68	2.864.314.173.736,17	293.733.805.841,51	90,70
3	2015	3.847.980.791.548,56	3.538.236.408.628,75	309.744.382.919,81	91,95
4	2016	3.308.220.881.043,84	3.085.253.152.781,39	222.967.728.262,45	93,26
5	2017	3.867.867.660.896,54	3.617.054.713.494,68	250.812.947.401,86	93,52
Rata-rata Prosentase Realisasi Belanja Daerah					92,65

Sumber : BPKAD Kabupaten Malang

Tabel 3.5
Target Dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2017

No	Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
1	2013	1.351.246.089.870,56	1.239.250.421.797,00	111.995.668.073,56	91,71
2	2014	1.571.912.623.792,95	1.381.411.861.626,00	190.500.762.166,95	87,88
3	2015	1.613.269.395.504,17	1.403.342.366.775,00	209.927.028.729,17	86,99
4	2016	1.519.142.003.336,82	1.444.198.233.600,00	74.943.769.736,82	95,07
5	2017	1.387.057.658.907,10	1.281.201.252.736,92	105.855.406.170,18	92,37
Rata-rata Prosentase Realisasi Belanja pegawai					90,80

Sumber : BPKAD Kabupaten Malang

Tabel 3.6
Rasio Realisasi Pendapatan Dengan Realisasi Belanja Dalam Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan	2.529.685.862.151,87	3.058.671.277.833,13	3.471.281.006.610,73	3.439.632.063.348,96	3.741.797.078.749,19
2	Belanja	2.440.509.395.392,07	2.864.314.173.736,17	3.538.236.408.626,75	3.543.281.420.693,89	3100.184.352.857,68
3	Persentase	96,47	93,65	98,10	97,07	120,70

Sumber : BPKAD Kabupaten Malang

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 dan rata-rata perkembangan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah APBD
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2017

No.	Uraian	2013 (Rupiah)	2014 (Rupiah)	2015 (Rupiah)	2016 (Rupiah)	2017 (Rupiah)
1	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.1	Penerimaan Pembiayaan	123.134.944.546,62	217.172.991.116,39	427.161.196.272,67	352.093.880.267,55	217.444.522.922,62
1.1.1	Penggunaan SILPA (tahun lalu)	123.124.944.546,62	194.440.358.298,77	390.957.110.050,91	352.093.880.267,55	217.444.522.922,62
1.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	22.732.632.817,62	36.204.086.221,76	0,00	0,00
1.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	17.694.629.138,70	20.572.985.162,44	8.111.913.987,10	31.000.000.000,00	50.147.791.979,72
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	16.694.629.138,70	19.572.985.162,44	1.515.584.449,05	0,00	15.147.791.979,72
1.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	5.596.329.538,05	30.000.000.000,00	34.000.000.000,00
1.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	105.440.315.407,9	196.600.005.953,95	419.049.282.285,57	321.093.880.267,55	167.296.730.942,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Malang

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Tabel 3.8
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan per tahun
1	2	3	4	5	6	7
ASET	5.944.030.513.016,47	6.811.346.538.188,62	7.509.688.960.815,35	8.158.654.348.295,56	9.419.768.487.737,53	12,24
ASET LANCAR	246.151.506.668,38	469.818.670.143,79	454.166.552.798,88	318.089.085.022,42	414.828.395.603,92	22,00
Kas	196.521.923.490,59	390.986.361.637,13	353.413.134.828,12	217.562.055.735,35	292.039.096.197,41	21,28
Piutang	36.306.251.868,79	60.701.949.512,50	82.623.058.976,60	82.094.015.626,54	89.897.933.273,26	28,04
Investasi jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	13.323.331.309,00	18.130.358.994,16	18.130.358.994,16	18.433.013.660,53	32.891.366.133,25	29,05
INVESTASI JANGKA PANJANG	154.967.660.798,54	141.127.329.876,71	141.139.762.625,16	181.090.410.972,31	235.263.016.996,29	12,32
Investasi non Permanen	6.733.286.900,88	5.749.495.571,24	5.761.928.316,68	6.732.899.439,19	6.516.302.118,38	-0,19
Investasi Permanen	148.234.373.897,66	135.377.834.305,47	135.377.834.308,48	174.357.511.533,12	228.746.714.877,91	12,83
ASET TETAP	5.446.925.100.435,89	6.097.390.801.890,22	6.811.372.909.113,41	7.622.499.406.168,97	8.712.074.733.726,48	12,46
Tanah	1.951.376.651.282,20	1.984.854.578.570,38	1.999.365.964.570,38	2.028.394.855.570,38	2.386.414.726.372,58	5,39
Peralatan dan mesin	488.437.511.933,62	589.107.560.935,75	757.054.473.121,94	929.817.964.723,59	1.048.047.974.118,44	21,16
Gedung dan bangunan	1.152.849.352.597,00	1.298.071.608.150,44	1.446.837.193.440,44	1.702.340.824.433,54	1.822.243.684.315,54	12,19
Jalan, irigasi, dan jaringan	1.708.675.146.407,39	2.000.325.812.625,39	2.380.750.581.202,39	2.858.223.437.759,39	3.331.663.193.707,39	18,18
Aset tetap lainnya	35.173.450.215,68	45.265.770.835,55	47.599.226.005,55	54.051.115.682,07	58.014.321.418,07	13,68

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan per tahun
1	2	3	4	5	6	7
Utang jangka panjang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	20.061.538.046	28.359.877.855	28.359.877.855	9.351.062.833,61	4.969.013.543,05	-18,13
EKUITAS DANA	5.923.968.974.971,18	6.748.298.158.560,85	5.440.397.882.597,35	0,00	0,00	0,00
EKUITAS DANA LANCAR	233.825.160.635,74	448.193.984.301,37	58.814.771.647,37	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	194.616.782.167,72	390.957.110.050,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan yg ditanggihkan	1.905.071.573,29	29.251.586,22	29.251.586,22	0,00	0,00	0,00
Cadangan Piutang	36.306.251.868,79	60.701.949.512,50	62.279.846.909,41	0,00	0,00	0,00
Cadangan Persediaan	13.323.331.309,00	18.130.358.994,16	18.130.358.994,16	0,00	0,00	0,00
Dana yang harus disediakan untuk pembiayaan utang jangka pendek	(12.326.276.283,06)	(21.624.685.842,42)	(21.624.685.842,42)	0,00	0,00	-6,14
EKUITAS DANA INVESTASI	5.652.295.664.907,55	6.265.415.672.486,77	5.346.894.609.177,27	0,00	0,00	-25,95
EKUITAS DANA CADANGAN	37.848.149.427,89	34.688.501.772,71	34.688.501.772,71	0,00	0,00	-27,09
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.944.030.513.016,89	6.776.658.036.415,92	5.468.757.760.452,42	9.351.062.833,61	4.969.013.543,05	-38,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Malang

Gambaran kondisi neraca daerah tersebut lebih lanjut dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio, dimana terdapat 2 jenis Rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas sebagaimana terjabarkan sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Data rasio likuiditas dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.9
Rasio Likuiditas Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio Lancar = (Aktiva Lancar : Kewajiban Jangka Pendek)	19.97	21.73	22.61	15.99	12.71
2.	Rasio Quick = (Aktiva Lancar - Persediaan : Kewajiban Jangka Pendek)	16.90	20.12	22.61	15.99	12.25

Sumber : BPKAD Kab Malang

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kondisi pendanaan yang cukup kuat dilihat dari hasil analisis ratio lancar, *quick ratio* dan rasio total hutang terhadap total aset juga bernilai sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Malang cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas dapat dilihat di tabel :

Tabel 3.10
Rasio Solvabilitas Kabupaten Malang Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
II.	Rasio Solvabilitas					
1.	Rasio Total Hutang thd Asset = Total Hutang : Total Asset	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003
2.	Rasio Total Hutang thd Modal = Total Hutang : Total Ekuitas	0.003	0.003	0.004	0	0

Sumber : BPKAD Kab Malang

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Malang secara umum bisa dilihat pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan APBD. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang rasional maka akan menghasilkan optimalisasi pendapatan daerah yang dapat digunakan dengan efisien untuk pembelanjaan dan pembiayaan daerah. Penggunaan pendapatan daerah harus digunakan dengan efektif dan efisien sehingga segala kebijakan maupun program prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara baik melalui keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meliputi: proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam analisis ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Kebutuhan belanja untuk aparatur dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan belanja tak langsung. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja di Kabupaten Malang dalam lima tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.11
 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
 Kabupaten Malang

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2013	2,440,509,395,392.07	2,545,949,710,799.99	95.86
2	Tahun Anggaran 2014	2,864,314,173,736.17	3,060,914,179,690.12	93.58
3	Tahun Anggaran 2015	3,538,276,305,821.74	3,957,325,588,107.31	89.41
4	Tahun Anggaran 2016	3,543,281,420,693.89	3,864,375,300,961.44	91.69
5	Tahun Anggaran 2017	3,617,053,713,494.68	3,784,350,444,437.58	95.58

Berdasarkan tabel di atas, prosentase terbesar penggunaan anggaran belanja adalah pada tahun 2013 dan tahun 2017.

Tabel 3.12
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
A.	Belanja Tidak Langsung	1.970.389.596.495,00	2.053.601.522.573,00	1.942.200.180.579,00	1.935.977.909.662,00
1	Belanja Pegawai	1.459.209.807.019,00	1.531.793.288.973,00	1.420.100.180.579,00	1.400.798.120.185,00
2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes	506.179.789.476,00	516.808.233.600,00	517.100.000.000,00	530.179.789.477,00
5.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
B.	Belanja Langsung	152.312.580.449,00	166.760.535.006,00	169.063.074.121,00	173.575.569.153,00
1	Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoraan yang harus diselenggarakan (habis pakai, jasa kantor dll)	152.312.580.449,00	166.760.535.006,00	169.063.074.121,00	173.575.569.153,00
C.	Pengeluaran Pembiayaan	38.000.000.000,00	16.000.000.000,00	21.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	15.000.000.000	20.000.000.000,00	0,00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	17.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Total (A+B+C)	2.160.702.176.944,00	2.236.362.057.579,00	2.132.263.254.700,00	2.110.553.478.815,00

Tabel 3.13
 Realisasi Dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Malang
 Tahun Anggaran 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rupiah)	2014 (Rupiah)	2015 (Rupiah)	2016 (Rupiah)	2017 (Rupiah)	Rata-rata Pertumbuhan per tahun (%)
1	BELANJA DAERAH	2.440.509.395.392,07	2.864.314.173.736,17	3.538.276.305.821,74	3.543.281.420.693,89	3.617.054.713.494,68	10,78
1.1	Belanja Tidak Langsung	1.511.241.974.353,00	1.629.572.341.704,00	1.844.417.080.236,00	2.011.552.863.042,50	1.908.647.554.313,51	6,24
1.1.1	Belanja pegawai	1.239.250.421.797,00	1.381.411.861.626,00	1.403.342.366.775,00	1.444.198.233.600,00	1.281.201.252.736,92	1,17
1.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Belanja hibah	85.708.808.180,00	115.434.068.600,00	96.318.501.178,00	90.587.169.480,00	84.290.140.939,59	1,31
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	66.234.873.200,00	15.115.149.000,00	20.105.658.000,00	12.476.650.000,00	26.284.800.000,00	7,14
1.1.6	Belanja Bagi Hasil	14.631.182.317,00	15.303.673.890,00	30.630.076.536,00	28.682.058.300,50	15.946.060.761,00	13,50
1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	705.400.227,00	769.032.588,00	288.968.291.977,00	429.346.209.612,00	500.924.299.876,00	9387,46
1.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.695.673.632,00	2.499.375.000,00	5.052.185.770,00	6.262.542.050,00	-	57,83
1.1.9	Belanja Transfer Keuangan kepada Pemerintah Desa	103.015.615.000,00	99.039.181.000,00	-	-	-	-3,86
1.2	Belanja Langsung	929.267.421.039,07	1.234.741.832.032,17	1.693.859.225.585,74	1.531.728.557.651,39	1.708.407.159.181,17	18,00
1.2.1	Belanja Pegawai	87.198.262.349,00	118.220.239.768,43	163.203.501.885,26	178.901.639.206,85	225.086.262.729,62	27,27
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	405.567.656.162,07	615.017.918.829,74	816.558.658.477,29	668.901.797.142,74	742.976.554.018,74	19,35
1.2.3	Belanja Modal	436.501.502.528,00	501.503.673.434,00	714.097.065.223,19	683.925.121.301,80	740.344.342.432,81	15,33

Sumber : BPKAD Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan seluruh belanja yang harus tersedianya anggarannya setiap tahun dengan baik serta bersifat rutin.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan Kabupaten Malang dalam waktu 2013-2017 dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang menyebabkan defisit riil terbesar pada 2015 75,067,316,003.12. Rinciannya sebagai tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Malang

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Realisasi Pendapatan Daerah	2.529.685.862.151,87	3.058.671.277.833,13	3,471,281,006,610.73	3.439.632.063.348,96	3.741.797.078.749,19
Belanja Daerah	2.440.509.395.392,07	2.864.314.173.736,17	3,538,236,408,626.75	3.085.253.152.781,39	3.100.184.352.857,68
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.694.629.138,70	20.572.985.162,44	8.111.913.987,10	321.093.880.267,55	167.296.730.942,90
Defisit riil	71,481,837,621.10	173,784,118,934.52	(75,067,316,003.12)	217.444.522.922,62	292.039.096.197,41

Sumber : BPKAD Kabupaten Malang

Dari tabel 3.14 di atas dapat diketahui bahwa untuk menutup defisit riil pemerintah Kabupaten Malang menggunakan strategi pemakaian penerimaan pembiayaan, penggunaan SILPA tahun lalu 2013-2017, pencairan dana kembali, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Selama waktu 2013-2017, penerimaan pembiayaan bersifat flutuaktif dengan perencanaan penganggaran yang dilakukan rasional dan detail sehingga pada beberapa tahun memiliki kemampuan keuangan daerah yang lebih tinggi daripada defisit riil.

Berikut ini merupakan data penutup defisit riil anggaran Kabupaten Malang pada tahun 2013-2017, rinciannya pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah APBD
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2017

No.	Uraian	2013 (Rupiah)	2014 (Rupiah)	2015 (Rupiah)	2016 (Rupiah)	2017 (Rupiah)
1	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.1	Penerimaan Pembiayaan	123.134.944.546,62	217.172.991.116,39	427.161.196.272,67	352.093.880.267,55	217.444.522.922,62
1.1.1	Penggunaan SILPA (tahun lalu)	123.124.944.546,62	194.440.358.298,77	390.957.110.050,91	352.093.880.267,55	217.444.522.922,62
1.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	22.732.632.817,62	36.204.086.221,76	0,00	0,00
1.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	17.694.629.138,70	20.572.985.162,44	8.111.913.987,10	31.000.000.000,00	50.147.791.979,72
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	16.694.629.138,70	19.572.985.162,44	1.515.584.449,05	0,00	15.147.791.979,72
1.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	5.596.329.538,05	30.000.000.000,00	34.000.000.000,00
1.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	105.440.315.407,9	196.600.005.953,95	419.049.282.285,57	321.093.880.267,55	167.296.730.942,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Malang

Berdasarkan pada tabel 3.16 diatas diketahui bahwa penerimaan pembiayaan dari 2013-2017 mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup tinggi. Pada Tahun 2014 ke 2015 Rp419.049.282.285,57 dan mengalami penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2016 ke 2017 Rp167.296.730.942,00. Berikut ini merupakan data realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) riil Kabupaten Malang Tahun 2013-2017.

Tabel 3.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Malang

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	123,124,944,546.62	194,440,358,298.77	390,957,110,050.91	352,093,880,267.55	217,444,522,922.62
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	22,732,632,817.62	36,204,086,221.76	0.00	0.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan.

3.3.1. Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Malang

Proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan dengan menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Gambaran proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tertuang dalam tabel 3.17 :

Tabel 3.17
Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Malang
Tahun 2018 – 2021

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
A.	Belanja Tidak Langsung	1.970.389.596.495,00	2.053.601.522.573,00	1.942.200.180.579,00	1.935.977.909.662,00
1	Belanja Pegawai	1.459.209.807.019,00	1.531.793.288.973,00	1.420.100.180.579,00	1.400.798.120.185,00
2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes	506.179.789.476,00	516.808.233.600,00	517.100.000.000,00	530.179.789.477,00
5.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
B.	Belanja Langsung	152.312.580.449,00	166.760.535.006,00	169.063.074.121,00	173.575.569.153,00
1	Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoraan yang harus diselenggarakan (habis pakai, jasa kantor dll)	152.312.580.449,00	166.760.535.006,00	169.063.074.121,00	173.575.569.153,00
C.	Pengeluaran Pembiayaan	38.000.000.000,00	16.000.000.000,00	21.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	17.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Total (A+B+C)	2.160.702.176.944,00	2.236.362.057.579,00	2.132.263.254.700,00	2.110.553.478.815,00

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurun waktu 2013-2017 sebesar 13,1% per tahun. Pencapaian realisasi tersebut disamping karena adanya kebijakan keuangan yang sumbernya adalah penerimaan daerah termasuk pendapatan daerah. Sedangkan proyeksi pendapatan daerah 2018-2021 sebesar 3 – 5 % diasumsikan tidak adanya perubahan signifikan terhadap kebijakan keuangan daerah Kabupaten Malang sehingga berdampak terhadap penerimaan daerah. Maka proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018-2021 Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 3.18
 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang
 Tahun 2018 - 2021

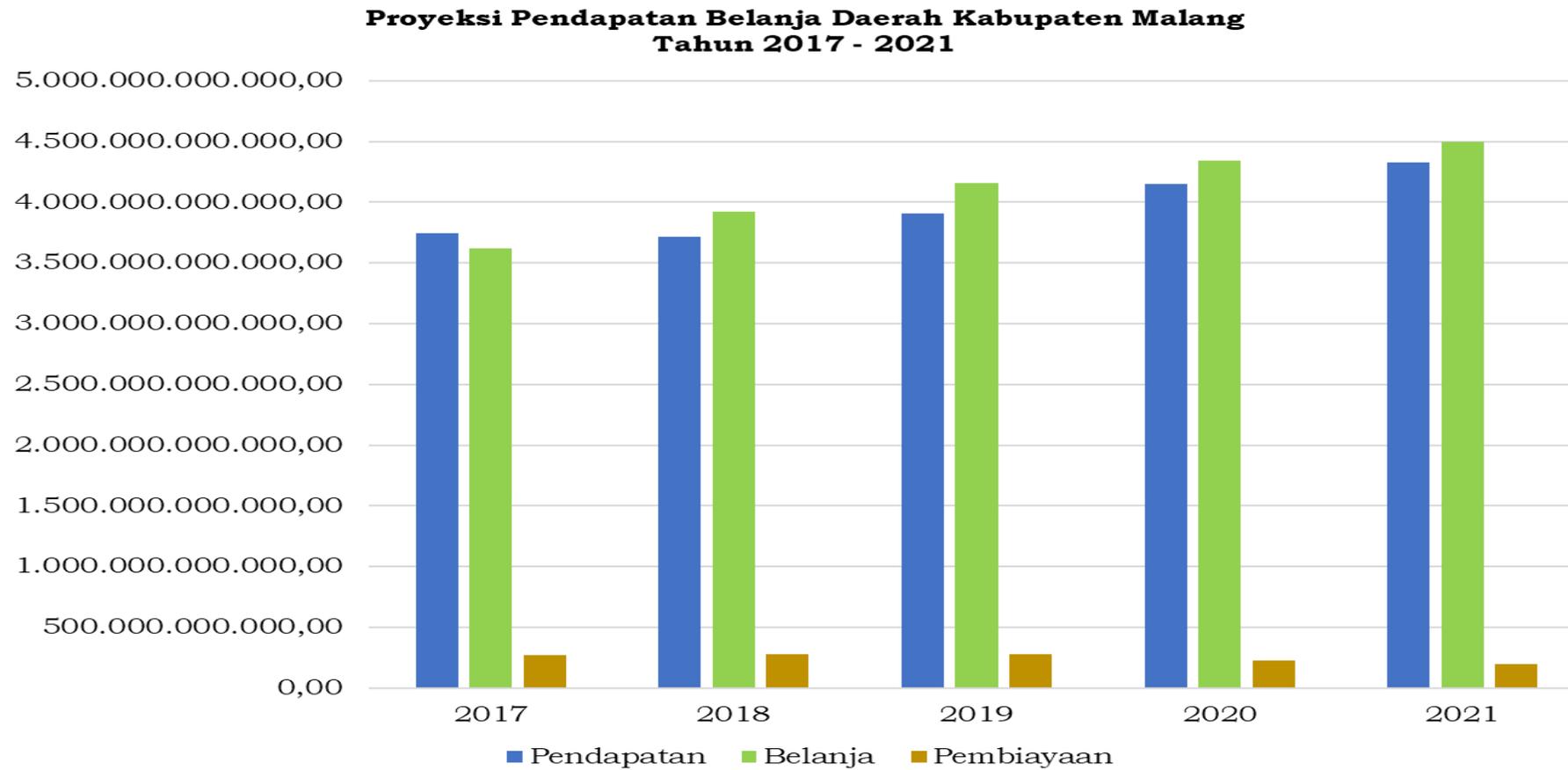
NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2017*	2018**	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDAPATAN	3.741.811.706.499,19	3.719.088.768.103,96	3.907.907.344.312,49	4.148.265.173.893,29	4.327.742.409.572,97
1.1	Pendapatan Asli Daerah	743.313.499.675,19	489.326.953.004,96	514.522.904.344,02	550.451.082.974,31	579.224.443.410,44
1.1.1	Pajak Daerah	255.851.109.883,64	205.066.250.000,00	215.661.875.000,00	228.633.856.000,00	240.021.599.666,67
1.1.2	Retribusi Daerah	38.398.298.560,00	35.547.501.460,00	36.435.684.096,00	46.119.356.269,60	49.939.368.751,47
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.817.903.641,8	16.924.114.019,94	17.859.333.548,00	14.874.687.360,74	14.503.284.983,69
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	433.246.187.589,75	231.789.087.525,02	244.566.011.700,02	260.823.183.343,97	274.760.190.008,61
1.2	Dana Perimbangan	2.299.979.677.583,00	2.411.639.617.000,00	2.556.587.385.256,47	2.700.863.419.876,09	2.875.745.989.209,12
1.2.1	Dana Bagi Hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	128.179.963.798,00	158.199.390.000,00	166.367.098.495,00	179.074.037.716,09	189.886.180.153,12
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.665.110.987.000,00	1.665.195.901.000,00	1.665.195.901.000,00	1.731.803.737.040,00	1.801.075.886.521,60
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	506.688.726.785,00	588.244.326.000,00	725.024.385.761,47	789.985.645.120,00	884.783.922.534,40
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	698.518.529.241,00	818.122.198.099,00	836.797.054.712,00	896.950.671.042,89	872.771.976.953,41
1.3.1	Hibah	24.743.464.000,00	200.678.600.000,00	185.678.600.000,00	30.691.532.812,50	30.691.532.812,50
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	267.272.241.741,00	243.838.853.599,00	218.504.710.212,00	400.470.655.465,78	376.086.889.701,28
1.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	320.479.737.000,00	346.590.658.000,00	346.590.658.000,00	347.205.873.025,07	347.410.944.700,09

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2017*	2018**	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	86.023.086.500,00	27.014.086.500,00	86.023.086.500,00	118.582.609.739,54	118.582.609.739,54
II	BELANJA DAERAH	3.617.054.713.494,68	3.919.235.773.458,44	4.157.615.110.797,50	4.341.070.471.704,14	4.495.498.339.707,65
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.908.647.554.313,51	2.106.513.788.581,00	2.191.176.798.228,50	2.232.170.857.979,14	2.273.383.798.065,65
2.1.1	Belanja Pegawai	1.281.202.252.736,92	1.459.209.807.019,00	1.533.902.240.973,00	1.582.987.112.684,14	1.622.561.790.501,24
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	84.290.140.939,59	87.808.166.940,00	87.694.423.741,00	95.000.000.000	91.326.192.940,41
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	26.284.800.000,00	29.651.650.000,00	29.651.650.000,00	29.651.650.000	29.651.650.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemdes	15.946.060.761,00	18.664.375.146,00	19.412.441.065,00	21.200.323.695	18.664.375.147,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes	500.924.299.876,00	506.179.789.476,00	515.516.042.449,50	498.331.771.600	506.179.789.477,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000	5.000.000.000,00
2.1.9	Belanja Transfer Keuangan kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	1.708.407.159.181,17	1.812.721.984.877,43	1.966.438.312.569,00	2.108.899.613.725,00	2.222.114.541.642,00
2.2.1	Belanja Pegawai	225.086.262.729,62	238.829.962.021,14	259.082.413.864,76	277.851.992.117	292.768.298.732,18
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	742.976.554.018,74	788.342.478.243,75	855.192.834.630,36	917.148.444.009	966.384.972.055,14
2.2.3	Belanja Modal	740.344.342.432,81	785.549.544.612,55	852.163.064.073,88	913.899.177.599	962.961.270.854,68
III	PEMBIAYAAN	167.296.730.942,90	200.147.005.354,47	189.154.797.647,00	163.538.209.110,00	161.826.504.813,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	217.444.522.922,62	238.147.005.354,47	265.707.766.485,01	208.805.297.810,85	183.755.930.134,68
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	217.444.522.922,62	238.147.005.354,47	265.707.766.485,01	208.805.297.810,85	183.755.930.134,68

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2017*	2018**	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	50.147.791.979,72	38.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.147.791.979,72	20.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	34.000.000.000	17.000.000.000	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : *) LRA 2017, **) APBD 2018

Dari tabel di atas dapat dibuat gambaran dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Malang 2018-2021 mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan. Nilai proyeksi pendapatan belanja daerah Kabupaten Malang meliputi 3 hal yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan 2017 sebesar Rp. 3.741.811.706.499,19, tahun 2018 sebesar Rp. 3,719,088,768,103.96, tahun 2019 sebesar Rp. 3.907.907.344.312,49, tahun 2020 sebesar Rp. 4.148.265.173.893,29 dan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 4.327.742.409.572,97. Sedangkan Belanja Kabupaten Malang tahun 2017 sebesar Rp. 3.617.054.713.494,68 tahun 2018 sebesar Rp.3,919,235,773,458.44, tahun 2019 sebesar Rp. 4.157.615.110.797,50 tahun 2020 sebesar Rp. 4.341.070.471.704,14 pada tahun 2021 Rp.4.495.498.339.707,65 serta untuk pembiayaan Kabupaten Malang tahun 2017 sebesar Rp. 167.296.730.942,90, tahun 2018 sebesar Rp. 200.147.005.354,47, tahun 2019 sebesar Rp. 249.707.766.485,01, tahun 2020 sebesar Rp. 189.154.797.647,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 161.826.504.813,00.

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperoleh dari akumulasi pendapatan, pencairan dana cadangan, SiLPA dikurangi total belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.19
 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
 untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Malang 2018 - 2021

No	Uraian	Proyeksi			
		2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	3.719.088.768.103,96	3.907.907.344.312,49	4.148.265.173.893,29	4.327.742.409.572,97
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	238.147.005.354,47	205.154.797.647,00	184.538.209.110,00	162.826.504.813,00
	Total Penerimaan	3.957.235.773.458,43	4.128.062.141.959,49	4.352.803.383.003,29	4.490.568.914.385,97
	Dikurangi				
1	Total Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2.160.702.176.944,00	2.236.362.057.579,00	2.132.263.254.700,00	2.110.553.478.815,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.796.533.596.514,43	1.891.700.084.380,49	2.220.540.128.303,29	2.380.015.435.570,97

Berdasarkan tabel 3.19 di atas dapat diketahui bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malang tahun 2018 – 2021 adalah sebesar Rp. 1.796.533.596.514,43 pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.891.700.084.380,49 tahun 2020 sebesar Rp. 2.220.540.128.303,29 dan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.380.015.435.570,97

Tabel 3.20
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Malang 2018 - 2021

No	Uraian	Alokasi			
		2018	2019	2020	2021
1	Prioritas I	1.282.323.315.007,72	1.358.272.263.598,00	1.475.661.366.268,00	1.559.707.161.502,00
2	Prioritas II	305.396.157.869,00	374.946.825.357,00	394.343.289.444,00	415.913.362.347,00
3	Prioritas III	208.814.123.637,71	158.480.995.425,49	350.535.472.591,29	404.394.911.721,97

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama dalam menyusun visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Malang

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi secara luas, terlebih pada konteks global, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pada perjalanannya, implementasi otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Salah satu persoalan krusial dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal pembiayaan pembangunan. Rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) terhadap total pendapatan daerah disparitasnya cukup lebar. Sehingga, Pemerintah Daerah berusaha untuk mendayagunakan keuangan daerah secara optimal dan efisien guna menjalankan prioritas-prioritas pembangunan.

Dalam konteks Kabupaten Malang saat ini dan ke depan, terdapat tiga masalah (dan sekaligus potensi) pembangunan yang harus menjadi titik perhatian. Pertama adalah masalah kemiskinan, di mana dari data BPS Kabupaten Malang angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 11,53% dan tahun 2016 turun menjadi 11,49%, sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 11,04% dari total jumlah penduduk yang ada. Sehingga hal ini harus mendapatkan penanganan yang serius mengingat jumlahnya yang masih besar. Kedua adalah dari sisi geografis dan historis, Kabupaten Malang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa besar. Sehingga, optimalisasi potensi ini menjadi sangat diperlukan, utamanya untuk mengangkat popularitas dari lokasi-lokasi wisata tersebut baik ke tingkat nasional maupun internasional, serta memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat sekitar lokasi wisata. Ketiga adalah terkait dengan isu lingkungan hidup. Secara geografis pula, Kabupaten Malang merupakan salah satu dari basis penopang ekologi yang sangat penting tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Di sisi lain, gencarnya pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Sehingga, saat ini yang perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Malang adalah bagaimana agar masalah lingkungan hidup ini dapat menjadi program atau kebijakan prioritas dalam pembangunan Kabupaten Malang ke depan.

Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Malang dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan capaian yang positif. Walaupun demikian, sasaran pembangunan daerah yang kompleks dan wilayah yang luas belum mampu memenuhi seluruh kehendak publik. Selain itu

identifikasi masalah dilakukan dengan penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang. Terhadap RPJMN, Pemerintah Kabupaten Malang merefleksikan gagasan revolusi mental untuk kemudian dijadikan kaca mata dalam analisis permasalahan. Selain itu, terhadap RPJMD Kab/Kota yang berbatasan Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan identifikasi dengan menghasilkan prioritas berupa kerja sama antar daerah, seperti misalnya dalam hal jasa transportasi. Beberapa masalah pembangunan Kabupaten Malang dirumukan berdasarkan identifikasi permasalahan pada tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

4.1.1 Pendidikan

1. Tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal;
2. Masih belum tercukupinya kebutuhan Guru PNS untuk jenjang SD Negeri baik Guru Kelas maupun Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan;
3. Belum tersedianya tenaga khusus administrasi pada Satuan Pendidikan Negeri, sehingga mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi sekolah serta pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah;
4. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada jenjang SD dan SMP Belum optimal;
5. Tingkat kualitas kelulusan pendidikan belum optimal;
6. Belum optimalnya pendidikan pembentukan karakter moral dan beragama;
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal ;
8. Penempatan tenaga pendidik (guru) belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara kawasan pedesaan dan perkotaan;
9. Belum tertampungnya siswa penyandang disabilitas di lembaga pendidikan luar biasa dan sedikitnya jumlah sekolah inklusif.

4.1.2 Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 52,78 per seratus ribu kelahiran hidup (21 Ibu meninggal) pada tahun 2016, dan Angka Kematian bayi (AKB) sebesar 4,52 per seribu kelahiran hidup (180 Bayi meninggal) pada tahun 2016;
2. Kasus balita gizi buruk dengan Angka Balita Gizi Buruk 0,67 (157.391 Balita);
3. Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif;
4. Biaya pemeriksaan layanan HIV-AIDS dan IMS bagi sasaran program belum diatur dalam Peraturan Daerah maupun BPJS kesehatan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
5. Sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) masih perlu ditingkatkan;
6. Masih tingginya angka kejadian tuberkulosis (kasus baru TB) BTA Positif usia di atas 15 tahun per 100.000 penduduk hasil survey prevalensi tahun 2013 sebesar 257 Per 100.000 penduduk dibanding tahun 2007 sebesar 107 per 100.000 penduduk;
7. Masih belum semua kasus TB terdeteksi dalam program DOTS tercapai 35% dari target 70% Tahun 2016;
8. Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang harus 100% berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2016;
9. Perlunya Peningkatan standar pelayanan Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat meningkatkan mutu secara berkesinambungan;
10. Masih banyak beredar makanan, dan makanan jajanan anak sekolah yang tidak aman akibat masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P);
11. Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan mengedepankan pendekatan Pembangunan Berbasis Desa melalui Desa Siaga perlu peningkatan meliputi peningkatan kuantitas dan

kualitas UKBM Desa siaga, Posyandu, dan lainnya yang belum berjalan optimal,;

12. Ketersediaan Petugas kesehatan di Puskesmas yang profesional meliputi tenaga Medis, Paramedis keperawatan, Paramedis non keperawatan dan administrasi medis masih kurang, dan tidak ada tenaga pengganti pensiun;
13. Belum optimalnya pengembangan pelayanan obat tradisional di Puskesmas, tahun 2016 masih 2 % Puskesmas yang menggunakan obat tradisional di Puskesmas;
14. Masih rendahnya capaian desa Open Defecation Free (ODF) , untuk tahun 2017 cakupan ODF masih < 30%, khususnya untuk masyarakat miskin masih banyak yang belum mempunyai Jamban Sehat.

4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan kabupaten akibat bencana alam, anomali cuaca dan pembebanan berlebih (overload);
2. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM Aparatur Teknis dibidang Jalan dan Jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada;
3. Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan;
4. Perlunya peningkatan skill/kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di Unit Pelaksana Teknis;
5. Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara

sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan;

6. Permasalahan dalam hal ketersediaan air, efisiensi air irigasi dan pengoperasian irigasi yang teratur;
7. Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air;
8. Perlunya menguatkan komitmen untuk mempertahankan lahan pertanian potensial terutama lahan pangan yang berkelanjutan sehingga meningkatkan ancaman terhadap luas sawah produktif beririgasi akibat alih fungsi lahan menjadi non-pertanian;
9. Kurang memadainya aksesibilitas dan mobilitas di kawasan selatan Kabupaten Malang;
10. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas saluran drainase;
11. Belum optimalnya upaya peningkatan pemeliharaan saluran drainase dan Jaringan drainase belum terhubung dengan optimal;
12. Belum memadainya prasarana penunjang jalan karena wilayah kabupaten malang yang sangat luas;
13. Belum teridentifikasinya sebagian data potensi sumber daya air serta belum tersedianya Peta Daerah Irigasi (peta baku sawah). Data-data tersebut digunakan sebagai data base perencanaan;
14. Adanya kewenangan baru yaitu bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai namun belum didukung data kawasan pantai;

15. Penyusutan usia bangunan dan kerusakan bangunan irigasi akibat bencana alam mengancam keberlanjutan daya dukung sumber daya air;
16. Kurang tercukupinya Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
17. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan;
18. Belum optimalnya upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah
19. Belum optimalnya upaya peningkatan pengolahan air baku.

4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun serta pemasangan sambungan rumah;
2. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan lingkungan;
3. Belum optimalnya upaya pengurangan luasan permukiman kumuh;
4. Belum terpenuhinya pelayanan dasar permukiman yang layak antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi;
5. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai;
6. Untuk penetapan Perda RDTR masih terkendala oleh panjangnya proses pengesahan;
7. Masih kurangnya gedung pemerintahan yang representatif serta belum terkendalinya secara optimal bangunan masyarakat;
8. Kurangnya SDM sebagai tenaga staf teknis dalam proses penanganan Perizinan terkait, seperti Rekomendasi IPPT;

9. Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan;
10. Kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (*backlog*);
11. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan lingkungan sehat;
12. Belum optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
13. Keterbatasan pengembang yang memenuhi kriteria teknis program Bantuan PSU Perumahan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum;
14. Belum tersedia data base tentang rumah di Kabupaten Malang;
15. Belum adanya serah terima asset oleh pelaku pembangunan di bidang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Malang;
16. Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

4.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas merupakan kendala bagi Satuan Polisi PP dan Linmas untuk melakukan pemantauan secara maksimal. Disamping itu, sarana untuk kegiatan penertiban khususnya pembongkaran masih terbatas;
2. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah perlu ditingkatkan;
3. Masih tingginya jumlah pelanggaran Peraturan Daerah;
4. Jumlah personil masih belum mencukupi dan kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan;
5. Kabupaten Malang merupakan daerah rawan bencana, seperti kekeringan, tsunami, erosi, tanah longsor dan banjir;
6. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kondisi geografis yang beragam di Kabupaten Malang tidak sebanding dengan jumlah prasarana dan sarana pemadaman dan pencegahan

bahaya kebakaran sehingga tingkat pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran menjadi belum optimal.

4.1.6 Sosial

1. Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level;
2. Belum optimalnya tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS;
3. Belum adanya pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial;
4. Peran serta potensi Sumber Kesejahteraan sosial dan sektor swasta dalam penanganan PMKS masih minim;
5. Ketersediaan data base PMKS yang valid masih jauh dari yang diharapkan, sehingga jumlah PMKS yang tertangani masih sangat terbatas.

4.1.7 Tenaga Kerja

1. Angkatan kerja dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan jumlah orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk usia kerja (19 tahun s/d 60 tahun) yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya sehingga masih banyak mencari kerja maupun penduduk usia kerja yang belum bekerja;
2. Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum memadai sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
3. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka;
4. Masih rendahnya jaminan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja;
5. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja;
6. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.

4.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;

2. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi;
3. Belum optimalnya upaya peranserta dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah;
4. Belum adanya persamaan persepsi bagi pemangku kepentingan terhadap pengarusutamaan gender, perencanaan penganggaran responsif gender serta Kabupaten Layak Anak;
5. Terbatasnya akses sumber daya pembangunan karena pendekatan pembangunan pemberdayaan perempuan masih mengabaikan isu kesetaraan dan keadilan;
6. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.;
7. Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan;
8. Ketersediaan data terpilah terbatas dan data terpilah belum menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan;
9. Masih adanya kekerasan terhadap ibu dan anak dalam rumah tangga (KDRT).

4.1.9 Pangan

1. Setiap tahun analisa peta daerah rawan pangan terjadi perubahan atau tidak sama dengan masalah dan potensi desa yang berbeda juga;
2. Data pendukung laporan ketersediaan pangan yang diperoleh dari instansi yang berwenang sering mengalami keterlambatan;
3. Data pendukung dalam analisa perhitungan terkadang berubah sehingga menyebabkan ketidaksesuaian hasil analisa ketersediaan pangan daerah;
4. Kurangnya daya saing komoditas pertanian dan perkebunan karena kurang pengetahuan petani terhadap peningkatan nilai tambah hasil produksi;

5. Kabupaten Malang sampai saat ini mempunyai 45 lumbung desa dimana sampai dengan tahun 2017 39 lumbung aktif, 3 lumbung belum ada isi dan 3 lumbung tidak aktif;
6. Idealnya seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Malang mempunyai minimal 1 lumbung pangan aktif atau terdapat 390 lumbung pangan;
7. Perlu pengembangan kelembagaan distribusi pangan;
8. Jumlah lumbung belum memenuhi terhadap Cadangan Pangan Masyarakat;
9. Pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah belum terealisasi;
10. Kurang termanfaatkannya pekarangan masyarakat miskin/rawan pangan sebagai sumber cadangan pangan pekarangan;
11. Analisa pasokan dan harga pangan pokok 17 komoditi belum dilaksanakan di 33 Kecamatan;
12. Lahan pekarangan banyak yang belum dimanfaatkan;
13. Kurangnya kreatifitas anggota kelompok usaha pangan olahan;
14. Rendahnya minat masyarakat terhadap produk olahan pangan lokal;
15. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman);
16. Kurangnya petugas di lapangan;
17. Belum terbentuknya satgas keamanan pangan;
18. Masih rendahnya pengetahuan produsen terhadap produk yang dihasilkan akibat residu pestisida;
19. Belum tersedianya informasi keamanan pangan segar;
20. Tingginya ketergantungan penduduk pada bahan pangan beras;
21. Orientasi pengembangan bisnis pangan masih berskala rumah tangga dan bersifat tradisional, belum menuju pada pengembangan agroindustri pangan skala UMKM;
22. Pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil olahan belum terbentuk sepenuhnya;
23. Peran Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) belum optimal dalam penyediaan data olahan analisis bulanan situasi pangan dan gizi dari lintas sektor;

24. Belum meratanya pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai pendukung cadangan pangan di tingkat rumah tangga.

4.1.10 Pertanahan

1. Proses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Malang berlangsung lama;
2. Tingginya kompleksitas sengketa pertanahan milik negara di Kabupaten Malang;
3. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dan desa serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan tanah;
4. Terdapat kawasan hutan yang sudah dikuasai masyarakat serta dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini perlu penegasan kepastian hukum kepemilikan;
5. Proses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Malang yang berlangsung lama;
6. Banyaknya Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah dan belum didukung dokumen fasibility study sebagai dasar pengadaan tanah;
7. Pencatatan tanah aset Kabupaten Malang yang belum optimal.

4.1.11 Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai;
2. Keterbatasan sarana prasarana pengolah air limbah domestik, sehingga masyarakat membuang ke sungai atau menggunakan septik tank yang tidak standar;
3. Belum optimalnya pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada beberapa kegiatan/usaha, seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolahan limbah cair tidak dapat berjalan secara optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke sungai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;

4. Tingginya kerusakan lingkungan sehingga jumlah lahan yang perlu dikonservasi sangat luas, tidak sebanding dengan jumlah konservasi yang dilaksanakan;
5. Kurang optimalnya peran serta dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam pelaksanaan penanaman pohon, manfaat dan kegunaannya;
6. Belum tersedianya instrumen pengawas yang memadai untuk melakukan pengawasan kepada seluruh kegiatan /usaha yang ada di seluruh Kabupaten Malang;
7. Ketersediaan lahan TPA yang semakin berkurang, tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan;
8. Ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang masih belum mencukupi sehingga belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan;
9. Tingginya laju kerusakan lingkungan, berakibat pada peningkatan luasan lahan yang perlu dikonservasi;
10. Peran serta sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
11. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; reuse, reduce and recycle);
12. Tuntutan konversi lahan dan adanya degradasi kualitas lingkungan, akibat alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek ekologis;
13. Kondisi kualitas lingkungan khususnya air badan air di wilayah Kabupaten Malang masih belum dapat memenuhi baku mutu.

4.1.12 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Situasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan masih ketergantungan pada adminduk pusat (berupa pengadaan blangko e-KTP);
2. Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan;

3. Belum optimalnya pengembangan data pilah kependudukan;
4. Belum optimalnya Sistem Kependudukan terpadu;
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, karena cakupan jangkauan wilayah Kabupaten Malang yang sangat luas.

4.1.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa;
2. Lemahnya *up-dating* data profil desa/kelurahan sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berspektif gender;
4. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat;
5. Belum optimalnya pengembangan Usaha Ekonomi Desa/Usaha Ekonomi Masyarakat. Jumlah BUMDes yang terbentuk melalui fasilitasi pendampingan masih mencapai 60 Desa;
6. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan, partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
7. Belum optimalnya pengembangan potensi desa (SDD, pengembangan/ pemanfaatan TTG dan pengembangan kawasan perdesaan);
8. Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PADes;
9. Masih adanya BUMDes yang kurang sehat bahkan tidak aktif;
10. Kurangnya pemahaman aparaturnya pemerintah desa dalam memahami regulasi.

4.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih rendahnya partisipasi aktif remaja dalam kegiatan PIK Remaja;
2. Masih rendahnya jumlah peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan masih tingginya Unmet Need;

3. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam penggerakan Program KB;
4. Terbatasnya modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok BKB;
5. Masih rendahnya kualitas tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga dan UPPKS;
6. Masih rendahnya kapasitas kader pendata, masih rendahnya tingkat kepatuhan petugas pencatatan/pelaporan dan masih rendahnya kapasitas petugas dalam input data berbasis TI (Teknologi Informasi).

4.1.15 Perhubungan

1. Kemacetan lalu lintas (ruas jalan Lawang-Singosari dan Kebonagung Kepanjen) dan arah objek wisata;
2. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum baik dari aspek keamanan, kenyamanan maupun kemudahan;
3. Tidak seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan;
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas di jalan;
6. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai;
7. Kurangnya fasilitas pendukung perlengkapan jalan (CCTV, Road barrier, Traffic cone);
8. Infrastruktur menuju tempat wisata yang kurang memadai;
9. Tidak adanya penerapan teknologi dalam pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas;
10. Kelayakan Usaha angkutan sungai yang sangat tidak layak serta belum pernah ada dukungan prasarana dari pemerintah;
11. Jumlah perlintasan sebidang jalan dan jalan kereta api yang terus berkembang seiring dengan perkembangan tata guna lahan;
12. Masih banyaknya fasilitas perlengkapan jalan yang hilang diakibatkan kurang sadarnya masyarakat untuk ikut menjaga dan mengerti arti serta pentingnya keberadaan rambu-rambu lalin tersebut;

13. Kurang memadainya kondisi perkerasan jalan sehingga mengakibatkan daya rekat marka jalan tidak maksimal;
14. Sulitnya kalibrasi dilakukan hingga mendekati 100 persen pada alat uji rem, alat uji kesejajaran vertikal dan horisontal roda depan (kincup) dan alat uji emisi.

4.1.16 Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya pelayanan jaringan internet dilakukan pihak ketiga atau provider karena investasi untuk membangun tower mempertimbangkan untung/rugi, kalau pengguna internet tidak ada, pihak ketiga tidak akan membangun tower;
2. Proses perijinan mendirikan tower membutuhkan persetujuan masyarakat, sehingga membutuhkan waktu yang lama;
3. Kurangnya dukungan/respon dari Perangkat Daerah lain dalam memberikan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Belum lagi dengan adanya perbedaan data antar Perangkat Daerah atau ketidakseragaman data dan informasi;
4. Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
5. Belum semua desa di Kabupaten Malang terjangkau jaringan internet.

4.1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Koperasi sehat dan aktif;
2. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri di Kabupaten Malang;
3. Belum memadainya kemampuan SDM dan kelembagaan UMKM;
4. Terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan dan pasar;
5. Pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar belum optimal;
6. Keberadaan usaha mikro di daerah (sebagian besar usaha mikro, Kecil dan Menengah masih belum terbina);
7. Kualitas SDM usaha mikro masih sangat terbatas;

8. Masih sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pinjaman.
9. Masih minimnya SDM ditingkat pengurus dan Pengawas Koperasi;
10. Minimnya pengetahuan berkoperasi bagi kelompok ekonomi produktif (KEP);
11. Sistem pengelolaan usaha ritel/toko koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela yang mempengaruhi usaha ritel koperasi;
12. Kurangnya promosi dan pameran produk-produk usaha KUMKM;
13. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan UKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.

4.1.18 Penanaman Modal

1. Kurangnya data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Malang;
2. Pelayanan dan regulasi penanaman modal perlu ditingkatkan;
3. Belum adanya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal;
4. Belum tersedianya kawasan industri di Kabupaten Malang yang bisa menunjang pengembangan investasi di Kabupaten Malang;
5. Daya saing daerah dalam menarik investasi perlu ditingkatkan;
6. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal;
7. Belum adanya kebijakan insentif di bidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor;
8. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Malang;
9. Ketidaktaatan sebagian investor untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
10. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengurusan perizinan;
11. Kurangnya data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Malang;

12. Kurang optimalnya komunikasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha;
13. Lemahnya koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral dengan OPD lain.

4.1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

1. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada;
2. Belum terpenuhinya standar mutu organisasi kepemudaan dan organisasi keolahragaan;
3. Masih rendahnya peranserta pemuda dalam pembangunan
4. Belum terpenuhinya standar mutu organisasi olah raga dari berbagai cabang olah raga;
5. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada;
6. Belum memadainya ketersediaan dan persebaran sarana prasarana olah raga;
7. Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap olahraga rekreasi;
8. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
9. Banyak pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan;
10. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat;
11. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang tersedia.

4.1.20 Statistik

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya manusia yang memahami pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisa serta menginterpretasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna;
2. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam pengelolaan pembangunan.

3. Belum optimalnya ketersediaan dan kelengkapan data statistik yang mutakhir.

4.1.21 Persandian

1. Lemahnya kelembagaan persandian daerah;
2. Pengembangan sarana prasarana Teknologi Informasi persandian masih perlu ditingkatkan dilingkup penyelenggaraan pemerintahan.

4.1.22 Kebudayaan

1. Kurang maksimalnya pembinaan kelompok seni yang ada;
2. Masih belum maksimalnya pengisian museum singhasari;
3. Banyak adat tradisi yang masih belum diangkat sebagai warisan dan kekayaan budaya di Kab. Malang;
4. Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
5. Upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya masih perlu ditingkatkan
6. Belum optimalnya upaya pengembangan kekayaan dan keragaman Budaya;
7. Sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya masih perlu ditambah;
8. Kurangnya jumlah SDM yang bersertifikasi dan berlisensi;
9. Kurangnya keikutsertaan kelompok seni budaya Kabupaten Malang pada event-event seni budaya di tingkat Provinsi maupun Nasional;
10. Kurangnya pembinaan secara komprehensif terhadap kelompok seni budaya lokal;
11. Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat/pelaku seni terhadap aktualitas dirinya;
12. Kurangnya kesadaran pribadi masyarakat tentang pentingnya seni dan budaya lokal;
13. Belum tersedianya sarana prasarana panggung (amphitheater) yang representatif untuk pertunjukan seni sekaligus menjamu pengunjung/tamu secara layak.

4.1.23 Perpustakaan

1. Belum tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat;

2. Terbatasnya koleksi buku di perpustakaan, baik perpustakaan umum maupun desa;
3. Masih belum optimalnya penyediaan fasilitas ruang perpustakaan di kewilayahan sebagai sasaran pembinaan.

4.1.24 Kearsipan

1. Keterbatasan tenaga arsiparis yang tersedia, sehingga perlu adanya penambahan tenaga fungsional arsiparis;
2. Rendahnya pengetahuan tentang tata kearsipan pada aparat pemerintah desa sehingga penataan berkas/arsip belum tertib baik arsip aktif, in aktif maupun statis;
3. Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada;
4. Belum optimalnya budaya tertib arsip, pengelolaan arsip dan sarana prasarana kearsipan.

4.1.25 Kelautan dan Perikanan

1. Terbatasnya pengetahuan pembudidaya tentang kesehatan lingkungan dan pakan. Banyaknya pembudidaya yang masih pemula sehingga masih belum banyak mengetahui tentang kesehatan lingkungan dan pakan;
2. Belum optimalnya produksi benih ikan di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) karena sebagian besar induk memasuki masa afkir;
3. Terbatasnya pengetahuan teknis budidaya ikan penerima paket percontohan budidaya lele di kolam terpal dan paket percontohan budidaya minapadi, karena sebagian besar merupakan pembudidaya pemula;
4. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dimana masih banyak ditemukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan yang dilarang;
5. Masih terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul yang menjadi faktor kunci keberhasilan usaha budidaya ikan;
6. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat;
7. Maraknya kegiatan *illegal and unregulated fishing* di pesisir;
8. Terbatasnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan;

9. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal yang diakibatkan oleh masih banyaknya skala usaha yang bersifat tradisional serta pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah lingkungan yang masih rendah;
10. Penurunan produksi perikanan tangkap laut yang disebabkan cuaca buruk (angin dan gelombang di perairan laut sepanjang tahun 2016 sehingga berpengaruh pada operasional penangkapan ikan serta hujan di perairan menyebabkan ikan pelagis kecil menghilang di perairan sehingga alat tangkap jaring menjadi tidak efektif yang berakibat kapal di Pelabuhan Pondokdadap terutama yang menggunakan purse sein (50 unit kapal) hampir tidak berproduksi sepanjang tahun 2016;
11. Penurunan produksi perikanan budidaya yang disebabkan menurunnya luas lahan budidaya yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan pembatasan Pembudidayaan KJA dan Jaring Sekat oleh Jasa Tirta sehingga menurunkan produksi perikanan budidaya (luas lahan KJA dan Jaring Sekat yang semula 191,64 Ha menurun menjadi 173,60Ha).

4.1.26 Pariwisata

1. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;
2. Keterbatasan SDM, akses, sarana prasarana yang mendukung serta sosialisasi tentang keberadaan TIC yang belum maksimal;
3. Pengembangan destinasi wisata belum berpadu sehingga pengembangannya cenderung berjalan ditempat/stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung;
4. Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
5. Kurangnya SDM Pariwisata Yang Kompeten Dan Profesional Dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pariwisata;
6. Banyak daya tarik wisata yang berada di kawasan Perhutani;
7. Promosi kepariwisataan belum dilakukan secara optimal, khususnya dalam ranah internasional;

8. Masyarakat sekitar obyek wisata belum berperan secara aktif dalam pengembangan obyek wisata setempat;
9. Lemahnya akurasi data kepariwisataan secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata;
10. Materi atau bahan pameran produk unggulan dari para pelaku jasa usaha pariwisata masih terbatas.

4.1.27 Pertanian

1. Besarnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan besarnya kebutuhan akan pangan yang harus disediakan sedangkan lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena alih fungsi lahan;
2. Kondisi iklim yang tidak menentu menyebabkan pergeseran tata tanam menyesuaikan ketersediaan air irigasi;
3. Kurangnya bangunan-bangunan irigasi untuk menyimpan air ketika musim penghujan;
4. Kapasitas sumberdaya penyuluh di lapangan yang kurang responsif terhadap isu-isu strategis yang ada;
5. Tingginya luasan lahan pertanian yang mengalami degradasi lahan akibat pemberian pupuk dan pestisida (bahan kimia) yang tidak berimbang;
6. Iklim yang tidak menentu meningkatkan populasi Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian/Perkebunan;
7. Kurangnya ketersediaan benih lokal untuk mencukupi kebutuhan petani/kelompok tani di Kabupaten Malang;
8. Beberapa komoditas unggulan buah di Kabupaten Malang belum memiliki sertifikasi untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk pertanian/perkebunan;
9. Peningkatan produksi yang tidak diiringi dengan nilai tambah/jual produk pertanian di pasaran;
10. Beberapa Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan tidak memiliki kantor tetap karena tanah yang digunakan adalah tanah desa/kecamatan;
11. Lemahnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan rata-rata di Jawa Timur sebesar 44,18m² (Sensus Pertanian, 2013);

12. Lemahnya Posisi Tawar di Tingkat Petani serta rendahnya daya saing produk pertanian;
13. Panjangnya mata rantai perdagangan sampai konsumen, sehingga pembagian margin keuntungan tidak berpihak pada petani;
14. Terbatasnya SDM dalam mendampingi kegiatan pertanian di masyarakat ;
15. Rendahnya SDM peternakan dalam segi budidaya, teknologi maupun pengolahan hasil ternak;
16. Sistem budidaya ternak masih tradisional;
17. Rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang diterima peternak dalam usaha peternakannya;
18. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dibidang pertanian serta masyarakat, tentang bahayanya penggunaan bahan kimia berbahaya dan produk pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu pangan;
19. Adanya kecenderungan alih ungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif.

4.1.28 Perdagangan

1. Belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar serta sarana dan prasarana pasar;
2. Rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur pengelola pasar;
3. Para pelaku importir dan eksportir belum optimal dalam melaporkan hasil realisasi impor ekspornya;
4. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi (akses) pasar baik dalam negeri maupun luar negeri;
5. Belum optimalnya upaya hubungan kerjasama pelaku usaha perdagangan.

4.1.29 Perindustrian

1. Peningkatan kualitas produksi industri kecil menengah (IKM) belum dimbangi oleh peningkatan kualitas produksi sehingga daya saing pasar masih rendah;
2. Untuk meningkatkan kualitas produksi industri kecil menengah (IKM), saat ini masih terkendala dengan sarana

dan prasarana yang tersedia pada IKM sehingga produk yang dihasilkan masih belum memenuhi standar;

3. Bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang sudah maksimal belum mampu mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) karena terkendala biaya sehingga menghambat daya saing produk dalam skala nasional dan internasional;
4. Hasil produksi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang sudah bisa menjangkau pasar yang lebih luas namun saat ini masih ada keterbatasan dalam promosi produk baik oleh perorangan maupun pendanaan dari pemerintah.

4.1.30 Transmigrasi

1. Belum optimalnya informasi tentang transmigrasi yang dapat diterima oleh masyarakat;
2. Masih minimnya keterampilan yang dimiliki oleh calon transmigran.

4.1.31 Fungsi Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan
 - a. Belum optimalnya komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (up to date);
 - b. Belum optimalnya fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan peningkatan koordinasi antara perangkat daerah yang menangani perencanaan maupun penganggaran;
 - c. Sistem informasi tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan belum optimal dan berkesinambungan;
 - d. Penyajian data dan informasi yang tidak tepat dan akurat baik dari segi kelengkapan maupun waktu;
 - e. Pemanfaatan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal;
 - f. Kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja yang belum optimal.
2. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan;

- b. Belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

3. Keuangan

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah;
- b. Rendahnya kualitas pengurus barang perangkat daerah dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah;
- c. Lemahnya koordinasi antara Pegawai yang menagai keuangan, melaksanakan pengadaan dengan pengurus barang yang berakibat pada minimnya informasi yang didapatkan oleh pengurus barang dalam rangka pengisian data aset;
- d. Keterbatasan aplikasi software yang dipergunakan dalam penatausahaan barang milik daerah;
- e. Penyimpanan dokumen perolehan aset yang masih belum tertib yang berakibat pada sulitnya melacak asal perolehan, tahun perolehan dan nilai perolehan;
- f. Penatausahaan Mutasi Barang Milik Daerah yang tidak tertib;
- g. Perangkat daerah dalam melakukan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan aset pada Kartu Inventaris Barang tidak tertib dan kurang cermat;
- h. Penatausahaan dan pengelolaan aset lainnya/rusak masih belum tertib;
- i. Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain belum tertib.

4. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

- a. Belum meratanya persebaran pegawai disetiap Perangkat Daerah dari segi dan kualitas;
- b. Belum maksimalnya integrasi sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi kepegawaian;
- c. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional;
- d. Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan.

5. Fungsi Lainnya

- a. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi dan teknis;
- b. Belum semua proses penyusunan Produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Bupati) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- c. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara bagi aparatur selaku kuasa hukum;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan legislasi daerah;
- e. Belum maksimalnya sistem pengendalian internal yang dilakukan secara prosedural;
- f. Upaya pengawasan masih perlu ditingkatkan;
- g. Kualitas dokumen SAKIP di setiap Perangkat Daerah belum merata;
- h. Belum seluruh Perangkat Daerah mampu menyusun proposal inovasi pelayanan publik;
- i. Belum optimalnya penggunaan sistem ketatausahaan yang dapat membantu kelancaran pekerjaan;
- j. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- k. Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- l. Belum optimalnya pengawasan dan pendataan terkait dengan pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat.

Uraian tentang masalah-masalah pembangunan di kabupaten Malang tersebut diatas selanjutnya dirangkum dalam beberapa point berikut:

1. Kondisi pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Malang belum setara, khususnya keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas bagi warga miskin, penyandang disabilitas dan wilayah pedesaan terpencil;
2. Pelayanan kesehatan dasar kurang memadai, ditandai dengan angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang relatif masih tinggi;
3. Kualitas infrastruktur masih menjadi persoalan, khususnya untuk mendukung peningkatan aktivitas perekonomian Kabupaten Malang pada sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, kelauatan dan perikanan;

4. Rendahnya kualitas angkatan kerja dan kesempatan kerja di Kabupaten Malang. Ditambah, semangat berwirausaha bagi angkatan kerja semakin menurun;
5. Produktivitas pertanian belum maksimal, khususnya tanaman pangan yang berfungsi untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat;
6. Kinerja birokrasi dan layanan publik belum optimal akibat lemahnya profesionalisme aparatur, rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi, dan regulasi yang mengikat;
7. Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin terutama kecukupan energi, air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di dusun terpencil dan sentra kemiskinan belum terealisasi secara menyeluruh.

4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

3.2.1 Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengungkap perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya

sumber daya tak terbarui yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Sebagai kota yang telah dan didorong untuk menjadi Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Malang antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/MDGs*), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

a. Sustainable Development Goals (SDG's)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development*

Goals (MDGs) memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang

disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, Amerika Serikat. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;

10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Malang, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan pertengahan tahun 2016, tak banyak sentimen positif yang

diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena “Brexit” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Malang yang berpengaruh pada perlambatan pemulihan ekonomi.

c. Antisipasi perubahan iklim global (*global warming/climate change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Mengacu pada sasaran utama dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan

strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka disebutkan pada arah kebijakan RPJMN 2015 - 2019 ditekankan Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

3.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional

1) Telaahan RPJPN Tahun 2005-2025

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kabupaten Malang pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat perodesasi RPJMD Kabupaten Malang mengikuti periode RPJMD III, maka arah kebijakan RPJMD Kabupaten Malang menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015-2019) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019).

Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan IPTEK untuk melahirkan inovasi. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM tahap III, RPJM tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya

dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus

dikembangkan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Kabupaten Malang harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

- a. Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
- b. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- c. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
- d. Semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif.

2) Telaahan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2015-2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta

berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan

yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.3 Isu atau Kebijakan Provinsi Jawa Timur

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJMD Kabupaten Malang sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 memiliki visi pembangunan **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing”**. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019,

ditempuh melalui lima misi yang diberi judul : “**Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik**”, sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi;
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

4.4 Isu-Isu Strategis Kabupaten Malang

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun, dan dampaknya sangat luas dalam jangka waktu yang panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu dilaksanakan secara bertahap. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan di daerah cenderung muncul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal. Perumusan permasalahan ini penting untuk merumuskan visi dan misi Kabupaten Malang untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan uraian permasalahan per urusan di atas, maka rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Malang yang cukup luas, kesenjangan layanan pendidikan baik kualitas maupun akses masih menjadi persoalan utama. Oleh karena itu, perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya

pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah peningkatan tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penambahan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dengan mengedepankan penanaman nilai keagamaan yang toleran dan budaya luhur, serta pembiayaan pendidikan yang murah. Selain strategi diatas, untuk menjembatani kesenjangan terhadap kualitas dan akses pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan perlu adanya langkah terobosan inovasi berupa sistem tata kelola pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk peningkatan akses pendidikan dasar penambahan lembaga SD, SMP penyelenggara inklusi, penguatan kelembagaan Sekolah Satu Atap dan peningkatan manajemen layanan pendidikan adalah upaya strategis lain dalam mewujudkan pemerataan kualitas dan akses layanan pendidikan di Kabupaten Malang.

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Dasar

Mengingat kemajemukan warga Kabupaten Malang terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan strategis bidang kesehatan yang perlu diambil antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang khususnya bayi dan Ibu melahirkan, kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

3. Pengembangan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum meliputi kebinamargan, pengairan, keciptakaryaan, pemukiman dan prasarana lingkungan

Infrastruktur pekerjaan umum harus dipandang sebagai aset yang perlu terus dipelihara dan ditingkatkan nilai tambahnya (*value added*) agar dapat terus diandalkan manfaatnya. Penyediaan

infrastruktur pekerjaan umum yang berorientasi kepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif.

Upaya yang perlu dilakukan antara lain peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan memfokuskan pada penguatan daya dukung infrastruktur kebinamargaan (jalan, jembatan, PJU dan sarana pelengkap jalan), infrastruktur pengairan (bangunan irigasi, saluran irigasi, dam, bangunan air, dan pintu air), infrastruktur keciptakarya, pengelolaan dan pemenuhan layanan dasar air minum - sanitasi - penanganan kawasan kumuh (*universal access*), penguatan database melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu dan sistem pengelolaan air minum (SPAM) bekerjasama dengan pemerintah daerah di sekitar Kabupaten Malang.

Isu-isu strategis terkait dengan infrastruktur di Kabupaten Malang adalah:

- a. Masih belum memadainya ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Malang, mengingat luas wilayah yang harus ditangani dan kondisi topografi yang merupakan daerah dataran tinggi dan dataran rendah yang curam;
- b. Upaya peningkatan pencapaian universal akses dimana target yang akan dicapai 100% untuk akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak;
- c. Terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat), serta cakupan pemenuhan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai;
- d. Upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan prasarana sumber daya air dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan pangan;
- e. Mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dibidang perhubungan perlu dilakukannya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan

angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta peningkatan dan pembangunan lalu lintas.

4. Pengurangan Angka Kemiskinan

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Malang pada tahun 2015 sebesar 11,53% dan tahun 2016 turun menjadi 11,49%, sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 11,04%. Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat masyarakat yang difokuskan pada sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

5. Masih tingginya angka pengangguran

Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi adanya peningkatan angka pengangguran. Pembangunan ekonomi selain mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Strategi yang dapat ditawarkan untuk mengurangi angka pengangguran adalah pembinaan kewirausahaan (*entrepreneurship*) secara luas dan berkelanjutan terlebih untuk penguatan sektor ekonomi kreatif.

6. Pengelolaan Kependudukan yang Berkualitas

Terdapat dua *point* penting terkait pengelolaan kependudukan, yaitu laju pertumbuhan penduduk dan administrasi kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi melahirkan ledakan penduduk, walaupun tingkat kepadatan berada pada angka moderat yaitu sebesar 720 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2015 sebesar 0,68 % lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 0,64 % pada tahun yang sama. Dengan demikian, perlu penetapan isu strategis guna menghambat progresifitas laju pertumbuhan penduduk melalui revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB).

Penduduk merupakan subyek pembangunan sekaligus obyek pembangunan, sangat diperlukan akurasi data sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menata tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan tata laksana yang didukung dengan pendelegasian sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat Kecamatan.

7. Optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik

Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya selain itu peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembehanan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi (TI).

Isu-isu Strategis yang terkait dengan optimalisasi birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Malang adalah:

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang masih perlu perbaikan yang harus dilaksanakan dengan komitmen di seluruh SKPD khususnya pada komponen Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Persepsi Korupsi dan Upaya untuk meraih Opini WTP;
- b. Belum optimalnya kualitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjawab tuntutan masyarakat atas kebijakan publik dan pelayanan berkualitas;
- c. Kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah, yang belum sepenuhnya kapabel sehingga lamban untuk meningkatkan layanan administrasi dan menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan.

8. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam setiap tahapan pembangunan di daerah, perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). RAD PUG diharapkan dapat memberikan arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

9. Optimalisasi Potensi kepariwisataan daerah berbasis kemitraan yang setara dan partisipatif

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Malang kaya atas potensi destinasi wisata alam. Selain itu, Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata non-alam, dengan tetap ditunjang oleh sumberdaya unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kreatif. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui penciptaan ragam paket wisata, pengembangan jalur wisata, mendorong pendirian sarana dan prasarana penunjang wisata seperti hotel, penginapan dan restoran serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

Pengembangan kepariwisataan permasalahan yang ada seperti: promosi yang belum optimal, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan obyek wisata serta sarana prasarana

pendukung wisata yang kurang memadai ditengah berlimpahnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Malang. Sehingga untuk mewujudkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang yang lebih baik dapat dilakukan dengan mengembangkan dari sector pertanian dan pariwisata dengan didukung dari industri kreatif.

10. Pengembangan sektor perekonomian basis (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan

Masyarakat Kabupaten Malang perlu melakukan transformasi dari pola produksi dan cara berpikir agraris-subsisten menuju pada cara berpikir ekonomis yang industrialis-progresif. Artinya, aktifitas ekonomi baik itu disektor pertanian, perikanan dan kelautan, tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya saja, akan tetapi ada strategi untuk memperbesar dan mengembangkannya sebagai sebuah potensi dan kekayaan ekonomi daerah yang dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional. Untuk melaksanakan hal ini maka diperlukan pengkayaan inovasi melalui penerapan teknologi tepat guna dan pembinaan manajemen agrobisnis dan penguatan kelompok tani/usaha.

Masyarakat Kabupaten Malang perlu melakukan transformasi dari pola produksi dan cara berpikir agraris-subsisten menuju pada cara berpikir ekonomis yang industrialis-progresif. Artinya, aktifitas ekonomi baik itu disektor pertanian, perikanan dan kelautan, tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya saja, akan tetapi ada strategi untuk memperbesar dan mengembangkannya sebagai sebuah potensi dan kekayaan ekonomi daerah yang dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional. Untuk melaksanakan hal ini maka diperlukan pengkayaan inovasi melalui penerapan teknologi tepat guna dan pembinaan manajemen agrobisnis dan penguatan kelompok tani/usaha.

11. Perbaikan iklim investasi

Investasi merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Malang. Untuk mewujudkan iklim investasi yang baik perlu didukung adanya ketersediaan informasi tentang peta potensi investasi, pelayanan perizinan yang

cepat, mudah, murah dan transparan, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif dan disinsentif, stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, dan penyediaan kawasan industri.

12. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan iklim yang kondusif, berupa jaminan dengan melibatkan semua elemen masyarakat secara optimal melalui kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.

Kebijakan yang diambil melalui penegakan hukum, pengendalian ketentraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi Kabupaten Malang yang aman, tentram, tertib dan teratur, serta diperlukan juga strategi dan langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana.

Isu-isu strategis terkait dengan kemanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Malang antara lain:

- a. Ancaman konflik sosial akibat menurunnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara, serta tumbuhnya paham terorisme dan radikalisme;
- b. Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan (berupa penyakit masyarakat, perbuatan kriminal, kenakalan remaja dalam bentuk tawuran, prostitusi);
- c. Penegakan hukum dan penyebaran informasi yang belum optimal.

13. Penguatan Ketahanan Pangan

Permasalahan ketahanan pangan meliputi tiga sub sistem yaitu : ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, lancarnya distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang bermutu. Tantangan ketahanan pangan di Kabupaten Malang adalah menurunnya luas lahan pertanian tanaman pangan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan.

14. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun

Kualitas kesehatan manusia sangat ditentukan kualitas lingkungan hidup yang ada. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan angka harapan usia hidup lebih panjang,

Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Langkah kebijakan yang dilakukan melalui pengendalian pencemaran limbah, peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan penegakan hukum secara konsisten.

Isu-isu Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang adalah:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan;
- b. Pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.

15. Pengembangan Kerja Sama Antar Kota dan Kabupaten

Untuk lebih memosisikan Kabupaten Malang sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperlukan kerja sama antar kota dan kabupaten di wilayah sekitar dengan mengedepankan posisi Kabupaten Malang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerja sama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pengembangan kerja sama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

16. Implementasi Otonomi Desa

Dengan telah diterbitkannya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, maka tantangan pembangunan lima tahun ke depan (2015 – 2020) adalah melakukan penguatan Desa baik sebagai komunitas maupun sebagai organisasi pemerintahan. Dari sisi pemerintahan, maka dua strategi utama yang akan dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan (termasuk organisasi perangkat desa, sistem perencanaan dan penganggaran) dan penguatan SDM, baik SDM

perangkat desa, maupun SDM dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti BPD, BUMDes, PKK, Karang Taruna dan sebagainya. Isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa adalah:

- a. Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- b. Rendahnya Kesadaran Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Dalam Membangun Desa;
- c. Rendahnya aksesibilitas dan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya dan aktifitas perekonomian lainnya;
- d. Masih Belum Optimalnya Kelembagaan Masyarakat di Desa;
- e. Masih Kurangnya Sarana Prasarana Dalam Membangun Desa.

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Bab ini akan menjabarkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Malang selama 5 tahun mendatang (2016-2021). Hal ini sejalan dengan amanat di dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Undang-Undang tentang pemerintah daerah ini memberi pertegasan bahwa daerah saat ini memiliki kewenangan lebih untuk mengatur daerahnya, tanpa meninggalkan sinergitas dengan program-program pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Di samping mengacu pada regulasi di atas, sistematika pembahasan visi dan misi dalam bab ini juga merujuk pada Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun dalam setiap periodenya visi mempunyai jangkauan untuk dicapai selama 5 tahun. Hal ini berarti bahwa visi Kabupaten Malang yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 harus dicapai pada tahun 2021. Dalam tujuannya, visi juga dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholder* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi dalam pencapaiannya. Visi dan misi juga bersifat menjadi inspirasi, arah, dan posisi (*setting*) Kabupaten Malang di masa depan. Selanjutnya, pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi, dan program dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini tidak hanya berasal dari visi,

misi dan program Kepala Daerah saja, namun juga telah dilakukan beberapa proses penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang Tahun 2015 lalu. Hal ini ditegaskan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa setiap calon wajib untuk menyertakan visi pada saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Maka dari itu, mengacu pada hasil Pemilukada Tahun 2015, RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini merupakan hasil perumusan dari pasangan pemenang Pemilukada Kabupaten Malang yang ditetapkan pada tahun 2016 yakni Dr. H. Rendra Kresna dan H. Sanusi.

Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pembangunan desa, salah satunya diwujudkan melalui penjabaran visi misi, yakni dalam tujuan dan sasaran. Setidaknya beberapa penjabaran dalam sasaran diarahkan untuk pembangunan desa, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa. Melalui kualitas pelayanan publik yang baik dan memberi aksesibilitas kepada kelompok rentan, seperti difabel dan PMKS, maka hal ini akan mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan memberikan apresiasi mengenai usulan atau partisipasi warga desa yang dimasukkan dalam agenda Musrenbang Desa. Diharapkan melalui hal tersebut kebijakan pembangunan tidak lagi hanya dengan sistem *top-down* melainkan juga *bottom-up*.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: *Pertama*: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah **Madep**. *Kedua* Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan **Manteb**. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah **Manetep**.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: ***"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan"***.

Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP sebagaimana telah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”**. Dengan visi tersebut maka diharapkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Malang bisa bekerja sama untuk mengoptimalkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan dan mewujudkan Kabupaten Malang menjadi daerah yang Madep, Manteb dan Manetep. Pada Visi Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 secara terperinci dapat dijabarkan sebagai **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”**. Secara filosofi visi Kabupaten Malang tersebut dapat dijelaskan melalui makna didalamnya yang dapat diartikan dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yang **MADEP, MANTEB dan MANETEP**, maka dalam 5 tahun yang akan datang diperlukan upaya untuk mewujudkannya. Perumusan penjelasan visi tersebut adalah:

Tabel 5.1
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan visi
Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep, Manteb dan Manetep	Madep	Upaya Pelaksanaan Pembangunan yang berdasarkan pada konsistensi/istiqomah
	Manteb	Tekad yang selalu lebih baik dan maju
	Manetep	Kesejahteraan dalam pembangunan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat

Penggunaan istilah Madep, Manteb dan Manetep merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, Madep Manteb dan Manetep bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam rangka konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan dengan **HASIL TELAAHAN RPJPD KABUPATEN MALANG**.

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Malang dengan Visi RPJMD
Provinsi Jawa Timur dan RPJMN

Visi RPJMD Kabupaten Malang	Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur	Visi RPJMN
Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep, Manteb dan Manetep	Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Kesatuan Negara Republik Indonesia	Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Bila diperhatikan kembali bahwa tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Visi Kabupaten Malang 2016-2021 terdapat kesinambungan dengan Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Visi RPJMN. Tabel diatas memperlihatkan bahwa Kabupaten Malang mempunyai sinergitas perencanaan pembangunan sesuai dengan Visi Provinsi Jawa Timur dan Visi RPJMN, sehingga pembangunan bisa terlangsung mulai daerah hingga nasional.

5.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan **revolusi mental** yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;

2. Memperluas inovasi dan **reformasi birokrasi** demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan **Indeks Pembangunan Manusia**;
4. Mengembangkan **ekonomi masyarakat** berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui **penguatan kelembagaan**, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan **desa**;
6. Meningkatkan ketersediaan **infrastruktur** jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga **kelestarian lingkungan** hidup.

Tabel 5.3
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep, Manteb dan Manetep	Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum	Demi mewujudkan misi pertama Kabupaten Malang, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi forum-forum kerukunan antar umat beragama. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan peraturan yang berlaku. 3. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam acara kebudayaan dan seni masyarakat. 4. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. 5. Memfasilitasi penjangkangan pemuda dan olahragawan yang berpotensi untuk berprestasi.

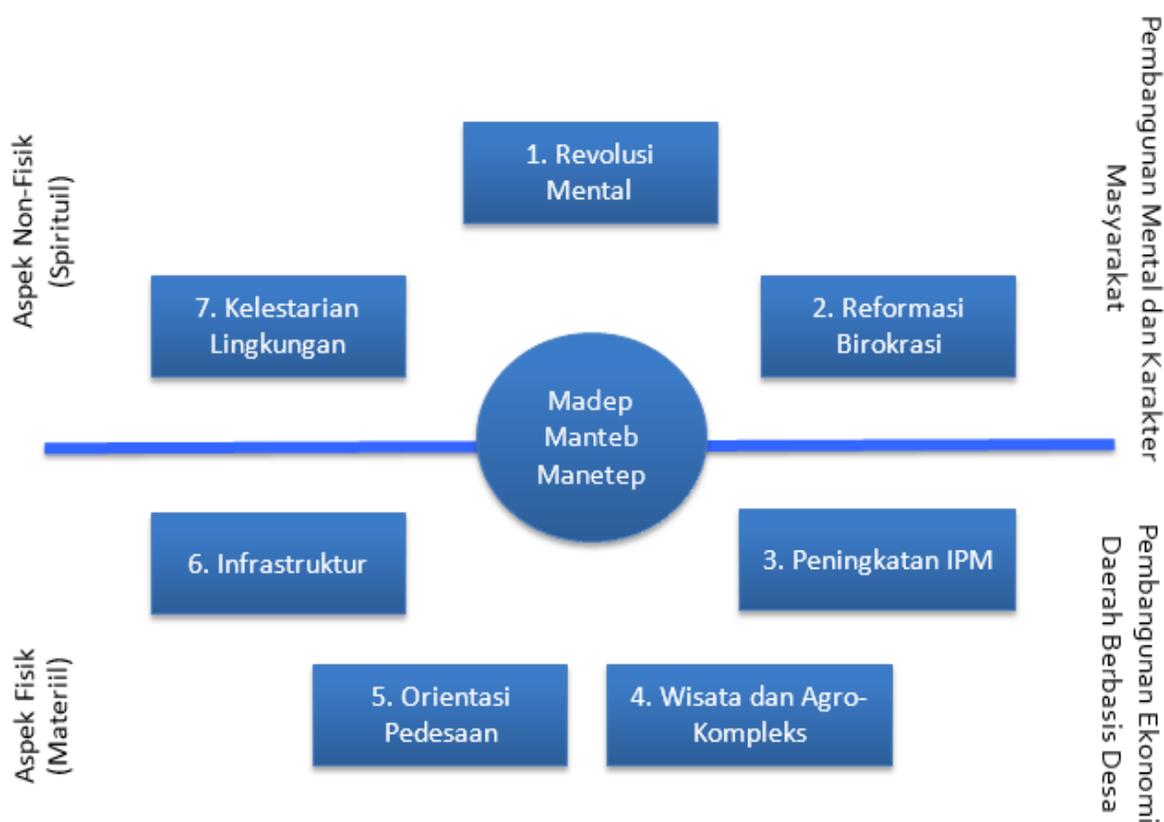
No	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
2.		Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.	<p>Demi mewujudkan misi kedua Kabupaten Malang, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas OPD dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap warganya. 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang diberlakukan. 3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah. 5. Meningkatkan profesionalism ASN berdasarkan <i>merit system</i>. 6. Meningkatkan kapasitas pengadaan dan penanganan pertanahan. 7. Menginisiasi kajian-kajian untuk memecahkan problem tatakelola pemerintahan dalam jangka waktu pendek dan panjang 8. Memfasilitasi terselenggaranya layanan yang berkualitas dalam rancangan peraturan daerah
3.		Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	<p>Demi mewujudkan misi ketiga Kabupaten Malang, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Daerah Kabupaten Malang 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai standar. 3. Meningkatkan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana.

No	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
4.		Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif	<p>Demi mewujudkan misi keempat Kabupaten Malang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan 2. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan 3. Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata 4. Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk industri kreatif lokal 5. Mengembangkan koperasi yang sehat dan mandiri 6. Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri 7. Meningkatkan nilai investasi luar dan dalam negeri 8. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD 9. Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan 10. Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan 11. Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan 12. Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan
5.		Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa	<p>Demi mewujudkan misi kelima Kabupaten Malang, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan jumlah pengangguran terutama di pedesaan 2. Menurunkan jumlah PMKS terutama di pedesaan 3. Meningkatkan koordinasi, sinergitas lintas sektor, intervensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan 4. Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal untuk memenuhi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui promosi dan edukasi

No	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
			5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa
6.		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman, dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan	<p>Demi mewujudkan misi keenam Kabupaten Malang, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk daerah prioritas 2. Menjamin Keberlangsungan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan 3. Memfasilitasi Sarana Prasarana Perhubungan untuk keselamatan pengguna jalan 4. Meningkatkan kapasitas irigasi di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan produk-produk pertanian 5. Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses internet
7.		Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	<p>Demi mewujudkan misi ketujuh Kabupaten Malang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air 2. Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran udara 3. Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan tutupan vegetasi 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana 5. Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana 6. Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasana

Tabel perumusan penjelasan misi di atas merupakan penyelarasan dari arah kebijakan lima tahun misi kepala daerah terpilih dan isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil, dan juga arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil. Kedua dimensi ini harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam skema berikut ini:



Berdasarkan skema di atas terlihat bagaimana tujuh misi pembangunan yang ada merupakan kombinasi antara dua dimensi dasar pembangunan, yaitu baik yang bersifat fisik materiil maupun yang bersifat pembangunan mental atau karakter masyarakat. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagai sebuah kesatuan, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

5.3 Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 3 tahun kedepan adalah:

1. Misi 1 **Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum** dengan tujuan:
Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah;
2. Misi 2 **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi** dengan tujuan:
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Misi 3 **Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia** dengan tujuan:
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Misi 4 **Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif** dengan tujuan:
Meningkatkan perekonomian masyarakat;
5. Misi 5 **Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa** dengan tujuan:
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel;
6. Misi 6 **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan** dengan tujuan:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk untuk pemerataan hasil pembangunan;

7. Misi 7 **Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup** dengan tujuan:

Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

5.4 Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 3 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Misi 1 mempunyai 1 tujuan 4 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama;
 - b. Ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah;
 - d. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender
 - e. Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya;
2. Misi 2 mempunyai 1 tujuan 8 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
 - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik;
 - d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi;
 - f. terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah;
 - g. Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan;
 - h. Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah.
3. Misi 3 mempunyai 1 tujuan 3 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.

4. Misi 4 mempunyai 1 tujuan 8 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatkan kinerja sektor pertanian;
 - b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan;
 - c. Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif;
 - d. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM;
 - e. Meningkatnya nilai investasi;
 - f. Meningkatnya jumlah PAD;
 - g. Meningkatnya kinerja sektor peternakan;
 - h. Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor pariwisata.
5. Misi 5 mempunyai 1 tujuan 4 sasaran yaitu:
 - a. Menurunkan jumlah pengangguran di desa;
 - b. Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan;
 - c. Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat;
 - d. Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.
6. Misi 6 mempunyai 1 tujuan 5 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang;
 - b. Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan;
 - c. Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan;
 - d. Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi;
 - e. Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan.
7. Misi 7 mempunyai 1 tujuan 2 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan;
 - b. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana.

Penjabaran visi misi, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan melalui Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN

No	Misi RPJMD Kabupaten Malang	Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019	RPJMN 2015-2019	Keterkaitan
1.	Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum	Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial	Misi Kedua: Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum Misi Ketujuh: Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Kualitas kehidupan beragama, revitalisasi budaya dan tradisi, penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia
2.	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.	Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Misi kelima : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Tata kelola pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang bersih dan profesionalisme pelayanan publik. Menunjukkan eksistensi kepada negara lain bahwa Indonesia berdaya saing pada hal reformasi birokrasi yang tidak ada KKN

3.	Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Misi Pertama : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	Misi Pertama: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan Misi Keempat: Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	Bidang pendidikan dan kesehatan
4.	Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif	Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi	Misi pertama: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	Pembangunan ekonomi di kelembagaan UMKM, koperasi, produktivitas sektor pertanian, perdagangan, percepatan industri agro atau non agro, pariwisata dan investasi. Pariwisata termasuk promosi Indonesia sebagai negara kepulauan

5.	Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan , peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa	Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang	Misi keempat: Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, sejahtera	Pembangunan desa dilakukan melalui pembangunan dan penataan ruang serta pembangunan kualitas hidup manusia agar lebih tinggi.
6.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman, dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan	Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang		Pembangunan ruang meliputi transportasi, permukiman dan prasarana penunjang
7.	Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang		Pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas hidup

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Selain itu sasaran juga merupakan dasar yang kuat untuk melihat pencapaian kinerja Kabupaten Malang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian seluruh sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam menindaklanjuti visi

dan misi Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 5.5
Tujuan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2021
<p>Misi I : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum</p>		
<p>1. Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah</p>	<p>Persentase konflik sosial yang ditangani</p>	<p>100%</p>
<p>Misi II : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi</p>		
<p>1. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>70,20</p>
<p>Misi III : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia</p>		
<p>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p>	<p>70,00 - 70,50</p>
<p>Misi IV : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif</p>		
<p>1. Meningkatkan perekonomian masyarakat</p>	<p>1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara</p>	<p>5,70% - 5,91% 10.052.688 Orang</p>

Misi V :		
Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa		
1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan 2. Persentase Desa Mandiri	9,44% - 9,04% 9,52%
Misi VI :		
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat		
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,304 - 0,300
Misi VII :		
Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup		
1. Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,31

Sedangkan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2019-2021 sebagaimana tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.6

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2017-2021
 VISI: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep, Menteb dan Manetep”

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA					PD Penanggung Jawab
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama	Persentase konflik sosial yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Persentase Event Wisata Budaya Lokal Yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	88,38	88,38	88,40	88,42	88,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya				Rata-rata Persentase prestasi pemuda dan olahraga	41%	42%	43%	44%	45%	Dinas Pemuda dan Olahraga	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA				PD Penanggung Jawab
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,11	79,20	79,50	80,00	80,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, RSUD Kanjuruhan RSUD Lawang Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah
			Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	BB	BB	BB	A	A	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
				Nilai Evaluasi LPPD	ST	ST	ST	ST	ST	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	95%	98%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi	Indeks profesionalisme ASN	N/A	N/A	94,56	94,22	94,49	Badan Kepegawaian Daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA				PD Penanggung Jawab
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	N/A	45%	56%	70%	87%	Dinas Pertanahan
			Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	34%	34%	34%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	Persentase fasilitasi rancangan peraturan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Indeks Pendidikan	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,12	72,15	72,30	72,45	72,60	Dinas Kesehatan
			Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	0,83%	0,76%	0,71%	0,67%	0,64%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA				PD Penanggung Jawab		
					2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kinerja sektor pertanian	Persentase PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	3,63%	3,63%	3,64%	3,65%	3,66%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
				Persentase PDRB Sub Sektor Hortikultura	4,43%	4,43%	4,44%	4,45%	4,46%			
				Persentase PDRB Sub Sektor Perkebunan	1,78%	1,78%	1,79%	1,80%	1,81%			
					Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	1,90%	1,92%	1,94%	1,96%	1,98%	Dinas Perikanan
					Meningkatkan perkembangan usaha industri kreatif	Persentase Industri Kreatif	N/A	10%	12,50%	15,00%	17,50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Stabilisasi	44,80%	50%	50%	50%	50%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						Persentase pertumbuhan UMKM	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
					Meningkatnya nilai investasi	Jumlah nilai investasi	28.018.355.000.253	28.858.905.650.261	29.724.672.819.768	30.616.413.004.362	31.534.905.394.492	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Meningkatnya jumlah PAD	Persentase PAD terhadap APBD	19,68%	19,96%	20,06%	20,16%	20,26%	Badan Pendapatan Daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA				PD Penanggung Jawab
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Meningkatnya kinerja sektor peternakan	Persentase PDRB Sektor Peternakan (Atas Dasar Harga Konstan)	4,50%	4,51%	4,52%	4,53%	4,54%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata thd PAD	2,76%	3%	3,24%	3,50%	3,75%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	Persentase angka kemiskinan	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Persentase Angka TPT	4,60%	4,60%	4,10%	3,60%	3,10%	Dinas Tenaga Kerja
			Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	86,83%	87,08%	87,53%	87,58%	87,83%	Dinas Sosial
			Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.	Persentase surplus ketersediaan pangan	N/A	76,49%	77,79%	79,09%	80,39%	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.	Jumlah Desa Maju	125	127	129	131	133	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA				PD Penanggung Jawab
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	66,45%	67,00%	67,60%	68,30%	69,10%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
			Meningkatnya Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta Penataan ruang dan Bangunan	70,72%	72,75%	74,91%	76,05%	76,05%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	17,76%	16,74%	15,71%	14,67%	13,62%	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi	Persentase luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi	78,22%	78,75%	79,25%	79,75%	80,00%	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
			Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan	Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	72,50%	75,00%	77,50%	80,00%	82,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA				PD Penanggung Jawab
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	50,30	50,60	50,90	51,20	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,15	76,20	76,30	76,40	76,50	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	76,91	77,20	77,50	77,80	78,00	
			Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Presentase desa tangguh bencana	62,50%	71,90%	81,30%	90,60%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, strategi juga bisa disebut sebagai metodologi dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja capaian dalam 5 tahun. Oleh karena itu, strategi merupakan unsur penting yang dapat mewujudkan inovasi, reformasi, dan peningkatan kinerja birokrasi.

Selain sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi, strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang juga merupakan serangkaian komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan konstitusi dan kebijakan nasional, serta tata pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini merupakan nilai substansial dalam kebijakan otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Penjelasan disebutkan bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Maka dari itu, segala hal yang telah disusun dalam bab ini memiliki substansi untuk mensukseskan kebijakan pembangunan nasional.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan. Dalam mewujudkan strateginya Pemerintah Kabupaten Malang juga mewujudkan poin-poin arah kebijakan yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah

Kabupaten Malang disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 tahun.

Dalam perumusan strategi didasarkan pada kriteria: 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Bagian ini menguraikan alternatif strategi internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih. Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan akan dijadikan rujukan yang harus digunakan untuk keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel. 6.1
Identifikasi SWOT

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik masyarakat Kabupaten Malang yang terbuka, dinamis, dan agamis • Tersedia kesempatan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja • Banyak tersedia kelembagaan pendidikan mulai dari usia dini sampai dengan perguruan tinggi • Banyaknya inovasi daerah, yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan tingkat regional maupun nasional • Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk menggerakkan ekonomi perdesaan • Letak wilayah yang strategis mendukung produksi sektor pertanian, aktivitas pariwisata serta pasar potensial bagi sektor industri dan perdagangan • Lingkungan alam asri yang sejuk, mendukung keanekaragaman hayati 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya solidaritas, keseimbangan, keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Malang • Tersedianya dana pengembangan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah • Kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional • Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang • Sebagai arah kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan wisata Jawa Timur
Internal	Eksternal
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya kinerja kelembagaan pemerintahan terbukti dengan nilai SAKIP 2014 yang belum maksimal • Terbatasnya infrastruktur khususnya di kawasan selatan • Rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia terutama pada sektor riil dan investasi skala besar • Daya saing produk pertanian dan agro industri di pasar internasional masih rendah 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bebasnya tayangan budaya luar • Jangkauan pelayanan pada masyarakat perbatasan/pinggiran belum optimal • Persaingan dunia kerja semakin ketat, dalam era globalisasi • Persaingan global yang makin terbuka terutama di kawasan Asia Tenggara • Maraknya penyelundupan barang impor • Adanya bencana alam

Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Malang. Berdasarkan tabel identifikasi SWOT di atas dapat ditentukan alternatif strategis permasalahan yang ada.

Tabel. 6.2
Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran

Internal Eksternal	Kekuatan Strenght	Kelemahan Weakness
Peluang Opportunities	<p style="text-align: center;">SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi forum-forum kebijakan yang memperkuat kerukunan beragama 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur birokrasi 3. Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi 	<p style="text-align: center;">WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan yang bermutu 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur
Internal Eksternal	Kekuatan Strenght	Kelemahan Weakness
Ancaman Threats	<p style="text-align: center;">ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas budaya lokal dan mendorong masyarakat untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-sehari 2. Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan <i>merit system</i> 3. Meningkatkan perkembangan usaha industri kreatif 4. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif melalui pengoptimalan sumber daya alam 	<p style="text-align: center;">WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan jumlah pengangguran desa untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan produktifitas kualitas tenaga kerja 2. Meningkatkan produk-produk hasil pertanian untuk bersaing di pasar internasional

Bab ini akan memberikan paparan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang secara ringkas diulas dalam bentuk strategi umum, dan secara detail dalam matriks/tabel.

6.1. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Malang melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

6.2. Strategi Umum

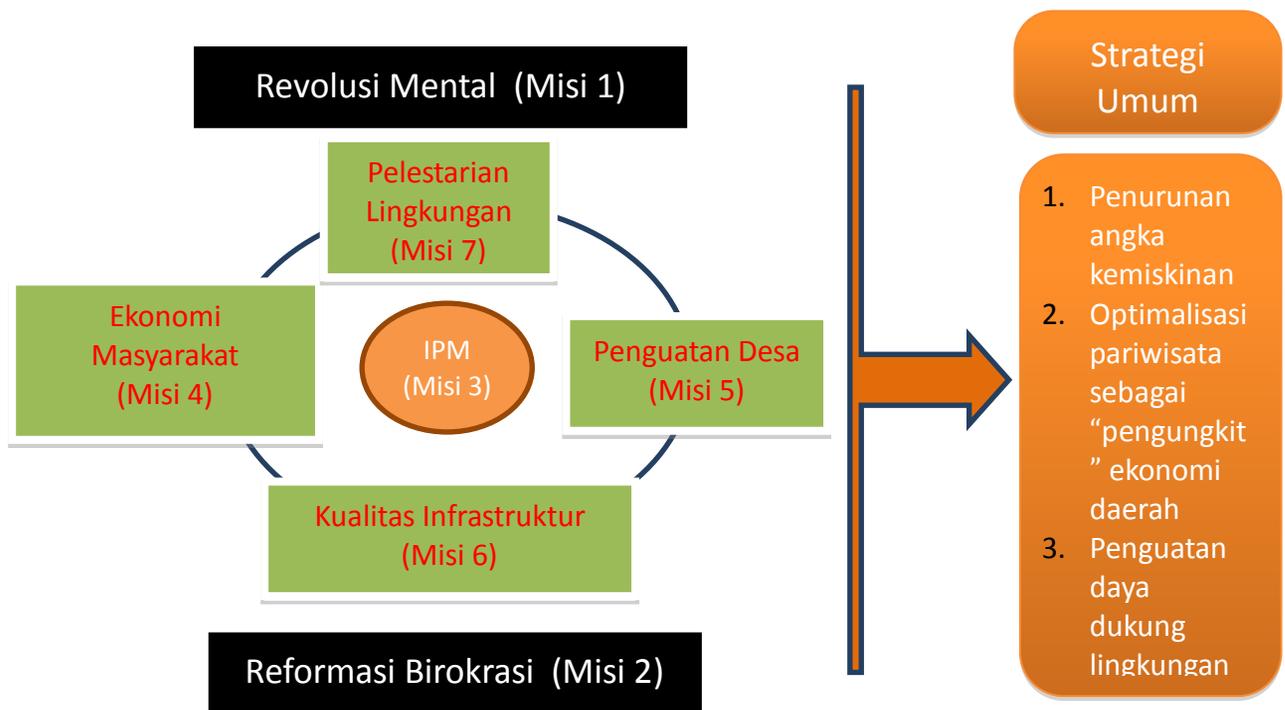
Visi "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep Manteb Manetep" yang dijabarkan dengan Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan, dan tujuh misi Pemerintah Kabupaten Malang, diwujudkan melalui tiga strategi umum sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata;
3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang 2016-2021 dengan menegaskan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Malang. Kemiskinan telah dianggap oleh Pemerintah Kabupaten Malang menjadi masalah serius yang harus ditangani. Ini juga tidak lepas dari refleksi atas masih banyaknya jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang. Permasalahan ini jika ditelusuri tidak dapat terpisah dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Malang pada

periode sebelumnya. Pembangunan yang hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan kesenjangan pendapatan penduduk menjadi salah satu penyebab kemiskinan tidak menurun secara drastis. Atas dasar itu, pada RPJMD kali ini Pemerintah Kabupaten Malang telah berkomitmen untuk lebih serius mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Malang dengan menjadikan permasalahan ini pada strategi umum.

Adapun hubungan antara Misi pembangunan Kabupaten Malang 2016-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Tujuan utama dari pembangunan selama lima tahun kedepan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Secara kuantitatif ukuran yang dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disamping beberapa ukuran-ukuran lainnya. Hal ini tertuang dalam Misi ke-tiga dalam dokumen RPJMD ini. Sedangkan untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan landasan yang kokoh, yaitu konsistensi pelaksanaan revolusi mental (misi ke-satu) dan penguatan reformasi birokrasi (misi ke-dua). Adapun upaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dicapai melalui beberapa upaya pokok, seperti penguatan ekonomi masyarakat (misi ke-empat), peningkatan dan perluasan akses dan kualitas infrastruktur (misi ke-enam) dan penguatan kelembagaan pemerintah desa (misi ke-lima) serta meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup (misi ke-tujuh).

Secara lebih operasional, kombinasi dan sinergi antar-misi tersebut diharapkan dapat menghasilkan beberapa instrumen sebagai sasaran utama sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya sinergi dari ketujuh misi pembangunan yang ada, maka angka kemiskinan di Kabupaten Malang harus dapat berkurang secara signifikan di tahun 2021. Sektor pariwisata, sebagai sektor yang memiliki daya ungkit yang cukup kuat dalam menopang perekonomian masyarakat harus diperluas dan dioptimalkan dayagunanya. Ketiga, yang tak kalah penting adalah upaya-upaya percepatan pembangunan yang ada harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan, agar kelestarian daya dukung lingkungan di Kabupaten Malang tidak rusak akibat aktivitas pembangunan daerah yang dilakukan.

Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi salah satu strategi umum dalam RPJMD Kabupaten Malang. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi penting dilakukan pada era dewasa ini mengingat kerusakan lingkungan hidup mulai berdampak dalam skala lokal maupun global. Penyebabnya adalah pembangunan dan industrialisasi yang selama ini kurang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Dengan memperhatikan *Sustainable Development Goals* sebagai agenda global yang fokus menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah geografis yang cukup luas dan disertai panorama alam yang begitu indah membuat Kabupaten Malang menjadi rujukan utama kepariwisataan. Di sebelah selatan wilayah Kabupaten Malang memiliki hamparan pantai dengan pasir putih yang memikat. Selain itu, Kabupaten Malang juga dekat dengan kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru. Potensi pariwisata ini ditangkap oleh pemerintah sebagai salah satu pengembangan kepariwisataan yang akan meningkatkan perekonomian daerah.

6.2.1. Menurunkan Angka Kemiskinan

Sebagaimana diketahui kemiskinan adalah permasalahan sosial yang harus ditanggulangi oleh pemerintah secara serius. Argumentasi ini didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat, yang menyebutkan bahwa kehadiran Pemerintah Indonesia harus dapat memajukan kesejahteraan umum. Hal ini ditegaskan pada pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Atas dasar konstitusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas dalam strategi rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Selain atas dasar konstitusi di atas, angka kemiskinan di Kabupaten Malang belum mengalami penurunan secara drastis. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Malang pada tahun 2015 adalah 11,53%, namun pada tahun 2016 angka ini mengalami penurunan sebesar 0,04% menjadi 11,49%.

Pada tahun 2017 angka kemiskinan di Kabupaten Malang mengalami penurunan secara signifikan. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada tahun 2017 adalah 11,04%. Angka ini turun 0,45% dibandingkan tahun 2016 adalah 11,49%. Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2017 diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2016 sebesar 293.740 jiwa, pada tahun 2017 berkurang 9.780 jiwa menjadi sebesar 283.960 jiwa.

Menurunnya Angka kemiskinan tersebut menunjukkan hasil kinerja yang bersinergi dengan upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan adalah:

- a. Meningkatnya akses layanan terhadap penduduk miskin terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur, terutama ketersediaan jalan akses yang menghubungkan langsung penduduk ke tempat fasilitas kesehatan, sarana pendidikan serta tempat-tempat wisata;

- c. Meningkatnya kunjungan pariwisata baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah, dengan demikian juga meningkatkan perputaran uang di tingkat lokal sehingga meningkatkan penghasilan masyarakat yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan;
- d. Adanya intervensi pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PHK) yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM);
- e. Adanya Data Kemiskinan (Damis) Kabupaten Malang yang menyajikan data penduduk miskin by name by address yang dapat diakses secara online dan telah diintegrasikan dengan data pada Kementerian Sosial, sangat penting untuk mengarahkan program pembangunan dan kegiatan pengentasan kemiskinan perangkat daerah serta program-program bantuan sosial dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, lembaga swasta maupun lembaga sosial lainnya agar tepat guna dan tepat sasaran.
- f. Adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan pelaku usaha yang memberi ruang pada para pengusaha di kabupaten Malang untuk berperan serta dalam pembangunan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Angka kemiskinan beberapa sebab, salah satunya adalah minimnya perhatian melalui pemberian akses layanan terhadap penduduk miskin. Sebagaimana diketahui salah satu penyebab dari terjadinya kemiskinan ialah keterbatasan akses penduduk miskin dalam sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan beberapa akses lain. Ditambah lagi, adanya ketidakstabilan harga harga secara umum yang menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk meningkatkan pendapatannya. Fenomena terkait kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari akibat sirkulasi modal yang hanya terpusat, sehingga menyebabkan kesenjangan dan ketidakmerataan pendapatan. Oleh karena itu program program menyangkut penanganan kemiskinan menjadi sebuah prioritas khusus yang berkelanjutan.

Penetapan strategi penurunan angka kemiskinan pada RPJMD 2016-2021 diikuti oleh serangkaian arah kebijakan sebagai petunjuk dalam menjalankan program. Langkah-langkah seperti pemberdayaan ekonomi, pemberian lapangan pekerjaan, perbaikan akses layanan prioritas, pengawasan sirkulasi modal hingga kontrol terhadap pajak akan dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Diharapkan melalui strategi ini jumlah penduduk miskin terhadap total/jumlah penduduk dapat menurun drastis dan terciptanya pendapatan ekonomi masyarakat yang lebih merata.

6.2.2. Mengoptimalkan Potensi Sektor Pariwisata

Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Malang juga diikuti dengan potensi wisata alam yang bervariasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada gambaran umum di bab II, bahwa potensi pariwisata alam di Kabupaten Malang yang utama meliputi wisata pantai di sepanjang pesisir selatan dan pegunungan di kawasan Bromo Tengger Semeru. Selain potensi pariwisata alam, Kabupaten Malang juga memiliki pariwisata budaya yang terkenal seperti peninggalan sejarah Kerajaan Singosari. Keberadaan potensi ini ditangkap oleh pemerintah sebagai aset yang dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selama ini potensi wisata telah dikembangkan dengan baik, salah satunya melalui media informasi dan komunikasi. Akan tetapi, pengembangan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya masyarakat belum berkembang dengan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah potensi pariwisata yang relatif saling berjauhan dan sulit diakses. Masyarakat belum memiliki kemampuan dalam menangkap potensi ekonomi untuk pengembangan usaha pariwisata di daerahnya. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan pariwisata sebagai salah satu strategi umum yang nantinya dapat menjadi prioritas dalam pembangunan. Sehingga strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kekurangan dan mengembangkan potensi yang selama ini telah ada.

Pengembangan kepariwisataan juga ditegaskan oleh pemerintah pusat sebagai agenda pembangunan nasional yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Penegasan lebih lanjut pada Pasal 4 menyatakan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, dan 5 tujuan lainnya. Undang undang tersebut setidaknya dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan kepariwisataan dan sekaligus digunakan sebagai salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Salah satu kebijakan kepariwisataan yang sedang diupayakan Pemerintah Kabupaten Malang adalah terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari yang saat ini dalam pembahasan di Kementerian. KEK Singhasari diharapkan menjadi bagian terintegrasi yang akan mendukung optimalisasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPN BTS). Dengan berbagai potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, antara lain: Cluster Wisata Petualang (Rafting Kasembon), Cluster Sekitar Batu (Desa Wisata Pujon, Coban Rondo), Cluster Budaya Singosari (situs candi, patung dan pemandian peninggalan Kerajaan Singosari), Cluster Agropolitan (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kerajinan Mendong Wajak, Desa Wisata Gubuk Klakah), Cluster Agribisnis (perkebunan kopi Ampelgading, Sumbermanjing, Tirtoyudo dan Dampit), Cluster Wisata Religi Gunung Kawi dan Cluster Wisata Pantai Malang Selatan serta dukungan ketersediaan infrastruktur pendukung yang sangat memadai meliputi angkutan udara, kereta api dan jalan raya, diantaranya: Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, Jalan Tol Surabaya – Pandaan – Malang, Stasiun Kereta Api di Singosari dan Jalan Arteri Primer Surabaya – Malang, Kabupaten Malang sangat optimis dengan rencana pengembangan KEK.

6.2.3. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pemanasan global semakin hari mulai dirasakan oleh semua pihak, tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Malang. Perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu dampak sehingga membuat hasil pertanian menurun dan sulit diprediksi. Ditambah lagi jumlah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang semakin bertambah membuat kualitas lingkungan hidup semakin memburuk. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Malang berinisiatif untuk melakukan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup.

Strategi ini menegaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ringkasnya, regulasi tersebut berfungsi untuk merencanakan hingga mengawasi lingkungan hidup secara lebih berkualitas.

Bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Hal ini tidak bisa lepas dari kondisi geografis yang cukup luas dan jenis sumber daya alam Kabupaten Malang yang beragam. Melimpahnya potensi tersebut akan menimbulkan masalah jika pengaturan terhadap lingkungan hidup tidak diprioritaskan. Memahami urgensi tersebut Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan pengaturan terhadap lingkungan hidup yang berkualitas sebagai prioritas rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Strategi akan diarahkan melalui bentuk kebijakan seperti perencanaan, pengawasan, hingga perbaikan kualitas lingkungan. Untuk mencapainya pengaturan ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta sebagai aktor yang akan dilibatkan dalam menjaga kelestarian. Sehingga diharapkan pula dalam strategi ini Pemerintah Kabupaten Malang dapat

mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai arahan peraturan nasional mengenai pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada poin tersebut dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang berorientasi pada pemaduan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi demi menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

6.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Ketiga strategi umum tersebut menjadi pijakan utama dalam penetapan, dan pelaksanaan strategi, serta arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan daerah bagi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Untuk lebih detailnya akan diuraikan pada tabel 6.3 berikut:

Tabel. 6.2
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
				PERNYATAAN	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah	Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama	Menginisiasi forum-forum kerukunan antar umat beragama	Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan umat beragama dalam suasana saling menghormati	√	√	√	√	√	
		Ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan peraturan yg berlaku	Mengimplementasikan sistem komplain dan membentuk tim reaksi cepat dalam penyelesaiannya komplain masyarakat	√	√	√	√	√	
		Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Menginisiasi dan berperan aktif even-even budaya dan seni masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yg mendukung gerakan cinta budaya lokal	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender	√	√	√	√	√	√
		Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya	Memfasilitasi penjangkaran Pemuda dan Olahragawan yang berpotensi untuk berprestasi	Mengimplementasikan kebijakan pengembangan prestasi Pemuda dan Olahraga	√	√	√	√	√	√
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kapasitas OPD dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap warganya	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima	√	√	√	√	√	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang diberlakukan	Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, pelaporan dan pengawasan yang efektif	√	√	√	√	√
		Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan perencanaan dan meningkatkan kapasitas individu dan unit pengelola	√	√	√	√	√
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang terintegrasi dan Penguatan kapasitas SDM Perencana	√	√	√	√	√
		Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi	Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan sistem merit	Menjamin terselenggaranya kebijakan ASN berdasarkan kompetensi, fit and proper test, reward and punishment	√	√	√	√	√
		Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Meningkatkan kapasitas pengadaan dan penanganan pertanahan	Mengimplementasikan kebijakan pengadaan tanah dan penanganan kasus pertanahan	√	√	√	√	√
		Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Menginisiasi kajian-kajian untuk memecahkan problem tatakelola pemerintahan dalam jangka waktu pendek dan panjang	Mengimplementasikan kebijakan kemitraan dengan berbagai sektor dalam melaksanakan kajian-kajian tatakelola pemerintahan	√	√	√	√	√

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatkan kualitas layanan fasilitas perencanaan peraturan daerah	Memfasilitasi terselenggaranya layanan yang berkualitas dalam rancangan peraturan daerah	Mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas layanan dengan melibatkan partisipasi individu dan organisasi yang kompeten	√	√	√	√	√
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Daerah Kabupaten	Memformulasikan dan Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan standar Pelayanan Minimal pendidikan daerah kabupaten	√	√	√	√	√
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai standar	Mengimplementasikan dan memformulasikan kebijakan yang menjamin hak - hak masyarakat terhadap derajat kesehatan masyarakat	√	√	√	√	√
		Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana	Mengimplementasikan kebijakan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana	√	√	√	√	√
4. engembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkan kinerja sektor pertanian	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	√	√	√	√	√
			Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan	√	√	√	√	√

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan	√	√	√	√	√
		Meningkatkan perkembangan usaha industri kreatif	Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk industri kreatif lokal	Mengimplementasikan kebijakan yang meluaskan pasar hasil produk industri kreatif	√	√	√	√	√
		Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Mngembangkan koperasi yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah	√	√	√	√	√
			Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM	√	√	√	√	√
		Meningkatnya nilai investasi	Meningkatkan nilai investasi luar dan dalam negeri	Mempermudah kebijakan perizinan dan investasi	√	√	√	√	√
		Meningkatnya jumlah PAD	Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menggali potensi PAD	√	√	√	√	√
		Meningkatnya kinerja sektor peternakan	Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan produksi hasil ternak	√	√	√	√	√
			Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan		√	√	√	√	√
			Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan		√	√	√	√	√
			Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan		√	√	√	√	√

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yg terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata di wilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu)	√	√	√	√	√
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Menurunkan jumlah pengangguran terutama di pedesaan	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi dan peluang kerja pengangguran	√	√	√	√	√
		Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan	Menurunkan jumlah PMKS terutama di pedesaan	Mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS yang terintegrasi	√	√	√	√	√
		Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.	Meningkatkan koordinasi, sinergitas lintas sektor, intervensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan	Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	√	√	√	√	√
		Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal untuk memenuhi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui promosi dan edukasi.	Meningkatkan gizi dan keamanan pangan	√	√	√	√	√	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa.	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa maju.	√	√	√	√	√
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk daerah prioritas	Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan hasil ekonomi, pariwisata dan lingkungan hidup	√	√	√	√	√
		Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Menjamin Keberlangsungan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Mengimplimentasikan kebijakan mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang	√	√	√	√	√
		Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Memfasilitasi Sarana Prasarana Perhubungan untuk keselamatan pengguna jalan	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keselamatan pengguna jalan	√	√	√	√	√
		Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi	Meningkatkan kapasitas irigasi di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan produk-produk pertanian	Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perluasan penyaluran irigasi air persawahan	√	√	√	√	√

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan	Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses internet	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan kemitraan dalam meningkatkan akses dan kualitas internet di daerah-daerah terpencil	√	√	√	√	√
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas air	√	√	√	√	√
			Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran udara	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas udara	√	√	√	√	√
			Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan tutupan vegetasi	Melaksanakan konservasi dan pembinaan dalam pengelolaan tutupan vegetasi	√	√	√	√	√
		Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	√	√	√	√	√
			Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Melaksanakan Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	√	√	√	√	√
			Pemulihan masyarakat dan pengoperasian sarana prasana	Melaksanakan Pemulihan masyarakat dan mengoperasionalkan sarana prasana	√	√	√	√	√

6.3. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar 6.1 berikut:

Gambar 6.1.
Agenda/Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021



BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum merupakan sarana untuk mencapai tujuan disertai dengan target yang hendak dicapai. Kebijakan umum yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Malang guna mempertajam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ke dalam program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Malang 2016-2021 disusun sebagai tahap operasional dari upaya untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Malang selama lima tahun ke depan yang menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Strategi dan Arah Kebijakan, telah dijabarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan tiga strategi umum sebagai prioritas dalam kegiatan pembangunan pada periode tahun 2016-2021. Ketiga strategi tersebut ialah: **Kemiskinan, lingkungan hidup, dan wisata**. Oleh sebab itu,

untuk menjadikan ketiga strategi tersebut dapat kongkrit diaktualisasikan, maka ketiganya akan dirujuk sebagai landasan dari prioritas kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Berikut merupakan contoh poin-poin kebijakan umum dalam kaitannya dengan **pengentasan kemiskinan**:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin.

Berikut merupakan contoh poin-poin kebijakan umum dalam kaitannya dengan **meningkatkan kualitas lingkungan hidup**:

1. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
2. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
3. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
4. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan hidup;

Berikut merupakan contoh poin-poin kebijakan umum dalam kaitannya dengan **pengembangan industri wisata**:

1. Pengembangan *branding* destinasi wisata Kabupaten Malang;
2. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
3. Pengembangan wisata berbasis budaya dan kearifan lokal;
4. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);
5. Pengembangan wisata Agroindustri.

Sebagai prioritas dalam kebijakan umum dan program pembangunan, ketiganya tidak akan berdiri terpisah, melainkan dapat bersinergis atau saling memiliki keterhubungan. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Malang merasa bahwa tiga hal ini merupakan potensi yang harus dimunculkan dalam prioritas. Selain itu, sebagaimana telah dipaparkan pada Bab VI terlihat jelas bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi dan masalah dalam bidang wisata, lingkungan hidup, dan kemiskinan yang perlu untuk ditangani. Keterhubungan ketiganya akan saling menyelesaikan masalah dan bahkan akan mengembangkan potensi yang berdampak positif bagi pemerintah daerah.

Kebijakan umum **kemiskinan**. Sebagaimana telah diketahui kemiskinan menjadi masalah serius yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Posisi Pemerintah Kabupaten Malang dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya akan menjadi fasilitator yang melayani masyarakat dalam mengakses ekonomi. Fasilitasi ini menjadi penting untuk dilakukan lantaran selama ini kebanyakan masyarakat miskin jarang diperhatikan sehingga posisi mereka tetap terpinggirkan. Adanya potensi wisata dan lingkungan hidup menjadikan agenda prioritas pengentasan kemiskinan menjadi mungkin untuk dimaksimalkan. Sebabnya destinasi wisata di Kabupaten Malang yang potensial dapat meningkatkan perekonomian daerah, khususnya di lingkungan wisata. Argumentasinya, masyarakat miskin dapat memanfaatkan pengembangan wisata menjadi sarana pemasukan ekonomi bagi mereka, misalnya dengan mendirikan gerai-gerai hasil kreativitas di lokasi wisata. Hal ini dapat dibuktikan bahwa telah ada perubahan sosial bagi beberapa warga miskin di daerah sekitar wisata yang dikembangkan. Meskipun akibat di tahun sebelumnya wisata belum menjadi prioritas yang ditonjolkan dampak perubahan belum banyak atau merata dirasakan. Salah satu hal lainnya yang harus diperhatikan jika memperhatikan keterhubungan antara kemiskinan dan pariwisata adalah lingkungan hidup. Industri wisata membutuhkan lingkungan hidup yang baik, karena itu lingkungan hidup harus benar-benar diperhatikan di tengah proses pemanfaatannya.

Kebijakan umum **lingkungan hidup**. Lingkungan hidup berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, lingkungan hidup juga memberikan efek berupa bencana yang dapat menimbulkan kerugian. Efek ini akan terjadi bilamana kualitas lingkungan hidup tidak dijaga dengan baik. Pemerintah Kabupaten Malang memiliki komitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini mengingat potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kabupaten Malang cukup potensial. Ketika lingkungan hidup dapat dimanfaatkan dengan baik, maka hal ini juga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Kondisi miskin salah satu penyebabnya adalah sulitnya akses masyarakat miskin dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan dibukanya industri pariwisata, misalnya industri wisata berbasis lingkungan (ekowisata) memungkinkan perekonomian penduduk meningkat, khususnya warga miskin. Alhasil, kondisi lingkungan hidup dan pemanfaatannya memiliki relasi terhadap kesejahteraan

masyarakat dan pengembangan industri pemanfaatan lingkungan, seperti pariwisata.

Kebijakan umum **pariwisata**. Perkembangan industri pariwisata akan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang menysar pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sarana edukasi akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup. Misalnya, pada pengembangan industri ekowisata, kondisi alam yang bagus akan menarik perhatian wisatawan untuk datang berwisata. Tidak sampai disitu saja, ekowisata juga mengharuskan para pengunjung belajar untuk memahami kondisi lingkungan yang sebenarnya. Bahwa alam merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan. Pengembangan industri ekowisata akan berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan kedatangan pengunjung yang diharuskan membayar karcis masuk dan parkir (jika membawa kendaraan) akan menyumbang pemasukan daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat mengembangkan usahanya di sentra usaha di dekat area wisata. Potensi ini ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Malang sebagai kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kehidupan masyarakat Kabupaten Malang yang lebih baik.

Ketiga prioritas kebijakan umum ini bukan kemudian menyingkirkan kebijakan lainnya dalam kaitannya dengan kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang. Akan tetapi posisinya hanya sebatas sebagai prioritas yang merupakan hasil dari pengembangan dengan merujuk kondisi potensi dan masalah di Kabupaten Malang.

Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang inheren disetiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program- program prioritas di masing-masing strategi merupakan program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih. Dalam mewujudkan

capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Penetapan program prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran** : Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama.
 - 1) Strategi : Menginisiasi forum-forum kerukunan antar umat beragama;
 - 2) Arah Kebijakan : Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan umat beragama dalam suasana saling menghormati;
 - 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
 - b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - c. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

2. **Sasaran** : Ketentraman dan ketertiban umum.
 - 1) Strategi : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan peraturan yg berlaku;
 - 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan sistem komplain dan membentuk tim reaksi cepat dalam penyelesaiannya komplain masyarakat;
 - 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah;

3. **Sasaran** : Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah.
 - 1) Strategi : Menginisiasi dan berperan aktif even-even budaya dan seni masyarakat;
 - 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yg mendukung gerakan cinta budaya lokal;
 - 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya.

4. **Sasaran** : Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.
 - 1) Strategi : Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;

- 2) Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 - b. Program Pengarusutamaan Gender;
 - c. Program Perlindungan Hak Perempuan.
5. **Sasaran** : Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya.
 - 1) Strategi : Memfasilitasi penjangkaran Pemuda dan Olahragawan yang berpotensi untuk berprestasi;
 - 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengembangan prestasi Pemuda dan Olahraga;
 - 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga;
 - b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda;
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
6. **Sasaran** : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
 - 1) Strategi : Meningkatkan kapasitas OPD dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap warganya;
 - 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima;
 - 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
 - b. Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - c. Program Pengembangan dan pengawasan kearsipan;
 - d. Program Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip;
 - e. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
 - f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - g. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS;
 - h. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata;
 - i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- j. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- k. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;
- l. Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan;
- m. Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil;
- o. Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- p. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

7. **Sasaran** : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

- 1) Strategi : Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang diberlakukan;
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, pelaporan dan pengawasan yang efektif;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah;
 - c. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah;
 - e. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja;
 - f. Program Pencegahan Korupsi;
 - g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

8. **Sasaran** : Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik.

- 1) Strategi : Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan perencanaan dan meningkatkan kapasitas individu dan unit pengelola;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan;
 - b. Program Administrasi Tata Pemerintahan.

9. **Sasaran** : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- 1) Strategi : Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Arah Kebijakan : Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang terintegrasi dan Penguatan kapasitas SDM Perencana;
 - 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
10. **Sasaran** : Meningkatkan profesionalisme aparatur birokrasi.
- 1) Strategi : Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan sistem merit;
 - 2) Arah Kebijakan : Menjamin terselenggaranya kebijakan ASN berdasarkan kompetensi, fit and proper test, reward and punishment;
 - 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
 - b. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur;
 - c. Program Administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan;
 - d. Program Peningkatan dan pengembangan data serta informasi aparatur.
11. **Sasaran** : terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah.
- 1) Strategi : Meningkatkan kapasitas pengadaan dan penanganan pertanahan;
 - 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pengadaan tanah dan penanganan kasus pertanahan;
 - 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah;
 - b. Program Penanganan Masalah Pertanahan.

12. **Sasaran** : Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan.

- 1) Strategi : Menginisiasi kajian-kajian untuk memecahkan problem tatakelola pemerintahan dalam jangka waktu pendek dan panjang;
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan kemitraan dengan berbagai sektor dalam melaksanakan kajian-kajian tatakelola pemerintahan;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;
 - b. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
 - c. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan;
 - d. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan.

13. **Sasaran** : Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah.

- 1) Strategi : Memfasilitasi terselenggaranya layanan yang berkualitas dalam rancangan peraturan daerah;
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas layanan dengan melibatkan partisipasi individu dan organisasi yang kompeten;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - b. Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media;
 - c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

14. **Sasaran** : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan.

- 1) Strategi : Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Daerah Kabupaten;
- 2) Arah Kebijakan : Memformulasikan dan Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal pendidikan Daerah kabupaten;

- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan;
 - b. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 - d. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
 - f. Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri.

15. **Sasaran** : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

- 1) Strategi : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai standar;
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan dan menformulasikan kebijakan yang menjamin hak - hak masyarakat terhadap derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Sumber Daya Kesehatan;
 - b. Program Upaya Pelayanan Kesehatan;
 - c. Program Peningkatan kesehatan masyarakat;
 - d. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - e. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

16. **Sasaran** : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.

- 1) Strategi : Meningkatkan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana;
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk;
 - b. Program Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana.

17. **Sasaran** : Meningkatkan kinerja sektor pertanian.

- 1) Strategi : Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan;
- 2) Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
 - b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura;
 - c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan;
 - d. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
 - e. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan;
 - f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

18. **Sasaran** : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan.

- 1) Strategi : Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan;
- 2) Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
 - b. Program Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - c. Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
 - d. Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan.

19. **Sasaran** : Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif.

- 1) Strategi : Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk industri kreatif lokal;
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang meluaskan pasar hasil produk industri kreatif;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro;
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro;
 - c. Program Pembinaan Industri;

- d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
- f. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan.

20. **Sasaran** : Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM.

- 1) Strategi :
 - a. Mengembangkan koperasi yang sehat dan mandiri;
 - b. Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri.
- 2) Arah Kebijakan :
 - a. Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah;
 - b. Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM.
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
 - d. Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

21. **Sasaran** : Meningkatnya nilai investasi.

- 1) Strategi : Meningkatkan nilai investasi luar dan dalam negeri;
- 2) Arah Kebijakan : Mempermudah kebijakan perizinan dan investasi;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
 - c. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi;
 - d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

22. **Sasaran** : Meningkatnya jumlah PAD.

- 1) Strategi : Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD;
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menggali potensi PAD;

- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD;
 - b. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah;
 - d. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB.

23. **Sasaran** : Meningkatnya kinerja sektor peternakan.

- 1) Strategi :
 - a. Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan;
 - b. Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan;
 - c. Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan;
 - d. Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan.
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan produksi hasil ternak;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;
 - b. Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan;
 - c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
 - d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

24. **Sasaran** : Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor pariwisata.

- 1) Strategi : Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yg terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata;
- 2) Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata di wilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu);
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - b. Program Pengembangan Kemitraan;
 - c. Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya.

25. **Sasaran** : Menurunkan jumlah pengangguran di desa.

- 1) Strategi : Menurunkan jumlah pengangguran terutama di pedesaan;
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi dan peluang kerja pengangguran;

- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Perluasan dan Penempatan Kerja;
 - b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - d. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - e. Program Ketrasmigrasian.

26. **Sasaran** : Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan.

- 1) Strategi : Menurunkan jumlah PMKS terutama di pedesaan;
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS yang terintegrasi;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Program Penanganan Fakir Miskin;
 - c. Program Pemberdayaan Sosial.

27. **Sasaran** : Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.

- 1) Strategi :
 - a. Meningkatkan koordinasi, sinergitas lintas sektor , intervensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - b. Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal untuk memenuhi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui promosi dan edukasi.
- 2) Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 - b. Meningkatkan gizi dan keamanan pangan.
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
 - b. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - c. Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - d. Program Keamanan Pangan.

28. **Sasaran** : Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.

- 1) Strategi : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa;

- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa maju;
 - 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 - d. Program Pengembangan Potensi Desa.
29. **Sasaran** : Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang.
- 1) Strategi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk daerah prioritas;
 - 2) Arah Kebijakan : Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan hasil ekonomi, pariwisata dan lingkungan hidup;
 - 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pembangunan dan Peningkatan;
 - b. Program Pemeliharaan.
30. **Sasaran** : Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan.
- 1) Strategi : Menjamin Keberlangsungan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan;
 - 2) Arah Kebijakan : Mengimplimentasikan kebijakan mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang;
 - 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman;
 - b. Program Pengelolaan Perumahan;
 - c. Program Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - e. Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan.
31. **Sasaran** : Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan.
- 1) Strategi : Memfasilitasi Sarana Prasarana Perhubungan untuk keselamatan pengguna jalan;
 - 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keselamatan pengguna jalan;

- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi;
 - b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Program Terminal dan Perparkiran;
 - d. Program Pelayanan UPT Perhubungan.

32. **Sasaran** : Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi.

- 1) Strategi : Meningkatkan kapasitas irigasi di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan produk-produk pertanian;
- 2) Arah Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perluasan penyaluran irigasi air persawahan;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - b. Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan SDA;
 - c. Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi;
 - d. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana;
 - e. Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.

33. **Sasaran** : Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan.

- 1) Strategi : Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses internet;
- 2) Arah Kebijakan : Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan kemitraan dalam meningkatkan akses dan kualitas internet di daerah-daerah terpencil;
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika;
 - b. Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi;
 - c. Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK.

34. **Sasaran** : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan.

- 1) Strategi :
 - a. Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air;
 - b. Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran udara;
 - c. Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan tutupan vegetasi.
- 2) Arah Kebijakan :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas air;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas udara;
 - c. Melaksanakan konservasi dan pembinaan dalam pengelolaan tutupan vegetasi.
- 3) Program pembangunan meliputi:
 - a. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup;
 - c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3;
 - d. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP);
 - e. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.

35. **Sasaran** : Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana.

- 1) Strategi :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana;
 - b. Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - c. Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasana.
- 2) Arah Kebijakan :
 - a. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana;

- b. Melaksanakan Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - c. Melaksanakan Pemulihan masyarakat dan mengoperasikan sarana prasana.
- 3) Program pembangunan meliputi:
- a. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - b. Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana;
 - c. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama	Persentase konflik sosial yang terfasilitasi	Menginisiasi forum-forum kerukunan antar umat beragama	Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan umat beragama dalam suasana saling menghormati	Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah	Persentase wilayah yang terpelihara kamtrantibmas dan dalam pencegahan tindak kriminal	-	100%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
							Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
							Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase forum-forum dan organisasi organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	-	100%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan peraturan yg berlaku	Mengimplemen tasikan sistem komplain dan membentuk tim reaksi cepat dalam penyelesaiann ya komplain masyarakat	Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	-	80%	Satuan Polisi Pamong Praja

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Persentase Event Wisata Budaya Lokal Yang Difasilitasi	Menginisiasi dan berperan aktif even-even budaya dan seni masyarakat	Mengimplemen tasikan kebijakan yg mendukung gerakan cinta budaya lokal	Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	-	100%	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
			Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender	Memformulasi kan dan mengimplemen tasikan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender	Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Persentase pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga	-	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
							Program Pengarusutamaan Gender	Persentase capaian pelaksanaan PUG	-	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
							Program Perlindungan Anak	Persentase Capaian Pelaksanaan Perlindungan Anak	-	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya	Rata-rata Persentase prestasi pemuda dan olahraga	Memfasilitasi penjangkaran Pemuda dan Olahragawan yang berpotensi untuk berprestasi	Mengimplemen tasikan kebijakan pengembangan prestasi Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga	Persentase pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	-	100%	Dinas Pemuda Dan Olahraga
							Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	-	60%	Dinas Pemuda Dan Olahraga

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	21%	25%	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per	Meningkatkan kapasitas OPD dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap warganya	Mengimplemen tasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang	30%	84%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
							Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang	-	70%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
							Program Pengembangan dan pengawasan kearsipan	Persentase terlaksananya SDM kearsipan	-	100%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
							Program Penyelamatan , pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip	Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip	-	100%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan perorangan rujukan di RS	-	100%	RSUD Kanjuruhan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan	-	100%	RSUD Kanjuruhan
							Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS	Persentase sarana prasarana dan peralatan RS	80%	100%	RSUD Kanjuruhan
							Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan.	100%	100%	RSUD Lawang
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang	100%	100%	RSUD Lawang
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase sarana prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit	-	100%	RSUD Lawang
							Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	-	100%	33 Kecamatan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan	Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)	-	100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
							Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Standar Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	-	100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
							Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)	-	100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
							Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	-	100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
							Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)	-	100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Nilai Opini BPK	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang diberlakukan	Mengimplemen tasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, pelaporan dan pengawasan yang efektif	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	100%	Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah
							Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah	100%	100%	Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah
							Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)	-	100%	Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah
							Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah	-	100%	Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah
							Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	-	100%	Inspektorat
							Program Pencegahan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB minimal B	-	89%	Inspektorat

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	86%	89%	Inspektorat
			Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Mengimplemen tasikan kebijakan pengelolaan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan perencanaan dan meningkatkan kapasitas individu dan unit pengelola	Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	-	100%	Bagian Organisasi
				Nilai Evaluasi LPPD			Program Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	-	100%	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang terintegrasi dan Penguatan kapasitas SDM Perencana	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	-	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang ditetapkan dalam RKPD	-	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
								Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	80%	95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	-	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
								Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	-	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
								Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi	Indeks profesionalisme ASN	Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan sistem merit	Menjamin terselenggaranya kebijakan ASN berdasarkan kompetensi, fit and proper test, reward and punishment	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan	-	73%	Badan Kepegawaian Daerah
							Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	-	100%	Badan Kepegawaian Daerah
							Program Administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan	Persentase pemrosesan mutasi jabatan, kenaikan pangkat dan Sasaran Kerja Pegawai	-	100%	Badan Kepegawaian Daerah
							Program Peningkatan dan pengembangan data serta informasi aparatur	Persentase data dan informasi kepegawaian yang valid	-	100%	Badan Kepegawaian Daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Meningkatkan kapasitas pengadaan dan penanganan pertanahan	Mengimplementasikan kebijakan pengadaan tanah dan penanganan kasus pertanahan	Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Malang	-	80%	Dinas Pertanahan
							Program Penanganan Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	-	80%	Dinas Pertanahan
			Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	Menginisiasi kajian-kajian untuk memecahkan problem tatakelola pemerintahan dalam jangka waktu pendek dan panjang	Mengimplementasikan kebijakan kemitraan dengan berbagai sektor dalam melaksanakan kajian-kajian tatakelola pemerintahan	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	-	81%	Badan Penelitian Dan Pengembangan
							Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Masyarakat	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	-	81%	Badan Penelitian Dan Pengembangan
							Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	-	81%	Badan Penelitian Dan Pengembangan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Persentase hasil kegiatan kelitbang yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	-	81%	Badan Penelitian Dan Pengembangan
			Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	Persentase fasilitasi rancangan peraturan daerah	Memfasilitasi terselenggaranya layanan yang berkualitas dalam rancangan peraturan daerah	Mengimplemen tasikan kebijakan peningkatan kualitas layanan dengan melibatkan partisipasi individu dan organisasi yang kompeten	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD (%)	100%	100%	Sekretariat DPRD
							Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media	Persentase Kerjasama dengan Mass Media (%)	100%	100%	Sekretariat DPRD
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan (%)	100%	100%	Sekretariat DPRD

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Indeks Pendidikan	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Daerah Kabupaten	Memformulasikan dan Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan standar Pelayanan Minimal pendidikan daerah kabupaten	Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan	Menigkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP	-	93%	Dinas Pendidikan
							Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap pendidikan PAUD dan DIKMAS	-	85%	Dinas Pendidikan
							Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD di Kabupaten Malang	-	27 Indikator	Dinas Pendidikan
							Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SMP di Kabupaten Malang	-	27 Indikator	Dinas Pendidikan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	Persentase Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	-	100%	Dinas Pendidikan
							Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik	88%	95%	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai standar	Mengimplemen tasikan dan menformulasikan kebijakan yang menjamin hak - hak masyarakat terhadap derajat kesehatan masyarakat	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase sarana prasarana Puskesmas sesuai standar akreditasi	-	100%	Dinas Kesehatan
							Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas lulus akreditasi	-	100%	Dinas Kesehatan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase rata- rata capaian SPM kesehatan ibu dan anak : (Pelayanan kesehatan ibu hamil,Pelayana n kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar , Pelayanan kesehatan pada usia lanjut)	-	100%	Dinas Kesehatan
							Program pencegahan dan penanggulanga n penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Desa/ Kelurahan UCI	-	90%	Dinas Kesehatan
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase gedung Puskesmas sesuai standar akreditasi dan yang melayani Maskin	-	100%	Dinas Kesehatan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	Meningkatkan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana	Mengimplemen tasikan kebijakan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana	Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk	Persentase data keluarga dan KB di desa/ kelurahan	-	100%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
							Program Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB MKJP	-	40.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
							Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana	Persentase PPKBD Mandiri	-	69.49 %	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4. engembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kinerja sektor pertanian	Peningkatan PDRB Sektor Pertanian : Sub Sektor Tanaman Pangan Sub Sektor Hortikultura Sub Sektor Perkebunan	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan	Memformulasi kan dan mengimplemen tasikan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan Terhadap Sasaran Persentase Capaian Produksi Hortikultura Terhadap Sasaran Persentase Capaian Produksi Tanaman Perkebunan Terhadap Sasaran	-	90%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
						Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan			-	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
									-	90%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
							Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase capaian produksi tembakau terhadap sasaran	-	20%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan	Persentase penyediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani pertanian/ perkebunan	-	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
							Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persentase Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Yang Memenuhi Akreditasi	20%	80%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
							Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan Terhadap Sasaran	-	90%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
							Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura	Persentase Capaian Produksi Hortikultura Terhadap Sasaran	-	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Memformulasikan dan mengimplemen tasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya (%)	5%	50%	Dinas Perikanan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase peningkatan sarana prasarana nelayan (%)	-	12%	Dinas Perikanan
							Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahhan (%)	-	20%	Dinas Perikanan
							Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan (%)	-	20%	Dinas Perikanan
			Meningkatkan perkembangan usaha industri kreatif	Persentase Industri Kreatif	Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk industri kreatif lokal	Mengimplemen tasikan kebijakan yang meluaskan pasar hasil produk industri kreatif	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri Agro	-	100%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri Non Agro	-	100%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Program Pembinaan Industri	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Industri	-	100%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial	100%	100%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan	Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan perdagangan (%)	-	100%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	-	100%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Stabilisasi	Mngembangkan koperasi yang sehat dan mandiri	Mengimplemen tasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	-	100%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Persentase pertumbuhan UMKM	Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri	Mengimplemen tasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	-	100%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
							Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	-	100%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
							Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	-	100%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
							Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	-	100%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	-	100%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
			Meningkatnya nilai investasi	Jumlah nilai investasi	Meningkatkan nilai investasi luar dan dalam negeri	Mempermudah kebijakan perizinan dan investasi	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase Pencapaian Pelayanan Perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	-	20%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan Sosial Budaya yang tepat waktu	-	30%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundangan penanaman modal	-	80%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	1%	17%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya jumlah PAD	Persentase PAD terhadap APBD	Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD	Mengimplemen tasikan kebijakan yang dapat menggali potensi PAD	Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD	Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB	-	100%	Badan Pendapatan Daerah
							Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan	Tingkat Layanan PBB	-	100%	Badan Pendapatan Daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah	Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah
							Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	-	100%	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya kinerja sektor peternakan	Persentase PDRB Sektor Peternakan (Atas Dasar Harga Konstan)	Pengembangan kawasan sentra produksi, SDM, pemanfaatn potensi SDA dan pemanfaatan teknologi sector peternakan	Meningkatkan produksi hasil ternak melalui Pengembangan kawasan sentra produksi, SDM, pemanfaatn potensi SDA dan pemanfaatan teknologi sector peternakan	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Persentase keikutsertaan masyarakat yang melakukan pengolahan hasil peternakan (%)	-	100%	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
							Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan	Persentase partisipasi bimbingan teknis manajemen kelompok ternak (%)	-	100%	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase rerata kegiatan pencegahan penyakit hewan/ ternak (%)	100%	100%	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
							Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase kelahiran sapi potong dari IB (%)	95%	95%	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata thd PAD	Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yg terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata	Memformulasikan dan mengimplemen tasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata diwilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Perkembangan Pemasaran Pariwisata	100%	100%	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
							Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata	100%	100%	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa	Mewujudkan penyelenggaraa n pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	Persentase angka kemiskinan	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Persentase Angka TPT	Menurunkan jumlah pengangguran terutama di pedesaan	Mengimplemen tasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi dan peluang kerja pengangguran	Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)	-	100%	Dinas Tenaga Kerja
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	-	100%	Dinas Tenaga Kerja
							Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	-	100%	Dinas Tenaga Kerja
							Program Ketransmigrasian	Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi	-	100%	Dinas Tenaga Kerja
			Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	Menurunkan jumlah PMKS terutama di pedesaan	Mengimplemen tasikan kebijakan penanganan PMKS yang terintegrasi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.	-	80%	Dinas Sosial
							Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Pendampingan, Pemberdayaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan.	-	80%	Dinas Sosial

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan sosial pengelolaan sumber dana bantuan sosial	-	80%	Dinas Sosial
			Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.	Persentase surplus ketersediaan pangan	Meningkatkan koordinasi, sinergitas lintas sektor, intervensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan	Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	-	0.034 %	Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal untuk memenuhi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui promosi dan edukasi.	Meningkatkan gizi dan keamanan pangan	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	-	88,80%	Dinas Ketahanan Pangan
							Program Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar	-	68%	Dinas Ketahanan Pangan
							Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Persentase penduduk rawan pangan	-	41,70 %	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.	Jumlah Desa Maju	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa.	Mengimplemen tasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa maju.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	-	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
							Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	-	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
							Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	-	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk daerah prioritas	Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan hasil ekonomi, pariwisata dan lingkungan hidup	Program Pembangunan dan Peningkatan	Persentase Panjang Jalan yang Dibangun dan Ditingkatkan	-	100 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
							Program Pemeliharaan	Persentase Panjang Jalan yang dipelihara	-	100 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
			Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Presentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta Penataan ruang dan Bangunan	Menjamin Keberlangsungan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Mengimplimentasikan kebijakan mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	-	83 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
							Program Pengelolaan Perumahan	Persentase ketersediaan rumah layak huni	-	97.7 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
							Program Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase IPAL komunal yang secara teknis berfungsi optimal	-	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
							Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang dikelola	0,75%	1%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	-	79,99 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
			Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	Memfasilitasi Sarana Prasarana Perhubungan untuk keselamatan pengguna jalan	Mengimplemen tasikan kebijakan yang menjamin keselamatan pengguna jalan	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi	Rasio sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan yang tersedia	-	100%	Dinas Perhubungan
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang	-	100%	Dinas Perhubungan
							Program Terminal dan Perparkiran	Persentase jaringan prasarana angkutan jalan	-	100%	Dinas Perhubungan
							Program Pelayanan UPT Perhubungan	Persentase pemenuhan target PAD di UPT Perhubungan Kabupaten Malang	-	100%	Dinas Perhubungan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi	Persentase luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi	Meningkatkan kapasitas irigasi di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan produk-produk pertanian	Mengimplemen- tasikan kebijakan yang mendukung perluasan penyaluran irigasi air persawahan	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	-	100%	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
							Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan SDA	Persentase pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA	-	100%	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
							Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi	Persentase layanan sarana dan prasarana penyediaan air irigasi	-	100%	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
							Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana	Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dan bangunan pengendalian daya rusak air yang di bangun/ di rehabilitasi	-	100%	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
							Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Persentase layanan bidang Sumber Daya Air di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air	-	100%	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan	Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses internet	Memformulasikan dan mengimplemen tasikan kebijakan kemitraan dalam meningkatkan akses dan kualitas internet di daerah-daerah terpencil	Program Layanan Persandian, Pengembangan , Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	-	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
							Program Pemberdayaan , pengembangan , pembinaan dan penyebarluasan informasi	Cakupan kerjasama informasi dengan mas media	-	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
							Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK	Persentase cakupan terbitnya pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Malang	-	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas air	Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan tutupan vegetasi	-	12%	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran udara	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas udara					
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan tutupan vegetasi	Melaksanakan konservasi dan pembinaan dalam pengelolaan tutupan vegetasi					

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan	-	80%	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3	Persentase Layanan Persampahan	-	75%	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)	Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	-	100%	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri yang memenuhi baku mutu	-	33%	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	82.67 %	86%	Dinas Lingkungan Hidup

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
									2017	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Presentase desa tangguh bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	85%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Presentase desa tangguh bencana	Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Melaksanakan Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	-	90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Presentase desa tangguh bencana	Pemulihan masyarakat dan pengoperasian sarana prasana	Melaksanakan Pemulihan masyarakat dan mengoperasionalkan sarana prasana	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana (%)	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk perodesasi RPJMD ini.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2016 s/d 2021, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Indikasi rencana program dan kegiatan telah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang mendasari dilakukannya perubahan RPJMD ini serta telah menyesuaikan dengan OPD sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Malang berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renstra PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program, pagu indikatif dan target kinerja untuk tahun 2016 dan program, pagu indikatif dan target kinerja untuk tahun 2017 adalah berdasarkan realisasi. Sedangkan untuk tahun 2018 merupakan indikasi program, pagu indikatif dan target kinerja pada APBD Tahun Anggaran 2018. Indikasi program, pagu indikatif dan target kinerja tahun 2019 s/d 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Untuk menunjukkan sejauh mana capaian rencana pembangunan akan dicapai, yang akan disajikan dalam 3 (tiga) bentuk/kelompok tabel sebagai berikut :

- 1) Program prioritas dalam APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dalam tabel 8.1;
- 2) Indikasi Rencana Program Prioritas beserta kebutuhan pendanaan Kabupaten Malang Tahun 2017-2021, sebagaimana tabel 8.2.

Tabel 8.1
Program Prioritas Dalam APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.010.101	DINAS PENDIDIKAN	23.860.062.301,00
1010101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.118.395.400,00
1010102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	380.083.000,00
1010115	Program Pendidikan Anak Usia Dini	130.000.000,00
1010116	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	12.673.882.701,00
1010117	Program Pendidikan Menengah	3.211.201.200,00
1010118	Program Pendidikan Non Formal	250.000.000,00
1010120	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	406.500.000,00
1010121	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.690.000.000,00
1.020.101	DINAS KESEHATAN	174.464.339.199,90
1020101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.606.530.522,00
1020102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	841.956.900,00
1020105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	216.129.000,00
1020106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	82.401.000,00
1020115	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	13.383.512.800,00
1020116	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	39.967.915.312,00
1020117	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	189.387.500,00
1020118	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	14.680.000,00
1020119	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	963.557.400,00
1020120	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	522.301.040,00
1020121	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	355.592.000,00
1020122	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.023.164.250,00
1020123	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	995.737.300,00
1020125	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	64.327.511.457,00
1020131	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	249.100.000,00
1020134	Program Pelayanan JKN Kapitasi Pada FKTP	49.724.862.718,90
1.020.102	UPTD PUSKESMAS DONOMULYO (BLUD)	3.503.189.684,00
1020133	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	3.503.189.684,00
1.020.103	UPTD PUSKESMAS KEPANJEN (BLUD)	2.903.132.399,00
1020133	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	2.903.132.399,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.020.104	UPTD PUSKESMAS GONDANGLEGI (BLUD)	2.152.448.970,00
1020133	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	2.152.448.970,00
1.020.105	UPTD PUSKESMAS DAMPIT (BLUD)	2.930.532.531,00
1020133	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	2.930.532.531,00
1.020.106	UPTD PUSKESMAS TUREN (BLUD)	3.863.218.766,00
1020133	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	3.863.218.766,00
1.020.107	UPTD PUSKESMAS TUMPANG (BLUD)	3.824.766.752,00
1020133	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	3.824.766.752,00
1.020.108	UPTD PUSKESMAS SINGOSARI (BLUD)	2.356.118.313,00
1020133	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	2.356.118.313,00
1.020.109	UPTD PUSKESMAS DAU (BLUD)	1.370.613.931,00
1020133	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	1.370.613.931,00
1.020.110	UPTD PUSKESMAS SUMBERPUCUNG (BLUD)	1.977.962.470,00
1020133	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	1.977.962.470,00
1.020.111	UPTD PUSKESMAS KASEMBON (BLUD)	1.676.876.653,00
1020133	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	1.676.876.653,00
1.020.201	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN (SKPD)	32.830.808.469,32
1020226	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	20.486.229.153,32
1020233	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	12.344.579.316,00
1.020.202	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN (BLUD)	105.352.640.286,07
1020233	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	105.352.640.286,07
1.020.301	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (SKPD)	24.275.461.893,48
1020326	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	20.554.365.403,48
1020333	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	3.721.096.490,00
1.020.302	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (BLUD)	31.598.262.454,62
1020333	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	31.598.262.454,62
1.030.201	DINAS BINA MARGA	511.288.632.174,00
1030201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.161.207.636,00
1030202	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.034.663.000,00
1030203	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	263.074.500,00
1030205	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	213.591.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1030206	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	73.925.000,00
1030215	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	204.560.515.000,00
1030217	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	3.195.620.000,00
1030218	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	208.815.853.138,00
1030223	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	903.575.900,00
1030230	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	23.806.278.300,00
1030234	Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan	646.090.000,00
1030235	Program Pengelolaan Pelengkap Jalan Dan Penerangan Jalan Umum	65.614.238.700,00
1.030.301	DINAS PENGAIRAN	72.239.626.065,00
1030301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.193.739.425,00
1030302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.815.668.682,00
1030303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.350.000,00
1030306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	8.780.000,00
1030324	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	26.958.113.908,00
1030325	Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku	37.651.702.000,00
1030326	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	2.677.530.500,00
1030328	Program Pengendalian Banjir	592.153.550,00
1030329	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	299.588.000,00
1.030.501	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	131.137.704.812,00
1030501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.262.820.279,00
1030502	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	20.099.470.033,00
1030503	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	176.167.750,00
1030505	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	123.933.000,00
1030506	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	127.769.500,00
1030515	Program Pengembangan Data/Informasi	17.572.949.279,00
1030516	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	7.384.946.500,00
1030517	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.954.411.000,00
1030518	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	17.933.362.450,00
1030519	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	974.712.552,00
1030520	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	38.252.000,00
1030521	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	11.429.210.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1030522	Program Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pasar	10.584.241.000,00
1030524	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	12.117.533.169,00
1030527	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	3.885.650.500,00
1030530	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	24.472.275.800,00
1.040.101	BADAN PERUMAHAN	1.970.602.625,00
1040101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	390.557.175,00
1040102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	45.009.700,00
1040105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.300.000,00
1040106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	45.505.000,00
1040115	Program Pengembangan Perumahan	1.316.355.450,00
1040116	Program Lingkungan Sehat Perumahan	26.837.500,00
1040117	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	143.037.800,00
1.060.101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.444.081.050,00
1060101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	597.855.150,00
1060102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	414.826.300,00
1060103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.049.000,00
1060105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.650.000,00
1060106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	51.259.000,00
1060115	Program Pengembangan Data/Informasi	1.048.418.650,00
1060116	Program Kerjasama Pembangunan	223.453.850,00
1060117	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	74.925.000,00
1060118	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	467.400.500,00
1060119	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	249.933.200,00
1060121	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.617.586.600,00
1060122	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.261.218.800,00
1060123	Program Perencanaan Sosial Budaya	223.635.000,00
1060124	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	198.870.000,00
1.070.101	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.522.877.725,00
1070101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.554.361.850,00
1070102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	254.222.200,00
1070105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.770.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1070106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	49.606.000,00
1070115	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	196.825.000,00
1070116	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	150.970.000,00
1070117	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	297.620.350,00
1070118	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	53.919.125,00
1070119	Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	937.165.200,00
1070120	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.009.418.000,00
1.080.101	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	7.871.271.288,00
1080101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	645.980.608,00
1080102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	569.957.680,00
1080103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.720.000,00
1080106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	80.392.000,00
1080116	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	4.993.137.800,00
1080117	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.321.104.000,00
1080119	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	235.979.200,00
1.100.101	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.409.336.050,00
1100101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	645.666.750,00
1100102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	396.147.000,00
1100105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.800.000,00
1100106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	55.614.900,00
1100115	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.307.107.400,00
1.110.101	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.120.170.000,00
1110101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	235.186.000,00
1110102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	64.700.000,00
1110105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.080.000,00
1110106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.648.000,00
1110115	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	141.656.500,00
1110116	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	239.452.000,00
1110117	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	1.264.297.500,00
1110118	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	165.150.000,00
1.120.101	BADAN KELUARGA BERENCANA	4.496.526.350,00
1120101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	385.644.300,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1120102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	913.499.800,00
1120105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.860.000,00
1120106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	17.372.500,00
1120115	Program Pengembangan Data/Informasi	235.336.000,00
1120116	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	312.104.500,00
1120117	Program Pelayanan Kontrasepsi	196.572.000,00
1120118	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	1.392.798.000,00
1120122	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	680.020.750,00
1120123	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	357.318.500,00
1.130.101	DINAS SOSIAL	3.724.166.224,00
1130101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	752.940.224,00
1130102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	414.592.300,00
1130103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.850.000,00
1130105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
1130106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	163.618.000,00
1130115	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.150.601.950,00
1130116	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	151.197.250,00
1130117	Program Pembinaan Anak Terlantar	35.633.000,00
1130118	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	104.091.000,00
1130119	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	161.084.600,00
1130120	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)	412.872.400,00
1130121	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	359.685.500,00
1.140.101	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.274.865.000,00
1140101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	587.738.300,00
1140102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	40.598.000,00
1140105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
1140106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	6.502.800,00
1140115	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.893.216.300,00
1140116	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	254.499.000,00
1140117	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1.492.310.600,00
1.150.101	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	3.874.462.006,00
1150101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	654.696.706,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1150102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	116.601.600,00
1150105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.400.000,00
1150106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	10.564.000,00
1150115	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	515.696.500,00
1150116	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2.031.651.000,00
1150117	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	394.851.700,00
1150118	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	144.000.500,00
1.150.102	UPT UMKM DANA BERGULIR (BLUD)	740.004.277,00
1150119	Program Peningkatan Pelayanan	740.004.277,00
1.160.101	KANTOR PENANAMAN MODAL	738.096.900,00
1160101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	174.841.200,00
1160102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	27.205.700,00
1160105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.570.000,00
1160106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	2.200.000,00
1160115	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	470.230.000,00
1160116	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	57.050.000,00
1.170.101	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	13.054.866.508,00
1170101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.165.264.408,00
1170105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37.214.675,00
1170106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.885.325,00
1170115	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.372.391.200,00
1170116	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	6.306.203.900,00
1170117	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.167.907.000,00
1.170.102	UPT TAMAN WISATA WENDIT (BLUD)	1.776.667.224,00
1170119	Program Peningkatan Pelayanan	1.776.667.224,00
1.180.101	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.720.289.300,00
1180101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	734.903.500,00
1180102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	22.518.800,00
1180106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	7.008.000,00
1180115	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	50.000.000,00
1180116	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	338.665.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1180120	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.433.454.000,00
1180121	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	133.740.000,00
1.190.101	BADAN KESBANG DAN POLITIK	1.073.005.233,00
1190101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	402.326.433,00
1190102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	42.913.800,00
1190106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	11.375.000,00
1190115	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	40.810.000,00
1190116	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	116.025.000,00
1190117	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	342.740.000,00
1190121	Program Pendidikan Politik Masyarakat	116.815.000,00
1.190.301	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.603.009.193,00
1190301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	282.202.443,00
1190302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	123.439.800,00
1190303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	94.844.750,00
1190306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	10.752.000,00
1190315	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	356.488.900,00
1190316	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.474.000.700,00
1190319	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	261.280.600,00
1.190.401	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24.787.730.310,00
1190401	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	644.287.176,00
1190402	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	297.827.067,00
1190403	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.265.000,00
1190405	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.100.000,00
1190406	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	23.797.500,00
1190423	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	3.069.412.810,00
1190424	Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	1.063.671.357,00
1190425	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana Dan Prasarana Pasca Bencana	19.623.369.400,00
1.200.301	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM	1.940.353.100,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	596.486.200,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	64.735.000,00
1200303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	280.110.000,00
1200305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	34.740.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1200306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	36.970.000,00
1200316	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	74.560.000,00
1200317	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	704.041.900,00
1200321	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	148.710.000,00
1.200.302	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA	946.818.200,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	399.360.800,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	130.952.000,00
1200303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.237.200,00
1200306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	9.050.400,00
1200315	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	112.237.700,00
1200316	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	18.265.000,00
1200317	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	75.248.800,00
1200318	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	185.466.300,00
1.200.303	BAGIAN HUKUM	2.053.505.925,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	296.908.000,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	115.955.500,00
1200303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.900.000,00
1200305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	76.714.200,00
1200306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	604.000,00
1200320	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	522.705.000,00
1200326	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.025.719.225,00
1.200.304	BAGIAN ORGANISASI	1.844.683.500,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181.471.296,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	96.746.600,00
1200305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.150.000,00
1200306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	3.582.000,00
1200321	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	226.166.000,00
1200322	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	471.490.500,00
1200323	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	194.085.000,00
1200326	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	357.394.604,00
1200331	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	196.260.000,00
1200332	Program Peningkatan Pelayanan Publik	114.337.500,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.200.305	BAGIAN PEREKONOMIAN	1.513.859.597,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	201.816.267,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	55.918.004,00
1200303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.168.000,00
1200305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99.975.000,00
1200306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.986.000,00
1200315	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	687.028.326,00
1200317	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	50.682.500,00
1200320	Program Pembinaan Industri Rokok Dan Tembakau	230.348.000,00
1200332	Program Peningkatan Pelayanan Publik	178.937.500,00
1.200.306	BAGIAN KERJASAMA	1.085.410.850,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	379.821.100,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	26.973.900,00
1200305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.800.000,00
1200316	Program Kerjasama Pembangunan	670.815.850,00
1.200.307	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.951.164.000,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	260.287.600,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	129.028.000,00
1200303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.315.000,00
1200305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	191.273.200,00
1200315	Program Pengembangan Data/Informasi	156.260.200,00
1200320	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	1.114.755.000,00
1200330	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	92.245.000,00
1.200.308	BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK	8.253.274.855,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	456.812.350,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	308.525.600,00
1200303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.019.000,00
1200305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.320.000,00
1200306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	7.846.000,00
1200315	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	7.304.754.405,00
1200317	Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi	79.832.500,00
1200323	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	73.165.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.200.309	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	10.718.402.000,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.478.655.000,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.533.542.000,00
1200305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.000.000,00
1200306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	880.000,00
1200316	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	702.325.000,00
1.200.310	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	6.163.239.411,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	489.897.052,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	86.548.000,00
1200305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.280.000,00
1200306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	2.600.000,00
1200315	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1.800.000,00
1200316	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.245.613.900,00
1200317	Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi	30.015.000,00
1200318	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	4.296.485.459,00
1.200.311	BAGIAN TATA USAHA	3.295.193.000,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.685.998.600,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	440.173.700,00
1200303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.500.000,00
1200305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	106.733.200,00
1200306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	39.787.500,00
1.200.312	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL	2.045.448.000,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	209.618.500,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	32.004.500,00
1200315	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	287.480.000,00
1200317	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.283.475.000,00
1200318	Program Pendidikan Non Formal	232.870.000,00
1.200.313	BAGIAN PERTANAHAN	10.877.791.460,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	356.469.700,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	68.248.300,00
1200303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.042.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1200305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.600.000,00
1200306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	32.550.000,00
1200316	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	10.058.727.960,00
1200317	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	294.108.000,00
1200318	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	46.045.500,00
1.200.314	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.019.857.850,00
1200301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	280.158.600,00
1200302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	31.665.850,00
1200303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4.854.500,00
1200306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	45.906.600,00
1200315	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	441.594.100,00
1200316	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	247.244.800,00
1200317	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-
1200319	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	166.034.100,00
1200321	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	722.384.500,00
1200326	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	80.014.800,00
1.200.401	SEKRETARIAT DPRD	32.497.893.151,00
1200401	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.991.466.563,00
1200402	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.394.194.371,00
1200403	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	355.380.000,00
1200405	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	621.007.356,00
1200406	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	337.596.200,00
1200415	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	22.002.680.378,00
1200418	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	547.396.000,00
1200426	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	248.172.283,00
1.200.501	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET	120.882.531.608,00
1200501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	47.763.596.725,00
1200502	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	27.033.629.071,00
1200503	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	587.862.550,00
1200505	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	32.460.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1200506	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.815.271.900,00
1200517	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.098.263.922,00
1200519	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.416.875.000,00
1200537	Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.572.458.500,00
1200538	Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah	3.026.850.500,00
1200539	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	5.613.012.175,00
1200540	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah	4.332.503.990,00
1200541	Program Pelayanan Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	14.589.747.275,00
1.200.502	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)	541.814.370.712,50
1.200.601	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	971.783.100,00
1200601	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	248.154.600,00
1200602	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	38.613.200,00
1200605	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.755.000,00
1200606	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	22.212.600,00
1200615	Program Pengembangan Data/Informasi	137.818.600,00
1200621	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	110.902.100,00
1200636	Program Penelitian Dan Pengembangan	399.327.000,00
1.200.701	INSPEKTORAT KABUPATEN	6.170.069.450,00
1200701	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	417.135.500,00
1200702	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	64.125.200,00
1200706	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	6.992.000,00
1200720	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	5.204.127.500,00
1200721	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	18.726.500,00
1200726	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	458.962.750,00
1.200.901	KECAMATAN PUJON	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	339.160.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	88.635.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.085.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.880.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.530.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	18.000.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	19.710.000,00
1.200.902	KECAMATAN NGANTANG	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	310.477.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	122.973.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.160.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.280.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	36.500.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9.610.000,00
1.200.903	KECAMATAN KASEMBON	499.150.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	306.678.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	86.210.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.150.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.800.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	12.072.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	36.500.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20.740.000,00
1.200.904	KECAMATAN LAWANG	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	362.140.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	99.960.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.300.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.800.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	2.400.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	20.400.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6.000.000,00
1.200.905	KECAMATAN SINGOSARI	464.696.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	263.490.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	117.041.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.400.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.100.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	4.370.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	43.900.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	17.395.000,00
1.200.906	KECAMATAN KARANGPLOSO	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	335.065.600,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	76.871.400,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.100.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.430.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	8.204.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	41.436.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	22.893.000,00
1.200.907	KECAMATAN DAU	499.457.700,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	244.963.600,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	162.239.100,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	18.075.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	60.365.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	13.815.000,00
1.200.908	KECAMATAN PAKIS	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	315.060.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	111.606.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.125.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.800.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	2.624.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	36.500.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	19.285.000,00
1.200.909	KECAMATAN JABUNG	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	350.493.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	55.355.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.900.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.000.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.660.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	36.400.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	26.192.000,00
1.200.910	KECAMATAN TUMPANG	497.545.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	354.494.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	82.235.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.900.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.200.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.660.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	18.200.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12.856.000,00
1.200.911	KECAMATAN PONCOKUSUMO	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	309.353.800,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	136.621.200,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.625.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.500.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	16.260.000,00
1200919	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.500.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6.140.000,00
1.200.912	KECAMATAN BULULAWANG	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	290.618.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	135.366.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.120.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	16.410.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	32.460.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.026.000,00
1.200.913	KECAMATAN GONDANGLEGI	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	329.432.300,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	118.548.700,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.500.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.800.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	28.800.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.919.000,00
1.200.914	KECAMATAN PAGELARAN	499.992.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	277.349.520,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	139.737.480,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.350.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	7.790.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	14.400.000,00
1200917	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	20.365.000,00
1.200.915	KECAMATAN TAJINAN	499.992.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	303.150.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	75.586.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	39.890.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	16.140.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	48.321.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	16.905.000,00
1.200.916	KECAMATAN BANTUR	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	251.710.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	149.705.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.975.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.200.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	14.725.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	36.000.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	14.685.000,00
1.200.917	KECAMATAN GEDANGAN	499.992.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	319.485.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	68.980.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.120.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	16.309.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	37.300.000,00
1200919	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	15.840.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	26.958.000,00
1.200.918	KECAMATAN WAJAK	499.992.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	294.130.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	167.437.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.625.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.400.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	26.400.000,00
1.200.919	KECAMATAN TUREN	499.992.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	285.476.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	127.144.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.825.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.250.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	43.038.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	13.259.000,00
1.200.920	KECAMATAN DAMPIT	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	266.835.200,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	124.459.800,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.300.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.250.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	21.028.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	40.204.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	21.923.000,00
1.200.921	KECAMATAN AMPELGADING	499.992.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	290.655.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	105.541.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.888.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	8.241.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	59.107.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	22.560.000,00
1.200.922	KECAMATAN TIRTOYUDO	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	333.927.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	80.460.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.880.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.408.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	52.625.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	24.700.000,00
1.200.923	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	500.000.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	338.050.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	77.250.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.000.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.100.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	42.600.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,00
1.200.924	KECAMATAN KEPANJEN	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	314.944.500,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	107.748.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.875.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	49.620.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.812.500,00
1.200.925	KECAMATAN PAKISAJI	499.992.500,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	312.564.500,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	134.692.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.500.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.200.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	29.275.800,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.760.200,00
1.200.926	KECAMATAN NGAJUM	498.674.050,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	352.428.100,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	62.501.950,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.884.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.660.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	43.200.000,00
1.200.927	KECAMATAN WAGIR	498.420.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	217.420.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	279.000.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.000.000,00
1.200.928	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	261.516.100,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	117.783.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13.789.500,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	26.060.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	53.636.400,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	27.215.000,00
1.200.929	KECAMATAN KROMENGAN	499.996.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	284.501.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	113.812.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.000.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.400.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	18.798.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	36.000.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20.485.000,00
1.200.930	KECAMATAN WONOSARI	498.260.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	310.210.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	94.173.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.985.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.875.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	38.640.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	33.377.000,00
1.200.931	KECAMATAN PAGAK	499.996.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	304.097.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	149.899.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	36.000.000,00
1.200.932	KECAMATAN KALIPARE	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	312.921.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	120.664.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.200.000,00
1200906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	15.440.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11.375.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1200937	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	32.400.000,00
1.200.933	KECAMATAN DONOMULYO	500.000.000,00
1200901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	337.821.000,00
1200902	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	93.149.000,00
1200903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.720.000,00
1200905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.600.000,00
1200915	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	28.100.000,00
1200918	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.310.000,00
1200921	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.300.000,00
1.201.001	KELURAHAN ARDIREJO	250.000.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95.550.000,00
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	52.200.000,00
1201015	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	62.260.000,00
1201021	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.240.000,00
1201029	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	27.750.000,00
1201030	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	9.000.000,00
1.201.002	KELURAHAN CANDIRENGGO	250.000.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.000.400,00
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	85.720.600,00
1201003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.079.000,00
1201005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.200.000,00
1.201.003	KELURAHAN CEPOKOMULYO	250.000.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	134.810.000,00
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	95.960.000,00
1201003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.200.000,00
1201015	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	13.530.000,00
1201016	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.800.000,00
1201018	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	2.700.000,00
1.201.004	KELURAHAN DAMPIT	250.000.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	191.820.000,00
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	58.180.000,00
1.201.005	KELURAHAN KALIREJO	250.000.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	176.325.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	73.675.000,00
1.201.006	KELURAHAN KEPANJEN	249.996.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	223.740.000,00
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	26.256.000,00
1.201.007	KELURAHAN LAWANG	250.000.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	185.410.000,00
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	54.790.000,00
1201003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.800.000,00
1.201.008	KELURAHAN LOSARI	250.000.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	144.450.000,00
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	58.500.000,00
1201003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.150.000,00
1201005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	34.900.000,00
1.201.009	KELURAHAN PAGENTAN	250.000.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.879.600,00
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	64.672.000,00
1201003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.200.000,00
1201015	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	18.664.000,00
1201032	Program Peningkatan Pelayanan Publik	13.584.400,00
1.201.010	KELURAHAN PENARUKAN	250.000.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	171.108.100,00
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	27.218.400,00
1201015	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	43.388.500,00
1201021	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.285.000,00
1.201.011	KELURAHAN SEDAYU	250.000.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	146.750.000,00
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	61.800.000,00
1201003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.350.000,00
1201015	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	32.100.000,00
1.201.012	KELURAHAN TUREN	249.996.000,00
1201001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	176.000.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1201002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	35.346.000,00
1201003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.150.000,00
1201005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.500.000,00
1.201.101	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	1.364.329.175,00
1201101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	606.907.775,00
1201102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	214.540.400,00
1201106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	7.896.000,00
1201124	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	16.115.000,00
1201132	Program Peningkatan Pelayanan Publik	518.870.000,00
1.201.201	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.990.241.000,00
1201201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	450.089.000,00
1201202	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	80.341.000,00
1201203	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.375.000,00
1201205	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.405.277.000,00
1201206	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	36.159.000,00
1.201.301	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.222.520.338,00
1201301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	414.322.498,00
1201302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	269.230.700,00
1201303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	58.290.000,00
1201305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.930.000,00
1201306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	29.576.000,00
1201330	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	137.234.500,00
1201331	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	2.307.936.640,00
1.210.101	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN	6.436.240.700,00
1210101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	615.216.950,00
1210102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.907.400.050,00
1210106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	67.155.000,00
1210115	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1.955.458.700,00
1210119	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	891.010.000,00
1.220.101	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2.477.326.500,00
1220101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	449.369.400,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1220102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	56.243.400,00
1220103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.900.000,00
1220105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.400.000,00
1220106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	50.000.000,00
1220115	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	940.012.400,00
1220116	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	318.815.300,00
1220117	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	377.661.500,00
1220118	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	184.824.500,00
1220119	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	79.100.000,00
1.240.101	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	2.844.377.115,00
1240101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	700.440.094,00
1240102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	417.561.966,00
1240103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.600.000,00
1240105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.926.000,00
1240106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	20.612.400,00
1240115	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	584.223.420,00
1240116	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	109.569.785,00
1240117	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan	745.331.450,00
1240118	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	250.112.000,00
2.010.101	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	11.968.984.650,00
2010101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.225.546.300,00
2010102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	730.000.000,00
2010105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.600.000,00
2010115	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	7.227.194.550,00
2010116	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	615.994.400,00
2010117	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	326.991.500,00
2010118	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.835.657.900,00
2.010.102	UPT LUMBUNG DESA MODERN (BLUD)	1.124.622.659,00
2010116	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1.124.622.659,00
2.010.301	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	20.053.620.148,00
2010301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.394.386.062,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
2010302	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	342.275.866,00
2010303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	39.875.000,00
2010305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.520.000,00
2010306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	127.895.500,00
2010320	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	4.284.758.900,00
2010321	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	11.814.335.520,00
2010322	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1.868.353.300,00
2010323	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	174.220.000,00
2.020.101	DINAS KEHUTANAN	4.387.365.704,00
2020101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	379.213.704,00
2020102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	85.606.000,00
2020103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.000.000,00
2020105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.000.000,00
2020106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	24.780.000,00
2020115	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	175.087.000,00
2020116	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	3.071.697.000,00
2020121	Program Pengembangan Usaha Perhutanan Dan Peran Serta Masyarakat	597.982.000,00
2.030.101	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.175.397.222,00
2030101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	547.406.642,00
2030102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	49.430.830,00
2030105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00
2030106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.834.000,00
2030115	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	147.130.000,00
2030116	Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	90.680.000,00
2030117	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	2.782.075.100,00
2030118	Program Pembinaan Dan Pengawasan Migas	50.000.000,00
2030119	Program Pembinaan Dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Dan Konservasi Energi	66.000.000,00
2030125	Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku	338.034.000,00
2030126	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	78.806.650,00
2.050.101	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.984.225.855,00
2050101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	893.004.405,00
2050102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	58.385.000,00

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
2050103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.731.000,00
2050105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.660.000,00
2050106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	77.663.700,00
2050120	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.821.872.200,00
2050121	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.067.737.000,00
2050123	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.749.656.900,00
2050125	Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian Dan Konservasi Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	35.823.000,00
2050126	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	24.168.000,00
2050127	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan	224.524.650,00
2.070.101	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	24.079.214.026,00
2070101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	806.143.788,00
2070102	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	906.288.000,00
2070103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4.500.000,00
2070106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	95.173.000,00
2070115	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.912.188.310,00
2070116	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	337.247.500,00
2070117	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	512.709.040,00
2070118	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	303.842.898,00
2070119	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	25.000.000,00
2070120	Pembinaan Lingkungan Sosial	4.890.740.000,00
2070121	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar Dan Pembinaan Pedagang	984.478.750,00
2070122	Program Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pasar	12.138.725.940,00
2070123	Program Resi Gudang	162.176.800,00
	JUMLAH TOTAL	1.531.728.557.651,39

TABEL 8.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017-2021

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1,708,407,159,181.17		1,812,721,984,877.43		1,966,438,312,569.00		2,108,899,613,725.00		2,222,114,541,642.00		9,818,581,611,994.60	
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,273,799,348,315.52		1,315,682,729,318.72		1,409,401,941,809.00		1,495,020,067,701.00		1,581,564,878,052.00		7,075,468,965,196.24	
101. PENDIDIKAN				212,871,448,277.00		238,930,459,860.00		283,592,492,260.00		284,015,377,260.00		285,489,377,260.00		1,304,899,154,917.00	
10102. DINAS PENDIDIKAN				212,871,448,277.00		238,930,459,860.00		283,592,492,260.00		284,015,377,260.00		285,489,377,260.00		1,304,899,154,917.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,956,969,800.00	100%	2,009,160,000.00	100%	3,364,529,000.00	100%	3,394,081,000.00	100%	3,394,081,000.00	100%	14,118,820,800.00	Dinas Pendidikan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	649,705,400.00	100%	540,220,000.00	100%	771,456,000.00	100%	839,789,000.00	100%	839,789,000.00	100%	3,640,959,400.00	Dinas Pendidikan
c	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	190,967,000.00	100%	108,000,000.00	100%	108,000,000.00	100%	108,000,000.00	100%	108,000,000.00	100%	622,967,000.00	Dinas Pendidikan
d	Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan	Meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP			91.9 %	3,835,100,000.00	92.4 %	2,871,100,000.00	92.7 %	2,871,100,000.00	93%	2,871,100,000.00	93%	12,448,400,000.00	Dinas Pendidikan
e	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap pendidikan PAUD dan DIKMAS			82.55 %	2,596,400,000.00	83.35 %	39,248,600,000.00	84.25 %	39,273,600,000.00	85%	39,273,600,000.00	85%	120,392,200,000.00	Dinas Pendidikan
f	Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD di Kabupaten Malang			15 Indikator	23,170,011,348.00	18 Indikator	24,616,531,348.00	21 Indikator	24,766,531,348.00	27 Indikator	24,916,531,348.00	27 Indikator	97,469,605,392.00	Dinas Pendidikan
g	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SMP di Kabupaten Malang			15 Indikator	19,684,409,172.00	18 Indikator	25,033,675,912.00	21 Indikator	25,133,675,912.00	27 Indikator	26,457,675,912.00	27 Indikator	96,309,436,908.00	Dinas Pendidikan
h	Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	Persentase Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri			100%	185,678,600,000.00	100%	185,678,600,000.00	100%	185,678,600,000.00	100%	185,678,600,000.00	100%	742,714,400,000.00	Dinas Pendidikan
i	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik	88%	1,146,401,165.00	90%	1,308,559,340.00	92%	1,900,000,000.00	94%	1,950,000,000.00	95%	1,950,000,000.00	95%	8,254,960,505.00	Dinas Pendidikan
j	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	81.95 %	718,515,000.00									81.95 %	718,515,000.00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase IRTP yang bersertifikat			82%		83%		84%		85%		85%		
		Persentase Pengawasan Toko obat, Apotik, Supermarket, pasar, kosmetika dan PKRT			100%		100%		100%		100%		100%		
h	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas lulus akreditasi			26%	9,271,593,100.00	100%	8,790,536,673.00	100%	8,802,648,973.00	100%	8,804,824,642.00	100%	35,669,603,388.00	Dinas Kesehatan
		Persentase Faskes yang melayani Maskin			100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan .			100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional			100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
i	Program Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase rata-rata capaian SPM kesehatan ibu dan anak : (Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar , Pelayanan kesehatan pada usia lanjut)			100%	12,641,224,900.00	100%	3,551,709,200.00	100%	3,551,709,200.00	100%	3,551,709,200.00	100%	23,296,352,500.00	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita kekurangan gizi			15%		15%		15%		15%		60%		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Stunting			2.70%		2.70%		2.70%		2.70%		2.70%		
j	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Desa/Kelurahan UCI			90%	1,715,527,950.00	90%	1,818,406,555.00	90%	1,842,188,383.00	90%	1,767,188,383.00	90%	7,143,311,271.00	Dinas Kesehatan
		Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit menular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Cakupan penderita DBD yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare, Cakupan penanganan penderita Pneumonia balita)			100%		100%		100%		100%		100%		

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit tidak menular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan pada usia produktif)			100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan
k	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase gedung Puskesmas sesuai standar akreditasi dan yang melayani Maskin			100%	7,716,464,595.00	100%	15,716,464,595.00	100%	16,716,464,595.00	100%	17,716,464,595.00	100%	57,865,858,380.00	Dinas Kesehatan	
l	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	Persentase cakupan Lokasi ODF					70%	40,132,201,303.00	80%	40,134,701,303.00	80%	40,140,201,303.00	80%	120,407,103,909.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (Puri)					14%		14%		14%		14%			
		Persentase program yang difasilitasi media promosinya						100%		100%		100%		100%		
		Persentase Survey PIS-PK di wilayah Puskesmas						60%		80%		100%		100%		
m	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas yang menerima biaya operasional dan kinerja BLUD	100%	8,589,851,813.25	100%	8,540,487,310.00	100%	28,010,679,154.00					100%	45,141,018,277.25	Dinas Kesehatan	
n	Program Peningkatan Pelayanan Puskesmas / UPT	Persentase Pelayanan UKP dan Manajemen yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	100%	87,085,826,611.00	100%	88,835,194,842.00	100%	175,921,021,453.00	Dinas Kesehatan	
o	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase stok obat indikator 144 item menjadi 90%	90%	16,191,511,406.00									90%	16,191,511,406.00	Dinas Kesehatan	
p	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	118 per 100000 Kelahiran Hidup	48,341,081,453.00									118 per 100000 Kelahiran Hidup	48,341,081,453.00	Dinas Kesehatan	
		Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	24 per 1000 kelahiran hidup										24 per 1000 kelahiran hidup			
q	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pengawasan Toko Obat dan Apotik	100%	219,419,500.00									100%	219,419,500.00	Dinas Kesehatan	
r	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Puskesmas yang menggunakan obat tradisional sebagai obat komplementer	10%	161,295,000.00									10%	161,295,000.00	Dinas Kesehatan	
s	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif Puri (Purnama, Mandiri)	12%	1,249,038,625.00									12%	1,249,038,625.00	Dinas Kesehatan	
t	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Kurang	15%	524,648,500.00									15%	524,648,500.00	Dinas Kesehatan	
		Angka Balita Gizi Buruk	2%										2%			
		Prevalensi Balita Stunting	26%											26%		
u	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Lokasi ODF	11%	812,598,000.00									11%	812,598,000.00	Dinas Kesehatan	
		Cakupan masyarakat pedesaan memakai air bersih memenuhi syarat	31%											31%		

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Cakupan masyarakat perkotaan memakai air bersih memenuhi syarat	100%											100%		
v	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengendalian kematian kasus Demam Berdarah (DBD) tiap tahunnya di bawah CFR	2%	1,631,874,750.00										2%	1,631,874,750.00	Dinas Kesehatan
		Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) desa/kelurahan <24 jam	100%											100%		
		Pengendalian kasus penderita HIV/AIDS dibawah 0,5%	100%											100%		
		Prevalensi kematian penderita TB	2 per 100.000 penduduk											2 per 100.000 penduduk		
		Prosentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) secara terpadu	10%											10%		
w	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	100%	1,318,047,500.00										100%	1,318,047,500.00	Dinas Kesehatan
x	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringan	Cakupan Puskesmas akreditasi dasar	95%	42,527,337,200.00										95%	42,527,337,200.00	Dinas Kesehatan
y	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase IRTP yang bersertifikat	81%	247,324,600.00										81%	247,324,600.00	Dinas Kesehatan
z	Program pelayanan JKN kapitasi pada FKTP	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	91%	50,100,756,093.20										91%	50,100,756,093.20	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	9%											9%		
aa	Program Pelayanan JKN kapitasi pada FKTP	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	91%	19,873,190,523.64										91%	19,873,190,523.64	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	9%											9%		
ab	Program Penunjang Operasional dan kinerja UPT / UPTD	Persentase Pemenuhan Penunjang Operasional			100%	67,376,619,859.00								100%	67,376,619,859.00	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10236. RSUD KANJURUHAN				94,125,558,012.84		149,691,953,682.72		151,269,600,000.00		143,200,000,000.00		150,200,000,000.00		688,487,111,695.56	
a	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan perorangan rujukan di RS					100%	86,700,000,000.00	100%	93,200,000,000.00	100%	100,200,000,000.00	100%	280,100,000,000.00	RSUD Kanjuruhan
b	Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan			100%	11,688,466,505.00	100%	15,000,000,000.00	100%	15,000,000,000.00	100%	15,000,000,000.00	100%	56,688,466,505.00	RSUD Kanjuruhan
c	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS	Persentase sarana prasarana dan peralatan RS	80%	9,841,056,475.00	85%	15,735,233,559.00	90%	49,569,600,000.00	95%	35,000,000,000.00	100%	35,000,000,000.00	100%	145,145,890,034.00	RSUD Kanjuruhan
d	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengadaan Peralatan Kedokteran	100%	1,581,865,134.00									100%	1,581,865,134.00	RSUD Kanjuruhan
e	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan di rumah sakit	100%	82,702,636,403.84	100%	122,268,253,618.72							100%	204,970,890,022.56	RSUD Kanjuruhan
10237. RSUD LAWANG				79,713,815,785.59		58,505,925,000.00		66,350,425,000.00		72,742,725,000.00		79,574,255,000.00		356,887,145,785.59	
a	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan.	100%	36,045,112,975.28	100%	6,598,500,000.00	100%	10,500,000,000.00	100%	12,500,000,000.00	100%	14,500,000,000.00	100%	80,143,612,975.28	RSUD Lawang
b	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang	100%	3,150,059,293.00			100%	43,923,000,000.00	100%	48,315,300,000.00	100%	53,146,830,000.00	100%	148,535,189,293.00	RSUD Lawang
c	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase sarana prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit			100%	11,977,425,000.00	100%	11,927,425,000.00	100%	11,927,425,000.00	100%	11,927,425,000.00	100%	47,759,700,000.00	RSUD Lawang
d	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan di rumah sakit	100%	40,518,643,517.31	100%	39,930,000,000.00							100%	80,448,643,517.31	RSUD Lawang
103. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				634,775,504,913.00		589,111,622,700.00		533,196,034,699.00		589,955,051,467.00		648,350,486,613.00		2,995,388,700,392.00	
10304. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				497,248,510,144.00		453,873,424,000.00		420,657,564,000.00		462,723,320,400.00		508,995,652,440.00		2,343,498,470,984.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,174,044,744.00	100%	1,586,486,000.00	100%	1,872,230,000.00	100%	2,059,453,000.00	100%	2,265,398,300.00	100%	8,957,612,044.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2,958,135,400.00	100%	2,056,200,000.00	100%	2,952,080,000.00	100%	3,247,288,000.00	100%	3,572,016,800.00	100%	14,785,720,200.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	342,211,000.00	100%	353,347,500.00	100%	290,490,000.00	100%	319,539,000.00	100%	351,492,900.00	100%	1,657,080,400.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	291,130,350.00	100%	75,000,000.00	100%	136,890,000.00	100%	150,579,000.00	100%	165,636,900.00	100%	819,236,250.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	52,705,000.00	100%	48,730,000.00	100%	109,520,000.00	100%	120,472,000.00	100%	132,519,200.00	100%	463,946,200.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
f	Program Pembangunan dan Peningkatan	Persentase Panjang Jalan yang Dibangun dan Ditingkatkan			25%	200,300,300,000.00	50%	173,766,290,000.00	75%	191,142,919,000.00	100%	210,257,210,900.00	100%	775,466,719,900.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
g	Program Pemeliharaan	Persentase Panjang Jalan yang dipelihara			50.01 %	162,110,619,500.00	66.68 %	159,042,094,000.00	83.35 %	174,946,303,400.00	100%	192,440,933,740.00	100%	688,539,950,640.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
h	Program Bina Teknik	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknik			100%	2,731,786,000.00	100%	1,134,430,000.00	100%	1,247,873,000.00	100%	1,372,660,300.00	100%	6,486,749,300.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
		Persentase Studi/Review Kebinarmargaan			100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap			100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan			50.01 %		66.68 %		83.35 %		100%		100%			
i	Program Fasilitas Jalan	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang			50.01 %	72,136,095,000.00	66.68 %	69,353,540,000.00	83.35 %	76,288,894,000.00	100%	83,917,783,400.00	100%	301,696,312,400.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
		Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun			50.01 %		66.68 %		83.35 %		100%		100%			
		Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam			50.01 %		66.68 %		83.35 %		100%		100%			
j	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan			100%	12,474,860,000.00	100%	12,000,000,000.00	100%	13,200,000,000.00	100%	14,520,000,000.00	100%	52,194,860,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
k	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan	20%	185,339,477,900.00									20%	185,339,477,900.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
l	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah panjang dinding penahan jalan yang dibangun	241 Meter	5,678,827,000.00									241 Meter	5,678,827,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
m	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah panjang jalan desa yang dibangun	41 Km	47,356,513,500.00									41 Km	47,356,513,500.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
n	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi	148 Km	190,274,045,000.00									148 Km	190,274,045,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
o	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinarmargaan	20%	3,121,357,000.00									20%	3,121,357,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
p	Pengelolaan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan jembatan	Persentase updating data base jalan dan jembatan	100%	485,634,000.00									100%	485,634,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
q	Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang terpasang, Jumlah panjang drainase/trottoar yang terbangun	470.16000 Titik.Meter	60,174,429,250.00									470.16000 Titik.Meter	60,174,429,250.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
10305. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR				62,079,266,719.00		75,889,628,000.00		76,024,965,789.00		83,840,230,520.00		92,224,183,571.00		390,058,274,599.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,277,267,803.00	100%	1,798,316,300.00	100%	1,921,127,300.00	100%	2,113,221,330.00	100%	2,324,543,463.00	100%	9,434,476,196.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2,141,680,074.00	100%	1,384,448,850.00	100%	2,181,771,700.00	100%	1,672,607,290.00	100%	1,839,868,019.00	100%	9,220,375,933.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	92,686,000.00	100%	169,400,000.00	100%	42,900,000.00	100%	47,190,000.00	100%	51,909,000.00	100%	404,085,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	39,375,000.00	100%	275,775,000.00	100%	49,375,000.00	100%	54,312,500.00	100%	59,743,750.00	100%	478,581,250.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	9,262,000.00	100%	14,584,000.00	100%	16,804,000.00	100%	18,484,400.00	100%	20,332,840.00	100%	79,467,240.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
f	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air			25%	1,500,000,000.00	25%	3,575,000,000.00	25%	3,932,500,000.00	25%	4,325,750,000.00	100%	13,333,250,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
g	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan SDA	Persentase pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA			25%	2,451,797,500.00	25%	6,578,783,100.00	25%	7,225,661,410.00	25%	7,948,227,551.00	100%	24,204,469,561.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
h	Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi	Persentase layanan sarana dan prasarana penyediaan air irigasi			25%	11,154,331,500.00	25%	13,993,883,306.00	25%	15,393,271,637.00	25%	16,932,598,801.00	100%	57,474,085,244.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
i	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana	Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dan bangunan pengendalian daya rusak air yang di bangun/ di rehabilitasi			25%	56,911,738,500.00	25%	47,260,321,383.00	25%	52,937,481,953.00	25%	58,231,160,147.00	100%	215,340,701,983.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
j	Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Persentase layanan bidang Sumber Daya Air di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air			25%	229,236,350.00	25%	405,000,000.00	25%	445,500,000.00	25%	490,050,000.00	100%	1,569,786,350.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
k	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase layanan sarana dan prasarana air irigasi	25%	17,845,104,578.00									25%	17,845,104,578.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
l	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana irigasi	25%	37,193,352,864.00									25%	37,193,352,864.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
m	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Persentase peningkatan sarana prasarana penyediaan air irigasi	25%	2,379,140,000.00									25%	2,379,140,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
n	Program Pengendalian Banjir	Persentase luas sawah yang terlindungi dari ancaman banjir	25%	547,167,400.00									25%	547,167,400.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
o	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	25%	554,231,000.00									25%	554,231,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
10306. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				75,447,728,050.00		59,348,570,700.00		36,513,504,910.00		43,391,500,547.00		47,130,650,602.00		261,831,954,809.00	
a	Program Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase IPAL komunal yang secara teknis berfungsi optimal					100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
b	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	0.75 %	10,601,319,100.00	0.85 %	5,066,520,700.00	0.95 %	5,573,172,770.00	1%	6,130,490,047.00	1%	6,743,539,052.00	1%	34,115,041,669.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
c	Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)			73.77 %	54,282,050,000.00	76.86 %	30,440,332,140.00	79.99 %	36,761,010,500.00	79.99 %	39,887,111,550.00	79.99 %	161,370,504,190.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang			32%		34%		37%		37%		37%		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
d	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase layanan verifikasi gambar teknis dan perhitungan konstruksi sebagai persyaratan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan.	5.99 %	1,850,191,200.00									5.99 %	1,850,191,200.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
e	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase ketersediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	71.44 %	21,898,125,000.00									71.44 %	21,898,125,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
f	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase RTH publik yang terkelola	0.75 %	81,815,000.00									0.75 %	81,815,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
g	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	71.35 %	9,886,955,000.00									71.35 %	9,886,955,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
h	Program Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pasar	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	71.35 %	10,125,920,000.00									71.35 %	10,125,920,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
i	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	75.22 %	6,003,178,050.00									75.22 %	6,003,178,050.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	75.74 %										75.74 %		
j	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	72.65 %	12,652,176,700.00									72.65 %	12,652,176,700.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
k	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	31%	2,148,713,000.00									31%	2,148,713,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
l	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	31%	199,335,000.00									31%	199,335,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
104. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				45,143,740,023.00		66,597,973,300.00		135,504,039,090.00		157,692,022,279.00		166,685,433,184.00		571,623,207,876.00	
10406. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				45,143,740,023.00		66,597,973,300.00		135,504,039,090.00		157,692,022,279.00		166,685,433,184.00		571,623,207,876.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	2,298,860,133.00	100%	5,335,939,400.00	100%	5,869,533,340.00	100%	7,520,842,604.00	100%	7,102,135,341.00	100%	28,127,310,818.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	27,959,168,650.00	100%	3,285,624,000.00	100%	1,614,186,400.00	100%	3,975,605,040.00	100%	4,373,165,544.00	100%	41,207,749,634.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	202,003,000.00	100%	80,000,000.00	100%	88,000,000.00	100%	96,800,000.00	100%	106,480,000.00	100%	573,283,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	85,435,000.00	100%	91,000,000.00	100%	100,100,000.00	100%	110,110,000.00	100%	121,121,000.00	100%	507,766,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	111,193,000.00	100%	426,740,000.00	100%	469,414,000.00	100%	633,483,400.00	100%	696,831,940.00	100%	2,337,662,340.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
f	Program Pengelolaan Perumahan	Persentase ketersediaan rumah layak huni			97.58 %	7,406,449,000.00	97.62 %	24,310,593,900.00	97.66 %	30,184,303,290.00	97.7 %	31,627,733,619.00	97.7 %	93,529,079,809.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase penurunan backlog rumah			1.13%		1.02%		0.91%		0.91%		0.91%		
g	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota			65%		68%	4,000,000,000.00	70%	4,000,000,000.00	70%	4,000,000,000.00	70%	12,000,000,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Persentase penyediaan jalan lingkungan permukiman skala kawasan dan skala kota			75%		78%		80%		80%		80%		
h	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah			79%	49,972,220,900.00	81%	99,052,211,450.00	82%	111,170,877,945.00	83%	118,657,965,740.00	83%	378,853,276,035.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum			77%		78.5 %		80%		81.77 %		81.77 %		
		Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota			65%		68%		70%		70%		70%		
		Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota			75%		78%		80%		80%		80%		
i	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penurunan backlog rumah	1.24 %	3,451,554,300.00									1.24 %	3,451,554,300.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
j	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	59.41 %	10,568,201,000.00									59.41 %	10,568,201,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
k	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase penurunan backlog rumah	1.24 %	467,324,940.00									1.24 %	467,324,940.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
105. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4,803,194,993.00		5,171,788,000.00		8,129,403,480.00		8,141,188,830.00		6,751,788,980.00		32,997,364,283.00	
10535. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				4,803,194,993.00		5,171,788,000.00		8,129,403,480.00		8,141,188,830.00		6,751,788,980.00		32,997,364,283.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	301,170,943.00	100%	2,564,572,474.00	100%	2,546,242,780.00	100%	2,550,602,780.00	100%	2,552,462,780.00	100%	10,515,051,757.00	Satuan Polisi Pamong Praja
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	130,304,500.00	100%	189,751,500.00	100%	1,529,849,500.00	100%	1,532,344,450.00	100%	134,948,000.00	100%	3,517,197,950.00	Satuan Polisi Pamong Praja
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	97,368,700.00	100%	72,360,000.00	100%	97,100,000.00	100%	97,900,000.00	100%	98,700,000.00	100%	463,428,700.00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%		100%		100%	171,000,000.00	100%	171,000,000.00	100%	171,000,000.00	100%	513,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	10,752,000.00	100%	10,752,000.00	100%	17,675,200.00	100%	18,805,600.00	100%	20,042,200.00	100%	78,027,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
f	Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda			20%	315,207,100.00	20%	283,400,000.00	20%	284,600,000.00	20%	285,900,000.00	80%	1,169,107,100.00	Satuan Polisi Pamong Praja
g	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan			20%	643,611,000.00	20%	852,600,000.00	20%	854,400,000.00	20%	857,200,000.00	80%	3,207,811,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
h	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan			3%	423,880,100.00	3%	1,580,200,000.00	3%	1,580,200,000.00	3%	1,580,200,000.00	12%	5,164,480,100.00	Satuan Polisi Pamong Praja
i	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	20%	1,085,495,650.00	20%	451,653,826.00	20%	551,336,000.00	20%	551,336,000.00	20%	551,336,000.00	100%	3,191,157,476.00	Satuan Polisi Pamong Praja
j	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran			20%	500,000,000.00	20%	500,000,000.00	20%	500,000,000.00	20%	500,000,000.00	80%	2,000,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
k	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	100%	415,028,800.00									100%	415,028,800.00	Satuan Polisi Pamong Praja
l	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan kegiatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	2,461,418,800.00									100%	2,461,418,800.00	Satuan Polisi Pamong Praja
m	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Persentase petugas linmas yang mendapat pelatihan	100%	301,655,600.00									100%	301,655,600.00	Satuan Polisi Pamong Praja
106. SOSIAL				5,658,079,438.00		7,918,396,000.00		8,986,043,300.00		9,159,683,300.00		9,580,058,300.00		41,302,260,338.00	
10614. DINAS SOSIAL				5,658,079,438.00		7,918,396,000.00		8,986,043,300.00		9,159,683,300.00		9,580,058,300.00		41,302,260,338.00	

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	813,862,438.00	100%	930,809,800.00	100%	1,099,809,800.00	100%	1,175,074,800.00	100%	1,246,074,800.00	100%	5,265,631,638.00	Dinas Sosial
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	868,432,500.00	100%	719,202,500.00	100%	1,211,202,500.00	100%	951,202,500.00	100%	941,202,500.00	100%	4,691,242,500.00	Dinas Sosial
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	17,850,000.00	100%	18,900,000.00	100%	19,250,000.00	100%	20,625,000.00	100%	22,000,000.00	100%	98,625,000.00	Dinas Sosial
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	15,297,500.00	100%	11,197,500.00	100%	14,197,500.00	100%	17,197,500.00	100%	20,197,500.00	100%	78,087,500.00	Dinas Sosial
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	69,124,000.00	100%	64,313,000.00	100%	69,313,000.00	100%	74,313,000.00	100%	79,313,000.00	100%	356,376,000.00	Dinas Sosial
f	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.			20%	1,787,783,500.00	20%	1,977,961,000.00	20%	2,116,961,000.00	20%	2,256,961,000.00	80%	8,139,666,500.00	Dinas Sosial
g	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial			20%	1,977,494,500.00	20%	2,025,494,500.00	20%	2,080,494,500.00	20%	2,135,494,500.00	80%	8,218,978,000.00	Dinas Sosial
h	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Pendampingan, Pemberdayaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan.			20%	1,243,878,500.00	20%	1,308,878,500.00	20%	1,363,878,500.00	20%	1,418,878,500.00	80%	5,335,514,000.00	Dinas Sosial
i	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepelawangan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan sosial pengelolaan sumber dana bantuan sosial			20%	1,164,816,700.00	20%	1,259,936,500.00	20%	1,359,936,500.00	20%	1,459,936,500.00	80%	5,244,626,200.00	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
j	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan hidup	17%	1,275,188,500.00									17%	1,275,188,500.00	Dinas Sosial
k	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang mendapatkan pelayanan	18%	251,251,000.00									18%	251,251,000.00	Dinas Sosial
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	15%										15%		
l	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pembinaan	17%	36,873,000.00									17%	36,873,000.00	Dinas Sosial
m	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	20%	1,051,908,500.00									20%	1,051,908,500.00	Dinas Sosial
n	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	17%	308,983,000.00									17%	308,983,000.00	Dinas Sosial
o	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mendapatkan pembinaan	17%	495,778,500.00									17%	495,778,500.00	Dinas Sosial
p	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	20%	453,530,500.00									20%	453,530,500.00	Dinas Sosial
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				115,553,495,479.00	152,037,147,625.00	167,413,496,051.00	218,546,827,698.00	230,080,451,424.00	883,631,418,277.00						
201. TENAGA KERJA				6,213,977,250.00	6,645,348,000.00	6,275,217,893.00	6,639,583,175.00	7,029,455,707.00	32,803,582,025.00						
20115. DINAS TENAGA KERJA				6,213,977,250.00	6,645,348,000.00	6,275,217,893.00	6,639,583,175.00	7,029,455,707.00	32,803,582,025.00						
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	959,300,800.00	100%	1,301,766,000.00	100%	989,213,178.00	100%	1,058,458,101.00	100%	1,132,550,167.00	100%	5,441,288,246.00	Dinas Tenaga Kerja
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	43,648,000.00	100%	115,546,000.00	100%	51,346,475.00	100%	54,940,728.00	100%	58,786,579.00	100%	324,267,782.00	Dinas Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	2,000,000.00	100%	4,000,000.00	100%	3,434,700.00	100%	3,675,129.00	100%	3,932,388.00	100%	17,042,217.00	Dinas Tenaga Kerja
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	6,572,800.00	100%	66,037,000.00	100%	7,628,240.00	100%	8,162,217.00	100%	8,733,573.00	100%	97,133,830.00	Dinas Tenaga Kerja
e	Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)			100%	214,908,000.00	100%	268,831,500.00	100%	287,650,000.00	100%	307,785,000.00	100%	1,079,174,500.00	Dinas Tenaga Kerja
f	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial			100%	2,400,000,000.00	100%	3,083,166,000.00	100%	3,224,087,000.00	100%	3,374,874,000.00	100%	12,082,127,000.00	Dinas Tenaga Kerja
g	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	100%	3,454,772,000.00	100%	752,161,000.00	100%	734,594,000.00	100%	786,015,500.00	100%	841,038,000.00	100%	6,568,580,500.00	Dinas Tenaga Kerja
h	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)			100%	1,150,904,000.00	100%	1,137,003,800.00	100%	1,216,594,500.00	100%	1,301,756,000.00	100%	4,806,258,300.00	Dinas Tenaga Kerja
i	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan keterampilan pencari kerja sebelum memasuki dunia kerja	100%	541,190,900.00									100%	541,190,900.00	Dinas Tenaga Kerja
j	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan pengetahuan masyarakat tentang peraturan ketenagakerjaan, pemahaman tentang Perselesian Hubungan Industrial dan peningkatan kesejahteraan pekerja	100%	1,206,492,750.00									100%	1,206,492,750.00	Dinas Tenaga Kerja
k	Program Pengembangan Wilayah Dan Transmigrasi Lokal	Persentase animo calon transmigran dan meningkatnya keterampilan calon transmigran			100%	640,026,000.00							100%	640,026,000.00	Dinas Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
202. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3,016,024,500.00		3,071,824,000.00		5,528,526,250.00		6,287,270,115.00		7,661,942,613.00		25,565,587,478.00	
20212. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3,016,024,500.00		3,071,824,000.00		5,528,526,250.00		6,287,270,115.00		7,661,942,613.00		25,565,587,478.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	466,290,000.00	100%	785,803,500.00	100%	1,090,263,850.00	100%	1,203,910,135.00	100%	1,395,565,178.00	100%	4,941,832,663.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	445,650,000.00	100%	211,345,000.00	100%	347,700,000.00	100%	417,240,000.00	100%	500,688,000.00	100%	1,922,623,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	38,500,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	198,500,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	7,500,000.00	100%	72,000,000.00	100%	64,680,000.00	100%	71,148,000.00	100%	78,262,800.00	100%	293,590,800.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	8,412,000.00	100%	15,259,000.00	100%	109,089,200.00	100%	130,906,640.00	100%	157,087,968.00	100%	420,754,808.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
f	Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Persentase pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga			60%	430,910,000.00	80%	952,084,420.00	100%	1,105,235,504.00	100%	1,285,290,224.00	100%	3,773,520,148.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
g	Program Pengarusutamaan Gender	Persentase capaian pelaksanaan PUG			60%	752,696,500.00	80%	1,026,503,780.00	100%	1,231,804,536.00	100%	1,478,165,443.00	100%	4,489,170,259.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
h	Program Perlindungan Anak	Persentase Capaian Pelaksanaan Perlindungan Anak			60%	408,130,000.00	80%	973,032,500.00	100%	1,070,335,700.00	100%	1,177,369,200.00	100%	3,628,867,400.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
i	Program Perlindungan Hak Perempuan	Persentase capaian pelaksanaan perlindungan hak perempuan			60%	357,180,000.00	80%	915,172,500.00	100%	1,006,689,600.00	100%	1,529,513,800.00	100%	3,808,555,900.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
j	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase dokumen terkait PUG dan PUHA	100%	223,420,000.00									100%	223,420,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
k	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Capaian Indikator KLA	40%	1,027,255,000.00									40%	1,027,255,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
l	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan/perindungan perempuan	100%	252,974,500.00									100%	252,974,500.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
m	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Capaian indikator ketahanan keluarga	60%	584,523,000.00									60%	584,523,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
203. PANGAN				3,366,198,400.00		3,618,540,000.00		3,280,394,000.00		3,623,433,400.00		3,990,276,740.00		17,878,842,540.00	
20320. DINAS KETAHANAN PANGAN				3,366,198,400.00		3,618,540,000.00		3,280,394,000.00		3,623,433,400.00		3,990,276,740.00		17,878,842,540.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	482,117,700.00	100%	610,955,000.00	100%	672,050,500.00	100%	739,255,550.00	100%	813,181,105.00	100%	3,317,559,855.00	Dinas Ketahanan Pangan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	57,089,000.00	100%	115,995,000.00	100%	127,594,500.00	100%	140,353,950.00	100%	154,389,345.00	100%	595,421,795.00	Dinas Ketahanan Pangan
c	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	56,885,000.00	100%	170,170,000.00	100%	187,187,000.00	100%	205,905,700.00	100%	226,496,270.00	100%	846,643,970.00	Dinas Ketahanan Pangan
d	Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Persentase penduduk rawan pangan			10.80%	423,000,000.00	10.55%	465,300,000.00	10.30%	511,830,000.00	10.05%	563,013,000.00	10.050%	1,963,143,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
e	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan			0.034%	331,400,000.00	0.034%	364,540,000.00	0.034%	400,994,000.00	0.034%	441,093,400.00	0.034%	1,538,027,400.00	Dinas Ketahanan Pangan
f	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)			88.40%	1,494,850,000.00	88.60%	929,335,000.00	88.70%	1,022,268,500.00	88.80%	1,124,495,350.00	88.80%	4,570,948,850.00	Dinas Ketahanan Pangan
g	Program Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar			62%	384,570,000.00	64%	438,027,000.00	66%	496,829,700.00	68%	551,012,670.00	68%	1,870,439,370.00	Dinas Ketahanan Pangan
h	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan			100%	87,600,000.00	100%	96,360,000.00	100%	105,996,000.00	100%	116,595,600.00	100%	406,551,600.00	Dinas Ketahanan Pangan
i	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Cakupan ketersediaan dan distribusi pangan ditingkat Rumah Tangga yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	100%	2,770,106,700.00									100%	2,770,106,700.00	Dinas Ketahanan Pangan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204. PERTANAHAN				16,671,411,363.00		37,091,660,000.00		20,000,000,000.00		23,551,730,010.00		27,780,073,535.00		125,094,874,908.00	
20407. DINAS PERTANAHAN				16,671,411,363.00		37,091,660,000.00		20,000,000,000.00		23,551,730,010.00		27,780,073,535.00		125,094,874,908.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	707,076,717.00	100%	1,038,861,250.00	100%	1,132,819,000.00	100%	1,189,456,000.00	100%	1,248,928,000.00	100%	5,317,140,967.00	Dinas Pertanahan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	328,537,700.00	100%	336,559,700.00	100%	245,488,050.00	100%	257,761,000.00	100%	270,649,535.00	100%	1,438,995,985.00	Dinas Pertanahan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	27,720,000.00	100%	26,250,000.00	100%	30,400,000.00	100%	31,920,000.00	100%	33,516,000.00	100%	149,806,000.00	Dinas Pertanahan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	3,000,000.00	100%	10,600,000.00	100%	31,600,000.00	100%	33,180,000.00	100%	34,839,000.00	100%	113,219,000.00	Dinas Pertanahan
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	25,755,000.00	100%	28,800,000.00	100%	37,501,200.00	100%	39,374,000.00	100%	41,343,000.00	100%	172,773,200.00	Dinas Pertanahan
f	Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Malang			35%	34,828,025,450.00	50%	17,739,948,150.00	65%	21,139,572,010.00	80%	25,204,284,000.00	80%	98,911,829,610.00	Dinas Pertanahan
g	Program Penanganan Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi			50%	822,563,600.00	60%	782,243,600.00	70%	860,467,000.00	80%	946,514,000.00	80%	3,411,788,200.00	Dinas Pertanahan
h	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase terwujudnya pelayanan pertanahan yang berkualitas serta mewujudkan tanah sebagai sarana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat	80%	14,919,708,570.00									80%	14,919,708,570.00	Dinas Pertanahan
i	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase terselesaikannya konflik-konflik pertanahan	70%	494,639,876.00									70%	494,639,876.00	Dinas Pertanahan
j	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase terinventarisir data kebutuhan tanah untuk pembangunan	80%	164,973,500.00									80%	164,973,500.00	Dinas Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
205. LINGKUNGAN HIDUP				21,156,402,472.00		24,007,240,000.00		28,682,000,000.00		42,208,620,000.00		46,733,300,000.00		162,787,562,472.00		
20510. DINAS LINGKUNGAN HIDUP				21,156,402,472.00		24,007,240,000.00		28,682,000,000.00		42,208,620,000.00		46,733,300,000.00		162,787,562,472.00		
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	693,691,935.00	100%	1,032,015,000.00	100%	1,520,015,000.00	100%	1,125,950,000.00	100%	1,215,900,000.00	100%	5,587,571,935.00	Dinas Lingkungan Hidup	
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	179,757,900.00	100%	193,518,000.00	100%	784,518,000.00	100%	745,000,000.00	100%	325,000,000.00	100%	2,227,793,900.00	Dinas Lingkungan Hidup	
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	49,808,000.00	100%	49,500,000.00	100%	49,500,000.00	100%	150,000,000.00	100%	160,000,000.00	100%	458,808,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	30,000,000.00	100%	20,500,000.00	100%	20,500,000.00	100%	50,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	181,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	99,698,000.00	100%	191,220,000.00	100%	191,220,000.00	100%	158,000,000.00	100%	172,000,000.00	100%	812,138,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
f	Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan tutupan vegetasi			3%	3,167,000,000.00	3%	3,829,378,000.00	3%	6,300,000,000.00	3%	6,900,000,000.00	12%	20,196,378,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel			90%		91%		92%		93%		93%			
		Persentase peningkatan kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan			10%		10%		10%		10%		10%		40%	
g	Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan			77%	1,950,000,000.00	78%	2,080,000,000.00	79%	3,075,000,000.00	80%	3,325,000,000.00	80%	10,430,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti			100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup			100%		100%		100%		100%		100%			
h	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3	Persentase Layanan Persampahan			60%	10,873,959,600.00	60%	13,423,959,600.00	70%	21,454,670,000.00	75%	24,175,400,000.00	75%	69,927,989,200.00	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase pengurangan sampah			18%		20%		22%		24%		24%		
		Persentase kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS E3			24%		39%		56%		74%		74%		
i	Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)	Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan			100%	2,233,509,400.00	100%	2,233,509,400.00	100%	2,950,000,000.00	100%	3,300,000,000.00	100%	10,717,018,800.00	Dinas Lingkungan Hidup
j	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri yang memenuhi baku mutu			30%	1,846,618,000.00	31%	2,100,000,000.00	32%	2,300,000,000.00	33%	2,450,000,000.00	33%	8,696,618,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
k	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase layanan persampahan	56.15 %	11,105,905,670.00											Dinas Lingkungan Hidup
l	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	82.67 %	6,285,716,968.00	83%	2,449,400,000.00	84%	2,449,400,000.00	85%	3,900,000,000.00	86%	4,650,000,000.00	86%	19,734,516,968.00	Dinas Lingkungan Hidup
m	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Persentase ketersediaan data/ informasi SDA dan LH yang dapat diakses	90%	493,078,099.00									90%	493,078,099.00	Dinas Lingkungan Hidup
n	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Cakupan lokasi konservasi yang dilakukan	16%	2,218,745,900.00									16%	2,218,745,900.00	Dinas Lingkungan Hidup
206. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10,333,184,700.00		11,329,155,000.00		15,779,839,350.00		16,370,194,600.00		16,865,569,556.00		70,677,943,206.00	
20611. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10,333,184,700.00		11,329,155,000.00		15,779,839,350.00		16,370,194,600.00		16,865,569,556.00		70,677,943,206.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,731,162,350.00	100%	2,226,420,000.00	100%	2,454,522,000.00	100%	2,533,043,100.00	100%	2,614,999,130.00	100%	11,560,146,580.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	3,403,514,200.00	100%	2,435,647,000.00	100%	4,918,300,600.00	100%	4,949,319,300.00	100%	4,981,888,100.00	100%	20,688,669,200.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	55,000,000.00			100%	60,500,000.00			100%	115,500,000.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	10,560,000.00	100%	17,100,000.00	100%	29,755,000.00	100%	31,242,700.00	100%	32,804,800.00	100%	121,462,500.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	65,516,100.00	100%	87,220,650.00	100%	80,036,000.00	100%	84,037,800.00	100%	88,239,100.00	100%	405,049,650.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan	Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)			100%	3,661,082,800.00	100%	5,053,474,200.00	100%	5,306,146,800.00	100%	5,571,454,100.00	100%	19,592,157,900.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
g	Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Standar Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)			100%	261,668,250.00	100%	139,290,450.00	100%	146,221,000.00	100%	153,517,000.00	100%	700,696,700.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
h	Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)			100%	614,997,100.00	100%	882,731,100.00	100%	926,867,600.00	100%	973,210,826.00	100%	3,397,806,626.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
i	Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)			100%	1,298,417,900.00	100%	1,518,730,000.00	100%	1,594,666,300.00	100%	1,674,399,000.00	100%	6,086,213,200.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
j	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)			100%	671,601,300.00	100%	703,000,000.00	100%	738,150,000.00	100%	775,057,500.00	100%	2,887,808,800.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
k	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan (%)	100%	5,122,432,050.00									100%	5,122,432,050.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
207. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5,046,711,431.00		4,345,456,000.00		5,891,238,000.00		4,445,134,000.00		4,640,299,000.00		24,368,838,431.00	
20721. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5,046,711,431.00		4,345,456,000.00		5,891,238,000.00		4,445,134,000.00		4,640,299,000.00		24,368,838,431.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	816,969,931.00	100%	1,323,499,000.00	100%	1,369,170,000.00	100%	1,418,127,000.00	100%	1,468,782,000.00	100%	6,396,547,931.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	148,939,000.00	100%	576,134,000.00	100%	625,609,000.00	100%	190,090,000.00	100%	198,893,000.00	100%	1,739,665,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	19,500,000.00	100%	52,947,000.00	100%	54,998,000.00	100%	56,148,000.00	100%	58,355,000.00	100%	241,948,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	2,500,000.00	100%	2,500,000.00	100%	2,625,000.00	100%	2,756,000.00	100%	2,894,000.00	100%	13,275,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	106,503,000.00	100%	118,405,500.00	100%	118,982,000.00	100%	122,883,000.00	100%	125,573,000.00	100%	592,346,500.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
f	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			50%	566,252,500.00	66.67 %	580,000,000.00	83.33 %	595,000,000.00	100%	615,000,000.00	100%	2,356,252,500.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
g	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat			36%	497,304,000.00	54.67 %	514,500,000.00	76.00 %	534,625,000.00	100%	555,406,000.00	100%	2,101,835,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
h	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	1,122,539,500.00	100%	649,054,000.00	100%	1,962,354,000.00	100%	851,505,000.00	100%	930,396,000.00	100%	5,515,848,500.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
i	Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.			43.75 %	559,360,000.00	62.50 %	663,000,000.00	81.25 %	674,000,000.00	100%	685,000,000.00	100%	2,581,360,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
j	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	33.33 %	832,246,000.00									33.33 %	832,246,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
k	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase peningkatan pembentukan BUMDes	20%	344,800,000.00									20%	344,800,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
l	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	5%	1,252,714,000.00									5%	1,252,714,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
m	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Persentase desa yang mengakomodir peran perempuan dalam pembangunan	18.25 %	400,000,000.00									18.25 %	400,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
208. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				4,528,925,435.00		10,759,394,000.00		15,365,400,000.00		14,311,200,000.00		17,926,450,000.00		62,891,369,435.00	
20813. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4,528,925,435.00		10,759,394,000.00		15,365,400,000.00		14,311,200,000.00		17,926,450,000.00		62,891,369,435.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	516,299,050.00	100%	837,341,000.00	100%	1,006,150,000.00	100%	1,080,850,000.00	100%	1,161,250,000.00	100%	4,601,890,050.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	621,550,275.00	100%	342,484,750.00	100%	1,298,050,000.00	100%	394,050,000.00	100%	2,227,300,000.00	100%	4,883,435,025.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	30,514,000.00	100%	31,900,000.00	100%	12,650,000.00	100%	13,550,000.00	100%	14,500,000.00	100%	103,114,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	6,060,000.00	100%	14,460,000.00	100%	16,300,000.00	100%	17,450,000.00	100%	18,700,000.00	100%	72,970,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	57,549,750.00	100%	13,807,000.00	100%	15,250,000.00	100%	16,650,000.00	100%	18,050,000.00	100%	121,306,750.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan			100%	1,532,439,600.00	100%	1,579,400,000.00	100%	2,268,050,000.00	100%	2,887,150,000.00	100%	8,267,039,600.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
g	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB MKJP			36.41 %	513,761,400.00	38.20 %	1,473,050,000.00	40.00 %	1,058,400,000.00	40%	1,137,300,000.00	40%	4,182,511,400.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)			60.00 %		80.00 %		89.47 %		100%		100%		
h	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase BKR Paripurna			45.28 %	1,777,890,000.00	53.46 %	1,700,600,000.00	54.72 %	2,784,750,000.00	62.26 %	3,302,800,000.00	62.26 %	9,566,040,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB			87.00 %		87.10 %		88.00 %		88.15 %		88.15 %		
		Persentase Kelompok UPPKS Mandiri			44.44 %		45.45 %		46.46 %		47.47 %		47.47 %		
i	Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana	Persentase PPKBD Mandiri			46.41 %	5,695,310,250.00	54.10 %	8,263,950,000.00	61.79 %	6,677,450,000.00	69.49 %	7,159,400,000.00	69.49 %	27,796,110,250.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
j	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100%	1,009,287,360.00									100%	1,009,287,360.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
k	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase kelompok PIK Remaja Tegar.	6.19 %	433,264,000.00									6.19 %	433,264,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
l	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase peserta KB Aktif	75.84 %	438,000,000.00									75.84 %	438,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	50.47 %										50.47 %		
m	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Persentase PPKBD Mandiri	38.72 %	906,346,000.00									38.72 %	906,346,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
n	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB	83.72 %	317,545,000.00									83.72 %	317,545,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
o	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	18.18 %	192,510,000.00									18.18 %	192,510,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
209. PERHUBUNGAN				10,411,953,083.00		16,456,892,000.00		17,000,000,000.00		34,620,750,000.00		28,572,800,000.00		107,062,395,083.00	
20908. DINAS PERHUBUNGAN				10,411,953,083.00		16,456,892,000.00		17,000,000,000.00		34,620,750,000.00		28,572,800,000.00		107,062,395,083.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3,620,291,173.00	100%	4,845,782,000.00	100%	5,056,500,000.00	100%	5,815,000,000.00	100%	6,687,355,000.00	100%	26,024,928,173.00	Dinas Perhubungan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1,990,272,510.00	100%	483,170,000.00	100%	1,055,000,000.00	100%	1,846,750,000.00	100%	2,122,700,000.00	100%	7,497,892,510.00	Dinas Perhubungan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	37,950,000.00	100%	128,250,000.00	100%	114,000,000.00	100%	131,100,000.00	100%	150,770,000.00	100%	562,070,000.00	Dinas Perhubungan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	71,663,000.00	100%	92,500,000.00	100%	150,000,000.00	100%	230,000,000.00	100%	264,500,000.00	100%	808,663,000.00	Dinas Perhubungan
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	63,840,000.00	100%	121,790,000.00	100%	210,000,000.00	100%	299,000,000.00	100%	343,925,000.00	100%	1,038,555,000.00	Dinas Perhubungan
f	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi	Rasio sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan yang tersedia			100%	885,400,000.00	100%	934,400,000.00	100%	1,292,750,000.00	100%	1,355,000,000.00	100%	4,467,550,000.00	Dinas Perhubungan
g	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang			100%	2,725,000,000.00	100%	3,715,000,000.00	100%	18,211,150,000.00	100%	10,301,550,000.00	100%	34,952,700,000.00	Dinas Perhubungan
h	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan			100%	325,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	640,000,000.00	100%	730,000,000.00	100%	2,145,000,000.00	Dinas Perhubungan
i	Program Terminal dan Perparkiran	Persentase jaringan prasarana angkutan jalan			100%	980,000,000.00	100%	1,215,100,000.00	100%	1,875,000,000.00	100%	2,157,000,000.00	100%	6,227,100,000.00	Dinas Perhubungan
j	Program Pelayanan UPT Perhubungan	Persentase pemenuhan target PAD di UPT Perhubungan Kabupaten Malang			100%	5,870,000,000.00	100%	4,100,000,000.00	100%	4,280,000,000.00	100%	4,460,000,000.00	100%	18,710,000,000.00	Dinas Perhubungan
k	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan RASS untuk 5 Kecamatan	100%	249,500,000.00										249,500,000.00	Dinas Perhubungan
		Persentase Prasarana dan Fasilitas di bidang Perhubungan	100%												
l	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100%	484,687,000.00									100%	484,687,000.00	Dinas Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
m	Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan, cermin tikungan) di wilayah Kabupaten Malang	100%	2,396,941,000.00									100%	2,396,941,000.00	Dinas Perhubungan
		Persentase fasilitas perlengkapan jalan (marka) di wilayah Kabupaten Malang	100%											100%	
n	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (jml sapras yg dibangun / jml sapras yg perlu dibangun x 100)	100%	178,528,000.00									100%	178,528,000.00	Dinas Perhubungan
o	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah peningkatan pelayanan angkutan di wilayah Kabupaten Malang	100%	1,318,280,400.00									100%	1,318,280,400.00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Pengendalian dan Pengawasan di Jalan Raya	100%											100%	
210. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17,418,259,225.00	16,410,638,000.00	10,017,180,908.00	10,073,549,908.00	10,286,596,908.00	64,206,224,949.00						
21009. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17,418,259,225.00	16,410,638,000.00	10,017,180,908.00	10,073,549,908.00	10,286,596,908.00	64,206,224,949.00						
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,134,000,175.00	100%	1,624,812,000.00	100%	1,903,636,000.00	100%	2,088,636,000.00	100%	2,233,636,000.00	100%	8,984,720,175.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	868,368,075.00	100%	367,887,000.00	100%	1,617,568,908.00	100%	1,585,568,908.00	100%	1,598,568,908.00	100%	6,037,961,799.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	54,137,000.00	100%	21,445,000.00	100%	135,300,000.00	100%	135,300,000.00	100%	135,300,000.00	100%	481,482,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	38,629,550.00	100%	21,885,000.00	100%	41,000,000.00	100%	41,000,000.00	100%	41,000,000.00	100%	183,514,550.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	6,134,000.00	100%	12,252,000.00	100%	7,800,000.00	100%	7,800,000.00	100%	7,800,000.00	100%	41,786,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Cakupan Sosialisasi di Bidang Cukai			100%	1,941,793,000.00	100%	1,941,793,000.00	100%	1,941,793,000.00	100%	1,941,793,000.00	100%	7,767,172,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
g	Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK			100%	9,267,714,000.00	100%	834,939,000.00	100%	834,939,000.00	100%	834,939,000.00	100%	11,772,531,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
h	Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi	Cakupan kerjasama informasi dengan mas media			100%	497,850,000.00	100%	506,000,000.00	100%	506,000,000.00	100%	506,000,000.00	100%	2,015,850,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
i	Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK	Persentase cakupan terbitnya pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Malang			100%	2,655,000,000.00	100%	3,029,144,000.00	100%	2,932,513,000.00	100%	2,987,560,000.00	100%	11,604,217,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
j	Program kerja sama informasi dengan mas media	Cakupan kerjasama informasi dengan mas media	100%	272,764,600.00									100%	272,764,600.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
k	Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%	14,651,262,325.00									100%	14,651,262,325.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
l	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Persentase cakupan terbitnya pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Malang	100%	158,670,000.00									100%	158,670,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
m	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informasi	100%	234,293,500.00									100%	234,293,500.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
211. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				4,707,194,334.00	4,658,644,000.00	6,497,092,300.00	6,841,058,155.00	7,707,076,850.00	30,411,065,639.00						
2116. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				4,707,194,334.00	4,658,644,000.00	6,497,092,300.00	6,841,058,155.00	7,707,076,850.00	30,411,065,639.00						
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	718,085,784.00	100%	964,528,800.00	100%	1,099,585,400.00	100%	1,213,745,800.00	100%	1,339,245,800.00	100%	5,335,191,584.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	184,898,850.00	100%	215,958,500.00	100%	550,433,800.00	100%	385,592,190.00	100%	721,523,800.00	100%	2,058,407,140.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	27,860,000.00	100%	35,300,000.00	100%	30,800,000.00	100%	40,300,000.00	100%	134,260,000.00	100%	134,260,000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	4,700,000.00	100%	7,200,000.00	100%	8,000,000.00	100%	9,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	38,900,000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	12,564,000.00	100%	19,939,000.00	100%	28,564,000.00	100%	35,564,000.00	100%	42,720,000.00	100%	139,351,000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
f	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan			100%	191,560,400.00	100%	204,560,150.00	100%	214,457,215.00	100%	229,450,800.00	100%	840,028,565.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
g	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran			100%	235,734,000.00	100%	335,000,000.00	100%	410,000,000.00	100%	460,000,000.00	100%	1,440,734,000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
h	Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi			100%	127,000,000.00	100%	947,500,000.00	100%	1,102,500,000.00	100%	1,267,125,000.00	100%	3,444,125,000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
i	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir			100%	325,000,000.00	100%	330,000,000.00	100%	335,000,000.00	100%	340,000,000.00	100%	1,330,000,000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
j	Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan			100%	146,723,300.00	100%	533,148,950.00	100%	558,148,950.00	100%	583,148,950.00	100%	1,821,170,150.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
k	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan			100%	2,425,000,000.00	100%	2,425,000,000.00	100%	2,546,250,000.00	100%	2,673,562,500.00	100%	10,069,812,500.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
l	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM	100%	21,052,500.00									100%	21,052,500.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
m	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase SDM KUMKM dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	100%	1,629,190,000.00									100%	1,629,190,000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
n	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	100%	1,388,259,600.00									100%	1,388,259,600.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
o	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi	100%	315,065,000.00									100%	315,065,000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
p	Program Peningkatan Pelayanan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Bantuan Dana Bergulir bagi KUMKM	100%	405,518,600.00										100%	405,518,600.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
212. PENANAMAN MODAL				3,249,629,880.00		3,365,076,000.00		5,047,614,000.00		6,108,404,000.00		6,476,731,500.00		24,247,455,380.00		
21217. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				3,249,629,880.00		3,365,076,000.00		5,047,614,000.00		6,108,404,000.00		6,476,731,500.00		24,247,455,380.00		
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	771,529,784.00	100%	1,266,254,600.00	100%	1,833,659,600.00	100%	1,925,220,000.00	100%	2,021,357,500.00	100%	7,818,021,484.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	484,332,823.00	100%	300,658,400.00	100%	354,814,400.00	100%	385,419,000.00	100%	401,564,000.00	100%	1,926,788,623.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)					100%	20,000,000.00	100%	21,000,000.00	100%	22,000,000.00	100%	63,000,000.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)			100%	14,400,000.00	100%	202,965,000.00	100%	213,113,000.00	100%	223,768,000.00	100%	654,246,000.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	21,252,900.00	100%	27,997,000.00	100%	13,025,000.00	100%	13,998,000.00	100%	15,070,000.00	100%	91,342,900.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
f	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Intensif dan standarisasi administrasi pelayanan			100%	225,700,000.00	100%	105,000,000.00	100%	105,000,000.00	100%	105,000,000.00	100%	540,700,000.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
g	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase Pencapaian Pelayanan Perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu			20%	297,370,000.00	20%	342,965,000.00	20%	390,113,000.00	20%	378,118,000.00	20%	1,408,566,000.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
h	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan Sosial Budaya yang tepat waktu			30%	326,955,000.00	30%	469,000,000.00	30%	492,430,000.00	30%	517,072,000.00	30%	1,805,457,000.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
i	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundang penanaman modal			80%	369,516,000.00	80%	372,570,000.00	80%	391,196,000.00	80%	416,757,000.00	80%	1,550,039,000.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
j	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	1%	1,134,920,798.00	4%	536,225,000.00	4%	1,333,615,000.00	4%	2,170,915,000.00	4%	2,376,025,000.00	17%	7,551,700,798.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
k	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Malang	1%	110,090,000.00									1%	110,090,000.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
l	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif	100%	24,095,940.00									100%	24,095,940.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
m	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan pelayanan perizinan	10%	703,407,635.00									10%	703,407,635.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
213. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				5,700,531,803.00		2,910,856,000.00		17,792,537,700.00		34,596,544,850.00		34,600,832,500.00		95,601,302,853.00	
21319. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				5,700,531,803.00		2,910,856,000.00		17,792,537,700.00		34,596,544,850.00		34,600,832,500.00		95,601,302,853.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	673,826,153.00	100%	1,592,895,700.00	100%	735,474,200.00	100%	735,474,200.00	100%	735,474,200.00	100%	4,473,144,453.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	75,533,800.00	100%	19,820,300.00	100%	28,622,500.00	100%	30,626,075.00	100%	32,769,900.00	100%	187,372,575.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	59,400,000.00									100%	59,400,000.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
c	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	50,168,000.00	100%	81,863,500.00	100%	63,562,500.00	100%	65,566,075.00	100%	67,709,900.00	100%	328,869,975.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
d	Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga	Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet			20%	531,055,000.00	24%	537,982,500.00	28%	537,982,500.00	28%	537,982,500.00	100%	2,145,002,500.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
e	Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi	Persentase Atlet yang dikirim			22%	88,112,000.00	22%	401,525,000.00	22%	401,525,000.00	22%	401,525,000.00	88%	1,292,687,000.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
f	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif			60%	408,992,500.00	60%	535,000,000.00	60%	535,000,000.00	60%	535,000,000.00	60%	2,013,992,500.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
g	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	21%	3,155,302,000.00	22%	188,117,000.00	45%	15,490,371,000.00	69%	32,290,371,000.00	94%	32,290,371,000.00	94%	83,414,532,000.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
h	Program Pengembangan Dan Kereserian Kebijakan Pemuda	Persentase pengembangan bagi pemuda di lingkungan Kabupaten Malang yang difasilitasi	100%	50,000,000.00									100%	50,000,000.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
i	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan fasilitasi Pembinaan Terhadap atlet	100%	1,184,131,350.00									100%	1,184,131,350.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
j	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase pembinaan SDM tentang Administrasi Pengelolaan Lembaga Kepemudaan	100%	430,970,500.00									100%	430,970,500.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
k	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase pembinaan kewirausahaan Kepemudaan	100%	21,200,000.00									100%	21,200,000.00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
214. STATISTIK						788,110,000.00		990,670,000.00		1,000,670,000.00		1,010,670,000.00		3,790,120,000.00	
21409. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						788,110,000.00		990,670,000.00		1,000,670,000.00		1,010,670,000.00		3,790,120,000.00	
a	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan pemenuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat			100%	788,110,000.00									Dinas Komunikasi Dan Informatika
b	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Daerah	Cakupan pemenuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat					100%	990,670,000.00	100%	1,000,670,000.00	100%	1,010,670,000.00	100%	3,002,010,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
215. PERSANDIAN								100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		300,000,000.00	
21509. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		300,000,000.00	
a	Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM dibidang Aplikasi informatika	Persentase cakupan tersedianya fasilitas Informasi berbasis TIK						100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	300,000,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
216. KEBUDAYAAN						3,416,538,625.00		3,494,476,650.00		3,669,200,485.00		3,852,660,515.00		14,432,876,275.00	
21618. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						3,416,538,625.00		3,494,476,650.00		3,669,200,485.00		3,852,660,515.00		14,432,876,275.00	
a	Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya			100%	3,416,538,625.00	100%	3,494,476,650.00	100%	3,669,200,485.00	100%	3,852,660,515.00	100%	14,432,876,275.00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
217. PERPUSTAKAAN				881,396,650.00		602,480,000.00		2,804,902,000.00		831,778,000.00		989,823,000.00		6,110,379,650.00	
21726. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				881,396,650.00		602,480,000.00		2,804,902,000.00		831,778,000.00		989,823,000.00		6,110,379,650.00	
a	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang	30%	881,396,650.00	46%	410,440,000.00	63%	2,580,215,000.00	81%	566,648,000.00	100%	674,317,000.00	100%	5,113,016,650.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
b	Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang			16%	192,040,000.00	33%	224,687,000.00	51%	265,130,000.00	70%	315,506,000.00	70%	997,363,000.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
218. KEARSIPAN				2,851,694,953.00		2,559,296,000.00		2,866,407,000.00		3,267,707,000.00		3,855,893,000.00		15,400,997,953.00	
21826. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				2,851,694,953.00		2,559,296,000.00		2,866,407,000.00		3,267,707,000.00		3,855,893,000.00		15,400,997,953.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	886,754,353.00	100%	1,144,755,300.00	100%	1,282,125,000.00	100%	1,461,624,000.00	100%	1,724,714,000.00	100%	6,499,972,653.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	468,281,200.00	100%	540,565,000.00	100%	605,432,000.00	100%	690,193,000.00	100%	814,429,000.00	100%	3,118,900,200.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	40,850,000.00	100%	19,740,000.00	100%	22,109,000.00	100%	25,204,000.00	100%	29,741,000.00	100%	137,644,000.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	900,000.00									100%	900,000.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	23,157,200.00	100%	23,356,700.00	100%	26,158,000.00	100%	29,821,000.00	100%	35,189,000.00	100%	137,681,900.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
f	Pengembangan dan pengawasan kearsipan	Persentase terlaksananya SDM kearsipan			100%	278,980,000.00	100%	312,456,000.00	100%	356,200,000.00	100%	420,316,000.00	100%	1,367,952,000.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
g	Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip	Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip			100%	551,899,000.00	100%	618,127,000.00	100%	704,665,000.00	100%	831,504,000.00	100%	2,706,195,000.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
h	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase peningkatan sarana pengelolaan dan penyimpanan dokumen	100%	293,094,200.00									100%	293,094,200.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
i	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase peningkatan SDM dan pemahaman perda kearsipan	100%	217,226,600.00									100%	217,226,600.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
j	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	Persentase peningkatan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip	100%	921,431,400.00									100%	921,431,400.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				78,153,137,003.65		80,806,089,375.00		114,471,953,098.00		113,737,530,844.00		118,687,422,188.00		505,856,132,508.65	
301. KELAUTAN DAN PERIKANAN				3,372,606,822.00		3,652,460,000.00		8,777,086,850.00		10,382,441,200.00		10,959,839,000.00		37,144,433,872.00	
30124. DINAS PERIKANAN				3,372,606,822.00		3,652,460,000.00		8,777,086,850.00		10,382,441,200.00		10,959,839,000.00		37,144,433,872.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	913,189,947.00	100%	1,039,903,100.00	100%	1,131,552,000.00	100%	1,188,129,600.00	100%	1,247,536,500.00	100%	5,520,311,147.00	Dinas Perikanan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	148,449,500.00	100%	62,229,000.00	100%	68,000,000.00	100%	71,400,000.00	100%	74,970,000.00	100%	425,048,500.00	Dinas Perikanan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	31,000,000.00	100%	16,200,000.00	100%	32,000,000.00	100%	33,600,000.00	100%	35,280,000.00	100%	148,080,000.00	Dinas Perikanan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	13,500,000.00	100%	13,500,000.00	100%	7,800,000.00	100%	8,190,000.00	100%	8,599,500.00	100%	51,589,500.00	Dinas Perikanan
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	130,151,000.00	100%	100,420,000.00	100%	155,000,000.00	100%	163,390,500.00	100%	171,560,100.00	100%	720,521,600.00	Dinas Perikanan
f	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya (%)	5%	595,273,400.00	12.50%	1,263,615,000.00	12.50%	2,620,766,850.00	12.50%	2,762,305,200.00	12.50%	2,900,420,550.00	50%	10,142,381,000.00	Dinas Perikanan
		Persentase Peningkatan Pembinaan Teknis Perikanan Budidaya (%)			13%		13%		13%		13%		52%		
g	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase peningkatan sarana prasarana nelayan (%)			3%	639,567,200.00	3%	3,321,320,000.00	3%	3,487,386,000.00	3%	3,661,755,300.00	12%	11,110,028,500.00	Dinas Perikanan
		Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Kelompok Nelayan dan Pokmaswas (%)			5%		5%		5%		5%		20%		
h	Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan (%)			5%	402,464,500.00	5%	769,923,000.00	5%	1,782,278,650.00	5%	1,921,242,600.00	20%	4,875,908,750.00	Dinas Perikanan
i	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan (%)			5%	114,561,200.00	5%	670,725,000.00	5%	885,761,250.00	5%	938,474,450.00	20%	2,609,521,900.00	Dinas Perikanan
		Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (%)			5%		5%		5%		5%		20%		

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
j	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	86.11 %	903,809,575.00									86.11 %	903,809,575.00	Dinas Perikanan
k	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	15.45 %	331,781,400.00									15.45 %	331,781,400.00	Dinas Perikanan
l	Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian Dan Konservasi Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	86.11 %	27,723,000.00									86.11 %	27,723,000.00	Dinas Perikanan
m	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	86.11 %	56,881,000.00									86.11 %	56,881,000.00	Dinas Perikanan
n	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan per kapita per tahun	5.03 %	220,848,000.00									5.03 %	220,848,000.00	Dinas Perikanan
302. PARIWISATA				25,073,808,435.00		21,036,689,375.00		26,493,123,348.00		20,671,525,795.00		21,553,951,205.00		114,829,098,158.00	
30218. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				25,073,808,435.00		21,036,689,375.00		26,493,123,348.00		20,671,525,795.00		21,553,951,205.00		114,829,098,158.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	954,414,275.00	100%	1,455,225,575.00	100%	1,349,817,522.00	100%	1,391,408,120.00	100%	1,429,886,941.00	100%	6,580,752,433.00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	657,597,600.00	100%	953,780,000.00	100%	781,326,000.00	100%	1,051,542,450.00	100%	1,104,119,577.00	100%	4,548,365,627.00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	186,300,000.00	100%	195,615,000.00	100%	205,395,750.00	100%	215,665,537.00	100%	802,976,287.00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	151,630,000.00	100%	165,000,000.00	100%	216,669,675.00	100%	224,938,425.00	100%	233,620,625.00	100%	991,858,725.00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	70,700,300.00	100%	82,383,800.00	100%	119,340,151.00	100%	77,098,300.00	100%	81,083,900.00	100%	430,606,451.00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
f	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Perkembangan Pemasaran Pariwisata	100%	4,904,690,060.00	100%	6,896,000,000.00	100%	3,775,800,000.00	100%	3,964,590,000.00	100%	4,162,819,500.00	100%	23,703,899,560.00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
g	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	100%	11,869,407,000.00	100%	6,533,000,000.00	100%	15,185,600,000.00	100%	8,801,650,000.00	100%	9,281,607,250.00	100%	51,671,264,250.00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
h	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata	100%	3,881,658,400.00	100%	1,615,000,000.00	100%	1,718,955,000.00	100%	1,804,902,750.00	100%	1,895,147,875.00	100%	10,915,664,025.00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
i	Program Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%	2,583,710,800.00	100%	3,150,000,000.00	100%	3,150,000,000.00	100%	3,150,000,000.00	100%	3,150,000,000.00	100%	15,183,710,800.00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
303. PERTANIAN				34,560,338,996.00		34,482,348,000.00		37,981,319,900.00		41,039,383,749.00		44,178,786,383.00		192,242,177,028.00	
30322. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				15,586,917,035.00		18,139,832,000.00		20,286,803,900.00		20,690,270,400.00		20,690,270,400.00		95,394,093,735.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,415,276,500.00	100%	1,912,691,500.00	100%	2,487,095,000.00	100%	2,487,095,000.00	100%	2,487,095,000.00	100%	10,789,253,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1,588,766,750.00	100%	1,250,580,000.00	100%	2,438,029,000.00	100%	2,438,029,000.00	100%	2,438,029,000.00	100%	10,153,433,750.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	112,521,750.00	100%	69,550,000.00	100%	85,000,000.00	100%	85,000,000.00	100%	85,000,000.00	100%	437,071,750.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)			100%	9,400,000.00	100%	9,400,000.00	100%	9,400,000.00	100%	9,400,000.00	100%	37,600,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100%	43,397,500.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	133,397,500.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
f	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan Terhadap Sasaran			90%	1,800,786,100.00	90%	1,979,544,500.00	90%	1,983,011,000.00	90%	1,983,011,000.00	90%	7,746,352,600.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
g	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura	Persentase Capaian Produksi Hortikultura Terhadap Sasaran			100%	1,110,252,500.00	100%	988,475,000.00	100%	988,475,000.00	100%	988,475,000.00	100%	4,075,677,500.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
h	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Capaian Produksi Tanaman Perkebunan Terhadap Sasaran			90%	2,903,724,900.00	90%	1,132,549,000.00	90%	1,132,549,000.00	90%	1,132,549,000.00	90%	6,301,371,900.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
i	Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase capaian produksi tembakau terhadap sasaran					20%	1,723,384,900.00	20%	1,723,384,900.00	20%	1,723,384,900.00	20%	5,170,154,700.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
j	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan	Persentase penyediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani pertanian/perkebunan					100%	8,644,979,000.00	100%	9,044,979,000.00	100%	9,044,979,000.00	100%	26,734,937,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
k	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pertanian	1%	6,748,976,700.00	1%	7,048,252,000.00						2%		13,797,228,700.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
l	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Yang Memenuhi Angka Kredit	20%	901,210,000.00	80%	961,197,500.00	80%	768,347,500.00	80%	768,347,500.00	80%	768,347,500.00	80%	4,167,450,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
m	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Keikutsertaan Promosi Atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	100%	413,681,500.00									100%	413,681,500.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
n	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase penanganan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)	0.10%	180,275,000.00									0.10%	180,275,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
o	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Ketersediaan sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	1%	3,038,006,850.00									1%	3,038,006,850.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
p	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah pengadaan gabah dan beras	155758 kg	1,188,201,985.00									155758 kg	1,188,201,985.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
q	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Persentase pembinaan peningkatan produktivitas hasil tanaman pangan yang difasilitasi			100%	1,030,000,000.00							100%	1,030,000,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
30323. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				18,973,421,961.00		16,342,516,000.00		17,694,516,000.00		20,349,113,349.00		23,488,515,983.00		96,848,083,293.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,329,840,011.00	100%	2,917,558,550.00	100%	2,944,546,343.00	100%	2,946,807,075.00	100%	2,974,065,419.00	100%	13,112,817,398.00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1,475,635,213.00	100%	924,651,000.00	100%	374,428,500.00	100%	375,800,643.00	100%	426,913,646.00	100%	3,577,429,002.00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	49,959,000.00	100%	140,999,000.00	100%	-	100%	100,000,000.00	100%		100%	290,958,000.00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	52,980,000.00	100%	114,045,000.00	100%	114,615,225.00	100%	115,188,301.00	100%	115,764,243.00	100%	512,592,769.00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Persentase ketersediaan bibit sapi perah di UPT (%)	30%		30%		30%		30%		30%		30%			
j	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan pengunjung pameran promosi produk hasil peternakan (%)	100%	1,699,605,887.00										100%	1,699,605,887.00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Cakupan data harga pasar produk hasil peternakan	100%											100%		
k	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase cakupan penerapan teknologi (%)	100%	1,482,098,000.00										100%	1,482,098,000.00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
304. PERDAGANGAN				4,474,104,400.00		7,701,425,000.00		24,806,425,000.00		25,069,104,600.00		25,204,426,600.00		87,255,485,600.00		
30425. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				4,474,104,400.00		7,701,425,000.00		24,806,425,000.00		25,069,104,600.00		25,204,426,600.00		87,255,485,600.00		
a	Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan	Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan perdagangan (%)			100%	2,194,725,000.00	100%	4,574,725,000.00	100%	4,687,404,600.00	100%	4,762,404,600.00	100%	16,219,259,200.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan perdagangan (%)			100%		100%		100%		100%		100%			
b	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (%)	100%	483,500,000.00										100%	483,500,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
c	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase kelancaran arus barang sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya (%)	100%	372,146,400.00										100%	372,146,400.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
d	Program Resi Gudang	Persentase pelaksanaan Program Resi Gudang (%)	100%	77,800,000.00										100%	77,800,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
g	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang			100%	5,506,700,000.00	100%	20,231,700,000.00	100%	20,381,700,000.00	100%	20,442,022,000.00	100%	66,562,122,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
h	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	100%	3,540,658,000.00										100%	3,540,658,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
305. PERINDUSTRIAN				10,672,278,350.65		13,933,167,000.00		15,827,167,000.00		15,947,167,000.00		16,118,547,000.00		72,498,326,350.65	
30525. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				10,672,278,350.65		13,933,167,000.00		15,827,167,000.00		15,947,167,000.00		16,118,547,000.00		72,498,326,350.65	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	991,499,691.00	100%	5,027,449,000.00	100%	5,027,449,000.00	100%	5,027,449,000.00	100%	5,039,449,000.00	100%	21,113,295,691.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	737,276,699.65	100%	47,900,000.00	100%	47,900,000.00	100%	47,900,000.00	100%	47,900,000.00	100%	928,876,699.65	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	26,500,000.00	100%	26,500,000.00	100%	26,500,000.00	100%	50,000,000.00	100%	129,500,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	36,280,000.00	100%	58,920,000.00	100%	58,920,000.00	100%	58,920,000.00	100%	65,000,000.00	100%	278,040,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	71,898,000.00	100%	66,398,000.00	100%	66,398,000.00	100%	66,398,000.00	100%	71,198,000.00	100%	342,290,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
f	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Agro	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Agro			100%	3,375,000,000.00							100%	3,375,000,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
g	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Non Agro	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Non Agro			100%	3,500,000,000.00							100%	3,500,000,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
h	Peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	100%	2,213,187,000.00									100%	2,213,187,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
i	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri Agro			100%	1,706,000,000.00			100%	90,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	1,996,000,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
j	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri Non Agro							100%	30,000,000.00	100%	45,000,000.00	100%	75,000,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
k	Program Pembinaan Industri	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Industri					100%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	750,000,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
l	Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau			100%	125,000,000.00							100%	125,000,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
m	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial	100%	4,211,753,960.00			100%	10,350,000,000.00	100%	10,350,000,000.00	100%	10,350,000,000.00	100%	35,261,753,960.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
n	Program Pengembangan IKM	Persentase pelaksanaan program pengembangan IKM	100%	372,000,000.00									100%	372,000,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
o	Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Persentase pengembangan pusat promosi sentra industri kecil dan menengah	100%	1,810,161,000.00									100%	1,810,161,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
p	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase pelaksanaan program pengembangan sentra industri potensial	100%	228,222,000.00									100%	228,222,000.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
306. TRANSMIGRASI				-		-		586,831,000.00		627,908,500.00		671,872,000.00		1,886,611,500.00	
30615. DINAS TENAGA KERJA				-		-		586,831,000.00		627,908,500.00		671,872,000.00		1,886,611,500.00	
a	Program Ketransmigrasian	Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi					100%	586,831,000.00	100%	627,908,500.00	100%	671,872,000.00	100%	1,886,611,500.00	Dinas Tenaga Kerja
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				240,901,178,383.00		264,196,018,558.71		275,150,921,611.00		281,595,187,482.00		291,781,789,978.00		1,353,625,096,012.71	
401. PERENCANAAN				8,424,782,140.00		8,118,540,000.00		6,922,901,027.00		6,879,524,500.00		7,507,328,500.00		37,853,076,167.00	
40127. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				8,424,782,140.00		8,118,540,000.00		6,922,901,027.00		6,879,524,500.00		7,507,328,500.00		37,853,076,167.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,099,452,250.00	100%	932,934,700.00	100%	1,083,712,500.00	100%	1,014,625,500.00	100%	1,019,925,500.00	100%	5,150,650,450.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	843,399,682.00	100%	636,468,800.00	100%	872,644,527.00	100%	355,880,000.00	100%	338,880,000.00	100%	3,047,273,009.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	48,898,000.00	100%	47,600,000.00	100%	44,625,000.00	100%	15,500,000.00	100%	35,600,000.00	100%	192,223,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	32,187,500.00	100%	26,000,000.00	100%	26,000,000.00	100%	47,000,000.00	100%	47,000,000.00	100%	178,187,500.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	47,337,000.00	100%	40,617,000.00	100%	24,170,000.00	100%	24,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	161,124,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penganggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
f	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah			100%	1,236,400,000.00								100%	1,236,400,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					100%	1,110,000,000.00	100%	1,190,000,000.00	100%	1,220,000,000.00	100%	3,520,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					100%		100%		100%		100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
g	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang ditetapkan dalam RKPD			90%	1,308,000,000.00	100%	1,168,815,000.00	100%	1,460,000,000.00	100%	1,510,000,000.00	100%	5,446,815,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	1,734,678,300.00	100%	1,565,978,000.00	100%	822,934,000.00	100%	842,519,000.00	100%	1,320,923,000.00	100%	6,287,032,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	80%		92%		93%		94%		95%		95%	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
i	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase keterpaduan perencanaan program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%	263,745,000.00	100%	1,238,284,000.00							100%	1,502,029,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Presentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD bidang perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya					100%	910,000,000.00	100%	990,000,000.00	100%	1,020,000,000.00	100%	2,920,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Presentase kesesuaian Renja terhadap RKPJ bidang perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya					100%		100%		100%		100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
j	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian	100%	1,606,994,172.00	100%	1,086,257,500.00							100%	2,693,251,672.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Perencanaan Pembangunan Ekonomi					100%	860,000,000.00	100%	940,000,000.00	100%	970,000,000.00	100%	2,770,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPJ Perencanaan Pembangunan Ekonomi					100%		100%		100%		100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
k	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan daerah	100%	685,101,600.00									100%	685,101,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
l	Program Kerja Sama Pembangunan	Persentase erjasama dunia usaha/lembaga dengan pemerintah daerah yang terfasilitasi	100%	276,846,200.00									100%	276,846,200.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
m	Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah yang disusun tepat waktu	100%	1,296,162,400.00									100%	1,296,162,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
n	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Cakupan keterpaduan program spasial dan non-spasial pengembangan kota-kota menengah dan besar	100%	202,034,600.00									100%	202,034,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
o	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur perencana	100%	287,945,436.00									100%	287,945,436.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
402. KEUANGAN				115,242,765,727.00		124,888,100,158.71		127,731,353,266.00		123,477,154,775.00		124,498,166,860.00		615,837,540,786.71	
40228. BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				87,690,779,920.00		88,958,728,158.71		95,161,870,562.00		95,670,615,893.00		96,289,536,148.00		463,771,530,681.71	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	63,271,789,812.00	100%	63,896,367,700.00	100%	72,144,966,562.00	100%	72,534,065,893.00	100%	73,030,947,228.00	100%	344,878,137,195.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	4,175,196,290.00	100%	7,068,100,258.71	100%	1,248,480,000.00	100%	1,273,449,600.00	100%	1,298,918,592.00	100%	15,064,144,740.71	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	5,754,132,500.00	100%	401,611,500.00	100%	6,000,000,000.00	100%	6,000,000,000.00	100%	6,000,000,000.00	100%	24,155,744,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	170,806,588.00	100%	386,310,000.00	100%	156,060,000.00	100%	159,181,200.00	100%	162,364,824.00	100%	1,034,722,612.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	807,915,468.00	100%	889,137,900.00	100%	774,240,000.00	100%	786,724,800.00	100%	799,459,296.00	100%	4,057,477,464.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
f	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	824,227,500.00	100%	997,383,500.00	100%	936,360,000.00	100%	955,087,200.00	100%	974,188,944.00	100%	4,687,247,144.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
g	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah	100%	2,607,954,077.00	100%	3,500,000,000.00	100%	2,796,960,000.00	100%	2,846,899,200.00	100%	2,897,837,184.00	100%	14,649,650,461.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
h	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah	100%	1,444,220,500.00	100%	3,128,500,000.00	100%	3,407,200,000.00	100%	3,417,604,000.00	100%	3,428,216,080.00	100%	14,825,740,580.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
i	Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)			100%	4,647,560,500.00	100%	3,972,797,000.00	100%	3,972,797,000.00	100%	3,972,797,000.00	100%	16,565,951,500.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
j	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah			100%	4,043,756,800.00	100%	3,724,807,000.00	100%	3,724,807,000.00	100%	3,724,807,000.00	100%	15,218,177,800.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
k	Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan peningkatan implementasi kebijakan akuntansi pemerintah daerah	98.17 %	654,247,400.00									98.17 %	654,247,400.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
l	Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	100%	1,521,541,300.00										100%	1,521,541,300.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
m	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	100%	6,458,748,485.00										100%	6,458,748,485.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
40229. BADAN PENDAPATAN DAERAH				27,551,985,807.00		35,929,372,000.00		32,569,482,704.00		27,806,538,882.00		28,208,630,712.00		152,066,010,105.00		
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	2,903,855,818.00	100%	7,973,705,750.00	100%	8,307,398,770.00	100%	4,557,987,850.00	100%	4,752,752,429.00	100%	28,495,700,617.00	Badan Pendapatan Daerah	
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	3,772,795,370.00	100%	6,920,412,550.00	100%	3,200,235,850.00	100%	3,370,453,669.00	100%	3,435,976,353.00	100%	20,699,873,792.00	Badan Pendapatan Daerah	
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	316,958,600.00	100%	389,000,000.00	100%	440,000,000.00	100%	537,287,500.00	100%	554,651,875.00	100%	2,237,897,975.00	Badan Pendapatan Daerah	
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	2,785,000.00	100%	196,877,200.00	100%	100,000,000.00	100%	173,643,750.00	100%	182,235,937.00	100%	655,541,887.00	Badan Pendapatan Daerah	
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	185,389,950.00	100%	60,236,000.00	100%	173,976,000.00	100%	178,976,000.00	100%	183,976,000.00	100%	782,553,950.00	Badan Pendapatan Daerah	
f	Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD	Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB			100%	2,278,810,000.00	100%	2,278,810,000.00	100%	2,182,064,000.00	100%	2,182,064,000.00	100%	8,921,748,000.00	Badan Pendapatan Daerah	
g	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan	Tingkat Layanan PBB			100%	7,190,742,000.00	100%	7,149,473,584.00	100%	7,180,624,363.00	100%	7,213,332,681.00	100%	28,734,172,628.00	Badan Pendapatan Daerah	
h	Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah	Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah	100%	18,650,262,369.00	100%	5,151,400,000.00	100%	5,151,400,000.00	100%	3,857,313,250.00	100%	3,935,452,937.00	100%	36,745,828,556.00	Badan Pendapatan Daerah	
i	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB			100%	5,768,188,500.00	100%	5,768,188,500.00	100%	5,768,188,500.00	100%	5,768,188,500.00	100%	23,072,754,000.00	Badan Pendapatan Daerah	
j	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1,719,938,700.00									100%	1,719,938,700.00	Badan Pendapatan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				7,281,418,268.00		7,805,794,000.00		12,334,491,000.00		13,109,005,000.00		14,297,513,000.00		54,828,221,268.00	
40330. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				7,281,418,268.00		7,805,794,000.00		12,334,491,000.00		13,109,005,000.00		14,297,513,000.00		54,828,221,268.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	815,445,405.00	100%	637,076,150.00	100%	957,883,000.00	100%	1,036,630,000.00	100%	1,121,979,000.00	100%	4,569,013,555.00	Badan Kepegawaian Daerah
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	570,185,216.00	100%	861,451,850.00	100%	609,374,000.00	100%	700,340,000.00	100%	808,100,000.00	100%	3,549,451,066.00	Badan Kepegawaian Daerah
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	79,500,000.00	100%	55,800,000.00	100%	75,525,000.00			100%	75,525,000.00	100%	286,350,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	90,435,000.00	100%	83,000,000.00	100%	383,000,000.00	100%	421,299,000.00	100%	463,425,000.00	100%	1,441,159,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	58,016,750.00	100%	84,832,000.00	100%	151,307,000.00	100%	166,435,000.00	100%	183,079,000.00	100%	643,669,750.00	Badan Kepegawaian Daerah
f	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan dengan kategori memuaskan	100%	1,277,500,000.00	75.34 %	2,791,594,000.00							75.34 %	4,069,094,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional			100%									100%	
g	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengembangan sumberdaya aparatur	100%	2,871,168,897.00	100%	1,845,040,000.00							100%	4,716,208,897.00	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur yang ditangani			100%									100%	
h	Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan	Persentase pemrosesan keputusan mutasi jabatan, pelantikan dan kenaikan pangkat			100%	655,000,000.00							100%	655,000,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
i	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan					20.45%	5,465,250,000.00	22.73%	5,483,750,000.00	29.55%	6,263,750,000.00	73%	17,212,750,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase aparatur yang lulus Diklat Prajabatan dengan kategori memuaskan					26.70%		26.53%		26.53%		80%		

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional					29.10%		35.37%			35.53%		100%		
j	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur					31.09%	2,417,352,000.00	31.87%	2,828,271,000.00	37.05%	2,692,145,000.00	100%	7,937,768,000.00	Badan Kepegawaian Daerah	
		Persentase Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur					33.33%		33.33%			33.33%	100%			
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur yang ditangani					33.33%		33.33%			33.33%	100%			
k	Program Administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan	Persentase pemrosesan mutasi jabatan, kenaikan pangkat dan Sasaran Kerja Pegawai					31.20%	1,348,800,000.00	34.88%	1,473,680,000.00	33.92%	1,611,050,000.00	100%	4,433,530,000.00	Badan Kepegawaian Daerah	
l	Program Peningkatan dan pengembangan data serta informasi aparatur	Persentase pemeliharaan data dan informasi kepegawaian					31.21%	926,000,000.00	34.54%	998,600,000.00	32.25%	1,078,460,000.00	98%	3,003,060,000.00	Badan Kepegawaian Daerah	
		Persentase data dan informasi kepegawaian yang valid			100%	792,000,000.00							100%	792,000,000.00	Badan Kepegawaian Daerah	
m	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi manajerial	67.94 %	1,519,167,000.00									67.94 %	1,519,167,000.00	Badan Kepegawaian Daerah	
404. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1,386,578,040.00	1,945,088,000.00	2,567,655,950.00	2,824,421,545.00	2,743,000,500.00	11,466,744,035.00							
40433. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1,386,578,040.00	1,945,088,000.00	2,567,655,950.00	2,824,421,545.00	2,743,000,500.00	11,466,744,035.00							
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	286,331,870.00	100 %	475,683,700.00	100 %	572,379,450.00	100 %	629,617,395.00	100 %	692,575,500.00	100 %	2,656,587,915.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan	
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	45,982,500.00	100%	152,688,700.00	100%	184,754,000.00	100%	203,229,400.00	100%	116,702,000.00	100%	703,356,600.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan	
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)					100%	22,400,000.00	100%	24,640,000.00				47,040,000.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan	
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	11,320,000.00	100%	18,120,000.00	100%	153,005,000.00	100%	168,305,500.00	100%	185,136,000.00	100%	535,886,500.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan	
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	30,650,600.00	100%	56,463,700.00	100%	67,290,000.00	100%	74,019,000.00	100%	81,420,000.00	100%	309,843,300.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan	

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Persentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun			44%	285,312,000.00	46%	345,227,500.00	48%	379,750,250.00	50%	417,725,000.00	50%	1,428,014,750.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
g	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Masyarakat	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang			78%	183,000,000.00	79%	233,000,000.00	80%	256,300,000.00	81%	281,929,000.00	81%	954,229,000.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
h	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang			78%	183,000,000.00	79%	233,000,000.00	80%	256,300,000.00	81%	281,929,000.00	81%	954,229,000.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
i	Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang			78%	183,000,000.00	79%	233,000,000.00	80%	256,300,000.00	81%	281,929,000.00	81%	954,229,000.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
j	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah			78%	224,819,900.00	79%	290,600,000.00	80%	319,660,000.00	81%	121,726,000.00	81%	956,805,900.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
k	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang			78%	183,000,000.00	79%	233,000,000.00	80%	256,300,000.00	81%	281,929,000.00	81%	954,229,000.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
l	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase laporan keuangan semesteran sesuai aturan, akurat dan tepat waktu	100%	160,743,770.00									100%	160,743,770.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
m	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen penguatan SIDA tahap pemantapan pada klaster apel di Kecamatan Poncokusumo disusun tepat waktu	100%	129,021,800.00									100%	129,021,800.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
n	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase kajian yang tersusun tepat waktu	100%	722,527,500.00									100%	722,527,500.00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
405. PENGAWASAN					8,084,712,300.00		9,180,220,000.00		13,399,661,250.00		15,274,957,800.00		17,684,943,600.00		63,624,494,950.00
40501. INSPEKTORAT					8,084,712,300.00		9,180,220,000.00		13,399,661,250.00		15,274,957,800.00		17,684,943,600.00		63,624,494,950.00
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	576,995,000.00	100%	1,012,851,750.00	100%	1,201,781,250.00	100%	1,366,995,800.00	100%	1,532,645,600.00	100%	5,691,269,400.00	Inspektorat

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1,702,653,800.00	100%	1,822,379,000.00	100%	1,405,000,000.00	100%	1,340,000,000.00	100%	1,815,000,000.00	100%	8,085,032,800.00	Inspektorat
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	158,930,000.00		55,000,000.00		6,000,000.00				219,930,000.00	Inspektorat
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	2,450,000.00	100%	9,310,000.00	100%	11,500,000.00	100%	12,500,000.00	100%	13,600,000.00	100%	49,360,000.00	Inspektorat
e	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja			75%	1,257,005,000.00	100%	2,400,000,000.00	100%	2,450,000,000.00	100%	2,500,000,000.00	100%	8,607,005,000.00	Inspektorat
f	Program Pencegahan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB minimal B			20%	54,945,000.00	20%	94,750,000.00	20%	94,750,000.00	29%	94,750,000.00	89%	339,195,000.00	Inspektorat
g	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Daerah Inspektorat Daerah	86%	5,298,348,750.00	87%	4,198,057,500.00	88%	7,081,630,000.00	89%	8,704,712,000.00	89%	10,228,948,000.00	89%	35,511,696,250.00	Inspektorat
h	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	16%	52,127,000.00	17%	163,828,000.00	17%	350,000,000.00	17%	400,000,000.00	17%	500,000,000.00	84%	1,465,955,000.00	Inspektorat
i	Program Peraturan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditata	8%	452,137,750.00	25%	502,913,750.00	17%	800,000,000.00	17%	900,000,000.00	17%	1,000,000,000.00	84%	3,655,051,500.00	Inspektorat
406. FUNGSI LAINNYA				100,480,921,908.00		112,258,276,400.00		112,194,859,118.00		120,030,123,862.00		125,050,837,518.00		570,015,018,806.00	
40631. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				5,296,520,402.00		5,111,784,000.00		7,817,315,200.00		8,619,119,338.00		9,501,335,940.00		36,346,074,880.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	740,438,830.00	100%	887,366,800.00	100%	1,522,170,400.00	100%	1,674,464,300.00	100%	1,842,234,740.00	100%	6,666,675,070.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	222,311,862.00	100%	176,543,700.00	100%	332,940,400.00	100%	366,234,538.00	100%	402,858,700.00	100%	1,500,889,200.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	26,198,700.00	100%	48,000,000.00	100%	52,800,000.00	100%	58,100,000.00	100%	63,888,000.00	100%	248,986,700.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	10,685,000.00	100%	20,890,000.00	100%	22,979,000.00	100%	25,280,000.00	100%	27,808,000.00	100%	107,642,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	33,823,100.00	100%	56,795,500.00	100%	129,173,400.00	100%	142,452,500.00	100%	156,698,500.00	100%	518,943,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
f	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			79%	1,140,488,000.00	81%	1,579,990,000.00	83%	1,764,494,000.00	85%	1,960,944,000.00	85%	6,445,916,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
g	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)			81%	633,700,000.00	85%	1,449,462,000.00	87%	1,586,514,000.00	90%	1,745,166,000.00	90%	5,414,842,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
h	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana (%)		2,494,800,060.00	100%	2,148,000,000.00	100%	2,727,800,000.00	100%	3,001,580,000.00	100%	3,301,738,000.00	100%	13,673,918,060.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
i	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase penanganan penanggulangan bencana	100%	88,800,000.00									100%	88,800,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
j	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase pembinaan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	798,163,650.00									100%	798,163,650.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
k	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana Dan Prasarana Pasca Bencana	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana	100%	633,699,200.00									100%	633,699,200.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
l	Program Mitigasi Bencana	Persentase Mitigasi Bencana	100%	197,600,000.00									100%	197,600,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
m	Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Persentase program peningkatan pelayanan kebencanaan	100%	50,000,000.00									100%	50,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
40632. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1,460,355,839.00		2,551,664,000.00		2,647,320,000.00		3,615,912,050.00		4,083,474,755.00		14,358,726,644.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	546,228,839.00	100%	671,433,000.00	100%	530,547,000.00	100%	1,299,833,000.00	100%	1,433,736,200.00	100%	4,481,778,039.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	166,140,000.00	100%	128,951,000.00	100%	197,980,000.00	100%	219,226,000.00	100%	237,949,000.00	100%	950,246,000.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	66,500,000.00	100%	68,150,000.00	100%	69,965,000.00	100%	210,615,000.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	5,537,000.00	100%	5,583,000.00	100%	106,673,000.00	100%	115,091,000.00	100%	236,851,000.00	100%	469,735,000.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
e	Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah	Persentase wilayah yang terpelihara kantrantibmas dan dalam pencegahan tindak kriminal			100%	442,261,000.00	100%	540,410,500.00	100%	587,880,550.00	100%	646,668,605.00	100%	2,217,220,655.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
f	Program Pendidikan Politik	Persentase peserta pendidikan politik			100%	601,068,000.00	100%	561,605,000.00	100%	617,765,500.00	100%	679,542,350.00	100%	2,459,980,850.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
g	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan	100%	388,540,000.00	100%	315,435,000.00	100%	353,254,000.00	100%	388,580,000.00	100%	427,438,000.00	100%	1,873,247,000.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
h	Prograam Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase forum-forum dan organisasi organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan			100%	383,933,000.00	100%	290,350,500.00	100%	319,386,000.00	100%	351,324,600.00	100%	1,344,994,100.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
i	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase pembinaan kesadaran ketahanan ekonomi masyarakat terfasilitasi	100%	55,330,000.00									100%	55,330,000.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
j	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase kegiatan kantrantibmas dalam pencegahan tindak kriminal yang terfasilitasi	100%	170,350,000.00									100%	170,350,000.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
k	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peserta pendidikan politik	100%	125,230,000.00									100%	125,230,000.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
40634. SEKRETARIAT DPRD				37,614,954,995.00		51,976,692,400.00		44,819,706,817.00		47,045,490,570.00		49,382,565,410.00		230,839,410,192.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	6,392,168,218.00	100%	7,923,301,200.00	100%	7,948,691,633.00	100%	8,336,126,264.00	100%	8,742,932,526.00	100%	39,343,219,841.00	Sekretariat DPRD
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2,337,745,272.00	100%	2,163,063,600.00	100%	2,845,074,638.00	100%	2,987,328,371.00	100%	3,136,694,789.00	100%	13,469,906,670.00	Sekretariat DPRD
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	510,644,000.00	100%	1,528,150,000.00	100%	694,575,000.00	100%	729,303,750.00	100%	765,768,938.00	100%	4,228,441,688.00	Sekretariat DPRD

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	545,024,419.00	100%	648,205,000.00	100%	847,629,232.00	100%	890,010,694.00	100%	934,511,229.00	100%	3,865,380,574.00	Sekretariat DPRD
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	294,827,800.00	100%	268,132,700.00	100%	937,971,960.00	100%	979,668,918.00	100%	1,023,452,724.00	100%	3,504,054,102.00	Sekretariat DPRD
f	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD (%)	100%	26,596,409,912.00	100%	38,232,968,700.00	100%	30,348,895,495.00	100%	31,866,340,271.00	100%	33,459,657,285.00	100%	160,504,271,663.00	Sekretariat DPRD
		Persentase Layanan Fasilitas Raperda Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
g	Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media	Persentase Kerjasama dengan Mass Media (%)	100%	567,736,000.00	100%	936,752,000.00	100%	693,019,152.00	100%	727,670,110.00	100%	764,053,616.00	100%	3,689,230,878.00	Sekretariat DPRD
h	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan (%)	100%	370,399,374.00	100%	276,119,200.00	100%	503,849,707.00	100%	529,042,192.00	100%	555,494,303.00	100%	2,234,904,776.00	Sekretariat DPRD
40638. BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN				1,909,466,400.00		2,136,100,000.00		2,799,694,170.00		3,177,977,127.00		3,617,884,646.00		13,641,122,343.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	541,966,300.00	100%	608,954,000.00	100%	619,571,620.00	100%	680,878,000.00	100%	759,022,800.00	100%	3,210,392,720.00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	55,420,000.00	100%	94,905,000.00	100%	122,292,875.00	100%	133,287,000.00	100%	145,926,250.00	100%	551,831,125.00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	18,000,000.00	100%	20,700,000.00	100%	23,805,000.00	100%	27,375,000.00	100%	29,000,000.00	100%	118,880,000.00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	28,375,000.00	100%	32,000,000.00	100%	36,800,000.00	100%	42,320,000.00	100%	48,600,000.00	100%	188,095,000.00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	40,300,000.00	100%	23,656,000.00	100%	47,935,000.00	100%	52,434,000.00	100%	57,400,000.00	100%	221,725,000.00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
f	Program Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan			100%	1,355,885,000.00	100%	1,949,289,675.00	100%	2,241,683,127.00	100%	2,577,935,596.00	100%	8,124,793,398.00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
g	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penataan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah	100%	1,137,608,200.00										100%	1,137,608,200.00	Bagian Hukum
h	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase kepastian hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia	100%	203,500,000.00										100%	203,500,000.00	Bagian Hukum
40640. BAGIAN ORGANISASI				1,834,064,400.00		1,743,528,000.00		1,743,528,000.00		1,832,603,800.00		1,818,264,800.00		8,971,989,000.00		
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	205,897,000.00	100%	365,799,800.00	100%	389,378,000.00	100%	391,453,800.00	100%	397,114,800.00	100%	1,749,643,400.00	Bagian Organisasi	
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	48,931,400.00	100%	48,300,000.00	100%	51,500,000.00	100%	92,500,000.00	100%	57,500,000.00	100%	298,731,400.00	Bagian Organisasi	
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	2,975,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,500,000.00	100%	3,500,000.00	100%	12,975,000.00	Bagian Organisasi	
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	3,150,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,150,000.00	100%	3,150,000.00	100%	3,150,000.00	100%	15,600,000.00	Bagian Organisasi	
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3,584,000.00	100%	2,525,000.00	100%	2,500,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	14,609,000.00	Bagian Organisasi	
f	Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah			28.78%	1,320,928,200.00	28.78%	1,294,000,000.00	82.92%	1,339,000,000.00	100%	1,354,000,000.00	100%	5,307,928,200.00	Bagian Organisasi	
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B			79.26%		79.26%		100%		100%		100%			
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK/SKJ			100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik			14%		14%		17%		19%		19%			
g	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan peraturan perundang-undangan yang tertata	60%	253,938,800.00									60%	253,938,800.00	Bagian Organisasi	
h	Program Penataan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase kebijakan sistem dan prosedur yang disempurnakan	48.81 %	140,244,000.00									48.81 %	140,244,000.00	Bagian Organisasi	
i	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan kualitas dokumen perencanaan	48.81%	248,945,800.00									48.81%	248,945,800.00	Bagian Organisasi	

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
j	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase peningkatan jumlah yang menyusun data Anjab/ABK	22.93%	231,221,000.00									22.93%	231,221,000.00	Bagian Organisasi
k	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase teknologi informasi yang dimanfaatkan	66.67 %	262,905,100.00									66.67 %	262,905,100.00	Bagian Organisasi
l	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	50.31%	435,247,300.00									50.31%	435,247,300.00	Bagian Organisasi
40641. BAGIAN PEREKONOMIAN				1,726,567,208.00		1,473,224,000.00		2,091,325,435.00		2,275,446,173.00		2,331,143,777.00		9,897,706,593.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	233,756,370.00	100%	333,067,000.00	100%	248,231,008.00	100%	257,392,614.00	100%	267,470,380.00	100%	1,339,917,372.00	Bagian Perekonomian
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	104,877,172.00	100%	44,063,000.00	100%	57,330,610.00	100%	60,553,361.00	100%	64,097,948.00	100%	330,922,091.00	Bagian Perekonomian
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	10,130,000.00	100%	13,600,000.00	100%	14,400,000.00	100%	14,400,000.00	100%	14,400,000.00	100%	66,930,000.00	Bagian Perekonomian
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	27,780,000.00	100%	102,685,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	175,465,000.00	Bagian Perekonomian
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3,562,000.00			100%	7,425,230.00	100%	9,267,753.00	100%	10,194,528.00	100%	30,449,511.00	Bagian Perekonomian
f	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian			25%	829,809,000.00	25%	1,598,938,587.00	25%	1,768,832,445.00	25%	1,809,980,921.00	25%	6,007,560,953.00	Bagian Perekonomian
g	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai			100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	600,000,000.00	Bagian Perekonomian
h	Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Cakupan Pengawasan Distribusi LPG Tabung 3 Kg sebagai salah satu barang bersubsidi	50%	749,234,866.00									50%	749,234,866.00	Bagian Perekonomian
i	Pogram Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terlaksananya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	50%	197,034,000.00									50%	197,034,000.00	Bagian Perekonomian

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
j	Program Pembinaan Industri Rokok dan tembakau	Persentase tersampainya informasi ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang cukai	50%	196,900,800.00										50%	196,900,800.00	Bagian Perekonomian
k	Program Peningkatan pelayanan Publik	Persentase capaian program penfawasan dan pengendalian teknis	50%	203,292,000.00										50%	203,292,000.00	Bagian Perekonomian
40642. BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA				1,079,248,881.00		1,073,384,000.00		1,304,919,050.00		1,435,410,925.00		1,578,952,125.00		6,471,914,981.00		
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	394,825,369.00	100%	451,499,450.00	100%	421,268,250.00	100%	463,395,025.00	100%	509,734,575.00	100%	2,240,722,669.00	Bagian Administrasi Kerjasama	
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	51,601,140.00	100%	57,284,050.00	100%	113,371,450.00	100%	124,708,600.00	100%	137,179,500.00	100%	484,144,740.00	Bagian Administrasi Kerjasama	
c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	480,000.00	100%	5,000,000.00	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000.00	100%	13,310,000.00	100%	41,890,000.00	Bagian Administrasi Kerjasama	
d	Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama			80%	559,600,500.00	80%	759,279,350.00	80%	835,207,300.00	80%	918,728,050.00	80%	3,072,815,200.00	Bagian Administrasi Kerjasama	
e	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dengan Wilayah Perbatasan, Daerah Lain, Badan Usaha dan Lembaga dari dalam dan luar negeri	5%	632,342,372.00										5%	632,342,372.00	Bagian Administrasi Kerjasama
40643. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				1,753,905,500.00		1,936,736,000.00		2,032,456,700.00		2,530,284,050.00		2,240,783,450.00		10,494,165,700.00		
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	349,820,800.00	100%	320,173,800.00	100%	387,827,100.00	100%	407,218,900.00	100%	427,580,050.00	100%	1,892,620,650.00	Bagian Administrasi Pembangunan	
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	72,884,300.00	100%	172,136,000.00	100%	93,541,050.00	100%	494,422,400.00	100%	103,128,450.00	100%	936,112,200.00	Bagian Administrasi Pembangunan	
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	17,400,000.00	100%	18,270,000.00	100%	19,183,500.00	100%	20,142,600.00	100%	74,996,100.00	Bagian Administrasi Pembangunan	

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	259,034,500.00	100%	245,950,000.00	100%	292,688,550.00	100%	307,322,900.00	100%	322,689,200.00	100%	1,427,685,150.00	Bagian Administrasi Pembangunan
e	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan	Cakupan peningkatan kualitas administrasi pembangunan			100%	1,066,338,000.00	100%	1,240,130,000.00	100%	1,302,136,350.00	100%	1,367,243,150.00	100%	4,975,847,500.00	Bagian Administrasi Pembangunan
f	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Terpenuhiya Pengumpulan Data Informasi untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	215,699,400.00									100%	215,699,400.00	Bagian Administrasi Pembangunan
g	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	770,851,400.00	100%	114,738,200.00							100%	885,589,600.00	Bagian Administrasi Pembangunan
h	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Proyek Pembangunan	100%	85,615,100.00									100%	85,615,100.00	Bagian Administrasi Pembangunan
40644. BAGIAN UMUM				9,622,825,600.00		12,982,116,000.00		13,371,579,480.00		13,772,726,865.00		14,185,908,672.00		63,935,156,617.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	8,782,981,000.00	100%	749,415,000.00	100%	771,897,450.00	100%	795,054,374.00	100%	818,906,005.00	100%	11,918,253,829.00	Bagian Umum
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	833,704,600.00	100%	170,450,000.00	100%	175,563,500.00	100%	180,830,405.00	100%	186,255,319.00	100%	1,546,803,824.00	Bagian Umum
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	31,750,000.00	100%	32,702,500.00	100%	33,683,575.00	100%	34,694,082.00	100%	132,830,157.00	Bagian Umum
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	4,940,000.00	100%	22,950,000.00	100%	23,638,500.00	100%	24,347,655.00	100%	25,078,085.00	100%	100,954,240.00	Bagian Umum
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	1,200,000.00	100%	44,050,000.00	100%	45,371,500.00	100%	46,732,645.00	100%	48,134,624.00	100%	185,488,769.00	Bagian Umum
f	Program Pelayanan Umum	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Umum (%)			100%	11,963,501,000.00	100%	12,322,406,030.00	100%	12,692,078,211.00	100%	13,072,840,557.00	100%	50,050,825,798.00	Bagian Umum

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40645. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL				7,282,512,977.00		2,657,408,000.00		3,000,000,000.00		4,842,994,820.00		5,139,773,188.00		22,922,688,985.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	434,821,293.00	100%	426,898,000.00	100%	627,325,000.00	100%	659,175,570.00	100%	662,138,000.00	100%	2,810,357,863.00	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	77,946,800.00	100%	48,325,000.00	100%	48,325,000.00	100%	50,741,250.00	100%	53,278,313.00	100%	278,616,363.00	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	65,964,000.00	100%	87,780,000.00	100%	87,780,000.00	100%	92,169,000.00	100%	96,777,450.00	100%	430,470,450.00	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	98.92 %	15,960,000.00	100%	13,650,000.00	100%	13,650,000.00	100%	14,332,500.00	100%	15,049,125.00	100%	72,641,625.00	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	2,500,000.00	100%	3,100,000.00	100%	3,100,000.00	100%	3,255,000.00	100%	3,417,750.00	100%	15,372,750.00	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
f	Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Kegiatan KDH/WKDH			90%	2,077,655,000.00	90%	2,219,820,000.00	90%	4,023,321,500.00	90%	4,309,112,550.00	90%	12,629,909,050.00	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
g	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Prosentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	98.16 %	1,966,110,593.00									98.16 %	1,966,110,593.00	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
h	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Tersebar nya informasi di masyarakat, meningkat nya/terjalin nya hubungan kemitraan yang baik dengan media massa	100%	2,658,665,750.00									100%	2,658,665,750.00	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
i	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase perbaikan sistem administrasi kearsipan	100%	123,325,000.00									100%	123,325,000.00	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
j	Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	Persentase Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	100%	1,937,219,541.00									100%	1,937,219,541.00	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
40646. BAGIAN TATA USAHA				4,144,783,100.00		2,909,792,000.00		3,358,766,800.00		3,482,846,500.00		3,572,914,700.00		17,469,103,100.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	2,747,106,300.00	100%	849,440,400.00	100%	926,001,300.00	100%	1,010,600,100.00	100%	1,094,739,200.00	100%	6,627,887,300.00	Bagian Tata Usaha

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	95%	1,242,380,700.00	97%	283,812,000.00	98%	519,990,000.00	98%	416,167,500.00	100%	297,365,000.00	100%	2,759,715,200.00	Bagian Tata Usaha
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	95%	22,500,000.00	97%	15,000,000.00	97%	25,000,000.00	97%	25,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	117,500,000.00	Bagian Tata Usaha
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	110,253,100.00	100%	6,105,000.00	100%	10,250,000.00	100%	13,525,000.00	100%	15,750,000.00	100%	155,883,100.00	Bagian Tata Usaha
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	22,543,000.00	100%	9,964,000.00	100%	10,975,000.00	100%	12,000,000.00	100%	13,200,000.00	100%	68,682,000.00	Bagian Tata Usaha
f	Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien (%)			98%	1,745,470,600.00	98%	1,866,550,500.00	100%	2,005,553,900.00	100%	2,121,860,500.00	100%	7,739,435,500.00	Bagian Tata Usaha
40647. BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL				2,576,781,000.00		1,250,140,000.00		2,558,207,000.00		2,686,940,000.00		2,821,510,000.00		11,893,578,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	241,883,500.00	100%	273,716,000.00	100%	281,157,000.00	100%	295,150,000.00	100%	310,255,000.00	100%	1,402,161,500.00	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	90%	27,900,000.00	90%	35,725,000.00	90%	70,350,000.00	90%	74,700,000.00	90%	78,400,000.00	90%	287,075,000.00	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	21,975,000.00	100%	9,744,000.00	100%	25,200,000.00	100%	26,450,000.00	100%	27,750,000.00	100%	111,119,000.00	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100%	9,855,000.00	100%	10,400,000.00	100%	11,000,000.00	100%	11,620,000.00	100%	42,875,000.00	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental
e	Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental	Presentase pelayanan administrasi kemasyarakatan dan pembinaan mental			100%	921,100,000.00	100%	2,171,100,000.00	100%	2,279,640,000.00	100%	2,393,485,000.00	100%	7,765,325,000.00	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental
f	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase partisipasi lembaga / tokoh agama dalam pembinaan keagamaan	100%	1,697,092,500.00									100%	1,697,092,500.00	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
g	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Cakupan pemuda yang memiliki ketahanan moral dengan mengamalkan nilai-nilai sosial, budaya dan agama	100%	294,340,000.00									100%	294,340,000.00	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental
h	Program Pendidikan Non Formal	Cakupan tenaga pendidik lembaga pendidikan non formal keagamaan dapat mengelola dan mengembangkan lembaga	100%	293,590,000.00									100%	293,590,000.00	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental
40648. BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM				851,827,056.00		1,053,528,000.00		1,044,722,350.00		1,097,004,200.00		1,152,104,350.00		5,199,185,956.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	260,117,343.00	100%	393,116,500.00	100%	236,510,000.00	100%	253,171,000.00	100%	266,433,100.00	100%	1,409,347,943.00	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	177,306,013.00	100%	100,202,500.00	100%	55,055,000.00	100%	60,560,500.00	100%	66,616,550.00	100%	459,740,563.00	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	8,000,000.00	100%	10,800,000.00	100%	11,500,000.00	100%	12,300,000.00	100%	12,500,000.00	100%	55,100,000.00	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	53,565,000.00	100%	71,240,000.00	100%	82,550,000.00	100%	91,205,000.00	100%	99,525,000.00	100%	398,085,000.00	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	4,880,000.00	100%	4,974,000.00	100%	10,150,000.00	100%	10,855,000.00	100%	11,570,500.00	100%	42,429,500.00	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
f	Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Direkomendasikan			100%	473,195,000.00	100%	648,957,350.00	100%	668,912,700.00	100%	695,459,200.00	100%	2,486,524,250.00	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
g	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Presentase cakupan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	100%	206,899,700.00									100%	206,899,700.00	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
h	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	100%	59,318,200.00									100%	59,318,200.00	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
i	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase cakupan penerapan teknologi perkebunan	100%	34,525,800.00									100%	34,525,800.00	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
j	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase cakupan peningkatan produksi hasil peternakan	100%	47,215,000.00									100%	47,215,000.00	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
40649. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT				1,795,921,650.00		1,256,932,000.00		1,475,729,876.00		1,485,779,204.00		1,494,633,465.00		7,508,996,195.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	303,525,600.00	100%	428,555,900.00	100%	403,098,100.00	100%	411,155,241.00	100%	417,818,096.00	100%	1,964,152,937.00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	60,952,850.00	100%	50,210,000.00	100%	39,921,876.00	100%	41,914,063.00	100%	44,105,469.00	100%	237,104,258.00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	5,139,200.00	100%	5,877,600.00	100%	8,076,000.00	100%	8,076,000.00	100%	8,076,000.00	100%	35,244,800.00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)					100%	8,000,000.00	100%	8,000,000.00	100%	8,000,000.00	100%	24,000,000.00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	69,338,600.00	100%	3,012,100.00	100%	93,182,500.00	100%	93,182,500.00	100%	93,182,500.00	100%	351,898,200.00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
f	Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat			75%	769,276,400.00	90%	923,451,400.00	90%	923,451,400.00	90%	923,451,400.00	90%	3,539,630,600.00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
g	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase peningkatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	50%	353,067,400.00									50%	353,067,400.00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
h	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat	50%	606,191,400.00									50%	606,191,400.00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
j	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	50%	120,865,800.00									50%	120,865,800.00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
j	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase peningkatan pengembangan lingkungan sehat	50%	214,012,200.00									50%	214,012,200.00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
k	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sosialisasi peraturan	100%	62,828,600.00									100%	62,828,600.00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40650. KECAMATAN PUJON				499,836,700.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,559,836,700.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	303,495,700.00	100%	365,296,000.00	100%	365,296,000.00	100%	365,296,000.00	100%	365,296,000.00	100%	1,764,679,700.00	Kecamatan Pujon
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	120,009,000.00	100%	79,645,000.00	100%	79,645,000.00	100%	79,645,000.00	100%	79,645,000.00	100%	438,589,000.00	Kecamatan Pujon
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	8,320,000.00											Kecamatan Pujon
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1,402,000.00	100%	2,400,000.00	100%	2,400,000.00	100%	2,400,000.00	100%	2,400,000.00	100%	11,002,000.00	Kecamatan Pujon
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu (%)	100%	4,810,000.00	100%	5,605,000.00	100%	5,605,000.00	100%	5,605,000.00	100%	5,605,000.00	100%	27,230,000.00	Kecamatan Pujon
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	62,054,000.00	100%	62,054,000.00	100%	62,054,000.00	100%	62,054,000.00	100%	248,216,000.00	Kecamatan Pujon
g	Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	8,550,000.00									100%	8,550,000.00	Kecamatan Pujon
h	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	18,250,000.00									100%	18,250,000.00	Kecamatan Pujon
i	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	100%	35,000,000.00									100%	35,000,000.00	Kecamatan Pujon
40651. KECAMATAN NGANTANG				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	323,846,000.00	100%	355,540,000.00	100%	355,540,000.00	100%	355,540,000.00	100%	355,540,000.00	100%	1,746,006,000.00	Kecamatan Ngantang
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	63,164,000.00	100%	59,004,000.00	100%	59,004,000.00	100%	59,004,000.00	100%	59,004,000.00	100%	299,180,000.00	Kecamatan Ngantang
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	10,660,000.00	100%	3,720,000.00	100%	3,720,000.00	100%	3,720,000.00	100%	3,720,000.00	100%	25,540,000.00	Kecamatan Ngantang
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	5,280,000.00	100%	4,500,000.00	100%	4,500,000.00	100%	4,500,000.00	100%	4,500,000.00	100%	23,280,000.00	Kecamatan Ngantang

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	4,400,000.00	100%	1,900,000.00	100%	1,900,000.00	100%	1,900,000.00	100%	1,900,000.00	100%	12,000,000.00	Kecamatan Ngantang
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	90,336,000.00	100%	90,336,000.00	100%	90,336,000.00	100%	90,336,000.00	100%	361,344,000.00	Kecamatan Ngantang
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	36,500,000.00									100%	36,500,000.00	Kecamatan Ngantang
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	9,610,000.00									100%	9,610,000.00	Kecamatan Ngantang
i	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pembinaan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	100%	46,540,000.00									100%	46,540,000.00	Kecamatan Ngantang
40652. KECAMATAN KASEMBON				499,303,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,559,303,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	288,401,000.00	100%	359,134,000.00	100%	359,134,000.00	100%	359,134,000.00	100%	359,134,000.00	100%	1,724,937,000.00	Kecamatan Kasembon
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	117,912,000.00	100%	53,695,000.00	100%	53,695,000.00	100%	53,695,000.00	100%	53,695,000.00	100%	332,692,000.00	Kecamatan Kasembon
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	32,550,000.00	100%	8,100,000.00	100%	8,100,000.00	100%	8,100,000.00	100%	8,100,000.00	100%	64,950,000.00	Kecamatan Kasembon
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	4,800,000.00	100%	4,800,000.00	100%	4,800,000.00	100%	4,800,000.00	100%	4,800,000.00	100%	24,000,000.00	Kecamatan Kasembon
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100%	750,000.00	100%	750,000.00	100%	750,000.00	100%	750,000.00	100%	3,000,000.00	Kecamatan Kasembon
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	88,521,000.00	100%	88,521,000.00	100%	88,521,000.00	100%	88,521,000.00	100%	354,084,000.00	Kecamatan Kasembon
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	47,120,000.00									100%	47,120,000.00	Kecamatan Kasembon

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	8,520,000.00									100%	8,520,000.00	Kecamatan Kasembon
40653. KECAMATAN LAWANG				997,203,000.00		1,015,000,000.00		1,015,000,000.00		1,015,000,000.00		1,015,000,000.00		5,057,203,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	710,918,905.00	100%	699,106,000.00	100%	699,106,000.00	100%	699,106,000.00	100%	699,106,000.00	100%	3,507,342,905.00	Kecamatan Lawang
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	234,354,095.00	100%	259,540,000.00	100%	259,540,000.00	100%	259,540,000.00	100%	259,540,000.00	100%	1,272,514,095.00	Kecamatan Lawang
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	7,830,000.00	100%	21,250,000.00	100%	21,250,000.00	100%	21,250,000.00	100%	21,250,000.00	100%	92,830,000.00	Kecamatan Lawang
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	5,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	17,000,000.00	Kecamatan Lawang
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	6,000,000.00	100%	2,350,000.00	100%	2,350,000.00	100%	2,350,000.00	100%	2,350,000.00	100%	15,400,000.00	Kecamatan Lawang
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	29,754,000.00	100%	29,754,000.00	100%	29,754,000.00	100%	29,754,000.00	100%	119,016,000.00	Kecamatan Lawang
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	21,100,000.00									100%	21,100,000.00	Kecamatan Lawang
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	12,000,000.00									100%	12,000,000.00	Kecamatan Lawang
40654. KECAMATAN SINGOSARI				1,250,000,000.00		1,265,000,000.00		1,265,000,000.00		1,265,000,000.00		1,265,000,000.00		6,310,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	777,337,600.00	100%	758,634,500.00	100%	758,634,500.00	100%	758,634,500.00	100%	758,634,500.00	100%	3,811,875,600.00	Kecamatan Singosari
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	369,596,400.00	100%	324,559,500.00	100%	324,559,500.00	100%	324,559,500.00	100%	324,559,500.00	100%	1,667,834,400.00	Kecamatan Singosari
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	44,171,000.00	100%	19,050,000.00	100%	19,050,000.00	100%	19,050,000.00	100%	19,050,000.00	100%	120,371,000.00	Kecamatan Singosari

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	6,000,000.00	100%	25,200,000.00	100%	25,200,000.00	100%	25,200,000.00	100%	25,200,000.00	100%	106,800,000.00	Kecamatan Singosari
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	8,420,000.00	100%	15,600,000.00	100%	15,600,000.00	100%	15,600,000.00	100%	15,600,000.00	100%	70,820,000.00	Kecamatan Singosari
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	121,956,000.00	100%	121,956,000.00	100%	121,956,000.00	100%	121,956,000.00	100%	487,824,000.00	Kecamatan Singosari
g	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	100%	14,395,000.00									100%	14,395,000.00	Kecamatan Singosari
h	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keaktifan Siskamling	100%	30,080,000.00									100%	30,080,000.00	Kecamatan Singosari
40655. KECAMATAN KARANGPLOSO				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	351,713,000.00	100%	298,422,000.00	100%	298,422,000.00	100%	298,422,000.00	100%	298,422,000.00	100%	1,545,401,000.00	Kecamatan Karangploso
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	55,000,000.00	100%	37,320,000.00	100%	37,320,000.00	100%	37,320,000.00	100%	37,320,000.00	100%	204,280,000.00	Kecamatan Karangploso
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	14,600,000.00	100%	28,280,000.00	100%	28,280,000.00	100%	28,280,000.00	100%	28,280,000.00	100%	127,720,000.00	Kecamatan Karangploso
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	11,144,000.00									100%	11,144,000.00	Kecamatan Karangploso
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	150,978,000.00	100%	150,978,000.00	100%	150,978,000.00	100%	150,978,000.00	100%	603,912,000.00	Kecamatan Karangploso
f	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Persentase kegiatan pembinaan dan pemasaran olahraga yang difasilitasi	100%	8,000,000.00									100%	8,000,000.00	Kecamatan Karangploso
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	41,400,000.00									100%	41,400,000.00	Kecamatan Karangploso

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	18,143,000.00									100%	18,143,000.00	Kecamatan Karangploso
40656. KECAMATAN DAU				498,551,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,558,551,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	306,858,700.00	100%	297,587,000.00	100%	313,029,500.00	100%	313,029,500.00	100%	297,587,000.00	100%	1,528,091,700.00	Kecamatan Dau
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	111,602,300.00	100%	84,440,500.00	100%	84,440,500.00	100%	84,440,500.00	100%	84,440,500.00	100%	449,364,300.00	Kecamatan Dau
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	37,192,500.00	100%	21,750,000.00	100%	21,750,000.00	100%	37,192,500.00	100%	117,885,000.00	Kecamatan Dau
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	18,075,000.00	100%	6,600,000.00	100%	6,600,000.00	100%	6,600,000.00	100%	6,600,000.00	100%	44,475,000.00	Kecamatan Dau
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	89,180,000.00	100%	89,180,000.00	100%	89,180,000.00	100%	89,180,000.00	100%	356,720,000.00	Kecamatan Dau
f	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	48,200,000.00									100%	48,200,000.00	Kecamatan Dau
g	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	13,815,000.00									100%	13,815,000.00	Kecamatan Dau
40657. KECAMATAN PAKIS				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	325,992,700.00	100%	259,270,500.00	100%	294,592,000.00	100%	294,592,000.00	100%	294,592,000.00	100%	1,469,039,200.00	Kecamatan Pakis
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	89,162,300.00	100%	108,100,000.00	100%	59,600,000.00	100%	59,600,000.00	100%	59,600,000.00	100%	376,062,300.00	Kecamatan Pakis
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	18,515,000.00	100%	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100%	38,515,000.00	Kecamatan Pakis
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	4,800,000.00	100%	4,700,000.00	100%	9,000,000.00	100%	9,000,000.00	100%	9,000,000.00	100%	36,500,000.00	Kecamatan Pakis

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	2,266,000.00	100%	3,210,000.00	100%	3,272,000.00	100%	3,272,000.00	100%	3,272,000.00	100%	15,292,000.00	Kecamatan Pakis
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)			100%	134,719,500.00	100%	143,536,000.00	100%	143,536,000.00	100%	143,536,000.00	100%	565,327,500.00	Kecamatan Pakis
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	39,770,000.00									100%	39,770,000.00	Kecamatan Pakis
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	19,494,000.00									100%	19,494,000.00	Kecamatan Pakis
40658. KECAMATAN JABUNG				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	334,453,000.00	100%	286,398,000.00	100%	284,498,000.00	100%	284,498,000.00	100%	284,498,000.00	100%	1,474,345,000.00	Kecamatan Jabung
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	66,170,000.00	100%	32,530,000.00	100%	77,030,000.00	100%	77,030,000.00	100%	77,030,000.00	100%	329,790,000.00	Kecamatan Jabung
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	10,925,000.00	100%	31,600,000.00	100%	10,925,000.00	100%	10,925,000.00	100%	10,925,000.00	100%	75,300,000.00	Kecamatan Jabung
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	9,000,000.00	100%	6,000,000.00	100%	6,000,000.00	100%	6,000,000.00	100%	6,000,000.00	100%	33,000,000.00	Kecamatan Jabung
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	1,660,000.00	100%	2,763,000.00	100%	10,470,000.00	100%	10,470,000.00	100%	10,470,000.00	100%	35,833,000.00	Kecamatan Jabung
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi			100%	155,709,000.00	100%	126,077,000.00	100%	126,077,000.00	100%	126,077,000.00	100%	533,940,000.00	Kecamatan Jabung
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	42,700,000.00									100%	42,700,000.00	Kecamatan Jabung
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	19,792,000.00									100%	19,792,000.00	Kecamatan Jabung

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
i	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pembinaan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	100%	15,300,000.00									100%	15,300,000.00	Kecamatan Jabung
40659. KECAMATAN TUMPANG				468,084,400.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,528,084,400.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	340,903,500.00	100%	315,865,000.00	100%	352,444,000.00	100%	352,444,000.00	100%	352,444,000.00	100%	1,714,100,500.00	Kecamatan Tumpang
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	50,797,900.00	100%	28,639,000.00	100%	46,839,000.00	100%	46,839,000.00	100%	46,839,000.00	100%	219,953,900.00	Kecamatan Tumpang
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	6,375,000.00	100%		100%		100%		100%		100%	6,375,000.00	Kecamatan Tumpang
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	2,500,000.00	100%		100%		100%		100%		100%	2,500,000.00	Kecamatan Tumpang
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3,126,000.00	100%	2,675,000.00	100%	2,675,000.00	100%	2,675,000.00	100%	2,675,000.00	100%	13,826,000.00	Kecamatan Tumpang
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	167,821,000.00	100%	113,042,000.00	100%	113,042,000.00	100%	113,042,000.00	100%	506,947,000.00	Kecamatan Tumpang
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keaktifan Siskamling	100%	39,713,000.00									100%	39,713,000.00	Kecamatan Tumpang
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	24,669,000.00									100%	24,669,000.00	Kecamatan Tumpang
40660. KECAMATAN PONCOKUSUMO				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	343,762,500.00	100%	306,681,500.00	100%	335,271,500.00	100%	335,271,500.00	100%	335,271,500.00	100%	1,656,258,500.00	Kecamatan Poncokusumo
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	91,300,000.00	100%	83,211,000.00	100%	60,211,000.00	100%	60,211,000.00	100%	60,211,000.00	100%	355,144,000.00	Kecamatan Poncokusumo
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	12,112,500.00	100%	12,112,500.00	100%	12,112,500.00	100%	12,112,500.00	100%	12,112,500.00	100%	60,562,500.00	Kecamatan Poncokusumo
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	4,500,000.00											Kecamatan Poncokusumo

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)			100%	112,995,000.00	100%	107,405,000.00	100%	107,405,000.00	100%	107,405,000.00	100%	435,210,000.00	Kecamatan Poncokusumo
f	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Siskamling aktif	100%	25,260,000.00									100%	25,260,000.00	Kecamatan Poncokusumo
g	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan desa	100%	16,500,000.00									100%	16,500,000.00	Kecamatan Poncokusumo
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Jumlah Usulan yang di Akumodir oleh Bappeda Kabupaten Malang	100%	6,175,000.00									100%	6,175,000.00	Kecamatan Poncokusumo
i	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Pegawai Honororer	100%	390,000.00									100%	390,000.00	Kecamatan Poncokusumo
40661. KECAMATAN BULULAWANG				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	289,471,000.00	100%	253,643,000.00	100%	270,857,000.00	100%	270,857,000.00	100%	270,857,000.00	100%	1,355,685,000.00	Kecamatan Bululawang
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	129,997,000.00	100%	148,027,000.00	100%	132,823,000.00	100%	132,823,000.00	100%	132,823,000.00	100%	676,493,000.00	Kecamatan Bululawang
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	2,000,000.00		7,650,000.00		7,650,000.00		7,650,000.00			Kecamatan Bululawang
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	18,720,000.00	100%	18,720,000.00									Kecamatan Bululawang
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	16,410,000.00	100%	12,360,000.00	100%	14,560,000.00	100%	14,560,000.00	100%	14,560,000.00	100%	72,450,000.00	Kecamatan Bululawang
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)			100%	80,250,000.00	100%	89,110,000.00	100%	89,110,000.00	100%	89,110,000.00	100%	347,580,000.00	Kecamatan Bululawang
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keaktifan Siskamling	100%	32,460,000.00									100%	32,460,000.00	Kecamatan Bululawang
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan Musrenbang	100%	12,942,000.00									100%	12,942,000.00	Kecamatan Bululawang

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40662. KECAMATAN GONDANGLEGI				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	335,382,000.00	100%	325,985,000.00	100%	325,985,000.00	100%	325,985,000.00	100%	325,985,000.00	100%	1,639,322,000.00	Kecamatan Gondanglegi
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	111,599,000.00	100%	86,957,000.00	100%	86,957,000.00	100%	86,957,000.00	100%	86,957,000.00	100%	459,427,000.00	Kecamatan Gondanglegi
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	14,500,000.00	100%	16,200,000.00	100%	16,200,000.00	100%	16,200,000.00	100%	16,200,000.00	100%	79,300,000.00	Kecamatan Gondanglegi
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1,800,000.00	100%	1,800,000.00	100%	1,800,000.00	100%	1,800,000.00	100%	1,800,000.00	100%	9,000,000.00	Kecamatan Gondanglegi
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	84,058,000.00	100%	84,058,000.00	100%	84,058,000.00	100%	84,058,000.00	100%	336,232,000.00	Kecamatan Gondanglegi
f	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	7,919,000.00									100%	7,919,000.00	Kecamatan Gondanglegi
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	80%	28,800,000.00									80%	28,800,000.00	Kecamatan Gondanglegi
40663. KECAMATAN PAGELARAN				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	276,405,000.00	100%	307,658,000.00	100%	307,658,000.00	100%	307,658,000.00	100%	307,658,000.00	100%	1,507,037,000.00	Kecamatan Pagelaran
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	132,685,000.00	100%	82,700,000.00	100%	82,700,000.00	100%	82,700,000.00	100%	82,700,000.00	100%	463,485,000.00	Kecamatan Pagelaran
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	18,625,000.00	100%	18,625,000.00	100%	5,625,000.00	100%	5,625,000.00	100%	48,500,000.00	Kecamatan Pagelaran
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	32,360,000.00	100%	25,945,000.00	100%	25,945,000.00	100%	25,945,000.00	100%	25,945,000.00	100%	136,140,000.00	Kecamatan Pagelaran
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	7,790,000.00	100%	7,672,000.00	100%	7,672,000.00	100%	7,672,000.00	100%	7,672,000.00	100%	38,478,000.00	Kecamatan Pagelaran

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan (%)			100%	72,400,000.00	100%	72,400,000.00	100%	85,400,000.00	100%	85,400,000.00	100%	315,600,000.00	Kecamatan Pagelaran
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	18,635,000.00									100%	18,635,000.00	Kecamatan Pagelaran
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	12,715,000.00									100%	12,715,000.00	Kecamatan Pagelaran
i	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pembinaan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	100%	11,760,000.00									100%	11,760,000.00	Kecamatan Pagelaran
j	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase pembinaan kapasitas aparatur desa yang terfasilitasi	100%	7,650,000.00									100%	7,650,000.00	Kecamatan Pagelaran
40664. KECAMATAN TAJINAN				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	307,354,000.00	100%	315,896,500.00	100%	315,896,500.00	100%	315,896,500.00	100%	315,896,500.00	100%	1,570,940,000.00	Kecamatan Tajinan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	55,606,000.00	100%	61,306,000.00	100%	61,306,000.00	100%	61,306,000.00	100%	61,306,000.00	100%	300,830,000.00	Kecamatan Tajinan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	9,500,000.00	100%	8,455,000.00	100%	8,455,000.00	100%	8,455,000.00	100%	8,455,000.00	100%	43,320,000.00	Kecamatan Tajinan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	31,805,000.00	100%	31,805,000.00	100%	31,805,000.00	100%	31,805,000.00	100%	31,805,000.00	100%	159,025,000.00	Kecamatan Tajinan
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	14,554,000.00	100%	14,554,000.00	100%	14,554,000.00	100%	14,554,000.00	100%	14,554,000.00	100%	72,770,000.00	Kecamatan Tajinan
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)			100%	82,983,500.00	100%	82,983,500.00	100%	82,983,500.00	100%	82,983,500.00	100%	331,934,000.00	Kecamatan Tajinan
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	47,776,000.00									100%	47,776,000.00	Kecamatan Tajinan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	16,905,000.00									100%	16,905,000.00	Kecamatan Tajinan
i	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pembinaan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	100%	16,500,000.00									100%	16,500,000.00	Kecamatan Tajinan
40665. KECAMATAN BANTUR				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	261,816,000.00	100%	276,035,000.00	100%	276,035,000.00	100%	276,035,000.00	100%	276,035,000.00	100%	1,365,956,000.00	Kecamatan Bantur
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	132,484,000.00	100%	118,260,000.00	100%	118,260,000.00	100%	118,260,000.00	100%	118,260,000.00	100%	605,524,000.00	Kecamatan Bantur
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	18,620,000.00	100%	16,890,000.00	100%	16,890,000.00	100%	16,890,000.00	100%	16,890,000.00	100%	86,180,000.00	Kecamatan Bantur
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	23,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	52,000,000.00	Kecamatan Bantur
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	13,195,000.00	100%	8,490,000.00	100%	8,490,000.00	100%	8,490,000.00	100%	8,490,000.00	100%	47,155,000.00	Kecamatan Bantur
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan			100%	88,125,000.00	100%	88,125,000.00	100%	88,125,000.00	100%	88,125,000.00	100%	352,500,000.00	Kecamatan Bantur
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	36,000,000.00									100%	36,000,000.00	Kecamatan Bantur
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	14,685,000.00									100%	14,685,000.00	Kecamatan Bantur
40666. KECAMATAN GEDANGAN				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	303,416,600.00	100%	302,886,000.00	100%	302,886,000.00	100%	302,886,000.00	100%	302,886,000.00	100%	1,514,960,600.00	Kecamatan Gedangan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	85,906,400.00	100%	117,216,000.00	100%	117,216,000.00	100%	117,216,000.00	100%	117,216,000.00	100%	554,770,400.00	Kecamatan Gedangan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	15,120,000.00	100%	15,120,000.00	100%	15,120,000.00	100%	15,120,000.00	100%	15,120,000.00	100%	75,600,000.00	Kecamatan Gedangan
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	16,359,000.00	100%	11,520,000.00	100%	11,520,000.00	100%	11,520,000.00	100%	11,520,000.00	100%	62,439,000.00	Kecamatan Gedangan
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%		100%	68,258,000.00	100%	68,258,000.00	100%	68,258,000.00	100%	68,258,000.00	100%	273,032,000.00	Kecamatan Gedangan
f	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase meningkatnya pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes	100%	15,840,000.00									100%	15,840,000.00	Kecamatan Gedangan
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	36,400,000.00									100%	36,400,000.00	Kecamatan Gedangan
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	26,958,000.00									100%	26,958,000.00	Kecamatan Gedangan
40667. KECAMATAN WAJAK				499,994,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,559,994,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			320,758,000.00		290,459,000.00		290,459,000.00		290,459,000.00		290,459,000.00		1,482,594,000.00	Kecamatan Wajak
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	120,964,000.00	100%	73,588,500.00	100%	73,588,500.00	100%	73,588,500.00	100%	73,588,500.00	100%	415,318,000.00	Kecamatan Wajak
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	5,625,000.00	100%	11,250,000.00	100%	11,250,000.00	100%	11,250,000.00	100%	11,250,000.00	100%	50,625,000.00	Kecamatan Wajak
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	6,400,000.00	100%	9,000,000.00	100%	9,000,000.00	100%	9,000,000.00	100%	9,000,000.00	100%	42,400,000.00	Kecamatan Wajak
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	4,980,000.00	100%	10,470,000.00	100%	10,470,000.00	100%	10,470,000.00	100%	10,470,000.00	100%	46,860,000.00	Kecamatan Wajak
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	120,232,500.00	100%	120,232,500.00	100%	120,232,500.00	100%	120,232,500.00	100%	480,930,000.00	Kecamatan Wajak

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
g	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	82%	7,607,000.00									82%	7,607,000.00	Kecamatan Wajak
i	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	33,660,000.00									100%	33,660,000.00	Kecamatan Wajak
40668. KECAMATAN TUREN				999,996,000.00		1,015,000,000.00		1,015,000,000.00		1,015,000,000.00		1,015,000,000.00		5,059,996,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	669,988,000.00	100%	647,712,000.00	100%	647,712,000.00	100%	647,712,000.00	100%	647,712,000.00	100%	3,260,836,000.00	Kecamatan Turen
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	152,476,000.00	100%	199,688,000.00	100%	199,688,000.00	100%	199,688,000.00	100%	199,688,000.00	100%	951,228,000.00	Kecamatan Turen
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	27,000,000.00	100%	33,000,000.00	100%	33,000,000.00	100%	33,000,000.00	100%	33,000,000.00	100%	159,000,000.00	Kecamatan Turen
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	48,000,000.00	100%	48,000,000.00	100%	48,000,000.00	100%	48,000,000.00	100%	48,000,000.00	100%	240,000,000.00	Kecamatan Turen
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang Terfasilitasi (%)			100%	86,600,000.00	100%	86,600,000.00	100%	86,600,000.00	100%	86,600,000.00	100%	346,400,000.00	Kecamatan Turen
f	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	85,462,000.00									100%	85,462,000.00	Kecamatan Turen
g	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	17,070,000.00									100%	17,070,000.00	Kecamatan Turen
40669. KECAMATAN DAMPIT				750,000,000.00		765,000,000.00		765,000,000.00		765,000,000.00		765,000,000.00		3,810,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	474,052,000.00	100%	496,566,000.00	100%	496,566,000.00	100%	496,566,000.00	100%	496,566,000.00	100%	2,460,316,000.00	Kecamatan Dampit
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	167,628,000.00	100%	121,294,000.00	100%	121,294,000.00	100%	121,294,000.00	100%	121,294,000.00	100%	652,804,000.00	Kecamatan Dampit
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%		100%	23,275,000.00	100%	23,275,000.00	100%	23,275,000.00	100%	23,275,000.00	100%	93,100,000.00	Kecamatan Dampit
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	15,250,000.00	100%	15,250,000.00	100%	15,250,000.00	100%	15,250,000.00	100%	15,250,000.00	100%	76,250,000.00	Kecamatan Dampit

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
c	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	19,380,000.00	100%	21,460,000.00	100%	21,460,000.00	100%	21,460,000.00	100%	21,460,000.00	100%	105,220,000.00	Kecamatan Dampit
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%		100%	87,155,000.00	100%	87,155,000.00	100%	87,155,000.00	100%	87,155,000.00	100%	348,620,000.00	Kecamatan Dampit
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	52,200,000.00									100%	52,200,000.00	Kecamatan Dampit
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	21,490,000.00									100%	21,490,000.00	Kecamatan Dampit
40670. KECAMATAN AMPELGADING				499,992,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,559,992,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	297,923,000.00	100%	224,249,500.00	100%	224,249,500.00	100%	224,249,500.00	100%	224,249,500.00	100%	1,194,921,000.00	Kecamatan Ampelgading
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	112,161,000.00	100%	116,437,000.00	100%	116,437,000.00	100%	116,437,000.00	100%	116,437,000.00	100%	577,909,000.00	Kecamatan Ampelgading
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%		100%	8,500,000.00	100%	8,500,000.00	100%	8,500,000.00	100%	8,500,000.00	100%	34,000,000.00	Kecamatan Ampelgading
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	8,241,000.00	100%	7,972,000.00	100%	7,972,000.00	100%	7,972,000.00	100%	7,972,000.00	100%	40,129,000.00	Kecamatan Ampelgading
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%		100%	157,841,500.00	100%	157,841,500.00	100%	157,841,500.00	100%	157,841,500.00	100%	631,366,000.00	Kecamatan Ampelgading
f	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	59,107,000.00									100%	59,107,000.00	Kecamatan Ampelgading
g	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	22,560,000.00									100%	22,560,000.00	Kecamatan Ampelgading

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40671. KECAMATAN TIRTOYUDO				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	338,430,000.00	100%	328,497,500.00	100%	364,510,000.00	100%	364,510,000.00	100%	364,510,000.00	100%	1,760,457,500.00	Kecamatan Tirtoyudo
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	77,323,000.00	100%	60,053,500.00	100%	58,541,000.00	100%	58,541,000.00	100%	58,541,000.00	100%	312,999,500.00	Kecamatan Tirtoyudo
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%		100%	5,520,000.00	100%	5,520,000.00	100%	5,520,000.00	100%	5,520,000.00	100%	22,080,000.00	Kecamatan Tirtoyudo
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	2,880,000.00											Kecamatan Tirtoyudo
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	5,364,000.00	100%	5,364,000.00	100%	5,364,000.00	100%	5,364,000.00	100%	5,364,000.00	100%	26,820,000.00	Kecamatan Tirtoyudo
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi			100%	115,565,000.00	100%	81,065,000.00	100%	81,065,000.00	100%	81,065,000.00	100%	358,760,000.00	Kecamatan Tirtoyudo
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	52,403,000.00									100%	52,403,000.00	Kecamatan Tirtoyudo
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	23,600,000.00									100%	23,600,000.00	Kecamatan Tirtoyudo
40672. KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	348,440,000.00	100%	335,600,000.00	100%	335,600,000.00	100%	335,600,000.00	100%	335,600,000.00	100%	1,690,840,000.00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	86,290,000.00	100%	83,800,000.00	100%	78,800,000.00	100%	78,800,000.00	100%	78,800,000.00	100%	406,490,000.00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	8,650,000.00	100%	6,300,000.00	100%	11,300,000.00	100%	11,300,000.00	100%	11,300,000.00	100%	48,850,000.00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	3,000,000.00	100%	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100%	23,000,000.00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi			100%	84,300,000.00	100%	84,300,000.00	100%	84,300,000.00	100%	84,300,000.00	100%	337,200,000.00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
f	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase kegiatan keamanan lingkungan di poskamling	92%	45,100,000.00									92%	45,100,000.00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
g	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	70%	8,520,000.00									70%	8,520,000.00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
40673. KECAMATAN KEPANJEN				1,499,160,000.00		1,515,000,000.00		1,515,000,000.00		1,515,000,000.00		1,515,000,000.00		7,559,160,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	923,452,250.00	100%	953,266,000.00	100%	953,266,000.00	100%	953,266,000.00	100%	953,266,000.00	100%	4,736,516,250.00	Kecamatan Kepanjen
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	193,755,000.00	100%	386,310,000.00	100%	386,310,000.00	100%	386,310,000.00	100%	386,310,000.00	100%	1,738,995,000.00	Kecamatan Kepanjen
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	69,456,250.00	100%	64,845,000.00	100%	64,845,000.00	100%	64,845,000.00	100%	64,845,000.00	100%	328,836,250.00	Kecamatan Kepanjen
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	8,175,000.00	100%	1,599,000.00	100%	1,599,000.00	100%	1,599,000.00	100%	1,599,000.00	100%	14,571,000.00	Kecamatan Kepanjen
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	108,980,000.00	100%	108,980,000.00	100%	108,980,000.00	100%	108,980,000.00	100%	435,920,000.00	Kecamatan Kepanjen
f	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Cakupan Kegiatan Koordinasi dan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (%)	100%	10,970,000.00									100%	10,970,000.00	Kecamatan Kepanjen
g	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Persentase Cakupan Pemenuhan Kegiatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan (%)	100%	7,600,000.00									100%	7,600,000.00	Kecamatan Kepanjen

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
j	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (%)	100%	5,367,500.00									100%	5,367,500.00	Kecamatan Kepanjen
k	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita (%)	100%	52,488,000.00									100%	52,488,000.00	Kecamatan Kepanjen
l	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pelayanan Publik (%)	100%	45,090,000.00									100%	45,090,000.00	Kecamatan Kepanjen
m	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	156,709,000.00									100%	156,709,000.00	Kecamatan Kepanjen
n	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	26,097,000.00									100%	26,097,000.00	Kecamatan Kepanjen
40674. KECAMATAN PAKISAJI				499,999,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,559,999,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	331,009,000.00	100%	356,111,000.00	100%	356,111,000.00	100%	356,111,000.00	100%	356,111,000.00	100%	1,755,453,000.00	Kecamatan Pakisaji
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	130,215,000.00	100%	99,315,000.00	100%	99,315,000.00	100%	99,315,000.00	100%	99,315,000.00	100%	527,475,000.00	Kecamatan Pakisaji
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	5,500,000.00	100%	5,129,000.00	100%	5,129,000.00	100%	5,129,000.00	100%	5,129,000.00	100%	26,016,000.00	Kecamatan Pakisaji
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	7,200,000.00	100%	7,000,000.00	100%	7,000,000.00	100%	7,000,000.00	100%	7,000,000.00	100%	35,200,000.00	Kecamatan Pakisaji
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	47,445,000.00	100%	47,445,000.00	100%	47,445,000.00	100%	47,445,000.00	100%	189,780,000.00	Kecamatan Pakisaji
f	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	21,075,000.00									100%	21,075,000.00	Kecamatan Pakisaji
g	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	5,000,000.00									100%	5,000,000.00	Kecamatan Pakisaji

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40675. KECAMATAN NGAJUM				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	304,019,200.00	100%	357,793,000.00	100%	357,793,000.00	100%	357,793,000.00	100%	357,793,000.00	100%	1,735,191,200.00	Kecamatan Ngajum
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	97,713,000.00	100%	72,061,000.00	100%	72,061,000.00	100%	72,061,000.00	100%	72,061,000.00	100%	385,957,000.00	Kecamatan Ngajum
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	4,250,000.00	100%	4,250,000.00	100%	4,250,000.00	100%	4,250,000.00	100%	17,000,000.00	Kecamatan Ngajum
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	5,310,000.00	100%	8,430,000.00	100%	8,430,000.00	100%	8,430,000.00	100%	8,430,000.00	100%	39,030,000.00	Kecamatan Ngajum
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	16,907,800.00	100%	4,050,000.00	100%	4,050,000.00	100%	4,050,000.00	100%	4,050,000.00	100%	33,107,800.00	Kecamatan Ngajum
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi			100%	68,416,000.00	100%	68,416,000.00	100%	68,416,000.00	100%	68,416,000.00	100%	273,664,000.00	Kecamatan Ngajum
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	61,000,000.00									100%	61,000,000.00	Kecamatan Ngajum
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	15,050,000.00									100%	15,050,000.00	Kecamatan Ngajum
40676. KECAMATAN WAGIR				499,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,559,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	292,641,500.00	100%	338,382,000.00	100%	338,382,000.00	100%	338,382,000.00	100%	338,382,000.00	100%	1,646,169,500.00	Kecamatan Wagir
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	121,406,000.00	100%	88,290,000.00	100%	88,290,000.00	100%	88,290,000.00	100%	88,290,000.00	100%	474,566,000.00	Kecamatan Wagir
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	28,875,000.00	100%	28,875,000.00	100%	28,875,000.00	100%	28,875,000.00	100%	115,500,000.00	Kecamatan Wagir
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	9,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	21,000,000.00	Kecamatan Wagir

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	11,952,500.00	100%	1,500,000.00	100%	1,500,000.00	100%	1,500,000.00	100%	1,500,000.00	100%	17,952,500.00	Kecamatan Wagir
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	54,953,000.00	100%	54,953,000.00	100%	54,953,000.00	100%	54,953,000.00	100%	219,812,000.00	Kecamatan Wagir
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	55,000,000.00									100%	55,000,000.00	Kecamatan Wagir
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	9,000,000.00									100%	9,000,000.00	Kecamatan Wagir
40677. KECAMATAN SUMBERPUCUNG				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	287,226,100.00	100%	335,687,500.00	100%	335,687,500.00	100%	335,687,500.00	100%	335,687,500.00	100%	1,629,976,100.00	Kecamatan Sumberpucung
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	101,933,000.00	100%	60,531,000.00	100%	60,531,000.00	100%	60,531,000.00	100%	60,531,000.00	100%	344,057,000.00	Kecamatan Sumberpucung
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%		100%	12,510,000.00	100%	12,510,000.00	100%	12,510,000.00	100%	12,510,000.00	100%	50,040,000.00	Kecamatan Sumberpucung
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	13,789,500.00	100%		100%		100%		100%			13,789,500.00	Kecamatan Sumberpucung
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	26,060,000.00	100%	5,796,000.00	100%	5,796,000.00	100%	5,796,000.00	100%	5,796,000.00	100%	49,244,000.00	Kecamatan Sumberpucung
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan			100%	100,475,500.00	100%	100,475,500.00	100%	100,475,500.00	100%	100,475,500.00	100%	401,902,000.00	Kecamatan Sumberpucung
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	46,286,400.00									100%	46,286,400.00	Kecamatan Sumberpucung
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	24,705,000.00									100%	24,705,000.00	Kecamatan Sumberpucung

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40678. KECAMATAN KROMENGAN				499,998,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,559,998,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	264,704,000.00	100%	308,268,000.00	100%	308,268,000.00	100%	308,268,000.00	100%	308,268,000.00	100%	1,497,776,000.00	Kecamatan Kromengan
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	133,611,400.00	100%	117,812,000.00	100%	117,812,000.00	100%	117,812,000.00	100%	117,812,000.00	100%	604,859,400.00	Kecamatan Kromengan
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	9,000,000.00	100%	9,000,000.00	100%	9,000,000.00	100%	9,000,000.00	100%	9,000,000.00	100%	45,000,000.00	Kecamatan Kromengan
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	17,400,000.00	100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	65,400,000.00	Kecamatan Kromengan
e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	18,797,600.00	100%	11,000,000.00	100%	11,000,000.00	100%	11,000,000.00	100%	11,000,000.00	100%	62,797,600.00	Kecamatan Kromengan
f	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)			100%	56,920,000.00	100%	56,920,000.00	100%	56,920,000.00	100%	56,920,000.00	100%	227,680,000.00	Kecamatan Kromengan
g	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah usulan yang diterima Musrenbangkab dibandingkan dengan jumlah usulan Musrenbang	100%	20,485,000.00									100%	20,485,000.00	Kecamatan Kromengan
h	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	36,000,000.00									100%	36,000,000.00	Kecamatan Kromengan
40679. KECAMATAN WONOSARI				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	293,431,000.00	100%	308,391,800.00	100%	326,391,800.00	100%	326,391,800.00	100%	326,391,800.00	100%	1,580,998,200.00	Kecamatan Wonosari
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	123,083,000.00	100%	27,747,000.00	100%	27,747,000.00	100%	27,747,000.00	100%	27,747,000.00	100%	234,071,000.00	Kecamatan Wonosari
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	11,725,000.00	100%	18,825,000.00	100%	12,825,000.00	100%	12,825,000.00	100%	12,825,000.00	100%	69,025,000.00	Kecamatan Wonosari
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	5,120,000.00											Kecamatan Wonosari

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	160,036,200.00	100%	148,036,200.00	100%	148,036,200.00	100%	148,036,200.00	100%	604,144,800.00	Kecamatan Wonosari
f	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	28,001,000.00									100%	28,001,000.00	Kecamatan Wonosari
h	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Presentase keaktifan Siskamling	100%	38,640,000.00									100%	38,640,000.00	Kecamatan Wonosari
40680. KECAMATAN PAGAK				499,992,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,559,992,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	80%	287,289,000.00	100%	286,297,000.00	100%	286,297,000.00	100%	286,297,000.00	100%	286,297,000.00	100%	1,432,477,000.00	Kecamatan Pagak
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	80%	159,703,000.00	100%	159,703,000.00	100%	159,703,000.00	100%	159,703,000.00	100%	159,703,000.00	100%	798,515,000.00	Kecamatan Pagak
c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	80%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	50,000,000.00	Kecamatan Pagak
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	12,000,000.00	Kecamatan Pagak
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan			100%	56,000,000.00	100%	56,000,000.00	100%	56,000,000.00	100%	56,000,000.00	100%	224,000,000.00	Kecamatan Pagak
f	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	36,000,000.00									100%	36,000,000.00	Kecamatan Pagak
g	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	7,000,000.00									100%	7,000,000.00	Kecamatan Pagak
40681. KECAMATAN KALIPARE				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	308,361,000.00	100%	284,865,200.00	100%	284,865,200.00	100%	284,865,200.00	100%	284,865,200.00	100%	1,447,821,800.00	Kecamatan Kalipare
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	122,064,000.00	100%	134,114,800.00	100%	134,114,800.00	100%	134,114,800.00	100%	134,114,800.00	100%	658,523,200.00	Kecamatan Kalipare

No	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program	Indikator Kinerja program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	7,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	36,000,000.00	Kecamatan Kalipare
d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	15,440,000.00	100%	15,440,000.00	100%	15,440,000.00	100%	15,440,000.00	100%	15,440,000.00	100%	77,200,000.00	Kecamatan Kalipare
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi (%)			100%	73,380,000.00	100%	73,380,000.00	100%	73,380,000.00	100%	73,380,000.00	100%	293,520,000.00	Kecamatan Kalipare
f	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	11,375,000.00									100%	11,375,000.00	Kecamatan Kalipare
g	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	35,560,000.00									100%	35,560,000.00	Kecamatan Kalipare
40682. KECAMATAN DONOMULYO				500,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		515,000,000.00		2,560,000,000.00	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	354,911,000.00	100%	289,688,000.00	100%	289,688,000.00	100%	289,688,000.00	100%	289,688,000.00	100%	1,513,663,000.00	Kecamatan Donomulyo
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	68,189,000.00	100%	72,562,000.00	100%	72,562,000.00	100%	72,562,000.00	100%	72,562,000.00	100%	358,437,000.00	Kecamatan Donomulyo
c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	14,760,000.00	100%	19,100,000.00	100%	19,100,000.00	100%	19,100,000.00	100%	19,100,000.00	100%	91,160,000.00	Kecamatan Donomulyo
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	7,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	7,200,000.00	100%	36,000,000.00	Kecamatan Donomulyo
e	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan			100%	126,450,000.00	100%	126,450,000.00	100%	126,450,000.00	100%	126,450,000.00	100%	505,800,000.00	Kecamatan Donomulyo
f	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	100%	28,600,000.00									100%	28,600,000.00	Kecamatan Donomulyo
g	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase pembinaan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	100%	8,040,000.00									100%	8,040,000.00	Kecamatan Donomulyo
h	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	18,300,000.00									100%	18,300,000.00	Kecamatan Donomulyo

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Hal ini akan ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap indikator kinerja yang ditetapkan. Sebagai bahan yang berpengaruh dalam capaian kinerja, pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Malang tahun kedepan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Ketika permasalahan kemiskinan tidak dapat diselesaikan maka hal ini akan mengakibatkan permasalahan lain yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi menjadi rencana. Sumber dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini harus dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM manusia mulai dari diri hingga dewasa, serta fokus untuk Indeks Pembangunan Manusia bukan hanya di wilayah yang ramai saja melainkan juga di pedesaan yang kurang akses sekolah. Di samping itu, seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang diupayakan untuk mampu menjaga keselarasan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Baseline			Target			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Reformasi Birokrasi	63,06	67,70	68,20	68,70	69,20	69,70	70,20
3	Indeks Pembangunan Manusia	66,63	67,51	68,47	68,75 - 69,00	69,00 - 69,50	69,50 - 70,00	70,00 - 70,50
4	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,27%	5,30%	5,43%	5,40% - 5,61%	5,50% - 5,71%	5,60% - 5,81%	5,70% - 5,91%
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	3.654.482 Orang	5.849.544 Orang	6.504.360 Orang	7.203.579 Orang	8.013.981 Orang	8.955.624 Orang	10.052.688 Orang
6	Persentase Angka Kemiskinan	11,53%	11,49%	11,04%	10,94% - 10,54%	10,44% - 10,04%	9,94% - 9,54%	9,44% - 9,04%
7	Persentase Desa Mandiri	0	2,12%	5,29%	6,35%	7,41%	8,47%	9,52%
8	Indeks Gini	0,38	0,32	0,35	0,321 - 0,317	0,316 - 0,310	0,309 - 0,305	0,304 - 0,300
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	51,07	64,03	68,61	68,83	69,07	69,31	69,31

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator kinerja daerah dalam penyusunannya berdasarkan indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan atau dampaknya setiap tahun sehingga untuk kondisi kinerja yang diinginkan pada dapat dicapai pada akhir periode.

Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian

indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain produktivitas total daerah, Nilai Tukar Petani, dan lama pelayanan perijinan.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Malang tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 9.2 sebagai berikut:

Tabel 9.2
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Persentase konflik sosial yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Event Wisata Budaya Lokal Yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Indeks Pemberdayaan Gender	88,38	88,38	88,4	88,42	88,44	
4	Angka Usia Harapan Hidup	72,12	72,15	72,30	72,45	72,60	
5	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	86,83%	87,08%	87,53%	87,58%	87,83%	
6	Jumlah Desa Maju	125	127	129	131	133	
7	Presentase desa tangguh bencana	62,50%	71,90%	81,30%	90,60%	100%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			
		2017	2018	2019	2020	2021
8	Persentase Angka TPT	4,60%	4,60%	4,10%	3,60%	3,10%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Rata-rata Persentase prestasi pemuda dan olahraga	41%	42%	43%	44%	45%
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,11	79,20	79,50	80,00	80,50
3	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	N/A	45%	56%	70%	87%
4	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	34%	34%	34%
5	Persentase fasilitasi rancangan peraturan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indeks Pendidikan	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			
		2017	2018	2019	2020	2021
7	Persentase pertumbuhan penduduk	0,83%	0,76%	0,71%	0,67%	0,64%
8	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	50,30	50,60	50,90	51,20
9	Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,15	76,20	76,30	76,40	76,50
10	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	76,91	77,20	77,50	77,80	78,00
11	Nilai Sakip	BB	BB	BB	A	A
12	Nilai Evaluasi LPPD	ST	ST	ST	ST	ST
13	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	95%	98%	100%	100%	100%
14	Indeks profesionalisme ASN	N/A	N/A	94,56	94,22	94,49
15	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	17,76%	16,74%	15,71%	14,67%	13,62%
16	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	
	penanganan kasus pelanggaran perda						
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Persentase PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	3,63%	3,63%	3,64%	3,65%	3,66%	
2	Persentase PDRB Sub Sektor Hortikultura	4,43%	4,43%	4,44%	4,45%	4,46%	
3	Persentase PDRB Sub Sektor Perkebunan	1,78%	1,78%	1,79%	1,80%	1,81%	
4	PDRB sektor perikanan	1,90%	1,92%	1,94%	1,96%	1,98%	
5	Persentase PDRB Sektor Peternakan (Atas Dasar Harga Konstan)	4,50%	4,51%	4,52%	4,53%	4,54%	
6	Persentase surplus ketersediaan pangan	N/A	76,49%	77,79%	79,09	80,39%	
7	Persentase Koperasi Stabilisasi	44,80%	50%	50%	50%	50%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			
		2017	2018	2019	2020	2021
8	Persentase pertumbuhan UMKM	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
9	Jumlah nilai investasi	28.018.355.000.253	28.858.905.650.261	29.724.672.819.768	30.616.413.004.362	31.534.905.394.492
10	Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata thd PAD	2,76%	3%	3,24%	3,50%	3,75%
11	Persentase Industri Kreatif	N/A	10%	12,50%	15,00%	17,50%
12	Persentase PAD terhadap APBD	19,68 %	19,96%	20,06%	20,16%	20,26%
13	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	66,45%	67,00%	67,60%	68,30%	69,10%
15	Persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta Penataan ruang dan Bangunan	70,72%	72,75%	74,91%	76,05%	76,05%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			
		2017	2018	2019	2020	2021
16	Persentase luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi	78,22%	78,75%	79,25%	79,75%	80,00%
17	Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	72,50%	75,00%	77,50%	80,00%	82,50%

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, sinkronisasi terkait akuntabilitas kinerja daerah, serta karena penyesuaian Perangkat Daerah. Dokumen Perubahan RPJMD ini adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Bupati yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyelarasan kebijakan dan program nasional dan provinsi.

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara Pemerintahan Daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana melaksanakan RPJMD, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan Pemerintah Pusat dalam koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

10.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan wujud regulasi dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021, sehingga kegiatan Pemilihan Kepala Daerah tidak boleh memutuskan proses pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan semula. Oleh karena itu dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Malang tetap menyusun RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. Oleh karena itu dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dimaksud, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2019-2021

Penyusunan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ini;

2. RKPD Tahun 2022

Penyusunan RKPD Tahun 2022 jika dalam penyusunannya belum ditetapkan RPJMD periode berikutnya, maka penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 dan mengacu pada penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah periode berikutnya. Selanjutnya RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2022.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Bupati Malang berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 kepada masyarakat;

2. Penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, instansi vertikal Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
4. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD ini;
5. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penjabaran Perubahan RPJMD ini ke dalam Perubahan Renstra PD;
7. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
8. Setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang agar segera menyusun Perubahan Renstra PD yang berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini;
9. Penyusunan Perubahan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program yang telah di susun, maka pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini menjadi tanggung jawab bersama di antara Pemerintah, *stakeholders*, dunia usaha, akademisi dan masyarakat Kabupaten Malang.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI